

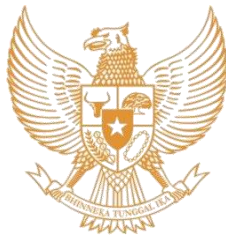


RKPD 2023



PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN
2022

BUKU I



BUPATI KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 248 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- b. bahwa sebagai tindak lanjut dari Musrenbang Tahun 2022, Pemerintah Daerah telah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kuningan Tahun 2023 secara partisipatif, sistematis, terukur dan terarah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b serta untuk menjamin kepastian hukum, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Kuningan Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Kuningan Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
17. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Akibat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan

- Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Daerah;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 26. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
 28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
 30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-

2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;

31. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2023;
32. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.189-Huam/2020 tentang Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Jawa Barat;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2010;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuningan Tahun 2011 – 2031;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2019;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kuningan Tahun 2018-2023;
38. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kuningan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan.
3. Bupati adalah Bupati Kuningan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan pembangunan dan penyusunan, serta pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Kuningan.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kuningan.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan Daerah dan mengacu pada RPJP Provinsi Jawa Barat dan Nasional.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dan penyusunannya berpedoman pada RPJPD dengan memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Barat dan Nasional.
9. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional atau Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disebut RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 yang selanjutnya disingkat RKPD Provinsi merupakan Rencana Kerja Tahunan yang akan menjadi pedoman bagi semua pelaku pembangunan di Daerah dalam menjalankan perannya sesuai dengan kapasitas dan fungsinya masing-masing.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2023 yang selanjutnya disingkat RKPD merupakan Rencana Kerja Tahunan yang akan menjadi pedoman bagi semua pelaku pembangunan di Daerah dalam menjalankan perannya sesuai dengan kapasitas dan fungsinya masing-masing.
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1

(satu) tahun.

13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 2

RKPD merupakan:

- a. dokumen perencanaan Daerah untuk periode tahun 2023, yang dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023; dan
- b. penjabaran dari RPJPD dan Perubahan RPJMD 2018-2023 yang memuat Pendahuluan; Gambaran Umum Kondisi Daerah; Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah; Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah; Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah; dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023.

Bagian Ketiga

Maksud dan Tujuan

Pasal 3

- (1) Maksud penetapan RKPD yaitu untuk menetapkan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam:
 - a. penyusunan Renja Perangkat Daerah; dan
 - b. penyusunan KUA, PPAS dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- (2) Tujuan penetapan RKPD adalah untuk:
 - a. mewujudkan pencapaian visi dan misi Daerah;
 - b. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan; dan
 - c. mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

BAB II

ISI DAN URAIAN RKPD

Pasal 4

Dokumen RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. Buku I tentang Pendahuluan; Gambaran Umum Kondisi Daerah; Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Ekonomi Daerah; Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah; Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah; dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan

- b. Buku II tentang Rencana Program dan Kegiatan Prioritas sebagaimana tercantum dalam Lampiran, Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

Kepala Badan melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 7-7-2022



Diundangkan di Kuningan
pada tanggal 7-7-2022



BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2022 NOMOR



DAFTAR ISI

DAFTAR ISIi

DAFTAR RABELiii

DAFTAR GAMBARvii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang I-1

1.2 Dasar Hukum Penyusunan I-6

1.3 Hubungan Antar Dokumen..... I-10

1.4 Maksud dan Tujuan I-14

1.5 Sistematika Dokumen RKPD..... I-14

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Kondisi Umum Daerah II-1

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi..... II-1

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat II-21

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum..... II-24

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah II-30

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD..... II-46

2.2.1 Evaluasi Pelaksanaan Program Pengentasan Kemiskinan Extrim di Kabupaten Kuningan..... II-46

2.2.2 Evaluasi Pelaksanaan Desa Pinunjul..... II-50

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah II-85

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah III-1

3.1.1 Evaluasi Kondisi Pembangunan Ekonomi Kabupaten Kuningan Tahun 2020 dan 2021 III-4

3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Tahun 2019-2023..... III-14

3.1.3 Evaluasi Hasil Perumusan Masalah Pembangunan Daerah III-25

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah III-31

3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan.... III-33

3.2.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah III-33

3.2.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah III-36



3.2.4 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah III-38

3.3 Kebijakan Non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah III-40

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan IV-1

4.2 Isu Strategis Tahun 2023 IV-11

4.3 Prioritas Pembangunan..... IV-11

4.3.1 Prioritas Pembangunan Nasional..... IV-14

4.3.2 Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat IV-19

4.3.3 Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Kuningan IV-21

4.4 Program Inovasi Daerah..... IV-24

4.4.1 Kegiatan KABISA DESA IV-25

4.4.2 Mekanisme dan Rancangan Kegiatan..... IV-27

4.4.3 Sumberdaya yang Dibutuhkan IV-28

4.4.4 Rencana Pelaksanaan IV-29

4.4.5 Rencana Lokasi/ Calon Penerima Calon Lokasi (CPCL) IV-29

4.4.6 Keberlanjutan IV-30

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

5.1 Rencana Program Pembangunan Daerah dalam Rangka Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tahun 2023..... V-23

5.2 Rencana Kerja Standar Pelayanan Minimal Tahun 2023..... V-50

5.3 Sinergitas Usulan Rencana Kegiatan yang Bersumber dari APBN Tahun 2023 V-56

5.4 Usulan Rencana Kegiatan yang Bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 V-57

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

6.1 Penetapan Indikator dan Target Kinerja Utama Tahun 2023.... VI-2

BAB VII PENUTUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Sinergitas Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten Tahun 2023	I-11
Tabel 2.1	Luas Wilayah Setiap Kecamatan di Kabupaten Kuningan.....	II-2
Tabel 2.2	Luasan Wilayah berdasarkan Topografi Kabupaten Kuningan	II-4
Tabel 2.3	Luasan Wilayah berdasarkan Morfologi Kabupaten Kuningan	II-5
Tabel 2.4	Luas Wilayah Berdasarkan Curah Hujan Kabupaten Kuningan	II-6
Tabel 2.5	Luas Hutan Berdasarkan Fungsi dan Status Kabupaten Kuningan	II-8
Tabel 2.6	Luas Areal Tanaman Perkebunan menurut Jenis Tanaman dan Produksi Kabupaten Kuningan Tahun 2020.....	II-9
Tabel 2.7	Luas Lahan Sawah Irigasi Menurut Kecamatan dan Jenis Penggunaan di Kabupaten Kuningan (Hektar)	II-10
Tabel 2.8	Luas Lahan Sawah Tadah Hujan Menurut Kecamatan dan Jenis Penggunaan di Kabupaten Kuningan (Hektar)	II-10
Tabel 2.9	Luas Panen dan Produksi Tanaman Pangan.....	II-11
Tabel 2.10	Produksi Tanaman Pangan Per-Wilayah	II-11
Tabel 2.11	Jumlah Komoditas Ternak Kabupaten Kuningan	II-12
Tabel 2.12	Jumlah Komoditas Ternak Per-Wilayah di Kabupaten Kuningan	II-13
Tabel 2.13	Luasan Kerentanan Gerakan Tanah di Kabupaten Kuningan	II-16
Tabel 2.14	Luas Kawasan Rawan Bencana Letusan Gunung api Ciremai.....	II-18
Tabel 2.15	Jumlah Penduduk Kabupaten Kuningan menurut Kelompok Umur Tahun 2019-2021	II-20
Tabel 2.16	Indikator Umum Kesejahteraan Kabupaten Kuningan Tahun 2019-2021	II-21
Tabel 2.17	Produk Domestik Regional Bruto Tahun 2019-2021	II-23
Tabel 2.18	Kondisi Pelayanan Umum pada Aspek Pendidikan	II-24
Tabel 2.19	Kondisi Pelayanan Umum pada Aspek Kesehatan	II-26
Tabel 2.20	Kondisi Pelayanan Umum pada Aspek Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	II-27
Tabel 2.21	Kondisi Pelayanan Umum pada Aspek Perumahan dan Kawasan Permukiman.....	II-28

Tabel 2.22	Kondisi Pelayanan Umum pada Aspek Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.....	II-28
Tabel 2.23	Kondisi Pelayanan Umum pada Aspek Sosial	II-29
Tabel 2.24	Kondisi Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Aspek Tenaga Kerja	II-29
Tabel 2.25	Kondisi Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Aspek Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	II-30
Tabel 2.26	Kondisi Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Aspek Pangan ...	II-30
Tabel 2.27	Kondisi Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Aspek Pertanahan	II-31
Tabel 2.28	Kondisi Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Aspek Lingkungan Hidup.....	II-31
Tabel 2.29	Kondisi Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Aspek Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	II-32
Tabel 2.30	Kondisi Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Aspek Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	II-32
Tabel 2.31	Kondisi Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Aspek Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.....	II-33
Tabel 2.32	Kondisi Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Aspek Perhubungan	II-33
Tabel 2.33	Kondisi Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Aspek Komunikasi dan Informatika	II-34
Tabel 2.34	Kondisi Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Aspek Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	II-35
Tabel 2.35	Kondisi Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Aspek Penanaman Modal	II-35
Tabel 2.36	Kondisi Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Aspek Kepemudaan dan Olahraga	II-36
Tabel 2.37	Kondisi Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Aspek Statistik.....	II-36
Tabel 2.38	Kondisi Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Aspek Persandian.....	II-37
Tabel 2.39	Kondisi Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Aspek Kebudayaan.....	II-37
Tabel 2.40	Kondisi Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Aspek Perpustakaan.....	II-38
Tabel 2.41	Kondisi Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Aspek Kearsipan	II-38
Tabel 2.42	Kondisi Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Aspek Pariwisata	II-38
Tabel 2.43	Kondisi Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Aspek Pertanian	II-39
Tabel 2.44	Kondisi Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Aspek Perdagangan	II-40

Tabel 2.45	Kondisi Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Aspek Perindustrian.....	II-40
Tabel 2.46	Kondisi Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Aspek Transmigrasi.....	II-41
Tabel 2.47	Kondisi Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Aspek Kelautan dan Perikanan	II-41
Tabel 2.48	Kondisi Pelayanan Penunjang Urusan Aspek Perencanaan Pembangunan	II-41
Tabel 2.49	Kondisi Pelayanan Penunjang Uusan Aspek Keuangan	II-42
Tabel 2.50	Kondisi Pelayanan Penunjang Urusan Aspek Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan	II-42
Tabel 2.51	Kondisi Pelayanan Penunjang Urusan Aspek Pengawasan	II-43
Tabel 2.52	Kondisi Pelayanan Penunjang Urusan Aspek Sekretariat Dewan.....	II-43
Tabel 2.53	Kondisi Aspek Daya Saing Daerah.....	II-44
Tabel 2.54	Capaian Indikator Makro Kabupaten Kuningan Tahun 2019 – 2021	II-45
Tabel 2.55	Rekapitulasi Data Hasil Verval Padu Padan DTKS dan SDGs Desa pada 25 Desa Lokus Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Kuningan Tahun 2021	II-48
Tabel 2.56	Capaian Desa Pinunjul Sampai Dengan Tahun 2021	II-50
Tabel 2.57	Evaluasi Pelaksanaan RPJMD Kab. Kuningan 2018 – 2023 Tahun 2021.....	II-53
Tabel 2.58	Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Daerah Sampai Tahun 2021.....	II-55
Tabel 3.1	Indikator Makro Pembangunan Ekonomi Kabupaten Kuningan Tahun 2015-2021	III-3
Tabel 3.2	Nilai Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten KuninganTahun 2016-2021 (Miliar Rupiah)	III-5
Tabel 3.3	Laju Pertumbuhan Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Konstan (%) Kabupaten Kuningan Tahun 2016 – 2021	III-6
Tabel 3.4	Distribusi Prosentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Kuningan Tahun 2016 – 2021	III-7
Tabel 3.5	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Kuningan Tahun 2016-2021 (juta rupiah).....	III-8
Tabel 3.6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Kuningan Tahun 2017-2021	III-9
Tabel 3.7	Data Ketenagakerjaan di Kabupaten Kuningan	III-10
Tabel 3.8	Angka Beban Ketergantungan Kabupaten Kuningan Tahun 2017-2021	III-12
Tabel 3.9	Angka Kemiskinan Kabupaten Kuningan Tahun 2017-2021	III-13
Tabel 3.10	Persentase Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera	

Kabupaten Kuningan Tahun 2017-2021	III-13
Tabel 3.11 Gini Ratio Kabupaten Kuningan Tahun 2017 – 2021	III-14
Tabel 3.12 Target Kinerja Indikator Makro Pembangunan Ekonomi.....	III-15
Tabel 3.13 Analisis SWOT Ekonomi Kabupaten Kuningan.....	III-18
Tabel 3.14 Analisis Faktor Internal dan Eksternal RKPD 2023	III-19
Tabel 3.15 Analisis Faktor Strategi Internal (IFAS).....	III-20
Tabel 3.16 Analisis Faktor Strategi Eksternal (EFAS).....	III-20
Tabel 3.17 Matriks SWOT Ekonomi Kabupaten Kuningan	III-21
Tabel 3.18 Realisasi Pendapatan Tahun 2020-2021 dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Kuningan Tahun 2022-2024	III-35
Tabel 3.19 Realisasi Belanja Tahun 2020-2021 dan Proyeksi/Target Belanja Kabupaten Kuningan Tahun 2022-2024.....	III-37
Tabel 3.20 Realisasi Pembiayaan Tahun 2020-2021 dan Proyeksi/Target Pembiayaan Kabupaten Kuningan	III-39
Tabel 4.1 Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan	IV-2
Tabel 4.2 Sandingan Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Kuningan Tahun 2023.....	IV-12
Tabel 5.1 Rekapitulasi Estimasi Belanja Tahun 2023	V-2
Tabel 5.2 Rekapitulasi Estimasi Pendapatan Daerah Tahun 2023	V-2
Tabel 5.3 Rekapitulasi Program Prioritas Kabupaten Kuningan Tahun 2023	V-3
Tabel 5.4 Program dan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2023.....	V-24
Tabel 5.5 Rencana Kegiatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2023	V-50
Tabel 5.6 Usulan Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Tahun 2023.....	V-56
Tabel 5.7 Usulan Rencana Kegiatan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2023.....	V-57
Tabel 5.8 Rekapitulasi Rencana Program dan Kegiatan berdasarkan Perangkat Daerah Tahun 2023	V-58
Tabel 5.9 Proporsi Biaya Operasional Tahun 2023 per Isu.....	V-60
Tabel 6.1 Target Indikator Makro Kabupaten Kuningan Tahun 2023.....	VI-2
Tabel 6.2 Penetapan Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Kuningan Tahun 2023	VI-3
Tabel 6.3 Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kuningan Tahun 2023	VI-4

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Alir Tahapan Tatacara Penyusunan RKPD Kabupaten Kuningan.....	I-5
Gambar 1.2	Skema Hubungan Antar Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Tata Ruang Daerah	I-13
Gambar 2.1	Peta Batas Administrasi Kabupaten Kuningan	II-2
Gambar 2.2	Peta Topografi Kabupaten Kuningan.....	II-4
Gambar 2.3	Peta Morfologi Kabupaten Kuningan.....	II-5
Gambar 2.4	Peta Curah Hujan Kabupaten Kuningan.....	II-7
Gambar 2.5	Peta Kawasan Bencana Kabupaten Kuningan.....	II-16
Gambar 2.6	Peta Rawan Gerakan Tanah Kabupaten Kuningan	II-17
Gambar 2.7	Peta Kawasan Rawan Bencana Letusan Gunung Api Ciremai Kabupaten Kuningan.....	II-18
Gambar 2.8	Peta Kawasan Rawan Bencana Kabupaten Kuningan	II-19
Gambar 2.9	Piramida Penduduk Kabupaten Kuningan Tahun 2021	II-20
Gambar 3.1	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Kuningan Tahun 2016-2020 (juta rupiah)	III-8
Gambar 3.2	Diagram Analisis SWOT.....	III-24

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari rencana strategis Kabupaten (Rencana Jangka Menengah Daerah/RPJMD). Penyusunan RKPD Kabupaten Kuningan tahun 2023 secara sistematis mengikuti tahapan pembangunan sebagaimana digariskan dalam RPJMD Kabupaten Kuningan 2018-2023. Arah pembangunan ini dimaksudkan untuk menjaga konsistensi dan kesinambungan program pembangunan sehingga secara terarah dapat mewujudkan Visi Pembangunan **“Kuningan MAJU (Ma’mur, Agamis, Pinunjul) Berbasis Desa Tahun 2023”**.

Sebagai suatu dokumen resmi rencana daerah, RKPD mempunyai kedudukan strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Secara umum, dokumen RKPD mempunyai nilai penting, antara lain:

- (1) Merupakan instrumen pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kuningan Tahun 2018–2023;
- (2) Menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- (3) Mewujudkan keselarasan program dan sinkronisasi pencapaian sasaran RPJMD Kabupaten Kuningan Tahun 2018-2023;
- (4) Menjadi landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Kuningan Tahun 2023; dan
- (5) Menjadi bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD untuk memastikan APBD telah disusun berpedoman pada RKPD.

RKPD Kabupaten Kuningan Tahun 2023 merupakan perencanaan tahunan yang akan menuntaskan target sebagaimana amanat RPJMD Kabupaten Kuningan Tahun 2018-2023. Dokumen RKPD Kabupaten Kuningan Tahun 2023 secara umum memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah, rencana kerja dan pendanaannya untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Proses penyusunan RKPD Kabupaten Kuningan Tahun 2023 dilaksanakan melalui pendekatan:

- 1) **Top-down**, yaitu pendekatan yang memperhatikan program-program prioritas dan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi, serta visi-misi daerah.
- 2) **Bottom-up**, yaitu pendekatan perencanaan yang mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang disampaikan melalui Musrenbang Desa, Kecamatan dan Kabupaten, Pra Musrenbang, dan Musrenbang Kabupaten. Proses ini dilaksanakan sejak Bulan Januari Tahun 2022, dengan hasil prioritas usulan dari setiap tahapan yang mengerucut sampai dengan Acara Puncak Musrenbang Kabupaten yang dilaksanakan pada bulan Maret 2022.
- 3) **Teknokratik**, yaitu pendekatan perencanaan yang mengedepankan pengetahuan, ilmu dan teknologi. Hal ini ditunjukkan oleh diakomodasinya saran dan pendapat dari akademisi dan praktisi pembangunan.
- 4) **Politik**, yaitu pendekatan perencanaan yang mengakomodasi kepentingan politik dalam pelaksanaan pembangunan, yang ditunjukkan terakomodasinya pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuningan.
- 5) **Partisipatif**, yaitu pendekatan perencanaan yang mengakomodir hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan Daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.

Selain pendekatan diatas, penyusunan RKPD Kabupaten Kuningan Tahun 2023 juga menerapkan pendekatan perencanaan pembangunan berbasis **Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS)** dengan penjelasan sebagai berikut:

- **Pendekatan Perencanaan Holistik – Tematik** pada dasarnya adalah pendekatan yang menekankan pada pentingnya keseluruhan dengan

terdapat kaitan antara bagian-bagiannya untuk mencapai tujuan utama. Jadi, pendekatan ini mengutamakan kegiatan-kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional, identifikasi program-program dan kegiatan sampai koordinasi multi kementerian dan antar perangkat daerah, yang bertujuan untuk mencapai sasaran prioritas nasional yang didukung oleh Kementerian/Lembaga dan antar SKPD di tingkat provinsi/ kabupaten.

- **Pendekatan Integratif** lebih mengarah pada kegiatan mengidentifikasi dan mengarahkan agar output dari kegiatan prioritas yang terdapat pada suatu perangkat daerah dapat saling terintegrasi dengan kegiatan prioritas yang ada pada perangkat daerah lainnya dalam mendukung satu kebijakan prioritas.
- **Pendekatan Spasial** digunakan saat pembahasan guna menyepakati lokus dari suatu kegiatan prioritas yang terdapat pada beberapa perangkat daerah untuk diintegrasikan yang selanjutnya akan diselaraskan dengan usulan.

Berdasarkan pendekatan perencanaan tersebut, maka proses penyusunan RKPD Kabupaten Kuningan Tahun 2023 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- 1) **Penyusunan Dokumen Rancangan Awal RKPD** dengan berpedoman kepada sasaran-sasaran yang tertuang dalam dokumen RPJPD Kabupaten Kuningan Tahun 2005-2025, Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2023, hasil evaluasi Perubahan RPJMD 2018-2023, evaluasi RKPD Tahun 2021 dan evaluasi RKPD tahun 2022 Triwulan 1.
- 2) **Penyusunan Rancangan RKPD** dilakukan melalui tahapan-tahapan mulai dari tahapan awal yang terdiri dari **Pra Musyawarah** Tingkat Koordinasi Pembangunan untuk Kebijakan Pembangunan, **Forum Konsultasi Publik**, **Forum Perangkat Daerah**, **Musrenbang Kabupaten** sebagai tindak lanjut dari hasil Musrenbang tingkat Desa dan Kecamatan, dan hasil pembahasan dalam Forum Perangkat Daerah. Selanjutnya draft rancangan RKPD dibahas secara intensif

melalui rangkaian Pra Musrenbang Kabupaten dan Rakor Bidang, Rapat Koordinasi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota, penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD serta Musrenbang Kabupaten.

- 3) **Penyusunan Rancangan Akhir RKPD**, melalui tahapan pembahasan Prioritas Pembangunan sampai dengan program dan kegiatan oleh Bappeda dan Perangkat Daerah Kabupaten pada rangkaian Musrenbang Kabupaten, dan memperhatikan pokok-pokok pikiran dari DPRD Kabupaten Kuningan serta pendapat dari kalangan perguruan tinggi, dunia usaha dan komunitas.
- 4) **Penetapan RKPD**, berpijak kepada Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Kuningan Tahun 2023 untuk kemudian diterbitkan dalam Peraturan Bupati tentang RKPD Kabupaten Kuningan Tahun 2023. Adapun alur proses penyusunan RKPD Kabupaten Kuningan Tahun 2023 disajikan pada Gambar 1.1

1



1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum yang melandasi penyusunan RKPD adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Kuningan Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Kuningan Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
17. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Akibat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

26. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran daerah Nomor 237) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;
31. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2023;
32. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.189-Huham/2020 tentang Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Jawa Barat;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kuningan

- Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2010;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuningan Tahun 2011 – 2031;
 36. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2019;
 37. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kuningan Tahun 2018-2023;
 38. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kuningan.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Penyusunan RKPD Kabupaten Kuningan Tahun 2023 memperhatikan RKP Nasional Tahun 2023, Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2023, Perubahan RPJMD Kabupaten Kuningan Tahun 2018-2023 serta masukan dan aspirasi masyarakat baik yang disampaikan secara langsung maupun melalui penjangkaran aspirasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuningan. Mekanisme perencanaan partisipatif juga diwujudkan melalui pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, forum SKPD sampai dengan Musrenbang Kabupaten.

Mengacu pada pendekatan perencanaan yang terintegrasi dari tingkat pemerintah kabupaten, provinsi sampai dengan pemerintah pusat, maka sinergi antar level perencanaan menjadi keniscayaan. Untuk mendapat gambaran yang lebih utuh mengenai perpaduan pendekatan rencana kabupaten, provinsi dan pusat akan disajikan dalam gambar berikut.

Tabel 1.1 Sinergitas Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten Tahun 2023

NASIONAL	KABUPATEN KUNINGAN	JAWA BARAT
“Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”	“Mencapai Daerah yang Maju dan Unggul”	“Mencapai Kemandirian Masyarakat Jawa Barat”
▪ Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem ▪ Peningkatan kualitas sumber daya manusia ▪ Penanggulangan pengangguran ▪ Pemulihan dunia usaha ▪ Percepatan pembangunan infrastruktur dasar (air bersih dan sanitasi) ▪ Pembangunan ekonomi hijau yang menjadi repons terhadap perubahan iklim ▪ Revitalisasi industri dan penguatan riset ▪ Pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN	▪ Percepatan rehabilitasi dan aksesibilitas pendidikan ▪ Percepatan pembangunan desa khususnya sektor pertanian dan pariwisata, melalui pembangunan dan rehabilitasi Infrastruktur ▪ Peningkatan produktivitas dan lapangan kerja melalui UMKM/IMKM berbasis teknologi informasi, Ketersediaan bantuan permodalan dan pengembangan usaha: ▪ Pengembangan karakter berbangsa dan bernegara serta keluhuran nilai-nilai agama ▪ Peningkatan layanan kesehatan, khususnya bagi ibu dan anak, manula dan penyandang disabilitas ▪ Peningkatan mutu pelayanan dan transparansi pemerintahan melalui Sistem Informasi Terpadu	▪ Reformasi sistem kesehatan daerah ▪ Pemulihan dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis inovasi ▪ Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan ▪ Reformasi Sistem Perlindungan Sosial ▪ Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan ▪ Reformasi Sistem Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana ▪ Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah ▪ Gerakan Membangun Desa ▪ Pendidikan Agama dan Tempat Ibadah Juara ▪ Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ▪ Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata

Pendekatan strategi dan arah kebijakan pada RKPD 2023 ini yaitu **“Mencapai Daerah yang Maju dan Unggul”** yang akan bermuara pada upaya pemulihan ekonomi. Kebijakan ini berangkat dari kondisi masyarakat yang mulai pulih pasca penanganan Covid-19. Pada masa pandemi Covid-19, Pemerintah Kabupaten Kuningan melakukan *refocusing* anggaran pembangunan daerah untuk kebutuhan di bidang kesehatan dalam penanganan pandemi Covid-19. Pemulihan ekonomi akan diarahkan pada kegiatan yang bersifat dapat membuka **peluang usaha baru** dan dapat menyediakan **lapangan kerja baru** bagi tenaga kerja produktif di Kabupaten Kuningan. Pemerintah Kabupaten Kuningan akan mendorong semua sektor untuk menjadi *leading* dalam menciptakan peluang usaha baru dan penyerapan tenaga kerja. **Daerah yang maju dan unggul** salah satunya dicirikan dengan kemampuan daerah tersebut untuk bangkit dari kondisi krisis dan mampu mempercepat laju pembangunan berdasarkan keunggulan lokal yang dimanfaatkan secara maksimal.

Upaya mendorong kesempatan usaha baru dan pembukaan lapangan kerja akan difokuskan pada lokus penanganan kemiskinan ekstrim yang berada di 5 (lima) kecamatan dan 25 (dua puluh lima) desa melalui berbagai intervensi ekonomi dan sosial sehingga masyarakat miskin di lokasi tersebut dapat secara bertahap menjadi masyarakat produktif yang secara mandiri dapat melepaskan diri dari jeratan kemiskinan.

Sektor yang mendapat prioritas untuk meningkatkan peluang usaha adalah sektor pertanian, peternakan, perikanan, usaha kecil dan menengah, industri kreatif dan sektor jasa pariwisata serta perdagangan. Untuk mendorong penyediaan tenaga kerja akan diarahkan pada pelatihan tenaga kerja produktif, kerjasama dengan dunia usaha dan industri, peningkatan volume pekerjaan infra struktur yang memanfaatkan tenaga kerja lokal. Pemerintah Kabupaten Kuningan akan mengarahkan setiap kegiatan pemerintah yang melibatkan pemanfaatan tenaga kerja akan bersumber dari tenaga kerja produktif dari Kabupaten Kuningan.

Pelaksanaan pembangunan tahun 2023 adalah tahun kelima dari RPJMD tahun 2018 - 2023, yang merupakan tahun terakhir untuk mewujudkan target pembangunan yang telah ditetapkan. Seluruh Perangkat

RKPD ini disusun berdasarkan hubungan antar dokumen yang ada baik di tingkat Nasional maupun Provinsi Jawa Barat, serta memperhatikan daerah sekitar juga Rencana Tata Ruang Wilayah yang ada. Hubungan antar dokumen yang membentuk sinergi perencanaan dapat digambarkan dalam skema berikut:

[illegible]

Dari skema di atas dapat dijelaskan bahwa RPJMD Kabupaten Kuningan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan perencanaan pembangunan nasional, provinsi serta harus selaras dan sinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang dan antar fungsi pemerintah, guna menjamin keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Penyusunan RPJMD Kabupaten Kuningan berpedoman pada RPJP Daerah Kabupaten Kuningan, dengan memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Barat dan mengacu pada RTRW Kabupaten Kuningan. Penyusunan RPJMD Kabupaten Kuningan ini diselaraskan pula dengan RTRW Provinsi Jawa Barat, RPJMN dan RTRW Kabupaten/Kota sekitar.

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud dari RKPD Kabupaten Kuningan Tahun 2023 adalah menyusun rencana pembangunan sebagai acuan/pedoman penganggaran tahunan daerah sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Kuningan Tahun 2018-2023.

Adapun tujuannya adalah: 1) Mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Kuningan; 2) Menetapkan strategi, arah kebijakan dan prioritas pembangunan serta program dan kegiatan Tahun 2023; 3) Mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergi pembangunan, baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan; 4) Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha, perguruan tinggi dan komunitas; dan 5) Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

RKPD Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan

Memuat gambaran umum penyusunan dokumen RKPD.

1.1. Latar Belakang

Memuat pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan, kedudukan, tahapan, prinsip, pendekatan penyusunan RKPD,

keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Memuat uraian ringkas tentang dasar hukum yang terkait langsung dengan penyusunan RKPD.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Memuat hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan.

1.4. Maksud dan Tujuan

Memuat maksud dan tujuan penyusunan dokumen RKPD.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Memuat pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah

Memuat gambaran umum kondisi daerah tentang kondisi geografi dan demografi serta indikator capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten meliputi 3 (tiga) aspek utama, yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah, uraian penelaahan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD, serta uraian rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah.

2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah

Memuat gambaran umum kondisi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dari aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2021

Memuat telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD.

2.3. Kondisi Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Kuningan

Menjelaskan kondisi kesehatan, ekonomi, sosial dan pelaksanaan anggaran selama masa pandemi covid-19.

2.4. Permasalahan Pembangunan Daerah

Memuat uraian rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah.

Bab III Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah

Memuat uraian kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Memuat arahan pembangunan ekonomi dalam dokumen RKP, RKPD provinsi dan kebijakan di bidang ekonomi dalam dokumen RPJMD. Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta permasalahan daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Memuat uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

Memuat rumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Memuat rumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang hendak dicapai pada tahun 2023 pada Perubahan RPJMD Kabupaten Kuningan Tahun 2018-2023 dengan turut memperhatikan tujuan dan sasaran pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2023, maupun tujuan dan sasaran pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat dalam RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2023.

4.2. Isu Strategis Tahun 2023

Memuat penentuan isu strategis Kabupaten Kuningan Tahun 2023.

4.3. Prioritas Pembangunan Tahun 2023

Memuat rumusan prioritas pembangunan daerah Tahun 2023 yang bersinergi dengan prioritas pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 maupun RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2023.

4.4. Program Inovasi Daerah

Memuat inovasi kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kuningan dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah untuk Tahun 2023.

Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

5.1 Rencana Program Pembangunan Daerah dalam rangka Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tahun 2023

Memuat uraian rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

5.2 Rencana Kerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2023

Memuat rumusan implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam RKPD Kabupaten Kuningan Tahun 2023.

5.3 Sinergitas Usulan Rencana Kegiatan yang bersumber dari APBN Tahun 2023

Menjelaskan keterkaitan dari indikator kinerja urusan pemerintah daerah dengan urusan pemerintah pusat.

5.4 Usulan Rencana Kegiatan yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2023

Menjelaskan keterkaitan dari indikator kinerja urusan pemerintah daerah dengan urusan pemerintah provinsi.

Bab VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Memuat indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Kuningan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Kuningan Tahun 2018-2023.

Bab VII Penutup

Memuat hal-hal penting dan perlu dilakukan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan Tahun 2023.

BAB II**GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH****2.1 Kondisi Umum Daerah****2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi****2.1.1.1 Kondisi Geografis**

Kabupaten Kuningan terletak di sebelah timur Provinsi Jawa Barat dan berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah. Secara astronomis terletak pada koordinat 6°46'51,92" Lintang Selatan - 7°11'44,02" Lintang Selatan dan 108°23'2,07" Bujur Timur - 108°47'40,12" Bujur Timur. Sementara itu, apabila dilihat dari letak geografisnya memiliki posisi yang cukup strategis yang berada pada lintasan jalan regional yang menghubungkan Pusat Kegiatan Nasional Cirebon dengan Pusat Kegiatan Wilayah Pangandaran dan sebagai jalan alternatif jalur tengah yang menghubungkan Bandung - Majalengka dengan Jawa Tengah. Selain itu, berada pada hulu dari 3 (tiga) Daerah Aliran Sungai (DAS), yaitu DAS Cisanggarung, Ciberes-Bangkaderes dan Cijolang, sehingga mempunyai keterkaitan erat dalam pengaturan tata air dengan daerah di bawahnya seperti Kabupaten/Kota Cirebon, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Brebes Jawa Tengah dan berdekatan dengan Bandar Udara Internasional Kertajati, rencana pembangunan jalan tol Cileunyi – Sumedang - Dawuan (Cisumdawu) dan jalan tol Cikampek-Cirebon.

Secara administratif Kabupaten Kuningan terdiri dari 32 kecamatan, 15 kelurahan, 361 desa 33 lingkungan, 1.187 Dusun, 1.745 Rukun Warga, 5.675 Rukun Tetangga dan 400.175 Kepala Keluarga. Berdasarkan batas definitif melalui Permendagri Nomor 2 Tahun 2009, Permendagri Nomor 14 tahun 2009 dan Kepmendagri Nomor 246 Tahun 2004 serta arahan Pusat Pemetaan Batas Wilayah (PPBW) Badan Informasi Geospasial, luas wilayah Kabupaten Kuningan secara keseluruhan mencapai ± 119.409,31 hektar dengan kecamatan terluas di Kabupaten Kuningan yaitu Kecamatan Cibingbin seluas ± 7.091 hektar dan kecamatan yang memiliki luas paling sedikit yaitu Kecamatan Sindangagung seluas ± 1.312 hektar.

Tabel 2.1 Luas Wilayah Setiap Kecamatan di Kabupaten Kuningan

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Persentase
1	Ciawigebang	6.040,81	5,06%
2	Cibeureum	3.919,78	3,28%
3	Cibingbin	6.972,51	5,84%
4	Cidahu	3.704,72	3,10%
5	Cigandamekar	2.242,54	1,88%
6	Cigugur	3.529,15	2,96%
7	Cilebak	4.268,78	3,57%
8	Cilimus	3.529,69	2,96%
9	Cimahi	5.838,75	4,89%
10	Ciniru	4.976,49	4,17%
11	Cipicung	1.902,09	1,59%
12	Ciwaru	5.197,64	4,35%

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Persentase
13	Darma	5.449,36	4,56%
14	Garawangi	2.984,57	2,50%
15	Hantara	3.537,40	2,96%
16	Jalaksana	3.920,57	3,28%
17	Japara	2.707,49	2,27%
18	Kadugede	1.810,55	1,52%
19	Kalimanggis	2.017,75	1,69%
20	Karangkencana	6.529,53	5,47%
21	Kramatmulya	1.687,29	1,41%
22	Kuningan	2.994,24	2,51%
23	Lebakwangi	1.969,69	1,65%
24	Luragung	4.073,77	3,41%
25	Maleber	5.736,20	4,80%
26	Mandirancan	3.500,00	2,93%
27	Nusaherang	1.809,45	1,52%
28	Pancalang	1.919,88	1,61%
29	Pasawahan	4.927,49	4,13%
30	Selajambe	3.661,44	3,07%
31	Sindangagung	1.300,91	1,09%
32	Subang	4.748,84	3,98%
Jumlah		119.409,3	100,00%

Sumber : Bappeda Kabupaten Kuningan, 2022

Batas wilayah Kabupaten Kuningan dengan kabupaten tetangganya diuraikan sebagai berikut:

- Sebelah utara dengan Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat;
- Sebelah timur dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah;
- Sebelah selatan dengan Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah;
- Sebelah barat dengan Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat.

Topografi dan Morfologi

Topografi merupakan tinggi suatu titik di atas bidang acuan yang biasanya digunakan tinggi rata-rata dari permukaan laut. Pada definisi lain, topografi menggambarkan relief permukaan bumi yang menunjukkan perbedaan ketinggian suatu tempat. Ketinggian pada suatu wilayah dapat diklasifikasikan menjadi 0 – 500 mdpl, 500 – 1.000 mdpl, 1.000 – 2.000 mdpl, 2.000 – 3.000 mdpl dan > 3000 mdpl. Luasan wilayah berdasarkan

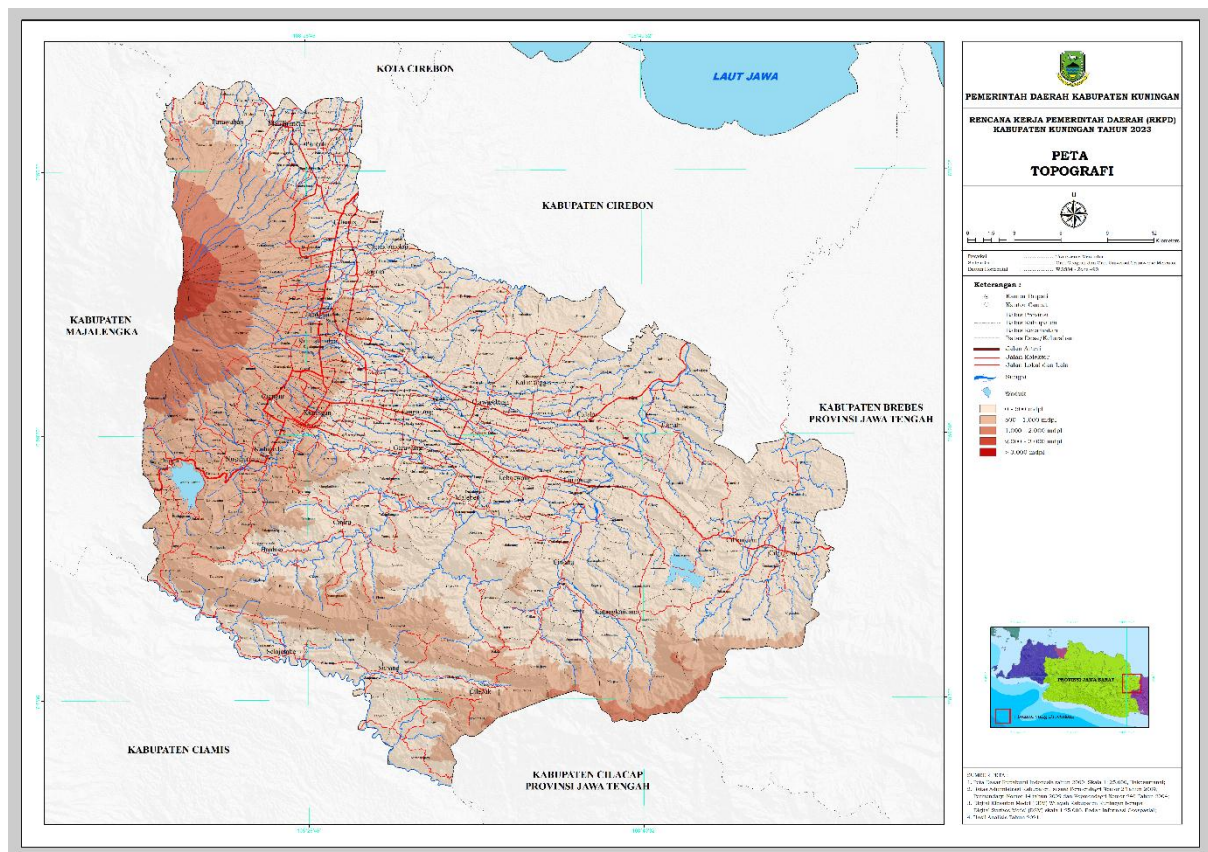
ketinggian di Kabupaten Kuningan disajikan Tabel 2.2, sementara sebarannya dapat dilihat pada Gambar 2.2 berikut ini.

Tabel 2.2 Luasan Wilayah berdasarkan Topografi Kabupaten Kuningan

No	Ketinggian	Luas (ha)	Persentase
1	0 - 500 mdpl	79.634,00	66,69
2	500 – 1.000 mdpl	32.451,44	27,18
3	1.000 – 2.000 mdpl	6.232,08	5,22
4	2.000 – 3.000 mdpl	1.083,88	0,91
5	> 3000 mdpl	7,92	0,01
Jumlah		119.409,31	100,00

Sumber : Bappeda Kabupaten Kuningan, 2022

Gambar 2.2 Peta Topografi Kabupaten Kuningan



Berdasarkan Tabel dan Gambar 2.2. dapat diketahui bahwa ketinggian wilayah Kabupaten Kuningan terluas berada pada ketinggian diantara 0 – 500 mdpl sebesar 66,69 % berada di wilayah tengah, timur, dan utara. Sementara ketinggian wilayah dengan luasan terkecil berada pada ketinggian >3.000 mdpl seluas 7,92 hektar atau 0,01 % dari luas Kabupaten Kuningan yang merupakan puncak dari Gunung Ciremai.

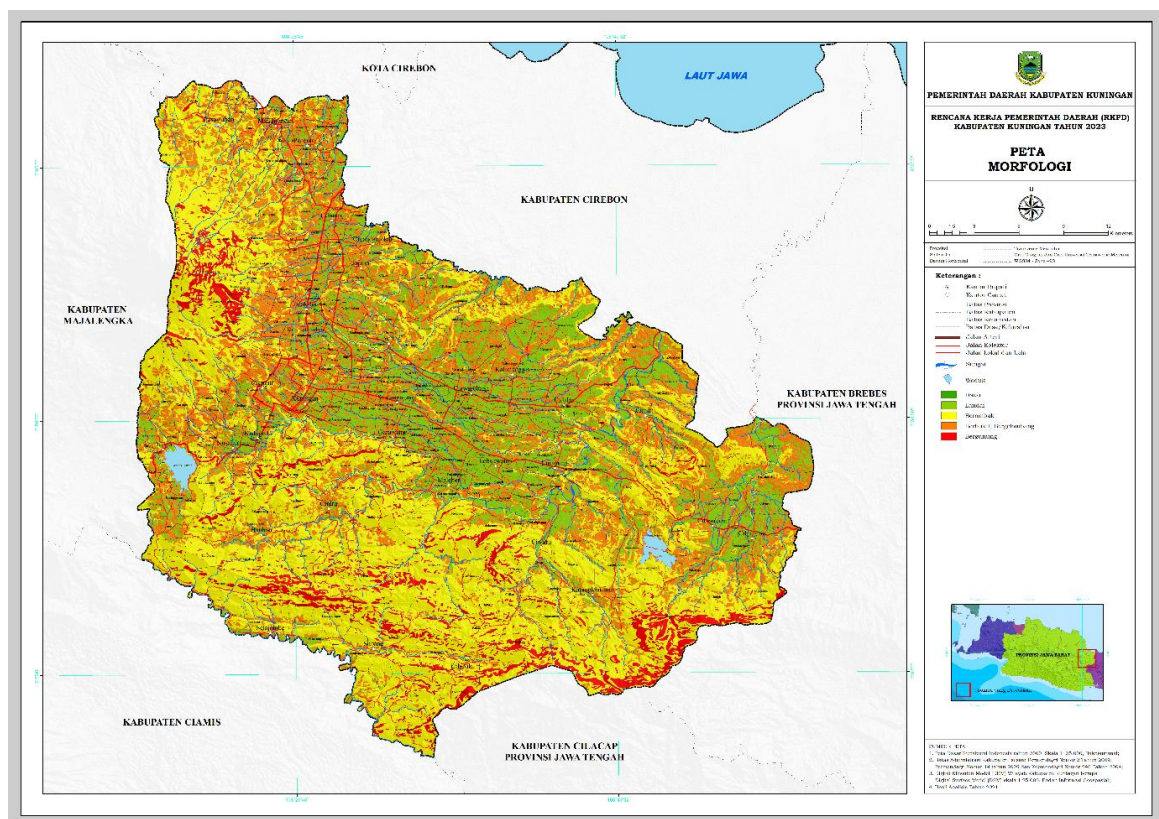
Morfologi wilayah merupakan aspek permukaan lahan yang dapat diidentifikasi dan diklasifikasikan menjadi datar, landai, berombak, berbukit/bergelombang dan bergunung. Luasan wilayah berdasarkan morfologi di Kabupaten Kuningan disajikan Tabel 2.3, sementara sebarannya dapat dilihat pada Gambar 2.3 berikut ini.

Tabel 2.3 Luasan Wilayah berdasarkan Morfologi Kabupaten Kuningan

No	Morfologi	Luas (ha)	Persentase
1.	Datar	3.718,47	3,11
2.	Landai	26.093,89	21,85
3.	Berombak	32.383,29	27,12
4.	Berbukit/Bergelombang	49.195,99	41,20
5.	Bergunung	8.017,68	6,71
Jumlah		119.409,31	100,00

Sumber : Bappeda Kabupaten Kuningan, 2022

Gambar 2.3 Peta Morfologi Kabupaten Kuningan



Berdasarkan Tabel dan Gambar 2.3. dapat dijelaskan bahwa morfologi berbukit bergelombang memiliki luasan paling besar yaitu sebesar 49.195,99 hektar (41,20 persen) tersebar di wilayah Kabupaten Kuningan, sedangkan luasan yang terkecil berada di wilayah morfologi datar seluas 3.718,47 hektar (3,11 persen) yang berada di bagian tengah wilayah.

Klimatologi

Iklim merupakan keadaan rata-rata peristiwa cuaca dalam periode yang lama dan meliputi daerah yang luas. Sedangkan curah hujan adalah jumlah hujan yang jatuh di suatu daerah dalam waktu tertentu. Kabupaten Kuningan termasuk ke dalam wilayah beriklim tropis. Rata-rata suhu udara sepanjang tahun mencapai 28°C, dengan suhu minimum sebesar 20,40°C di Bulan Juli, sedangkan suhu maksimum tertinggi mencapai 37,20°C di Bulan Oktober (Kuningan Dalam Angka tahun 2021). Untuk curah hujan, Wilayah Kabupaten Kuningan memiliki curah hujan 2.000 sampai dengan lebih dari 3.000 mm/tahun. Berikut ini disajikan luasan wilayah berdasarkan curah hujan di Kabupaten Kuningan.

Tabel 2.4 Luas Wilayah Berdasarkan Curah Hujan Kabupaten Kuningan

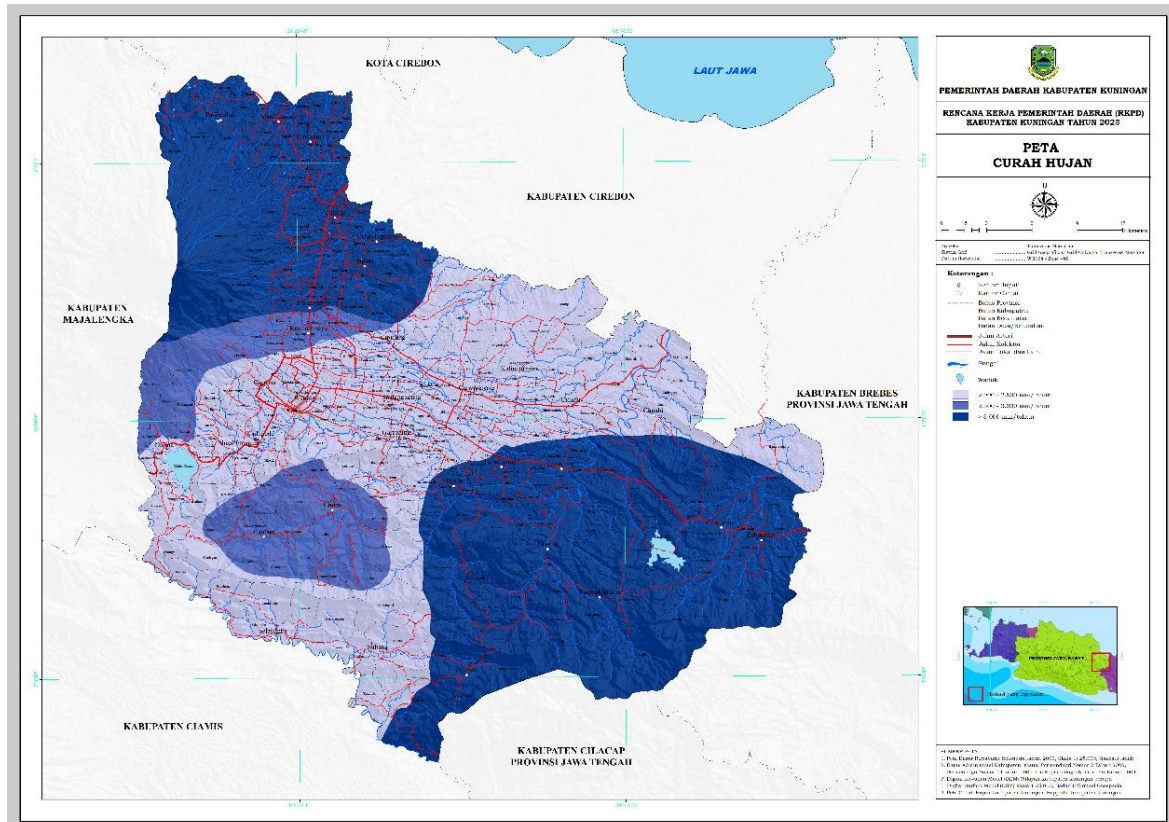
No	Curah Hujan	Luas (ha)	Persentase
1	2.000 - 2.500 mm/tahun	47.705,59	39,95%
2	2.500 - 3.000 mm/tahun	12.637,70	10,58%
3	> 3.000 mm/tahun	59.066,03	49,47%
Jumlah		119.409,31	100,00%

Sumber : Bappeda Kabupaten Kuningan, 2022

Berdasarkan Tabel dan Gambar 2.4. dapat dijelaskan bahwa sebagian besar wilayah Kabupaten Kuningan merupakan memiliki curah hujan >3.000 mm/tahun yaitu seluas 49,47% di wilayah bagian barat laut dan tenggara. Sedangkan luas wilayah terkecil sebesar 10,58% merupakan wilayah yang memiliki curah hujan 2.500-3.000 mm/tahun berada di wilayah utara, tengah dan selatan.

Potensi Wilayah

Gambar 2.4 Peta Curah Hujan Kabupaten Kuningan



Kabupaten Kuningan merupakan wilayah yang memiliki potensi besar dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, perikanan, peternakan, pariwisata dan sumberdaya air. Hal tersebut sangat ditunjang oleh faktor demografi, iklim serta tingkat kesuburan tanah dan ketersediaan air yang berlimpah. Berikut dijelaskan beberapa sektor yang menjadi potensi di Kabupaten Kuningan :

Kehutanan

Kehutanan menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan merupakan sistem pengelolaan yang bersangkut paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu. Kehutanan dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang bersangkut-paut dengan pengelolaan ekosistem hutan dan

pengurusannya, sehingga ekosistem tersebut mampu memenuhi berbagai kebutuhan barang dan jasa.¹

Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Hal ini untuk menjamin kepastian hukum mengenai status kawasan hutan, letak batas dan luas suatu wilayah tertentu yang sudah ditunjuk menjadi kawasan hutan tetap. Dengan merujuk kepada Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK. 2003/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/4/2017 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Jawa Barat sampai dengan tahun 2016; SK.3684/Menhut-VII/KUH/2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan Taman Nasional Gunung Ciremai dan Berita Acara Rapat dengan BTNGC tanggal 15 Desember 2017; SK Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor : SK.35/IV-SET/2015 tentang Penataan Blok Taman Wisata Alam Linggarjati Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat; Berita Acara Rapat Teknis Revisi RTRW Kabupaten Kuningan Persamaan Persepsi Seluruh Sektor dengan Balai Pengelolaan Hutan Wilayah V Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat; Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Hutan Kota; Surat Keputusan Bupati Kuningan Nomor 660.1/KPTS.503.BPLHD/2012 tentang Penetapan Kawasan Taman Keanekaragaman Hayati (KEHATI) Kabupaten Kuningan; dan Hasil Analisis SIG Tahun 2021, Bappeda Kabupaten Kuningan, diperoleh luasan kawasan hutan di Kabupaten Kuningan sebagaimana Tabel 2.5 berikut ini.

Tabel 2.5 Luas Hutan Berdasarkan Fungsi dan Status Kabupaten Kuningan

No	Fungsi Hutan	Luas (Ha)
1	Hutan Produksi	25.066,82
2	Taman Nasional	8.837,02
3	Taman Wisata Alam	8,90
4	Hutan Hak/Hutan Rakyat	18.418,73
5	Hutan Kota	71,50

¹ Arief, Arifin. 2011. *Hutan dan Kehutanan*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

No	Fungsi Hutan	Luas (Ha)
6	Taman Keanekaragaman Hayati	4,30

Sumber : Bappeda Kabupaten Kuningan, 2022
Hasil Analisis dari Pemangku Kepentingan Terkait

Tabel 2.5 menunjukkan luasan kawasan hutan menurut fungsinya dengan hasil hutan terdiri dari berbagai macam jenis kayu seperti kayu jati, kayu bakar jati, kayu rimba, kayu bakar rimba, dan produk lainnya seperti getah pinus, minyak kayu putih, daun kayu putih (Kuningan dalam Angka Tahun 2022).

Perkebunan

Perkebunan merupakan usaha pemanfaatan lahan kering dengan menanam komoditas tertentu. Fungsi perkebunan menurut Undang-Undang Perkebunan mencakup tiga hal, pertama, fungsi secara ekonomi yaitu peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat serta penguatan struktur ekonomi wilayah dan nasional. Kedua, fungsi ekologi yaitu peningkatan konservasi tanah dan air, penyerap karbon, penyedia oksigen dan penyangga kawasan lindung. Ketiga, fungsi sosial budidaya yaitu sebagai pemersatu kesatuan bangsa.

Tabel 2.6 Luas Areal Tanaman Perkebunan menurut Jenis Tanaman dan Produksi Kabupaten Kuningan Tahun 2020

No	Tanaman Perkebunan	Luas (Ha)	Ton
1	Kelapa	5.798,46	3.967,28
2	Karet	-	-
3	Kopi	1.725,11	323,70

Sumber : Kuningan Dalam Angka Tahun 2022

Tanaman Pangan

Pertanian dalam pengertian yang luas yaitu kegiatan manusia untuk memperoleh hasil yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dan atau hewan yang pada mulanya dicapai dengan jalan sengaja menyempurnakan segala kemungkinan yang telah diberikan oleh alam guna mengembangbiakkan tumbuhan dan atau hewan tersebut². Luasan tanaman pangan di Kabupaten Kuningan terdiri dari sawah irigasi seluas 19.026 hektar, sawah

² Aartsen, J. V., 1953. *Ekonomi pertanian Indonesia*. Jakarta: Pembangunan.

tadah hujan seluas 8.521 hektar, ladang seluas 9.211 hektar dan tegalan seluas 16.528 hektar.

Tabel 2.7 Luas Lahan Sawah Irigasi Menurut Kecamatan dan Jenis Penggunaan di Kabupaten Kuningan (Hektar)

Kecamatan	Ditanami Padi			Ditanami Lainnya	Tidak Ditanami Apapun	Jumlah
	>3 kali	2 kali	1 kali			
1. Darma	159	229	—	—	—	388
2. Kadugede	308	126	—	—	—	434
3. Nusaherang	266	93	—	—	—	359
4. Ciniru	135	184	—	—	—	319
5. Hantara	195	119	—	—	—	314
6. Selajambe	85	87	—	—	—	172
7. Subang	423	—	—	—	—	423
8. Cilebak	442	—	—	—	—	442
9. Ciwaru	516	72	—	—	—	588
10. Karangkencana	416	358	—	—	—	774
11. Cibingbin	204	636	—	—	—	840
12. Cibeureum	160	462	—	—	—	622
13. Luragung	468	483	—	—	—	951
14. Cimahi	33	157	—	—	—	190
15. Cidahu	40	286	—	—	—	326
16. Kalimanggis	215	205	—	—	—	420
17. Ciawigebang	75	1 000	—	20	—	1 095
18. Cipicung	160	460	—	—	—	620
19. Lebakwangi	785	207	—	—	—	992
20. Maleber	480	146	—	—	—	626
21. Garawangi	446	189	—	—	—	635
22. Sindangagung	714	—	—	—	—	714
23. Kuningan	387	101	—	90	—	578
24. Cigugur	452	35	—	—	15	502
25. Kramatmulya	407	216	80	30	—	733
26. Jalaksana	100	185	245	—	—	530
27. Japara	288	150	—	—	—	438
28. Cilimus	940	—	—	—	—	940
29. Cigandamekar	739	—	—	—	—	739
30. Mandirancan	820	8	9	—	—	837
31. Pancalang	31	817	—	200	—	1 048
32. Pasawahan	532	18	85	—	—	635
Kabupaten Kuningan	11.421	7 029	419	340	15	19.224

Sumber : Kuningan dalam Angka Tahun 2022

Tabel 2.8 Luas Lahan Sawah Tadah Hujan Menurut Kecamatan dan Jenis Penggunaan di Kabupaten Kuningan (Hektar)

Kecamatan	Ditanami Padi			Ditanami Lainnya	Tidak Ditanami Apapun	Jumlah
	>3 kali	2 kali	1 kali			
1. Darma	—	—	53	—	—	53
2. Kadugede	—	39	—	—	—	39
3. Nusaherang	—	5	—	—	—	5
4. Ciniru	—	294	178	—	—	472
5. Hantara	—	65	254	17	—	336
6. Selajambe	—	193	176	—	—	369
7. Subang	282	101	—	70	—	453
8. Cilebak	248	197	—	70	—	515
9. Ciwaru	—	473	72	—	—	545
10. Karangkencana	—	322	—	—	—	322

Kecamatan	Ditanami Padi			Ditanami Lainnya	Tidak Ditanami Apapun	Jumlah
	>3 kali	2 kali	1 kali			
11. Cibingbin	—	—	801	—	—	801
12. Cibeureum	—	—	385	—	—	385
13. Luragung	—	46	199	25	—	270
14. Cimahi	—	916	165	—	—	1 081
15. Cidahu	—	138	62	24	—	224
16. Kalimanggis	—	—	307	—	—	307
17. Ciawigebang	—	747	93	—	—	840
18. Cipicung	—	61	45	—	—	106
19. Lebakwangi	—	3	5	—	—	8
20. Maleber	—	464	256	28	—	748
21. Garawangi	—	77	158	—	—	235
22. Sindangagung	—	—	—	—	—	—
23. Kuningan	—	—	50	—	—	50
24. Cigugur	—	—	105	—	—	105
25. Kramatmulya	—	—	—	—	—	—
26. Jalaksana	—	—	—	—	—	—
27. Japara	—	—	200	10	—	210
28. Cilimus	—	—	—	73	—	73
29. Cigandamekar	—	242	—	—	—	242
30. Mandirancan	—	—	—	—	—	—
31. Pancalang	—	—	—	—	—	—
32. Pasawahan	—	—	—	—	—	—
Kabupaten Kuningan	530	4 383	3 564	317	—	8 794

Sumber : Kuningan dalam Angka Tahun 2022

Tabel 2.9 Luas Panen dan Produksi Tanaman Pangan

No	Tanaman Pangan	Luas (Ha)	Ton
1	Padi	59.919	370.280
2	Jagung	2.477	15.837
3	Kedelai	688	1.057
4	Kacang Tanah	260	407
5	Kacang Hijau	108	111
6	Ubi Kayu	431	24.168
7	Ubi Jalar	3.931	85.001

Sumber : Kuningan dalam Angka Tahun 2022

Tabel 2.10 Produksi Tanaman Pangan Per-Wilayah

Kecamatan	Padi	Jagung	Kedelai	Kacang Tanah	Kacang Hijau	Ubi Kayu	Ubi Jalar
	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021
1. Darma	7.140	1.947	-	-	-	17 290	—
2. Kadugede	7.837	32	-	-	-	357	—
3. Nusaherang	6.576	14	-	-	-	351	15
4. Ciniru	10.225	-	74	17	-	545	—
5. Hantara	9.106	46	-	17	-	722	—
6. Selajambe	7.950	721	79	-	-	—	—
7. Subang	11.887	-	102	89	11	86	—
8. Cilebak	12.445	-	70	6	-	66	—
9. Ciwaru	18.123	-	2	-	-	—	—
10. Karangkencana	17.626	5	-	-	-	—	—
11. Cibingbin	19.244	7.081	7	31	18	582	—
12. Cibeureum	11.315	4.326	3	44	14	400	—

Kecamatan	Padi	Jagung	Kedelai	Kacang Tanah	Kacang Hijau	Ubi Kayu	Ubi Jalar
	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021
13. Luragung	16.669	-	-	-	-	152	—
14. Cimahi	10.726	328	-	55	-	95	—
15. Cidahu	6.639	-	323	63	3	1 067	—
16. Kalimanggis	7.288	-	8	13	14	136	43
17. Ciawigebang	24.464	-	-	-	47	—	16
18. Cipicung	9.095	-	-	-	-	24	1 733
19. Lebakwangi	15.853	82	-	-	-	105	—
20. Maleber	19.945	1.027	328	72	4	130	—
21. Garawangi	11.048	-	-	-	-	141	—
22. Sindangagung	11.118	-	-	-	-	—	32
23. Kuningan	7.655	-	-	-	-	356	540
24. Cigugur	9.724	86	7	-	-	623	—
25. Kramatmulya	10.360	5	-	-	-	500	5 999
26. Jalaksana	6.798	99	-	-	-	247	11 675
27. Japara	8.510	-	-	-	-	—	597
28. Cilimus	6.565	19	-	-	-	—	35 073
29. Cigandamekar	8.830	5	-	-	-	—	23 676
30. Mandirancan	16.508	-	-	-	-	—	3 226
31. Pancalang	11.846	14	-	-	-	193	2 144
32. Pasawahan	11.165	-	-	-	-	—	232
Kabupaten Kuningan	370.280	15.837	1.057	407	111	24 168	85 001

Sumber : Kuningan dalam Angka Tahun 2022

Peternakan

Peternakan merupakan kegiatan mengembangkan dan membudidayakan hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasil dari kegiatan tersebut, sehingga tujuan dari peternakan adalah mencari keuntungan dengan penerapan prinsip-prinsip manajemen pada faktor-faktor pemeliharaan hewan ternak yang telah dikombinasikan secara optimal.

Tabel 2.11 Jumlah Komoditas Ternak Kabupaten Kuningan

No	Komoditas Ternak	Jumlah (Ekor)
1	Ternak Besar	
	a. Sapi Potong	29.972
	b. Sapi Perah	7.945
	c. Kerbau	4.609
	d. Kuda	365
2	Ternak Kecil	
	a. Domba	130.114
	b. Kambing	7.603
	c. Kelinci	7.931
	d. Babi	4.140
3	Ternak Unggas	
	a. Ayam Buras	601.702
	b. Ayam Ras Petelur	1.497.135
	c. Ayam Ras Pedaging	3.685.653

No	Komoditas Ternak	Jumlah (Ekor)
d. Puyuh		131.543
e. Itik		73.609
f. Itik Manila/Entog		16.095
g. Merpati		13.951

Sumber : Kuningan Dalam Angka Tahun 2022

Tabel 2.12 Jumlah Komoditas Ternak Per-Wilayah di Kabupaten Kuningan

Kecamatan	Sapi Potong 2021	Sapi Perah 2021	Kerbau 2021	Kuda 2021	Domba 2021	Kambing 2021	Kelinci 2021	Babi 2021
1. Darma	145	28	13	73	2.503	72	331	-
2. Kadugede	151	38	20	14	2.381	10	557	-
3. Nusaherang	199	7.724	57	22	1.674	-	267	4.140
4. Ciniru	27	-	53	-	2.017	359	50	-
5. Hantara	576	-	25	-	6.559	356	298	-
6. Selajambe	746	32	7	45	5.772	227	180	-
7. Subang	376	112	9	-	10.452	9	373	-
8. Cilebak	172	-	2	-	4.736	53	197	-
9. Ciwaru	81	2	88	-	4.416	128	510	-
10. Karangkencana	95	-	44	4	1.528	101	423	-
11. Cibingbin	242	-	3	23	2.892	52	7	-
12. Cibeureum	99	-	104	-	1.186	104	492	-
13. Luragung	76	-	633	36	7.505	244	784	-
14. Cimahi	868	-	174	-	4.765	80	51	-
15. Cidahu	605	-	99	4	545	418	227	-
16. Kalimanggis	966	-	354	-	1.255	152	33	-
17. Ciawigebang	5.913	-	419	-	2.203	498	60	-
18. Cipicung	1.912	-	119	2	2.825	576	-	-
19. Lebakwangi	239	-	54	-	4.825	274	20	-
20. Maleber	54	-	14	-	1.615	245	372	-
21. Garawangi	199	-	41	53	16.441	-	383	-
22. Sindangagung	57	-	127	-	6.390	-	105	-
23. Kuningan	389	-	156	-	5.319	110	236	-
24. Cigugur	62	-	89	-	2.316	353	181	-
25. Kramatmulya	182	-	454	8	5.904	20	186	-
26. Jalaksana	6.283	-	419	5	2.852	691	60	-
27. Japara	1.067	-	466	-	2.508	31	56	-
28. Cilimus	812	-	288	-	3.173	850	66	-
29. Cigandamekar	4.366	-	132	-	2.933	496	76	-
30. Mandirancan	689	-	77	75	7.628	351	112	-
31. Pancalang	17	-	7	1	1.340	27	1.130	-
32. Pasawahan	2.307	9	62	-	1.656	716	108	-
Kabupaten Kuningan	29.972	7.945	4.609	365	130.114	7.603	7.931	4.140

Sumber : Kuningan Dalam Angka Tahun 2022

**Tabel Lanjutan Jumlah Komoditas Ternak Per-Wilayah di
Kabupaten Kuningan**

Kecamatan	Ayam Buras	Ayam Ras Petelur	Ayam Ras Pedaging	Puyuh	Itik	Entog	Merpati
	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021
1. Darma	7.362	130.000	83.700	12.101	1.700	883	906
2. Kadugede	11.645	167.085	-	4.420	3.351	726	1.264
3. Nusaherang	6.871	66.000	63.000	1.300	3.845	681	1.281
4. Ciniru	9.245	3.433	114.000	1.199	1.478	50	—
5. Hantara	12.565	11.021	431.480	-	1.381	-	—
6. Selajambe	23.842	28.539	95.400	-	4.525	299	—
7. Subang	12.224	122.180	349.758	2.800	379	78	548
8. Cilebak	35.742	44.867	627.000	3.000	3.691	434	146
9. Ciwaru	18.173	1.810	198.950	140	10.847	1.519	698
10. Karangancana	42.132	188.500	22.500	-	1.854	2.205	1.497
11. Cibingbin	12.333	122.133	121.840	6.908	1.384	104	9
12. Cibeureum	5.467	9.000	2.000	5.402	405	495	518
13. Luragung	91.644	128.517	438.975	30.736	5.033	178	341
14. Cimahi	8.624	-	53.152	-	1.534	59	—
15. Cidahu	30.102	30.000	292.095	9.196	2.012	358	2.126
16. Kalimanggis	14.434	-	34.650	8.957	500	-	—
17. Ciawigebang	14.038	16.000	46.813	9.300	3.796	188	42
18. Cipicung	12.760	7.869	-	-	292	47	—
19. Lebakwangi	8.034	180	122.500	-	633	-	287
20. Maleber	13.606	2.199	71.000	2.250	345	-	302
21. Garawangi	14.848	24.781	23.000	-	1.327	1.283	205
22. Sindangagung	6.389	176.440	26.550	4.123	2.435	-	264
23. Kuningan	13.589	57.198	135.300	5.287	1.347	1.250	—
24. Cigugur	11.869	2.150	23.602	-	60	362	398
25. Kramatmulya	7.573	-	77.000	12.209	3.386	45	238
26. Jalaksana	14.038	3.000	46.183	9.300	2.126	188	50
27. Japara	15.960	-	32.000	-	301	-	56
28. Cilimus	13.985	28.450	57.045	-	906	1.244	—
29. Cigandamekar	11.420	8.978	1.300	-	531	-	—
30. Mandirancan	13.390	36.280	60.860	-	706	801	783
31. Pancalang	17.749	80.525	11.300	200	9.397	960	1.482
32. Pasawahan	70.049	-	22.700	2.715	2.102	1.658	510
Kabupaten Kuningan	601.702	1.497.135	3.685.653	131.543	73.609	16.095	13.951

Sumber : Kuningan Dalam Angka Tahun 2022

Perikanan

Definisi perikanan menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Menurut Kuningan dalam Angka tahun 2022, Kabupaten Kuningan memiliki produksi perikanan tangkap pada tahun 2021 sebesar 355,70 ton dengan nilai

Rp.7.824,48 (dalam Juta) dengan jenis potensi perikanannya berupa ikan mas, patin, nilem, gurame, nila, sepat, dan lele. Jumlah rumah tangga perikanan tangkap paling banyak terdapat di Kecamatan Darma, Kecamatan Pasawahan, dan Kecamatan Kuningan.

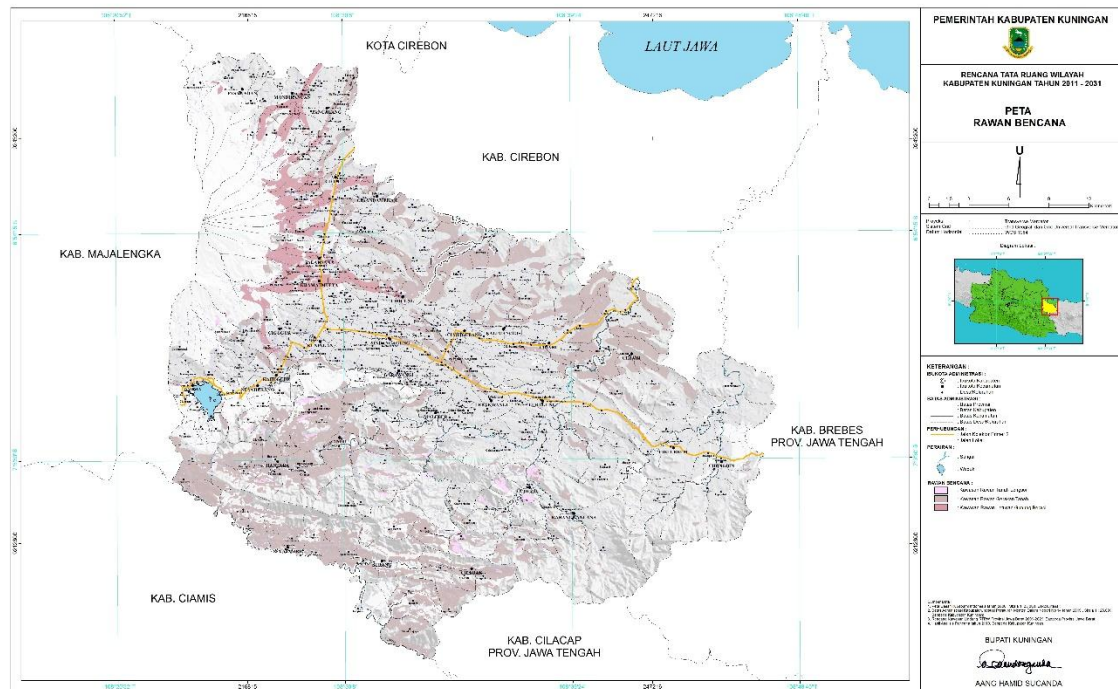
Pertambangan

Pertambangan yaitu sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengolahan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang³. Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM No. 1204 K/30/MEM/2014 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Jawa dan Bali, Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) di seluruh wilayah Kabupaten Kuningan yaitu seluas kurang lebih 46.313 hektar yang terdiri dari Blok A Bukan Logam dan Batuan, Blok B Bukan Logam dan Batuan, Blok C Bukan Logam dan Batuan, Blok D Bukan Logam dan Batuan, Blok I Mineral Logam dan Blok II Mineral Logam.

Kawasan Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana merupakan kawasan yang memiliki risiko tinggi terhadap ancaman terjadinya bencana baik akibat kondisi geografis, geologis dan demografis maupun karena ulah manusia. Bencana alam yang berpotensi terjadi di Kabupaten Kuningan diantaranya adalah gerakan tanah letusan gunung api, dan banjir.

³ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Gambar 2.5 Peta Kawasan Rawan Bencana Kabupaten Kuningan

Kerentanan Gerakan Tanah

Pengertian gerakan tanah dan longsoran mempunyai kesamaan. Gerakan tanah adalah perpindahan massa tanah atau batu pada arah tegak, mendatar atau miring dari kedudukan semula, gerakan tanah mencakup gerak rayapan dan aliran maupun longsor. Berdasarkan Peta Zona Kerawanan Gerakan Tanah, Badan Geologi Kementerian ESDM, kawasan rawan gerakan tanah di Kabupaten Kuningan terbagi menjadi kawasan rentan gerakan tanah sangat rendah, rendah, menengah, tinggi, alur aliran bahan rombakan, dan danau. Adapun luas kawasan rawan gerakan tanah di Kabupaten Kuningan dapat dilihat pada Tabel 2.13 di bawah ini.

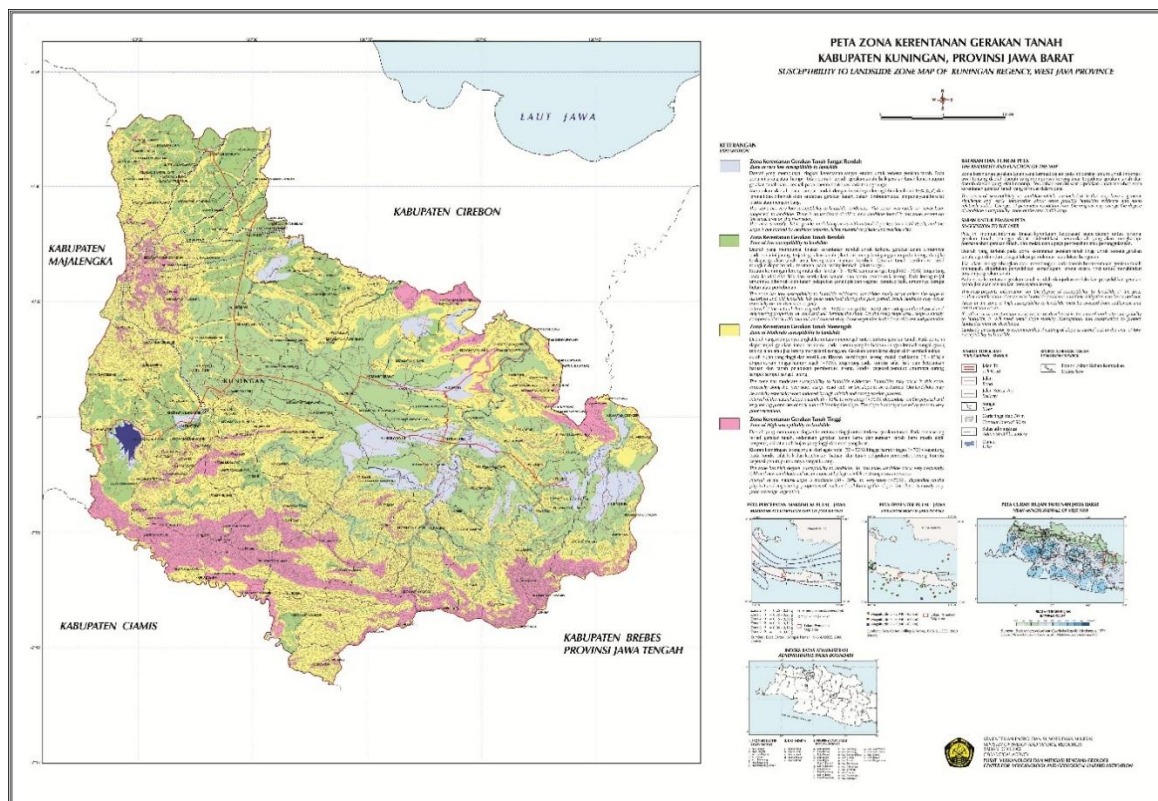
Tabel 2.13 Luasan Kerentanan Gerakan Tanah di Kabupaten Kuningan

No	Kerentanan Gerakan Tanah	Luas (Ha)	Persentase
1.	Sangat Rendah	6.843,67	5,73%
2.	Rendah	42.138,68	35,29%
3.	Menengah	53.368,90	44,69%
4.	Tinggi	15.893,92	13,31%
5.	Alur Aliran Bahan Rombakan	814,17	0,68%

No	Kerentanan Gerakan Tanah	Luas (Ha)	Persentase
6.	Danau	349,97	0,29%
Jumlah		119.409,31	100,00%

Sumber : Peta Zona Kerawanan Gerakan Tanah, Badan Geologi Kementerian ESDM

Gambar 2.6 Peta Rawan Gerakan Tanah Kabupaten Kuningan



Kawasan Rawan Letusan Gunung Berapi

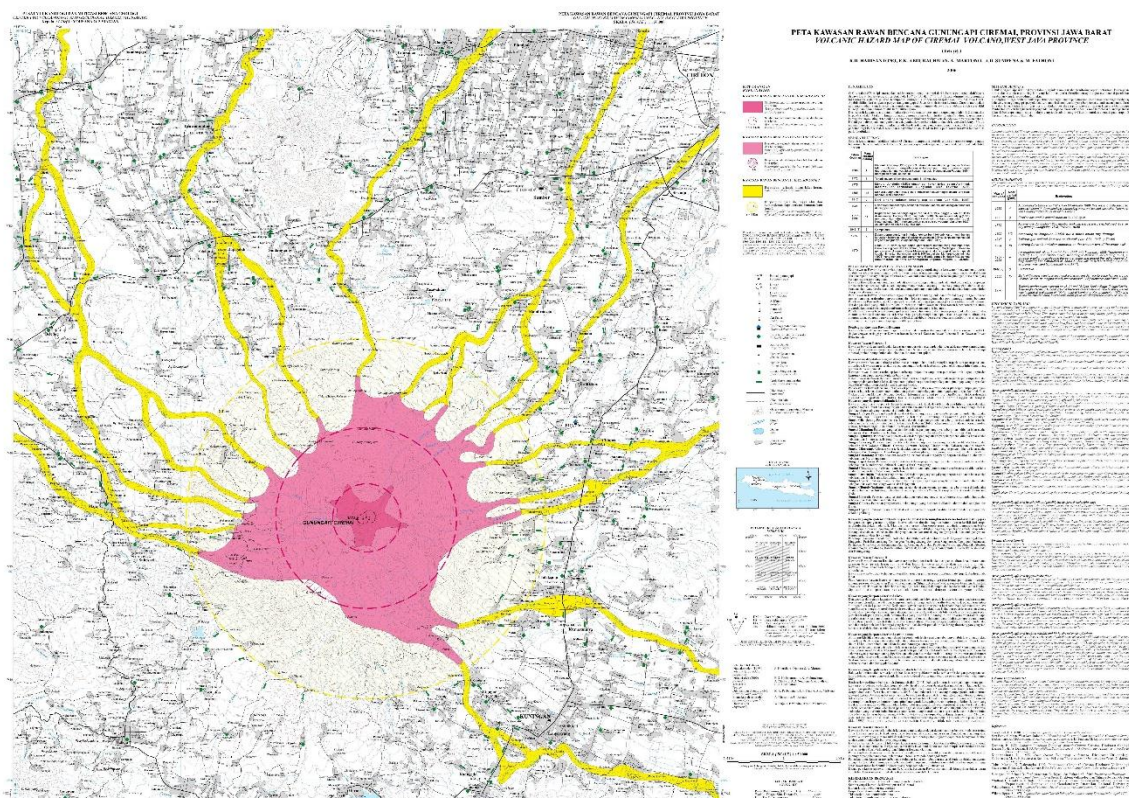
Kawasan rawan bencana letusan gunung berapi adalah kawasan yang pernah terlanda atau diidentifikasi berpotensi terlanda bahaya erupsi baik langsung (primer) maupun tidak langsung (sekunder). Keberadaan Gunung api Ciremai yang termasuk jenis gunung api aktif memiliki potensi alam sekaligus risiko bencana alam letusan gunung api (*eruption*), sehingga diperlukan pengendalian pemanfaatan ruangnya. Berdasarkan Peta Kawasan Rawan Bencana Gunung api Ciremai, luasan yang berpotensi terlanda bencana dapat disajikan pada Tabel 2.14. berikut ini.

Tabel 2.14 Luas Kawasan Rawan Bencana Letusan Gunung api Ciremai

No	Tipologi Rawan Gerakan Gunung Api	Luas (ha)
1.	Kawasan Rawan Bencana I : berpotensi terlanda aliran lahar hujan	2.503,86
2.	Kawasan Rawan Bencana II : berpotensi terlanda aliran awan panas, lava, dan lahar hujan	4.461,09
3.	Kawasan Rawan Bencana III : berpotensi selalu terancam aliran awan panas, lava, dan gas beracun	232,10
Jumlah		7.197,05

Sumber : Peta Kawasan Rawan Bencana Gunungapi Ciremai, Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi.

Gambar 2.7 Peta Kawasan Rawan Bencana Letusan Gunung Api Ciremai Kabupaten Kuningan

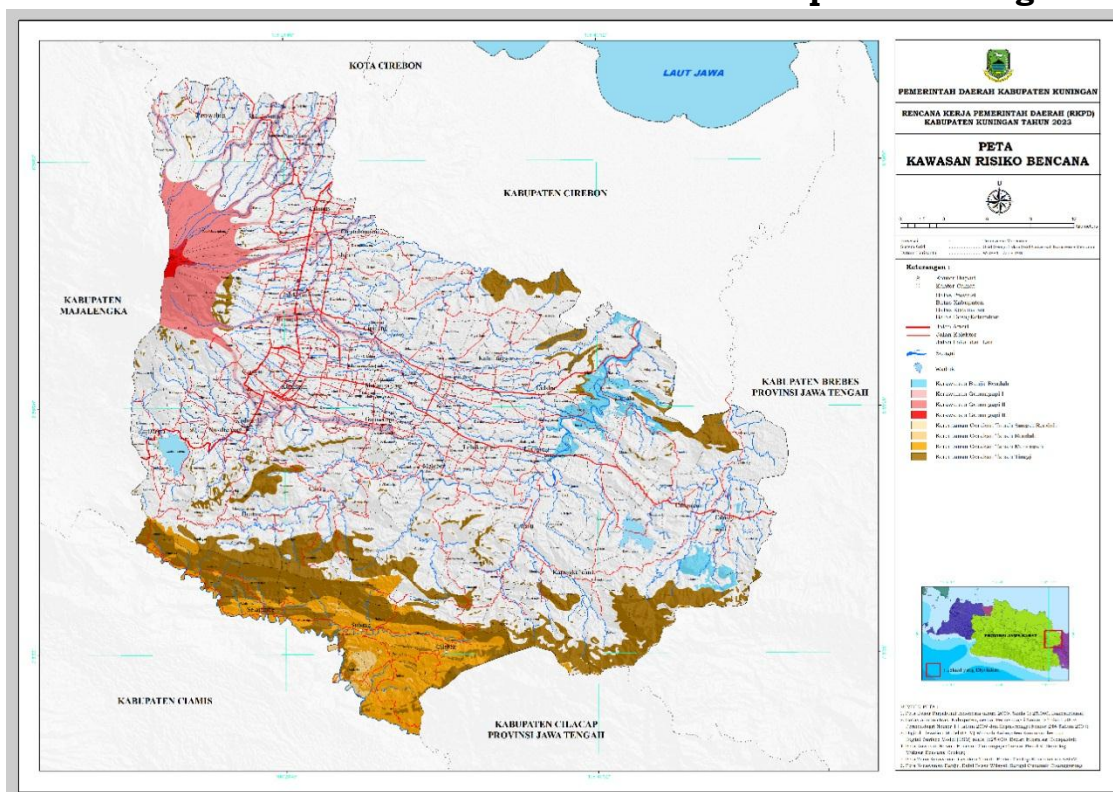


Kawasan Rawan Banjir

Banjir merupakan suatu peristiwa yang terjadi saat aliran air yang berlebihan merendam suatu daratan. Bencana banjir yang sering terjadi di Kabupaten Kuningan dipengaruhi oleh curah hujan yang tinggi serta

faktor-faktor kerusakan lingkungan seperti kurangnya daerah resapan air, pendangkalan sungai, maupun sarana dan prasarana lingkungan yang kurang berfungsi dengan baik. Berdasarkan Peta Kerawanan Banjir, Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung, lokasi potensi banjir akibat luapan air sungai berpotensi terjadi di Kecamatan Cibeureum, Kecamatan Cibingbin, Kecamatan Cidahu, Kecamatan Cimahi, dan Kecamatan Luragung seluas 2.320,80 Hektar.

Gambar 2.8 Peta Kawasan Risiko Bencana Kabupaten Kuningan



2.1.1.2 Gambaran Demografi

Kondisi demografi Kabupaten Kuningan pada tahun 2021 berdasarkan data Kuningan Dalam Angka 2022 Badan Pusat Statistik, jumlah penduduknya mencapai 1.180.391 jiwa (Laki-laki: 598.254 jiwa; perempuan: 582.137 jiwa) dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,09%. Kepadatan penduduk pada tahun 2021 tercatat 989 jiwa per km².

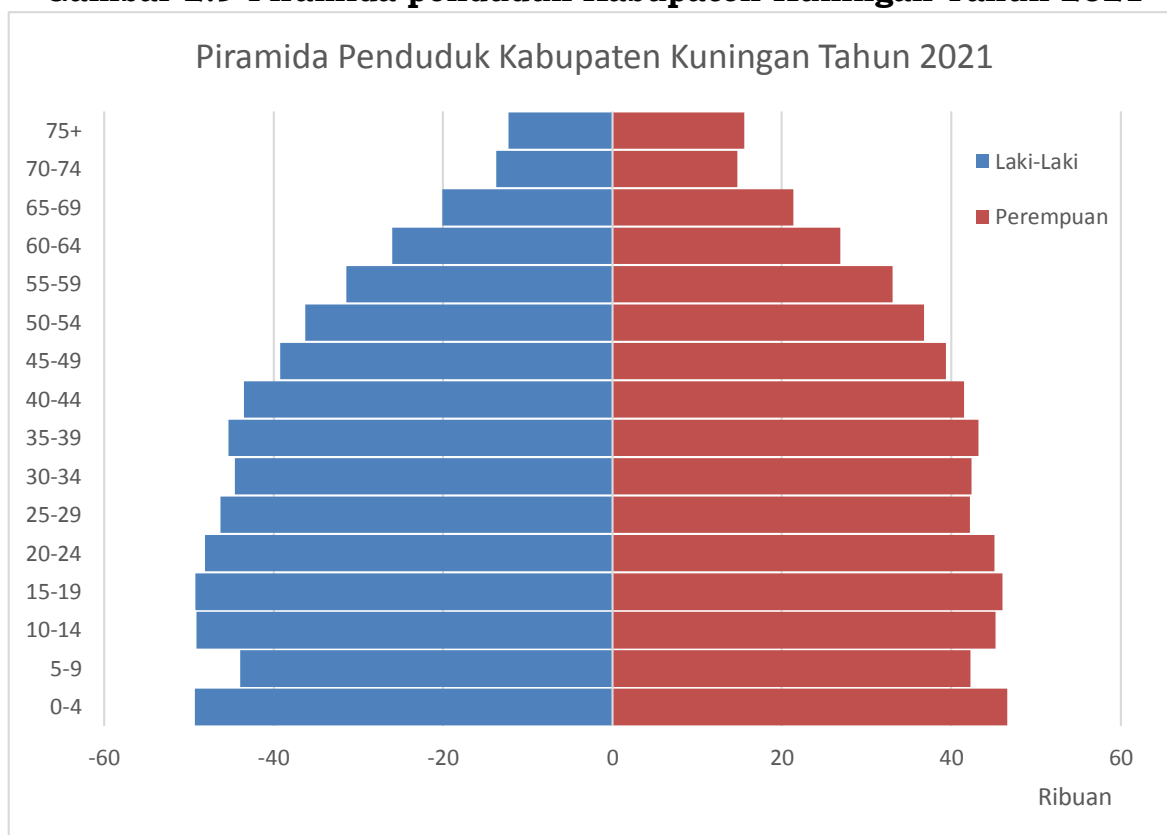
Komposisi penduduk menurut umur di Kabupaten Kuningan tergolong kedalam piramida *expansive* atau piramida penduduk muda, sesuai dengan tabel 2.15 dan Gambar 2.8 di bawah ini.

Tabel 2.15 Jumlah Penduduk Kabupaten Kuningan menurut Kelompok Umur Tahun 2019-2021

INDIKATOR	TAHUN		
	2019	2020	2021
Demografi			
1. Jumlah Penduduk	1.080.804	1.167.686	1.180.391
a. Laki-laki	543.415	592.009	598.254
b. Perempuan	537.389	575.677	582.137
c. Rasio	101,12	102,84	102,77
2. Kepadatan Penduduk (jiwa/km)	905	978	989
3. Laju Pertumbuhan Penduduk (persen)	0,59	1,17	1,09
4. Jumlah Rumah Tangga	277.287	346.114	355.273
5. Jumlah Penduduk menurut Kelompok umur (jiwa)			
a. 0-14	263.352	277.965	276.433
b. 15-64	716.626	798.083	806.294
c. 65+	100.826	91.638	97.664
6. Angka Beban Tanggungan (ABT)	50,82	46,31	46,40

Sumber: BPS Kabupaten Kuningan, 2022

Gambar 2.9 Piramida penduduk Kabupaten Kuningan Tahun 2021



Dari data diatas, pada tahun 2021 komposisi penduduk menurut kelompok umur terdiri atas kelompok penduduk umur muda (<15 tahun) berjumlah 23,80%; kelompok umur produktif (15 – 64 tahun) berjumlah 68,35% dan kelompok umur lanjut usia (>65 tahun) berjumlah 7,85%.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1 Kondisi Umum Kesejahteraan Masyarakat

Kondisi umum kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kuningan dapat dilihat dari pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Berdasarkan perhitungan IPM metode baru, selama kurun waktu tahun 2019-2021 komponen indeks pendidikan, indeks kesehatan dan pengeluaran mengalami peningkatan, sebagaimana diuraikan dalam tabel 2.16.

Tabel 2.16 Indikator Umum Kesejahteraan Kabupaten Kuningan Tahun 2019-2021

Indikator	Satuan	2019	2020	2021
UHH	Tahun	73,35	73,59	73,78
Angka Kematian Ibu	kasus per 100 ribu orang	23	27	42
Angka Kematian Bayi	kasus per 1000	4,9	4,14	2,95
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,10	12,22	12,23
Rata -Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7,38	7,57	7,80
Pengeluaran	000 Rp	9.731	9.459	9.409
Indeks Kesehatan	Poin	82,08	82,45	82,74
Indeks HLS	Poin	67,10	67,89	67,56
Indeks RLS	Poin	49,14	50,47	50,24
Indeks Pendidikan	Poin	58,21	59,18	59,97
Indeks Daya Beli	Poin	69,12	68,44	68,27
IPM	Poin	69,12	69,38	69,71

Sumber: BPS Kabupaten Kuningan, 2022

Berdasarkan hasil pencapaian pembangunan sampai dengan tahun 2021 dapat diuraikan hal-hal sebagai berikut. Pada aspek kesehatan angka kematian ibu dan kematian bayi masih cenderung stagnan pada 3 (tiga) tahun terakhir, ada kecenderungan penurunan lalu terjadi kenaikan lagi di akhir tahun walaupun sedikit. Peluang hidup penduduk Kabupaten Kuningan melalui proksi UHH, mulai tahun 2019 sampai tahun 2021 berkisar di antara 73,23 sampai dengan 73,78 tahun sejak dilahirkan, atau sejak umur nol tahun penduduk memiliki kesempatan hidup sampai dengan umur 73,78 tahun. Perkembangan angka harapan hidup penduduk dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, seiring perbaikan pola hidup dan peningkatan sarana pendukung kesehatan bagi

penduduk di Kabupaten Kuningan.

Dimensi pengetahuan yang meliputi indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Harapan lama sekolah penduduk Kabupaten Kuningan meningkat hingga mencapai kelas 3 SMA atau Diploma 1 sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2021. Peningkatan ini tidak terlepas dari kontribusi penduduk berumur 7 tahun ke atas yang masih bersekolah pada pendidikan formal maupun non formal. Semakin besar mereka yang sedang mengikuti pendidikan pada umur 7 tahun ke atas, maka akan semakin tinggi harapan lama sekolah yang akan dicapai.

Rata-rata lama sekolah penduduk berumur 25 tahun ke atas sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2021 sudah menginjak pada tingkatan kelas 1 SMP atau paling tinggi kelas 2 SMP. Kemampuan penduduk dalam capaian rata-rata lama sekolah masih berada pada tingkatan pendidikan SMP ke bawah menunjukkan kualitas penduduk dilihat dari aspek pendidikan masih relatif rendah, dengan capaian hanya sampai kelas 1 atau 2 SMP. Pengeluaran per kapita setahun Kabupaten Kuningan mencapai 9,409 juta rupiah pada tahun 2021, sebelumnya 9,459 juta rupiah pada tahun 2020 dan 9,673 juta rupiah pada tahun 2019. Kecenderungan pengeluaran per kapita menurun dari tahun 2019 ke tahun 2021 seiring kebutuhan hidup disertai perubahan harga yang cenderung meningkat pula. Sisi pengeluaran memberikan dampak kepada kemampuan individu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, terutama pada komoditi-komoditi yang sebagian besar dikonsumsi oleh penduduk keseluruhan. Pada tahun 2021 pengeluaran per kapita cenderung menurun 0,53% dari tahun sebelumnya seiring dengan pendapatan masyarakat yang menurun akibat pandemi covid-19.

2.1.2.2 Kondisi Pemerataan Ekonomi

Pemerataan ekonomi di Kabupaten Kuningan tidak terlepas dari perkembangan pertumbuhan ekonomi, inflasi, PDRB per kapita, dan indeks gini. Laju pertumbuhan ekonomi dalam kurun waktu 2019-2021 mengalami kenaikan, lebih rinci sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 2.17 Produk Domestik Regional Bruto Tahun 2019-2021

Indikator	Satuan	2019	Tahun 2020	2021
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)				
a. Nilai PDRB				
Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	Triliun Rupiah	25,09	25,62	26,92
Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)	Miliar Rupiah	16.864,15	16.879,45	17.483,02
b. PDRB Per Kapita	Juta Rupiah	15,6	14,45	18,66
c. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	6,59	0,11	3,56
d. Inflasi*	Persen	2,00	1,16	1,81
e. Indeks Gini	Persen	0,435	0,361	0,349

Sumber: Kuningan Dalam Angka 2022

*Inflasi Kota Cirebon

LPE Kabupaten Kuningan sempat mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2020 hingga mencapai 0,11 persen akibat pandemi Covid-19, namun pada tahun 2021 kembali mengalami peningkatan seiring dengan penurunan kasus Covid-19 walaupun peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah yang belum menunjukkan percepatan yang memadai. Hal ini membutuhkan kebijakan akselerasi pembangunan terutama peningkatan potensi sektor-sektor unggulan. Kabupaten Kuningan dengan basis ekonomi dari sektor pertanian, pariwisata dan jasa perdagangan serta usaha kecil dan menengah perlu memfokuskan prioritas pembangunan ke sektor-sektor tersebut, diantaranya adalah:

1. Sektor pertanian, perikanan dan kehutanan masih merupakan penyumbang terbesar perekonomian Kabupaten Kuningan, namun setiap tahun distribusinya terus menurun. Data lima tahun terakhir menunjukkan produksi dan produktivitas pertanian berfluktuasi dan cenderung menurun, hal tersebut dimungkinkan disebabkan kondisi musim maupun terus berkurangnya luas lahan yang dimiliki petani, sehingga perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :
 - a) Peningkatan sarana dan prasarana produksi pertanian;

- b) Optimalisasi lahan tadah hujan;
 - c) Optimalisasi pemanfaatan lahan;
 - d) Pemotongan rantai perdagangan saprota;
 - e) Perlindungan terhadap kegagalan panen; dan
 - f) Diversifikasi usaha pertanian.
2. Mengingat banyaknya pengurangan tenaga kerja perempuan, perlu ada upaya terobosan untuk pengembangan industri rumah tangga yang didukung dengan penyediaan sarana prasarana maupun pemasarannya serta peningkatan SDM.
 3. Pengembangan destinasi dan usaha pariwisata daerah.
 4. Peningkatan promosi pariwisata.

Hal lain yang perlu disikapi dengan bijak adalah tekanan terhadap lingkungan akibat kegiatan perekonomian. Sejalan dengan kebijakan pembangunan di Kabupaten Kuningan yang mengacu pada implementasi kabupaten konservasi maka sektor ekonomi produktif diarahkan pada kegiatan ekonomi ramah lingkungan.

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1 Fokus Pelayanan Urusan Wajib

Pendidikan

Kondisi pelayanan di bidang pendidikan di Kabupaten Kuningan, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.18 Kondisi Pelayanan Umum pada Aspek Pendidikan

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah penduduk	1.068.201	1.074.497	1.080.804	1.179.793	1.180.391
	Sekolah Dasar (SD)					
	Jumlah Sekolah					
	- Negeri	641	640	640	640	636
	- Swasta	10	14	17	18	21
	Jumlah Murid					
	- Negeri	100.645	113.012	98.058	96.628	94.674
	- Swasta	2.225	3.273	6.772	3.901	4.267

	Jumlah Guru					
	- Negeri	5.937	5.940	5.862	5.662	5.765
	- Swasta	121	160	442	210	208
	Rasio Jumlah Murid dan Guru					
	- Negeri	17	19	17	17	16,42
	- Swasta	18	20	15	19	20,51
2.	Madrasah Ibtidaiyah (MI)					
	Jumlah Sekolah	90	91	92	92	93
	Jumlah Murid	12.880	12.988	13.728	14.437	n/a
	Jumlah Guru	892	909	940	950	n/a
	Rasio	14,44	14,29	14,60	15,20	n/a
3.	Sekolah Menengah Pertama (SMP)					
	Jumlah Sekolah					
	- Negeri	79	79	79	79	79
	- Swasta	22	25	25	29	33
	Jumlah Murid					
	- Negeri	37.910	49.405	36.183	35.550	35.536
	- Swasta	3.290	4.930	8.434	4.528	4.834
	Jumlah Guru					
	- Negeri	2.019	2.081	2.065	2.018	2.054
	- Swasta	239	272	594	321	309
	Rasio Jumlah Murid dan Guru					
	- Negeri	19	24	18	18	17
	- Swasta	14	18	14	14	16
4.	Madrasah Tsanawiyah (MTs)					
	Jumlah Sekolah	63	63	63	63	63
	Jumlah Murid	18.857	18.860	18.961	19.182	n/a
	Jumlah Guru	1.338	1.324	1.366	1.373	n/a
	Rasio	14,09	14,24	13,88	13,97	n/a
5.	Sekolah Menengah Atas (SMA)					
	Jumlah Sekolah	28	28	28	27	27

	Jumlah Murid	17.591	17.591	20.425	18.494	18.815
	Jumlah Guru	935	935	1.057	964	916
	Rasio Jumlah Murid dan Guru	18,81	18,81	19,32	19,18	20,54
6.	Madrasah Aliyah (MA)					
	Jumlah Sekolah	27	28	29	29	28
	- Negeri	3				
	- Swasta	24				
	Jumlah Murid	5.192	5.726	6.013	6.358	-
	- Negeri	1.712				
	- Swasta	3.515				
	Jumlah Guru	547	614	625	638	-
	- Negeri	123				
	- Swasta	435				
	Rasio Jumlah Murid dan Guru	9,49	9,33	9,62	9,97	-
7.	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)					
	Jumlah Sekolah	45	45	45	42	41
	Jumlah Murid	21.697	21.697	27.541	27.752	27.255
	Jumlah Guru	1.195	1.195	1.509	1.515	1.466
	Rasio Jumlah Murid dan Guru	18,16	18,16	18,25	18,32	18,59

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kuningan, 2022

Kesehatan

Kondisi pelayanan di bidang kesehatan di Kabupaten Kuningan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.19 Kondisi Pelayanan Umum pada Aspek Kesehatan

No	Uraian	Tahun			
		2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Rumah Sakit	9	11	12	12
2.	Jumlah Puskesmas,	37	37	37	37
	Terdiri dari :				
	Jumlah Puskesmas tanpa perawatan	31	31	31	31
	Jumlah Puskesmas dengan Perawatan	6	6	6	6
	Jumlah Puskesmas tanpa	18	18	18	18

No	Uraian	Tahun			
		2018	2019	2020	2021
	Perawatan + PONE				
	Jumlah Puskesmas dengan Perawatan + PONE	6	6	6	6
3.	Jumlah Puskesmas Pembantu	69	69	69	69
4.	Jumlah Puskesmas Keliling	37	37	37	37
5.	Jumlah Posyandu	1.424	1.426	1.428	1.435
6.	Jumlah Poskesdes	244	255	252	251
7.	Jumlah Polindes	1	1	1	-
8.	Jumlah Balai Pengobatan	25	25	27	22
9.	Jumlah Apotek	100	97	108	129
10.	Jumlah Toko Obat	32	41	46	55
11.	Rasio Jumlah Penduduk Per Rumah Sakit	119.389	98.255	90.592	91.287
12.	Rasio Jumlah Penduduk Per Puskesmas	29.040	29.211	29.381	29.607
13.	Rasio Jumlah Penduduk Per Puskesmas Pembantu	15.572	15.664	15.755	15.876
14.	Rasio Jumlah Penduduk Per Puskesmas Keliling	29.040	29.211	29.381	29.607
15.	Rasio Jumlah Penduduk Per Poskesdes	4.404	4.238	4.314	4.364
16.	Rasio Jumlah Penduduk Per Posyandu	755	758	761	763
17.	Rasio Jumlah Penduduk Per Polindes	1.074.497	1.080.804	1.087.105	-
18.	Rasio Jumlah Penduduk Per Balai Pengobatan	42.980	43.232	40.263	49.793
19.	Rasio Jumlah Penduduk Per Toko Obat	33.578	26.361	23.633	19.917

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Kuningan, 2022

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kondisi pelayanan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Kuningan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.20 Kondisi Pelayanan Umum pada Aspek Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021
1.	Persentase Kemantapan Jalan dan Jembatan	76,50	79,063
2.	Persentase jaringan irigasi dengan kondisi baik	56,91	64
3.	Penanganan jalan & jembatan (target 1.000 Km)	259,843	282,82

No.	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021
4.	Penanganan jaringan irigasi (target 18.000 Hektar)	817	906,63
5.	Akses Air Minum Layak (%)	88,12	91,09
6.	Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Sanitasi Layak (%)	89,89	94,93
7.	Akses Air Minum Perpipaan (%)	34,65	37,01

Sumber : Dinas PUTR Kab. Kuningan, 2022

Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kondisi pelayanan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Kuningan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.21 Kondisi Pelayanan Umum pada Aspek Perumahan dan Kawasan Permukiman

No.	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021
1	Persentase rumah layak huni	95,57 %	97%
2	Jumlah dokumen perencanaan yang tersedia / tersusun	3	18
3	Lingkungan Pemukiman kumuh	0%	2,78%
4	Kawasan Kumuh	0%	0,0154%

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Kuningan, 2022

Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Kondisi pelayanan di bidang Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Kuningan, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.22 Kondisi Pelayanan Umum pada Aspek Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No.	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021
1	Tingkat penyelesaian pelanggaran ketentraman dan ketertiban (%)	100%	84%
2	Cakupan petugas perlindungan masyarakat	180 orang	109 orang
3	Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat (%)	80 %	80%
4	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran kabupaten/kota (%)	14,7	14,7
5	Tingkat Waktu tanggap (response time rate) (%)	100%	100%
6	Prosentase aparaturnya pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi (%)	52 %	52 %
7	Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran di atas 3000 – 5000 liter pada WMK (%)	14,3	14,3

Sumber : Satpol PP, BPBD Kab. Kuningan, 2022

Sosial

Kondisi pelayanan di bidang Sosial di Kabupaten Kuningan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.23 Kondisi Pelayanan Umum pada Aspek Sosial

No.	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021
1.	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	35 Panti	35 Panti
2.	Jumlah penyandang cacat baik fisik dan mental, serta lanjut usia yang tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	9.153 Orang	309 Orang
3.	PSKS yg memperoleh bantuan sosial	53.423 Orang	10.223 Orang
4.	Jumlah pelatihan /Gladi Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	60 orang	220 orang
5.	Rata-rata waktu penanganan, kedaruratan dan pemenuhan kebutuhan dasar	1 hari/24 jam	1 hari/24 jam
6.	Cakupan kajian kebutuhan pasca bencana (Jitupasna)	100 %	72,57%
7.	Cakupan pendampingan psikososial korban bencana	-	-

Sumber : Dinas Sosial, BPBD Kab. Kuningan, 2022

Tenaga Kerja

Kondisi pelayanan di bidang Tenaga Kerja di Kabupaten Kuningan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.24 Kondisi Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Aspek Tenaga Kerja

No.	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka	11,22%	14,06%
2.	Pelayanan kepesertaan Jaminan Sosial bagi Pekerja/Buruh	43,88%	76,94
3.	Pencari kerja yang ditempatkan	45,44%	55,78

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Kuningan, 2022

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kondisi pelayanan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Kuningan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.25 Kondisi Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Aspek Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No.	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021
1.	Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	3,6 %	41,00
2.	Angka melek huruf perempuan usia 15 tahun keatas	98,56 %	97,50 %
3.	Partisipasi angkatan kerja perempuan	52,03 %	45,41%
4.	Rasio KDRT	1 : 0000025	1 : 0000040
5.	Jumlah PSKS yang ditangani	53.423	10.223
6.	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	100 %	100%

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Kuningan, 2022

Pangan

Kondisi pelayanan di bidang Pangan di Kabupaten Kuningan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.26 Kondisi Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Aspek Pangan

No.	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021
1.	Regulasi ketahanan pangan	Ada	Ada
2.	Ketersediaan pangan utama	194,31 (Kg/kap/th)	274,21 (Kg/kap/th)
3.	Penanganan daerah rawan pangan	2 Desa	-
4.	Tingkat Konsumsi Pangan Lokal	35 %	40%

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Kuningan, 2022

Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pembangunan Pangan Daerah adalah regulasi terbaru sebagai dasar hukum untuk terlaksananya program dan kegiatan yang menjamin ketersediaan pangan, kemampuan produksi pangan, penuntasan kerawanan pangan dan meningkatkan supremasi pangan lokal. Adapun di Tahun 2021 terdapat Keputusan bupati Kuningan Nomor 520/KPTS.300-Diskatan/2021 tentang Penetapan tim kerja penyelenggaraan program membangun desa menata sumberdaya pangan keluarga (Bunda Menyapa) di Kabupaten Kuningan.

Pertanahan

Kondisi pelayanan di bidang Pertanahan di Kabupaten Kuningan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.27 Kondisi Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Aspek Pertanahan

No.	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021
1	Persentase Luas lahan bersertifikat	66,19 %	69,61 %

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kuningan, 2022.

Lingkungan Hidup

Kondisi pelayanan di bidang Lingkungan Hidup di Kabupaten Kuningan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.28 Kondisi Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Aspek Lingkungan Hidup

No.	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	67,04 Poin	68,91 Poin
2.	Indeks Kualitas Air	48,89 Poin	50 Poin
3.	Indeks Kualitas Udara	88,94 Poin	68,91 Poin
4.	Indeks Tutupan Lahan	57,73 Poin	68,80 Poin
5.	Penanganan Sampah	95.637 Ton (55,94%)	103.888 Ton (60,11)
6.	Pengurangan Sampah	9.976,68 Ton (16,55%)	10.120,64 Ton (18,10)

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kuningan, 2022

Sesuai Jakstrada Kabupaten Kuningan, kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Kuningan dilakukan melalui 2 kegiatan, yaitu penanganan sampah dan pengurangan sampah. Untuk penanganan sampah sampai saat ini, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuningan telah melayani 70 desa/kelurahan, dengan 21 armada dan 150 petugas kebersihan. Target penanganan yang ditetapkan dalam Jakstrada/RPJMD sebesar 59,57% dapat dipenuhi jika hingga akhir tahun 2023 adanya tambahan armada angkutan sampah *Dumtruck* 10 unit dan armada *Armroll* sebanyak 10 unit serta adanya penambahan untuk petugas kebersihan.

Kabupaten Kuningan tidak akan mampu menangani sampah dan melayani seluruh desa/kelurahan, oleh karenanya program penanganan sampah didampingi dengan program pengurangan sampah yang lebih banyak memberdayakan serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah yang benar. Program pengurangan sampah dilakukan dengan cara sosialisasi penanganan sampah dimulai dari

tingkat rumah tangga, bekerja sama dengan TP PKK. Selama Tahun 2021 telah dilaksanakan sosialisasi pengurangan sampah dengan memberikan pelatihan pemanfaatan sampah menjadi kompos atau ternak maggot di 3 desa/kelurahan. Selain itu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penanganan sampah ditingkat desa, hingga Tahun 2021 telah dibangun TPS3R sebanyak 31 unit. Penanganan sampah juga dilakukan dengan mendorong desa untuk membangun bank sampah, hingga 2021 sudah terbentuk 11 unit bank sampah desa yang secara rutin mendapat pembinaan dari Dinas Lingkungan Hidup.

Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kondisi pelayanan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Kuningan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.29 Kondisi Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Aspek Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No.	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021
1.	Kepemilikan KTP	99,50 %	98,53 %
2.	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	82,97 %	84,21 %
3.	Kepemilikan Kartu Keluarga	89,40 %	94,60 %
4.	Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	30,69 %	54,68 %
5.	Kepemilikan Akta Perkawinan	0,08 %	44,88 %
6.	Kepemilikan Akta Perceraian	100 %	100 %
7.	Kepemilikan Akta Kematian	37,86 %	57,89 %
8.	Penduduk Datang	10.246	7.735
9.	Penduduk Pindah	12.935	10.285
10.	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Ya	Ya

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kuningan, 2022

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kondisi pelayanan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Kuningan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.30 Kondisi Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Aspek Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No.	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021
1.	PKK aktif	100 %	100 %
2.	Posyandu	100 %	100 %

No.	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021
3.	Jumlah Desa Mandiri, Desa Maju, Desa Berkembang, dan Desa Tertinggal	Mandiri : 22 Maju : 115 Berkembang : 220 Tertinggal : 4 289 Desa	Mandiri : 35 Maju : 161 Berkembang : 165 Tertinggal : 0 295 Desa
4.	Jumlah usaha ekonomi masyarakat yang berdaya		
5.	Prosentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	100%	100 %
6.	Prosentase Desa Tertinggal	1,1%	0%
7.	Prosentase Status Desa mandiri	6 %	9,6 %

Sumber : Dinas Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Kuningan, 2022

Pada Tahun 2021 Lembaga Kemasyarakatan yang aktif terdiri dari 375 Karang taruna dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kondisi pelayanan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Kuningan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.31 Kondisi Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Aspek Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No.	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021
1.	Prevalensi Pemakaian Kontraserpsi/Contraceptive Prevalance (CPR)	71,56 %	71,60 %
2.	Prosentase Pasangan Usia Subur (PUS) ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmetneed)	13,01 %	17,49 %
3.	Rata-Rata Usia Kawin Pertama (UKP) Wanita	18,02 %	19,00 %

Sumber : Dinas PPKBPP&PA Kab. Kuningan, 2022

Perhubungan

Kondisi pelayanan di bidang Perhubungan di Kabupaten Kuningan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.32 Kondisi Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Aspek Perhubungan

No.	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Ket
1.	Jumlah Prasarana Perhubungan:			
	- PJU	8.748 Titik	9.558 Titik	
	- Terminal	10	10	
	- Terminal Penumpang Wisata Terpadu	1	1	Kec. Pasawahan
2.	Jumlah Ketersediaan Fasilitas dan Perlengkapan Jalan :			

No.	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Ket
-	Traffic light	9 Titik	10 Titik	
-	Warning Light	38 Unit	38 Unit	
-	Rambu Lalulitas	2.939 Buah	2.939 Buah	
-	Marka Zoss	9 Lokasi	9 Lokasi	
-	Cermin Tikungan	0	0	
-	Velican Crossing	0	0	
-	ATCS	1 Paket	1 Paket	
3.	Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji Yang melaksanakan Uji Berkala	32.561 Unit	42.124 Unit	

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Kuningan, 2022

Komunikasi dan Informatika

Kondisi pelayanan di bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Kuningan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.33 Kondisi Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Aspek Komunikasi dan Informatika

No.	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021
1.	Website milik pemerintah daerah	Ada	Ada
2.	Pameran/expo	Tidak Ada	Tidak Ada
3.	Prosentase jaringan komunikasi dan informatika yang terintegrasi	100 %	75%
4.	Jumlah informasi publik yang dipublikasikan	15	10 Buah
5.	Jumlah kelompok informasi masyarakat	1.165	1.165
6.	Jumlah BTS	283	318
	Jumlah Operator	19	19
7.	Sistem Informasi Manajemen Pemda	9	9

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kuningan, 2022

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, bahwa kesadaran masyarakat untuk memperoleh pengetahuan melalui penggunaan dan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi semakin tinggi. Di beberapa daerah di Indonesia, terdapat beraneka ragam komunitas/kelompok yang memiliki fungsi KIM, yaitu dengan memberdayakan masyarakat lokal untuk memperoleh/mengakses informasi dan teknologi komunikasi. Masing-masing daerah perlu mengenal dan memetakan potensi, kelompok masyarakat yang ada. Caranya adalah dengan melakukan inventarisasi setiap potensi kelompok yang ada di setiap daerah. Setelah itu dikategorikan untuk memudahkan dalam melakukan pengembangan dan pemberdayaan kelompok tersebut, misalnya : kelompok

wanita, pemuda, pelajar, wirausaha dan lain-lain.

KIM berperan sebagai media forum, yaitu kelompok masyarakat yang memiliki aktivitas mengikuti informasi dari berbagai sumber, kemudian mendiskusikan hasil monitoring, dan menyalurkan informasi kepada masyarakat sekitarnya dan lebih lanjut mengimplentasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam tahap berikutnya, setelah ada akses infrastruktur teknologi komunikasi dan informasi, maka KIM diarahkan untuk mendayagunakan teknologi komunikasi dan informasi tersebut.

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Kondisi pelayanan di bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di Kabupaten Kuningan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.34 Kondisi Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Aspek Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

No.	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021
1.	Koperasi aktif	460 koperasi	707 koperasi
2.	Jumlah Usaha Menengah dan Kecil	90 umk	150 umk

Sumber : Dinas Koperasi,UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kuningan, 2022

Penanaman Modal

Kondisi pelayanan di bidang Penanaman Modal di Kabupaten Kuningan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.35 Kondisi Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Aspek Penanaman Modal

No.	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021
1.	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	251.512.406.831	1.800.363.869.952
2.	Jumlah nilai investasi berskala nasional (milyar rupiah)	251.512.406.831	1.800.363.869.952
3.	Daya serap tenaga kerja (orang)	4.415	22.149

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Kuningan, 2022

Pada Tahun 2021 terjadi penurunan nilai realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri menjadi sebesar 1,8 triliun, hal tersebut terdapat pada sektor

Properti dan perdagangan. Rasio daya serap tenaga kerja di Kabupaten Kuningan adalah per satu miliar investasi menyerap tenaga kerja sebanyak empat orang.

Kepemudaan dan Olahraga

Kondisi pelayanan di bidang Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Kuningan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.36 Kondisi Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Aspek Kepemudaan dan Olahraga

No.	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021
1	Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)	2 unit	1 Unit
2	Lapangan olahraga	1.088 unit	1.125 Unit

Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kab. Kuningan, 2022

Pada Tahun 2021 salah satu Gelanggang/Balai Remaja yang dimiliki Kabupaten Kuningan berkurang satu, dikarenakan lahan gelanggang tersebut dipakai untuk perluasan Taman Kota Kuningan.

Statistik

Kondisi pelayanan di bidang Statistik di Kabupaten Kuningan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.37 Kondisi Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Aspek Statistik

No.	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021
1.	Buku "kabupaten dalam angka"	Ada edisi Tahunan	Ada edisi tahunan
2.	Buku "PDRB kabupaten"	Ada edisi Tahunan	-
3.	Jumlah dokumen data/informasi/statistik daerah	33 Dokumen	55 Dokumen

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kuningan, 2022

Persandian

Kondisi pelayanan di bidang Persandian di Kabupaten Kuningan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.38 Kondisi Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Aspek Persandian

No.	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021
1.	Prosentase informasi daerah yang wajib diamankan dengan persandian	0,1 %	27,8%

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kuningan, 2022

Pada Tahun 2021 Prosentase informasi daerah yang wajib diamankan dengan persandian sebesar 27,8, hal ini dikarenakan Target untuk Penerbitan dan Penerapan Sertifikat Elektronik / Tanda Tangan Elektronik yang diterapkan untuk Keamanan Informasi Daerah dalam Tata Naskah Dinas Pemerintah Daerah di targetkan sebanyak 600 Pejabat Eselon dan Baru bisa diterbitkan pada Tahun 2021, Sertifikat Elektronik/Tanda Tangan Elektroniknya sebanyak 167 orang pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan.

Adapun Dasar Hukum untuk informasi daerah yang wajib diamankan dengan persandian yaitu Peraturan Badan Siber Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dan Standar Teknis Dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan.

Kebudayaan

Kondisi pelayanan di bidang Kebudayaan di Kabupaten Kuningan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.39 Kondisi Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Aspek Kebudayaan

No.	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021
1.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	8 kegiatan	12 Kegiatan
2.	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	3 sarana	3 Sarana
3.	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	127	127

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kuningan, 2022

Perpustakaan

Kondisi pelayanan di bidang Perpustakaan di Kabupaten Kuningan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.40 Kondisi Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Aspek Perpustakaan

No.	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021
1.	Koleksi Buku di Perpustakaan	22.802 Judul Buku	24.742 Judul Buku
2.	Pengunjung perpustakaan	3.032 Orang	4.290 Orang

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kuningan, 2022

Kearsipan

Kondisi pelayanan di bidang Kearsipan di Kabupaten Kuningan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.41 Kondisi Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Aspek Kearsipan

No.	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021
1.	Penerapan pengelolaan arsip secara baku	100 %	80%
2.	Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan	1 kegiatan	1 Kegiatan

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kuningan, 2022

2.1.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan

Pariwisata

Kondisi pelayanan di bidang Pariwisata di Kabupaten Kuningan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.42 Kondisi Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Aspek Pariwisata

No.	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021
1	Kunjungan wisata	2.480.718 Orang	2.668.442 Orang

Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kab. Kuningan, 2022

Pertanian

Kondisi pelayanan di bidang Pertanian di Kabupaten Kuningan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.43 Kondisi Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Aspek Pertanian

No.	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021
1	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (Ton/Ha):		
	- Padi	61,90	62,56
	- Jagung	58,77	56,62
	- Kedelai	10,66	15,36
	- Kacang Tanah	17,52	15,65
	- Kacang Hijau	10,38	10,28
	- Ubi Kayu	177,27	167,72
	- Ubi Jalar	215,84	216,23
2	Produksi Daging, Susu dan Telur : Meningkatnya Produksi Daging (Ton)		
	- Sapi	1.495	2.193
	- Domba	1.396	1.375
	- Ayam Buras	491	560
	- Ayam Ras	25.804	28.991
	- Itik	53	56
	Meningkatnya Produksi Telur (Ton)		
	- Ayam Buras	1.132	1.290
	- Ayam Ras Petelur	17.143	17.120
	- Itik	431	443
	- Produksi Susu	19.262	19780
3	Pertumbuhan Populasi Ternak (ekor):		
	- Sapi Perah	7.737	7.945
	- Sapi Potong	29.533	29.972
	- Domba	125.652	130.114
	- Kambing	7.489	7.603
	- Ayam Ras Petelur	1.499.167	1.497.136
	- Ayam Ras Pedaging	3.280.516	3.685.653
4	Tingkat Kemampuan Kelompok (%):		
	- Kelompok Pemula	967	1.028
	- Kelompok Lanjut	1.186	1.240
	- Kelompok Madya	114	103
	- Kelompok Utama	2	3
5	Cakupan Binaan Kelompok Tani (%)	27,82	30,87
6	Produktivitas Tanaman Hortikultura (Kw/Ha) :		
	- Bawang Merah	102,11	98
	- Tomat	178,83	194,86
	- Cabe Besar	98,00	63,76
	- Cabe rawit	115,85	70,64
	- Mangga	246.464	304.330
	- Rambutan	14.631	31.150
	- Durian	35.284	53.470

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Kuningan, 2022

Perdagangan

Kondisi pelayanan di bidang Perdagangan di Kabupaten Kuningan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.44 Kondisi Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Aspek Perdagangan

No.	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021
1.	Ekspor Bersih Perdagangan	\$4.686.394	\$ 4.305.627
2.	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	100%	100%
3.	Daerah Tertib Ukur	3.924	5.300

Sumber : Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kuningan, 2022

Perindustrian

Kondisi pelayanan di bidang Perindustrian di Kabupaten Kuningan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.45 Kondisi Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Aspek Perindustrian

No.	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021
1.	Pertumbuhan Industri	9,20 %	9,25%
2.	Penerapan Standar Industri Hijau dan Penerapan Industri 4.0	20 Perusahaan	40 Perusahaan
3.	Peningkatan daya saing untuk produk Home Industri	30 IKM	130 IKM

Sumber : Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kuningan, 2022

Pada Tahun 2021 terdapat 40 Perusahaan yang sudah menerapkan standar industri hijau dan penerapan industri 4.0 dari jumlah total 50 industri yang terdaftar. Pertumbuhan industri selama kurun waktu satu tahun di tahun 2020 terdapat 4 industri baru (yang melalui rekomendasi dinas) dan pada tahun 2021 terdapat 2 industri baru.

Transmigrasi

Kondisi pelayanan di bidang Transmigrasi di Kabupaten Kuningan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.46 Kondisi Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Aspek Transmigrasi

No.	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021
1	Prosentase Transmigran Swakarsa	-	-

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Kuningan, 2022

Kelautan dan Perikanan

Kondisi pelayanan di bidang Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Kuningan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.47 Kondisi Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Aspek Kelautan dan Perikanan

No.	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021
1	Pencapaian Target Produksi perikanan	107,77%	98,8%
2	Tingkat Konsumsi ikan per produksi ikan	130,19%	118,70%

Sumber : Dinas Perikanan dan Peternakan Kab. Kuningan, 2022

Pada Tahun 2021 pencapaian produksi perikanan di Kabupaten Kuningan sebesar 14.341,9 Ton. Untuk tingkat konsumsi ikan per produksi ikan pada Tahun 2021 sebesar 25 Kg/Kapita/Tahun.

2.1.3.3 Fokus Layanan Penunjang Urusan

Perencanaan Pembangunan

Kondisi pelayanan di bidang Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Kuningan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.48 Kondisi Pelayanan Penunjang Urusan Aspek Perencanaan Pembangunan

No.	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021
1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	Ada	Ada
2.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA	Ada	Ada
3.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	Ada	Ada
4.	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	98 %	100 %
5.	Sistim Informasi Manajemen Pemda	9	9
6.	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	Ada	Ada

Sumber : BAPPEDA Kab. Kuningan, 2022

Keuangan

Kondisi pelayanan di bidang Keuangan di Kabupaten Kuningan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.49 Kondisi Pelayanan Penunjang Usan Aspek Keuangan

No.	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021
1.	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP
2.	Perbandingan Belanja Langsung dengan Belanja Tidak Langsung:		
	- Jml Belanja Langsung/Total APBD	38 %	40,2 %
	- Jml Belanja Tidak Langsung/Total APBD	62 %	59,8 %
3.	Penetapan APBD	Tepat Waktu 27 Desember 2019	Tepat Waktu 28 Desember 2020
4.	Prosentase SILPA	1,095 %	1,80%

Sumber : BPKAD Kab. Kuningan, 2022

Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Kondisi pelayanan di bidang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan di Kabupaten Kuningan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.50 Kondisi Pelayanan Penunjang Urusan Aspek Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

No.	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja	
		2020	2021
1.	Jumlah Pegawai yang difasilitasi (Org)	9	64
2.	Jumlah Aparatur yang terbina (%)	100	100
3.	Tingkat Pelayanan Pemerintahan dan Masyarakat (%)	10.528	10.575
4.	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat (%)	100	76,51
5.	Prosentase Pegawai yang dilayani (%)	100	100
6.	Prosentase Layanan (%)	100	100
7.	Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur (Kegiatan)	1	1
8.	Jumlah Kegiatan Pemilihan Pegawai Teladan (Kegiatan)	1	0

Sumber: BKPSDM Kab. Kuningan, 2022

Pengawasan

Kondisi pelayanan di bidang Pengawasan di Kabupaten Kuningan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.51 Kondisi Pelayanan Penunjang Urusan Aspek Pengawasan

No.	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021
1.	Prosentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI yang Ditindaklanjuti	84,17%	82,31%
2.	Prosentase Pelanggaran Pegawai	0,12%	0,09%
3.	Jumlah Temuan BPK	293	315

Sumber : Inspektorat dan BKPSDM Kab. Kuningan, 2022

Pada Tahun 2021 terjadi penurunan Prosentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI yang Ditindaklanjuti karena terdapat beberapa pemeriksaan baru yang dilakukan oleh BPK dan penambahan beberapa temuan BPK.

Sekretariat Dewan

Kondisi pelayanan di Sekretariat Dewan Kabupaten Kuningan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.52 Kondisi Pelayanan Penunjang Urusan Aspek Sekretariat Dewan

No.	Uraian	Tahun			
		2018	2019	2020	2021
1.	Tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota	Ada	Ada	Ada	Ada
2.	Tersusun dan terintegrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan fungsi anggaran dalam dokumen rencana lima tahunan (RPJM) maupun dokumen rencana tahunan	Ada	Ada	Ada	Ada
3.	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran kedalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran setwan DPRD	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Sekretariat DPRD Kab. Kuningan, 2022

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan pembangunan daerah sesuai dengan potensi, kekhasan dan unggulan daerah. Kondisi umum aspek daya saing daerah sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan daerah. Gambaran pencapaian kinerja selama tahun 2020-2021 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.53 Kondisi Aspek Daya Saing Daerah

No.	Aspek Daya Saing Daerah	Satuan	Tahun 2020	Tahun 2021
1.	Persentase lembaga keagamaan yang dibina & difasilitasi	Persen	20	35
2.	Persentase lembaga pendidikan keagamaan yang dibina & difasilitasi	Persen	20	35
3.	Prestasi olahraga tingkat Regional (Porda)	Peringkat	-	-
4.	Prestasi olahraga tingkat Regional (Popda)	Peringkat	-	-
5.	Nilai tukar petani (NTP)	Poin	101,53	96,45
6.	Desa agro pinunjul	Desa	42	42
7.	Jumlah sentra unggulan pertanian	Desa	14	5
8.	Desa pinunjul tematik	Desa	Industri: 18 UKM: 3 Koperasi: 3 Agro: 13 Pendidikan: 7 Budaya: 1 Kuliner Tradisional: 0 Wisata: 11	Industri: 18 UKM: 3 Koperasi: 3 Agro: 25 Pendidikan: 7 Budaya: 1 Kuliner Tradisional: 0 Wisata: 19
9.	Desa wisata	Kajian desa wisata	12	8
10.	Indeks desa membangun	Desa	Mandiri: 22 Maju: 115 Berkembang: 220 Tertinggal: 4	Mandiri: 35 Maju: 161 Berkembang: 165 Tertinggal: 0
11.	Cakupan pelayanan penyelenggaraan penanggulangan bencana	Persen	100%	100%
12.	Kemantapan Jalan dan Jembatan	Persen	76,50	79,063
13.	Kondisi Baik Irigasi	Persen	56,91	60,93
14.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	67,00	68,91
15.	Indeks kepuasan layanan masyarakat	Persen	80,04	76,51
16.	Indeks toleransi beragama	Poin	67,46	72,39
17.	Indeks gotong royong (aksi bersama)	Poin	-	-

Tabel 2.54 Capaian Indikator Makro Kabupaten Kuningan Tahun 2019 – 2021

No.	Indikator	Satuan	2019		2020		2021	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Umur Harapan Hidup	Tahun	73,23	73,35	73,28	73,59	73,37	73,78
2	HLS/ Harapan Lama Sekolah	Tahun	12.08	12,1	12,1	12,22	12,14	12,23
3	RLS/ Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,37	7,38	7,41	7,57	7,46	7.80
4	Pengeluaran Per Kapita	Rp. 000	9.731	9.731	8.967-9.003	9.459	9.042-9.092	9.409
5	Indeks Kesehatan	Point	81,89	82,08	81,97	82,45	82,23	82,74
6	Indeks HLS	Poin	67	67	67,22	67,89	67,56	67,56
7	Indeks RLS	Poin	49	49	49,4	50,47	50,24	50,24
8	Indeks Pendidikan	Poin	58,12	58,21	58,31	59,18	60,41	59,97
9	Indeks Pengeluaran	Poin	69,31	69,12	66,12-66,39	68,44	66,22-66,59	68,27
10	IPM	Poin	69,10	69,12	68,39	69,38	69,26	69.71
11	Prosentase Kemiskinan	Persen	11,41	11,41	13,58	12,82	13,38	13.10
12	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	9,83	9,83	15,25**	11,22	13,88	11,68
13	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	6,56	6,56	-2,42-1,51	0,09	1,75-2,65	3,56
14	Indeks Gini Rasio	Poin	0,34	0,34	<0,38	0,361	<0,38	0,349
15	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Persen	0,59	0,59	0,60	1,17	0,60	1,09

Sumber: BAPPEDA Kab. Kuningan, BPS Kab. Kuningan, 2022

Berdasarkan tabel diatas, terdapat beberapa indikator makro yang pada tahun 2021 tidak memenuhi target yaitu Laju pertumbuhan Penduduk yang ditargetkan mencapai 0,6 persen namun realisasinya pada tahun 2021 hanya mencapai 1,09. Hal tersebut merupakan dampak dari adanya

pandemi Covid-19 yang menyebabkan terjadinya migrasi penduduk Kuningan yang berada di luar kota karena kehilangan pekerjaan sehingga angka pertumbuhan penduduk tinggi. Walaupun pada tahun 2021 ini angka LPP lebih rendah dari tahun sebelumnya namun tetap diatas target yang ditetapkan.

Walaupun IPM, TPT, LPE, Indeks Gini dan LPP mengalami penurunan pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19, namun penurunan tersebut masih diatas angka yang ditargetkan pada RPJMD 2018-2023. Seiring dengan penurunan kasus covid-19 dan pemulihan pasca pandemic, indikator tersebut kembali mengalami peningkatan pada tahun 2021.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Kuningan telah menetapkan 5 (lima) misi yang akan dicapai. Pencapaian misi-misi ini perlu untuk selalu dievaluasi sebagai masukan bagi perbaikan pelaksanaan pembangunan. Evaluasi misi pembangunan dilakukan melalui evaluasi terhadap berbagai indikator RPJMD Tahun 2018-2023, evaluasi terhadap pelaksanaan program APBD Tahun 2021 dan evaluasi terhadap capaian indikator. Berdasarkan pada hasil evaluasi yang telah dilakukan, maka pencapaian misi pembangunan Kabupaten Kuningan dapat diuraikan sebagai berikut.

2.2.1 Evaluasi Pelaksanaan Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Kuningan

Kegiatan Verifikasi dan Validasi (Verval) Padu Padan DTKS dan SDGs Desa dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui gambaran kondisi terkini rumah tangga miskin pada 25 desa lokus penanggulangan ekstrem Kabupaten Kuningan, untuk kemudian dilakukan pendataan terkait kebutuhan bantuan dari masing-masing rumah tangga miskin berdasarkan DTKS, yang dikelompokkan berdasarkan tiga pilar penanggulangan kemiskinan ekstrem, yaitu mengurangi pengeluaran, meningkatkan pendapatan ekonomi, dan meminimalkan wilayah kantong kemiskinan. Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi padu padan DTKS

dan SDGs Desa pada 25 desa lokus penanggulangan kemiskinan ekstrem Kabupaten Kuningan Tahun 2021, diketahui bahwa jumlah kebutuhan bantuan tertinggi adalah bantuan pangan dan tunai, yaitu tercatat sebanyak 4.590 rumah tangga DTKS. Kategori bantuan lainnya yang dianggap paling banyak dibutuhkan oleh rumah tangga miskin di 25 desa lokus penanggulangan kemiskinan eskترم Kabupaten Kuningan adalah bantuan modal usaha, yaitu tercatat dibutuhkan oleh sebanyak 4.187 rumah tangga DTKS. Sementara itu, tercatat sebanyak 1.184 rumah tangga DTKS dianggap membutuhkan perbaikan DTKS, karena ditemukan telah meninggal, pindah, tidak ditemukan datanya di desa terkait, atau ditemukan sebagai data ganda.

Tabel 2.55 Rekapitulasi Data Hasil Verval Padu Padan DTKS dan SDGs Desa pada 25 Desa Lokus Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Kuningan Tahun 2021

KECAMATAN	DESA	JUMLAH KK	JUMLAH KK DTKS	JUMLAH DESIL 1	JUMLAH DESIL 2	KEBUTUHAN BANTUAN													
						Perbaikan Adminstrasi DTKS	Perbaikan Adminstrasi PKH	Perbaikan Adminstrasi BPNT	Bantuan Pertanian	Bantuan Ternak	Bantuan Modal Usaha	Bantuan Pelatihan Kerja	Rutillahu	Bantuan Jamban Sehat/ Air Bersih	Bantuan ODGJ	Bantuan Alat Bantu Disabilitas	Bantuan Biaya Kesehatan	Bantuan Pangan dan Tunai	Bantuan Biaya Pendidikan
KEC CIBINGBIN	DESA CIANGIR	1232	720	178	317	112	1	2	420	16	407	19	42	0	2	0	35	33	71
	DESA CIBINGBIN	3981	1217	438	636	52	0	0	0	24	6	5	22	0	1	1	10	6	2
	DESA CIPONDOK	1415	623	177	321	122	0	0	0	237	112	0	22	0	0	7	119	5	89
	DESA CISAAT	450	219	14	5	22	0	6	16	72	26	3	8	1	2	0	51	74	62
	DESA SUKAHARJA	1140	524	237	69	0	0	232	0	351	10	2	1	0	1	0	5	233	111
KEC CIDAHU	DESA CIDAHU	1126	629	103	133	114	53	146	62	325	450	3	87	1	8	19	555	554	269
	DESA DATAR	1126	751	135	238	137	0	0	63	1	601	254	229	7	2	10	138	257	232
	DESA JATIMULYA	1337	707	219	261	109	0	0	43	0	554	247	3	0	0	0	7	0	185
	DESA KERTAWINANG UN	927	468	13	94	61	120	230	1	405	1	0	61	0	4	2	4	407	391
	DESA NANGGELA	1434	727	134	253	98	111	180	6	91	206	3	70	45	13	7	55	597	297
KEC CIMAHI	DESA CIMAHI	1007	467	9	52	40	2	9	24	38	276	0	160	95	2	0	92	124	273
	DESA CIMULYA	583	277	7	36	41	10	10	251	11	187	0	82	33	10	5	8	95	130
	DESA GUNUNGSARI	922	502	18	65	21	0	0	194	108	145	0	150	0	3	10	145	80	165
	DESA MARGAMUKTI	1951	977	356	456	112	0	0	65	53	63	4	0	0	0	4	2	469	155
	DESA MEKARJAYA	902	406	0	18	0	129	130	10	27	340	1	9	0	0	6	36	15	13
KEC DARMA	DESA CAGEUR	587	347	5	29	27	0	0	41	0	32	31	13	0	0	1	5	29	127
	DESA KARANGSARI	768	406	5	56	0	99	111	0	26	13	0	0	0	0	0	0	61	0
	DESA PANINGGARAN	586	339	38	103	0	0	0	0	0	155	0	9	1	0	4	7	185	166
	DESA SITUSARI	466	240	6	35	16	2	2	36	3	65	0	17	13	9	9	52	86	149
	DESA TUGUMULYA	713	405	7	68	8	1	1	76	122	104	140	28	0	2	6	40	108	102
KEC KALIMANGGIS	DESA CIPANCUR	1588	467	73	394	5	1	12	144	0	8	8	16	0	0	6	113	34	252

RKPD Kabupaten Kuningan Tahun 2023



KECAMATAN	DESA	JUMLAH KK	JUMLAH KK DTKS	JUMLAH DESIL 1	JUMLAH DESIL 2	KEBUTUHAN BANTUAN													
						Perbaikan Adminstra si DTKS	Perbaikan Adminstra si PKH	Perbaikan Adminstras i BPNT	Bantuan Pertanian	Bantuan Ternak	Bantuan Modal Usaha	Bantuan Pelatihan Kerja	Rutillahu	Bantuan Jamban Sehat/ Air Bersih	Bantuan ODGJ	Bantuan Alat Bantu Disabilitas	Bantuan Biaya Kesehatan	Bantuan Pangan dan Tunai	Bantuan Biaya Pendidikan
	DESA KALIMANGGIS KULON	2073	938	106	156	10	0	0	719	0	38	179	2	0	0	0	17	182	141
	DESA KALIMANGGIS WETAN	1773	852	195	260	30	300	0	173	674	0	0	215	154	40	44	507	597	466
	DESA KERTAWANA	1824	512	60	161	47	0	0	10	623	363	0	3	0	0	0	648	307	139
	DESA WANASARAYA	940	512	38	57	0	0	0	0	110	25	0	7	2	0	6	4	52	6
JUMLAH		30.851	14.232	2.571	4.273	1.184	829	1.071	2.354	3.317	4.187	899	1.256	352	99	147	2.655	4.590	3.993

Sumber: Bappeda Tahun 2022

2.2.2 Evaluasi Pelaksanaan Desa Pinunjul

Pembentukan Desa Pinunjul Adalah Dimaksudkan Untuk Mewujudkan Strategi Pembangunan Yang Mengacu Pada Keunggulan Karakteristik Lokal Dan Menjadi Pendorong Percepatan Pembangunan Daerah. Tujuannya Adalah Untuk Memberikan Dasar Hukum Bagi Kegiatan Sinergitas Perencanaan Dan Pelaksanaan Pembangunan Berbasis Desa Di Kabupaten Kuningan.

Tabel 2.56 Capaian Desa Pinunjul Sampai Dengan Tahun 2021

NO	BIDANG/KEGIATAN	TARGET RPJMD	2019		2020		2021	
			TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
1	Desa Pinunjul Wisata	25	0	6	7	5	7	8
2	75 Desa Pinunjul Tematik:							
	- Desa Pinunjul Agro	42	4	7	9	9	10	12
	- Desa Pinunjul Industri	18	5	8	5	4	4	6
	- Desa Pinunjul UMKM	3	0	2	0	1	1	1
	- Desa Pinunjul Koperasi	3	0	0	0	4	1	8
	- Desa Pinunjul Budaya	1	0	0	1	1	0	0
	- Desa Pinunjul Kuliner Tradisional	1	0	0	0	0	1	0
	- Desa Pinunjul Pendidikan	7	0	0	7	7	3	0

Sumber: Bappeda Tahun 2022

Menurut tipologi/pengelompokan desa pinunjul berdasarkan potensi adalah sebanyak 11 kelompok. Untuk Kabupaten Kuningan yang sesuai dengan potensi baru terlaksana sebanyak 8 kelompok desa pinunjul.

Desa Pinunjul Wisata :

Dari target capaian sesuai RPJMD sebanyak 25 desa pinunjul wisata, capaian sampai dengan tahun 2021 adalah sebanyak 19 desa. Capaian tahun 2019 yaitu 6 desa (Cisantana, Maniskidul, Pakembangan, Sakerta Timur, Cibuntu dan Padabeunghar), tahun 2020 tercapai 5 desa (Cipasung, Pajambon, Setia Negara, Linggamekar dan Sangkanhurip), dan tahun 2021 tercapai 8 desa (Cigugur, Panawuan, Kaduela, Paniis, Kertayuga, Seda, Cibeureum dan Citundun).

Desa Pinunjul Agro :

Dari target capaian sesuai RPJMD sebanyak 42 desa pinunjul agro pertanian dan agro peternakan, capaian sampai dengan tahun 2021 adalah sebanyak 28 desa. Capaian sampai tahun 2021 yaitu 11 desa pinunjul

agro peternakan yaitu Desa Cipari, Bantar Panjang, Dukuh Badag, Galaherang, Koreak, Kalimanggis Kulon, Cibuntu, Tarikolot, Cileuya, Gunung Sari dan Ciwiru.

Desa Pinunjul Industri :

Pencapaian desa pinunjul industri sampai tahun 2021 telah mencapai target RPJMD yaitu sebanyak 18 desa. Progress tahunan sesuai target adalah untuk tahun 2019 targetnya 5 desa dan capaiannya 8 desa. Target untuk tahun 2020 targetnya 5 desa dan capaiannya 4 desa. Sedangkan target untuk tahun 2021 targetnya 4 desa dengan capaian 6 desa. Dari hasil tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa capaian telah mencapai hasil yang positif, bahkan tenggang waktu 5 tahun capaian sesuai RPJMD dapat ditempuh dalam waktu 3 tahun. Selama 2 tahun capaian selalu melebihi target, kecuali di tahun 2020 capaian sedikit di bawah target karena adanya pandemic covid 19 dan refocussing anggaran yang menyebabkan sedikit terhambatnya program-program yang telah direncanakan.

Desa Pinunjul UMKM :

Dari target capaian sesuai RPJMD sebanyak 3 desa pinunjul UMKM, capaian sampai dengan tahun 2021 adalah sebanyak 4 desa. Progress tahunan sesuai target adalah untuk tahun 2019 targetnya 0 desa dan capaiannya 2 desa. Target untuk tahun 2020 targetnya 0 desa dan capaiannya 1 desa. Sedangkan target untuk tahun 2021 targetnya 1 desa dengan capaian 1 desa. Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa capaian telah melebihi dari target yang telah ditetapkan, bahkan di tahun 2020 dapat melebihi target walaupun sedang mengalami kondisi pandemi covid 19. Adanya capaian yang melebihi target tersebut terjadi karena ada perubahan lokasi yang dilakukan oleh dinas teknis dengan menyesuaikan terhadap kondisi yang berkembang.

Desa Pinunjul Koperasi :

Dari target capaian sesuai RPJMD sebanyak 3 desa pinunjul koperasi, capaian sampai dengan tahun 2021 adalah sebanyak 12 desa pinunjul koperasi. Capaian tahun 2020 yaitu 4 desa (Cibingbin, Cigugur,

Cipasung dan Cipari) dan tahun 2021 tercapai 8 desa (Cisantana, Karangsari, Ciawi, Kaduella, Paniis, Sagarahieng, Sayana dan Mekarwangi).

Desa Pinunjul Budaya :

Dari target capaian sesuai RPJMD sebanyak 1 desa pinunjul budaya, telah terealisasi pada Tahun 2020 menjadikan Desa Citangtu Kecamatan Kuningan sebagai desa pinunjul budaya seni angklung.

Desa Pinunjul Kuliner Tradisional :

Dari target capaian sesuai RPJMD sebanyak 1 desa pinunjul kuliner tradisional, capaian sampai dengan tahun 2021 adalah masih 0 desa. Progres tahunan sesuai target adalah untuk tahun 2019 targetnya 0 desa dan capaiannya 0 desa. Target untuk tahun 2020 targetnya 0 desa dan capaiannya 0 desa. Sedangkan target untuk tahun 2021 targetnya 1 desa dengan capaian 0 desa. Dari hasil tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa capaian belum mencapai target karena ada beberapa permasalahan teknis berkaitan dengan desa pinunjul kuliner tradisional ini. Tetapi, di akhir target RPJMD yaitu tahun 2023, target ini akan bisa direalisasikan dengan berusaha menggandeng semua *stakeholder* untuk mewujudkan adanya sentuhan pembangunan di desa pinunjul kuliner tradisional.

Desa Pinunjul Pendidikan :

Dari target capaian sesuai RPJMD sebanyak 7 desa pinunjul pendidikan, sampai dengan tahun 2021 sudah terealisasi seluruhnya. Pencapaian ini terealisasi di tahun 2020 sebanyak 7 Desa Pinunjul Pendidikan yaitu Desa Manis Kidul Kecamatan Jalaksana, Desa Cipari Kecamatan Cigugur, Desa Linggajati Kecamatan Cilimus, Desa Bojong Kecamatan Cilimus, Desa Pancalang Kecamatan Pancalang, Desa Maleber Kecamatan Maleber dan Desa Lengkong Kecamatan Garawangi.

Tabel 2.57 Evaluasi Pelaksanaan RPJMD Kab. Kuningan 2018 – 2023 Tahun 2021

TUJUAN		INDIKATOR KINERJA TUJUAN		SATUAN	KONDISI AWAL 2018	2021		KONDISI AKHIR RPJMD 2023	PERANGKAT DAERAH PENYEDIA DATA
						TARGET	CAPAIAN		
-1		-2		-3	-4	-5	-6	-7	-8
	MISI 1								
1.1	Mewujudkan mutu pelayanan, akuntabilitas dan transparansi pemerintahan	1	Opini BPK	Katagori	WTP	WTP	WTP	WTP	BPKAD
		2	Indeks kepuasan layanan masyarakat	Persen	82,08	74,12	76,51	75,52	Bappeda
	MISI 2								
2.1	Mewujudkan kehidupan masyarakat yang agamis, toleran, ramah, berkualitas dengan melibatkan seluruh potensi umat beragama	3	Indeks toleransi beragama	Poin	N/A	69,1 – 69,4	72,39	69,9 – 70,2	Badan Kesbangpol
2.2	Menegakkan perundang-undangan daerah dan menciptakan kondusivitas kehidupan berbangsa dan bermasyarakat	4	Indeks Rasa Aman	Poin	n/a	71 – 73,5	n/a	73,6 - 76	Satpol PP
	MISI 3								
3.1	Mewujudkan layanan pendidikan yang adil dan berkualitas	5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	68,28	69,26	69,71	69,66	Bappeda
3.2	Mewujudkan masyarakat yang sehat melalui aksesibilitas pelayanan kesehatan yang terjangkau								
3.3	Menciptakan sumberdaya manusia yang Santana, Basajan, Santika dan Unggul								

TUJUAN		INDIKATOR KINERJA TUJUAN		SATUAN	KONDISI AWAL 2018	2021		KONDISI AKHIR RPJMD 2023	PERANGKAT DAERAH PENYEDIA DATA
						TARGET	CAPAIAN		
-1		-2		-3	-4	-5	-6	-7	-8
	MISI 4								
4.1	Terbangunnya desa pinunjul/unggul berdasarkan karakteristik lokal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi	6	Perencanaan Sektoral Terintegrasi berbasis Desa	Buah	-	1	1	1	Bappeda
4.2	Terwujudnya daya dukung investasi bagi pembangunan desa yang mendorong pertumbuhan lapangan kerja	7	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	6,45	1,75 – 2,65	3,56	2,00 - 3,45	Bappeda
4.3	Mempercepat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa	8	Indeks Desa Membangun	Poin	0,645	0,660	0,723	0,670	DPMD
	MISI 5								
5.1	Meningkatkan pemerataan dan kualitas infrastruktur daerah	9	Kemantapan Jalan	Persen	80,9	83,9	79,063	85,9	DPUTR
5.2	Mewujudkan kelestarian fungsi sumberdaya alam dan lingkungan hidup	10	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	68	66,45	68,91	68,40	DLH

Tabel 2.58 Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Daerah Sampai Tahun 2021

No.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	TARGET DAN CAPAIAN SETIAP TAHUN						KONDISI AKHIR RPJMD 2023	KETERANG AN
				2019	2020	2021	2021	2021	2021		
-1	-2	-3	-4	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	-10	-11
A ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT											
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	68,28	69.1	69.12	68.39	69.38	69.26	69.71	69,66	Bappeda
2	Persentase Penduduk Miskin (PPM)	Persen	12,22	11.41	12.22	13.58	11.41	13.38	13.10	12,74	Bappeda
3	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Persen	0,59	0.59	0.58	0.6	1.17	0,60	1,09	0,60	Bappeda
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	8,99	9.83	9,68	15.25	11.22	13,80	11.68	10,14	Bappeda
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	6,45	6.56	6.59	-2,42- 1,51	0.11	1,75-2,65	3,56	2,00-3,45	Bappeda
6	Indeks Gini	Poin	0,32	0.34	0,435	< 0,38	0.361	< 0,38	0,349	< 0,38	Bappeda
7	Indeks Pendidikan	Poin	58,57	58.12	58.21	58,31	59,18	60,41	59.97	60,77	Bappeda
8	EYS/Harapan lama sekolah	Tahun	12,07	12.08	12.10	12,10	12.22	12,14	12,23	12,23	Bappeda
9	MYS/Rata-rata lama sekolah	Tahun	7,51	7.37	7.38	7,41	7,57	7,46	7,80	7,60	Bappeda
10	Indeks EYS	Poin	67,06	67	67	67,22	67,22	67,89	67,56	68,04	Bappeda
11	Indeks MYS	Poin	50,08	49	49	49,40	49,4	50,47	50,24	50,61	Bappeda
12	UmurHarapan Hidup (UHH)	Tahun	73,01	73.23	73,35	73,28	73,59	73,37	73,78	73,53	Bappeda
13	Indeks Kesehatan	Persen	81,55	81.89	82.08	81,97	82.45	82,23	82,74	82,67	Bappeda
14	Persentase balita stunting	Persen	29	27	8,39	20	7,38	15	6,21	2,5	Dinkes
15	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	86,34	86,83	86,92	87,32	86,81	87,82	86,81	88,82	DPPKBP3A
16	Indeks Pengeluaran	Poin	66,64	69,31	69.12	66,12 – 66,39	68.44	66,22 – 66,59	68,27	66,33 – 66,91	Bappeda
17	Pengeluaran perkapita per tahun (Ribu Rupiah)	Rp.	8918	9731	9673	8967 – 9003	9459	9042- 9092	9409	9190- 9271	Bappeda

No.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	TARGET DAN CAPAIAN SETIAP TAHUN						KONDISI AKHIR RPJMD 2023	KETERANG AN
				2019		2020		2021			
				TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	
18	Laju inflasi	Persen	2,8	≤ 5	2	≤ 5	1.16	≤ 5	1,81	≤ 5	Bappeda
19	PDRB per kapita (ADHK)	Rp. (ribu)	14665.97	15308.94	16864.15	15980.11	16879.45	16680.7	17.483,02	18.175,37	Bappeda
20	Garis Kemiskinan	Rp.	332483	347850	340775	363217	352358	378584	358069	409318	Bappeda
21	Jumlah Angkatan Kerja	Jiwa	475284	488544	502051	502175	521677	516185	542.782	545390	Bappeda
22	Rasio penduduk yang bekerja /Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	Persen	91,01	91,38	90,32	91,75	88.78	92,12	88,32	92,86	Bappeda
23	Indeks Pemberdayaan Gender	Poin	72,39	74,42	-	76,50	-	78,64	-	83,10	DPPKBP3A
24	Keluarga pra sejahtera	Persen	5,26	5,24	3,92	5,22	3,97	5,20	4,07	5,12	DPPKBP3A
25	Keluarga sejahtera I	Persen	64,03	64,03	58,02	64,03	57,56	64,02	57,60	64,02	DPPKBP3A
26	Keluarga sejahtera II	Persen	30,71	30,73	38,06	30,75	38,47	30,78	38,33	30,86	DPPKBP3A
B	ASPEK PELAYANAN UMUM										
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB TERKAIT PELAYANAN DASAR										
	BIDANG PENDIDIKAN										
1	Pendidikan Anak Usia Dini (Paud)	Persen	74,05	74,10	74.1	74,20	78.53	74,35	78,7	74,80	Disdikbud
2	Eys/ Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,07	12,08	12.10	12,1	12.22	12,14	12,23	12,23	Disdikbud
3	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	Persen	99,85	99,88	95,57	99,89	95,21	99,90	95,26	99,93	Disdikbud
4	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	Persen	91,17	91,21	79,60	91,22	79,90	91,24	79.82	91,27	Disdikbud
5	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	Persen	100,11	100,12	100,35	100,13	98,60	100,14	100,72	100,16	Disdikbud
6	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	Persen	98,99	99,04	96,43	99,05	97,63	99,07	96,55	99,08	Disdikbud
7	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	Persen	0,01	0,01	0.01	0,01	0.01	0,01	0,01	0,01	Disdikbud

No.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	TARGET DAN CAPAIAN SETIAP TAHUN						KONDISI AKHIR RPJMD 2023	KETERANG AN
				2019		2020		2021			
				TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	
8	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	Persen	0,26	0,15	0.17	0,17	0.16	0,16	0,15	0,12	Disdikbud
9	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Disdikbud
10	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Disdikbud
11	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI Ke SMP/MTs	Persen	99,98	99,98	99.98	99,98	99.98	99,98	99,98	99,98	Disdikbud
12	Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/ D-IV	Persen	95,23	96	95.35	96	95.88	96,77	95,98	97,54	Disdikbud
13	Prosentase Guru PAUD Terlatih/ Bersertifikat	Persen	0,05	0,15	1.6	0,25	2.07	0,35	3,45	0,55	Disdikbud
14	Prosentase Ruang Kelas SD Dalam Kondisi Baik	Persen	84,47	84,72	84.73	84,97	84.87	85,22	84,92	85,72	Disdikbud
15	Prosentase Ruang Kelas SMP <i>Dalam</i> Kondisi Baik	Persen	97,60	97,70	97.65	97,80	97.72	97,90	97,81	98,10	Disdikbud
16	Jumlah Lembaga Pendidikan Non Formal/ Kursus Yang Legal	Jumlah	1.023	1.033	62	1.04	62	1.048	47	1.063	Disdikbud
17	Rasio Guru Terhadap Jumlah Murid Pendidikan Dasar	Rasio	1:0,06	1:0,08	1:0,08	1:0,08	1:0,08	1:0,09	1:0,08	1:0,10	Disdikbud
18	Rasio Jumlah Murid Dan Guru SMP Negeri/ Swasta Non Tsanawiyah	Rasio	1:0,055	1:0,053	1:0,053	1:0,052	1:0,052	1:0,051	1:0,052	1:0,050	Disdikbud
19	MYS/Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,51	7,37	7.38	7,41	7.57	7,46	7.8	7,6	Disdikbud
20	Indeks EYS / Harapan Lama Sekolah	Poin	67,06	67	67.22	67,22	67.89	67,56	67,94	68,04	Disdikbud
21	Indeks MYS / Rata-rata Lama Sekolah	Poin	50,08	49	49.2	49,4	50.47	50,24	52	50,61	Disdikbud
22	Rehabilitasi ruang kelas (1.000 RK)	Ruang	110	238	276	162	479	200	244	1000	Disdikbud

No.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	TARGET DAN CAPAIAN SETIAP TAHUN						KONDISI AKHIR RPJMD 2023	KETERANG AN
				2019		2020		2021			
				TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	
23	Pembangunan ruang kelas baru (300 RKB)	Ruang	37	9	15	70	40	75	10	300	Disdikbud
24	Pembangunan perpustakaan (100 ruang)	Ruang	10	20	2	20	6	20	14	100	Disdikbud
25	Pemberian beasiswa (1.000 orang)	Orang	485	200	260	200	687	150	947	1000	Disdikbud
BIDANG KESEHATAN											
1	Nilai Akreditasi Rumah Sakit di atas 80	Persen	75	81	73,3	88	73,3	80	73,3	100	RSUD Linggajati RSUD 45
2	BOR		66	70	64	72	45	74	40	80	
3	LOS		3	3	3	3	3	3	4	3	
4	GDR		34	34	41	33	51	32	72	30	
5	NDR		22	22	20	21	25	20	38	18	
6	BTO		79	69	74	69	51	69	78	69	
7	TOI		2	1	2	1	4	1	5	1	
8	Umur Harapan Hidup	Tahun	73,01	73,23	73,35	73,28	73,59	73,37	73,78	73,53	Dinas Kesehatan
9	Persentase Balita Stunting	Persen	29	27	8,39	20	7,38	15	6,21	2,5	
10	Ketersediaan ambulance gratis	Unit	40	0	1	8	0	8	1	72	
11	Revitalisasi 1.423 posyandu	Unit	N/A	284	100%	287	100%	284	100%	1.423	
12	Angka Kematian Ibu	Kasus	23	23	23	22	27	22	42	21	
13	Angka Kematian Bayi	Poin/1.000 kelahiran	4,06	4,05	3,55	4,05	4,14	4,04	2,95	4,02	
14	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditanganani	Persen	100	100	140,97	100	132	100	98,10	100	

No.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	TARGET DAN CAPAIAN SETIAP TAHUN						KONDISI AKHIR RPJMD 2023	KETERANG AN
				2019		2020		2021			
				TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	
15	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	Persen	87,07	90	104,13	91	103,3	92	83,29	93	
16	Cakupan desa/kelurahan universal child immunization (UCI)	Persen	91,49	92	96,01	80	75,00	85	61,07	90	
17	Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	
18	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC/TBA	Persen	69,52	70	76,54	71,40	59,78	72,20	38,22	74,15	
19	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	
20	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	
21	Cakupan kunjungan bayi	Persen	92,78	93	106,36	93	97,09	40	68,14	95	
22	Prosentase Penduduk yang menggunakan jamban keluarga	Persen		85	83,3	86	87,96	87	82,70		
23	Jumlah sarana prasarana Puskesmas, Pustu dan jaringannya dalam kondisi baik	Unit	28 Puskesmas, 52 Pustu	4 Puskesmas, 10 Pustu	3 Puskesmas, 0 Pustu	8 Puskesmas, 10 Pustu	4 Puskesmas, 0 Pustu	10 Puskesmas, 7 Pustu	2 Puskesmas, 0 Pustu	7 Puskesmas, 5 Pustu	
24	Jumlah puskesmas dengan perawatan	Unit	6	6	6	6	6	6	6	6	

No.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	TARGET DAN CAPAIAN SETIAP TAHUN						KONDISI AKHIR RPJMD 2023	KETERANG AN
				2019		2020		2021			
				TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	
25	Prosentase penduduk yang mempunyai BPJS/KIS	Persen	43,42	57,34	83,78	58,12	86,21	59,06	75,87	61,54	
26	Jumlah PBI BPKJS/KIS	Orang	520.28 3	616.15	603.298	624.55	605.180	634.63	423.231	661.241	
BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG											
1	Persentase Kemantapan Jalan dan Jembatan	Persen	80,9	81,9	75,43	82,9	76,5	83,9	79,063	85,9	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
2	Persentase jaringan irigasi dengan kondisi baik	Persen	59,01	60	59.77	62	56.91	64	60.93	70	
3	Jumlah dokumen perencanaan yang tersedia/ tersusun	Dokumen	N/A	3	-	9	19	14	9	32	
4	Capaian RTH (Penataan RTH)	Unit	8	2		-		-		10	DLH
5	Penanganan jalan & jembatan (target 1.000 Km)	Km	640	72	251.153	72	259.843	72	282.82	1000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
6	Penanganan jaringan irigasi (target 18.000 Hektar)	Hektar	15	600	823.99	600	817	600	906.63	18	
7	Penanganan Jalan dan Jembatan (1.000 Km)	Km	1.025	200		200		200		2000	
8	Akses Air Minum Layak Rumah Tangga Yang	Persen	90,85	85,15	85,15	85,15	88,12	88,12	91,09	97,03	
9	Memiliki Akses Sanitasi Layak	Persen	87,77	89,87	89,87	89,87	93,25	83.3	94,93	98,31	
10	Akses Air Minum Perpipaan (%)	Persen	36,00	32,29	32,29	32,29	34,65	34,65	37,01	41,73	

No.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	TARGET DAN CAPAIAN SETIAP TAHUN						KONDISI AKHIR RPJMD 2023	KETERANG AN
				2019		2020		2021			
				TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	
BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN											
1	Persentase rumah layak huni	Persen	94,92	95.63	95.5	95.85	95.57	96.56	97	96.92	DPKPP
2	Jumlah dokumen perencanaan yang tersedia / tersusun	Dokumen	N/A	3		0		26	18	71	
3	Lingkungan pemukiman kumuh	Persen	2,67	2.52	2.6	2.83	2.55	2.66	2.78	2.57	
4	Kawasan kumuh	Persen	0,05	0.03	0.03	0.296	0	0.199	0.0154	0.152	
BIDANG KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT											
1	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (LINMAS)	Petugas	106	107	107	108	108	109	109	111	Satpol-PP
2	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	Persen	80	82	82	83	83	84	84	85	
3	Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Persen	80	80	80	80	80	80	80	80	
4	Cakupan Pelayanan Kebakaran Kab./Kota	Persen	75	76	76	14,7	14,7	14,7	14,7	14,7	
5	Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) daerah Layanan WMK	Persen	90	100	100	100	100	100	100	100	

No.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	TARGET DAN CAPAIAN SETIAP TAHUN						KONDISI AKHIR RPJMD 2023	KETERANG AN
				2019		2020		2021			
				TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	
6	Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran di atas 3000 – 5000 liter pada WMK	Persen	0.2	0.2	0.2	14,3	14,3	14,3	14,3	14,3	
7	Persentase Penegakan Perda	Persen	90	91	91	92	92	93	93	95	
8	Persentase Tingkat Kapasitas Aparatur Satpol PP dan Damkar	Persen	90	90	90	95	95	95	95	98	
9	Persentase pencegahan dan kesiapsiagaan dalam rangka pengurangan resiko bencana	%	85	85	85	85	85	90	92.31	100	BPBD
10	Respons time penanganan kedaruratan dan pemuhan kebutuhan dasar	Hari/24 jam	1	1	1	1	1	1	1	1	
11	Persentase penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi Pasca Bencana	%	85	80	80	85	85	90	80	100	
12	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Nilai	0,60	0,62	0.66	0,63	0.86	0,64	0.88	0,66	
13	Persentase Korban Bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Persen	63	80	80	85	85	90	90	100	
14	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	

No.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	TARGET DAN CAPAIAN SETIAP TAHUN						KONDISI AKHIR RPJMD 2023	KETERANG AN
				2019		2020		2021			
				TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	
15	Jumlah Desa Tangguh yang terbentuk	Desa	3	-	-	1	2	2	2	7	
16	Persentase kajian kebutuhan pasca bencana (Jitupasna)	Persen	91	92	92	80	80	85	72.57	95	
BIDANG SOSIAL											
1	Sarana Sosial seperti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	Panti	38	10	38	10	35	10	2	10	Dinas Sosial
	Persentase Penyandang cacat baik fisik dan mental, serta lanjut usia yang tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial			9,20	77.25	10,00	80.02	10,00	13.39		
2	PSKS yang memperoleh bantuan sosial	Persen	8,80							10,00	
3	Jumlah PSKS yang ditangani	Persen	29,08	30,00	39.9	32,00	70.8	32,00	10.29	33,00	
4	Persentase penduduk miskin	PSKS	113.127	130	45,647	68.926	53,423	68.926	10,223	79.578	
5		Persen	12,22	11,41	11.00	11,22	11.00	13,38	5.00	12,74	
URUSAN WAJIB TIDAK TERKAIT PELAYANAN DASAR											
BIDANG TENAGA KERJA											
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	8,99	9.83	12.29%	15.25	14.29	13.88	14.06	10.14	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	Jumlah lapangan kerja di desa	Paket	N/A	4	4	0		1	2	9	
3	Jumlah Tenaga Kerja yang terserap di desa	Orang	N/A	80	80	0		20	40	180	
4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	58.65	59.62	61.31	60.61	61.98	61.62	63.82	63.68	

No.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	TARGET DAN CAPAIAN SETIAP TAHUN						KONDISI AKHIR RPJMD 2023	KETERANG AN
				2019		2020		2021			
				TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	
5	Persentase Transmigrasi	Persen	15	15	-	15	-	15	-	25	
6	Pelayanan kepesertaan Jaminan Sosial bagi Pekerja/Buruh	Persen	65,72	10.67	42.37	13.84	47.07	16.8	76.94	22.16	
7	Pencari kerja yang ditempatkan	Persen	99,36	74.22	72.99	30	45.44	50	55.78	68.5	
BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNG ANAK											
1	Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Persen	49,52	49,52		49,54		49,54	41,00	49,54	DPPKBP3A
2	Partisipasi angkatan kerja perempuan	Persen	37,40	37,42		37,42		37,42		37,44	DPPKBP3A
3	Rasio KDRT	Persen	0,01	0,02		0,02	1:000002 5	0,02	1:000004 0	0,02	DPPKBP3A
4	Jumlah PSKS yang ditangani	PSKS	113.12 7	130	45,647	68.926	53,423	68.926	10,223	79.578	DPPKBP3A
5	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan danak dari tindakan kekerasan	Persen	100	70	100	70	100	80	100	100	DPPKBP3A
6	Dokumen profil gender	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	DPPKBP3A
7	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	86,34	86,83	86,92	87,32	86,81	87,82	86,81	88,82	DPPKBP3A
BIDANG PANGAN											
1	Regulasi Ketahanan Pangan		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	Ketersediaan Pangan Utama	Kg/kap./th	268,85	270,40	281.56	271,84	261.17	274,50	274.21	280,08	

No.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	TARGET DAN CAPAIAN SETIAP TAHUN						KONDISI AKHIR RPJMD 2023	KETERANG AN
				2019		2020		2021			
				TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	
3	Penanganan Daerah Rawan Pangan	Desa	59	10	10	10	0	10	0	10	
4	Penanganan Penduduk Rawan Pangan yang Ditangani	Jiwa	6.511	1300	75	823	16,459	500	1021	500	
5	Tingkat Konsumsi Pangan Lokal	Persen	25	30	36	35	37	40	40	50	
6	Lumbung Pangan	Buah	N/A	1	1	0	0	3	1	10	
7	Skor Pola Pangan Harapan	Persen	81,20	82,80	83.5	83,11	82.4	84,35	82,4	86,73	
BIDANG LINGKUNGAN HIDUP											
1	Jumlah pelayanan pengelolaan sampah	Ton	52,279.27	122598	85393.4	116196.89	105613.68	115554.73	115554.64	114124.74	Dinas Lingkungan Hidup
		Persen	75,29	82,74	0	80,25	72.49	81,09	77.11	81,91	
	- Penanganan Sampah	Ton	43.719,27	112.621,32	81545	106.078,97	95637	105.294,71	103888	103.652,44	
		Persen	60,4	66,19	47.93	62,05	55.94	61,23	60.11	59,57	
	- Pengurangan Sampah	Ton	8560,00	9976.68	3848.4	10117.92	9976.68	10260.02	10120.64	10472.3	
		Persen	14,89	16,55	0	18,2	16.55	19,86	18.1	22,34	
2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	68.00	68,22	67.80	66.11	67.00	66.45	68.91	67.14	
	- Indeks Kualitas Air	Poin	65	65,25	99.62	48,5	48.89	49	50	50	
	- Indeks Kualitas Udara	Poin	86.83	86.88	83.59	87.25	88.94	87.5	86.52	88	
	- Indeks tutupan lahan	Poin	56.48	56.5	58.06	57.25	57.73	57.5	68.8	58	

No.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	TARGET DAN CAPAIAN SETIAP TAHUN						KONDISI AKHIR RPJMD 2023	KETERANG AN
				2019		2020		2021			
				TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	
BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL											
1	Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	Persen	75,50	76.53	76.65	78	89.14	79	94.6	80	Disdukcapil
2	Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP-eL.)	Persen	96,10	97.76	98.96	97.77	99.5	97.78	98.53	98	
3	Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	Persen	17,95	22.48	27.05	22.75	40.62	23	54.68	23,25	
4	Kepemilikan Akta Kelahiran	Persen	77,52	78.45	79.38	80	82.97	81	84..21	83	
5	Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0 s.d 18 Tahun	Persen	81,28	84	84.65	85	91.86	86	92.67	88	
6	Penanganan Pelayanan Pembuatan Akta Perkawinan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	
7	Penanganan Pelayanan Pembuatan Akta Perceraian	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	
8	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK			YA		YA		YA	YA	YA	
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA											
2	Jumlah BUMDES	Unit	180	14	165	14	185	14	229	10	DPMD
Status Desa :											
3	- Tertinggal		42	21	13	9	4	0	0	0	
	- Berkembang	DESA	255	255	255	35	220	55	165	82	
	- Maju		61	61	90	25	115	45	160	75	

No.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	TARGET DAN CAPAIAN SETIAP TAHUN						KONDISI AKHIR RPJMD 2023	KETERANG AN
				2019		2020		2021			
				TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	
	- Mandiri		3	2	3	2	22	2	36	15	
4	PKK aktif	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	
5	Posyandu	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	
6	Jumlah usaha ekonomi masyarakat yang berdaya	Desa		73	189	73	189	189	189		
7	Prosentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	Persen	100	100	100	100	100	100	100		
BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA											
1	Prevelensi Pemakaian Kontrasepsi/ Contaceptive Prevalence Rate (CPR)	Persen	70.68	70.87	71.03	70.21	71.56	71.61	71.6	72.24	DPPKBP3A
2	Prosentase Angka Pasangan Usia Subur (PUS) Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmetneed)	Persen	14.88	14.63	14.04	16.39	13.25	15.16	17.49	13.73	DPPKBP3A
3	Rata-rata Usia Kawin Pertama (RKP) Wanita		18.02	18.05	18.02	18.07	19	19	19	19.5	DPPKBP3A
4	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Persen	0.59	0.59	0.58	0.6	1.17	0,60	1,09	0.6	DPPKBP3A
BIDANG PERHUBUNGAN											
1	Persentase ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan	Persen	55	55	59	40	58	40	59	65	Dinas Perhubunga n
2	Jumlah Prasarana Perhubungan:										
	- PJU	Titik	7482	1022	8141	1022	8748	1022	9558	12258	

No.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	TARGET DAN CAPAIAN SETIAP TAHUN						KONDISI AKHIR RPJMD 2023	KETERANG AN
				2019		2020		2021			
				TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	
	- Terminal	Unit	8	2	2	0	10	0	10	10	
	- Terminal Penumpang Wisata Terpadu	Unit	0	1	1	0	1	0	1	1	
	- Kawasan/Area Parkir Terpadu	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Jumlah Ketersediaan Fasilitas dan Perlengkapan Jalan :										
	- Traffic light	Unit	9	0	0	0	9	1	10	10	
	- Warning Light	Unit	35	2	2	1	38	0	38	37	
	- RPPJ	Unit	114	0			0	22	22	157	
	- Rambu Lalu Lintas	Unit	2820	69	69	50	50	0	0	3087	
3	- Marka Jalan	Meter	52177.71	0	-	0	0	0	0	57677.71	
	- Marka Zoss	Lokasi	4	3	3	2	9	0	9	10	
	- Guardrail	Meter	3,988	1300	-	0	0	0	0	10288	
	- Patok Pengaman Jalan	Unit	0	0	-	0	0	0	0	100	
	- Cermin Tikungan	Unit	0	0	-	0	0	4	0	4	
	- Velican Crossing	Unit	0	2	-	0	0	0	0	6	
	- Rambu Elektronik	Unit	0	0	-	0	0	0	0	4	
	- ATCS	Paket	0	1	1	0	1	0	1	2	
	Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji Yang melaksanakan Uji Berkala	Unit	11,000	11000	22359	10000	32.561	10000	42.124	11000	
	BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA										
1	Website Milik Pemerintah Daerah		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Dinas Komunikasi

No.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	TARGET DAN CAPAIAN SETIAP TAHUN						KONDISI AKHIR RPJMD 2023	KETERANG AN
				2019		2020		2021			
				TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	
										dan Informatika	
2	Pameran Expo		Ada	Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	
3	Prosentase Jaringan Komunikasi dan Informatika yang Terintegrasi	Persen	100	100	65	100	70	100	75	100	
4	Jumlah Informasi Publik yang Dipublikasikan	Buah	10	10	10	15	10	20	10	30	
5	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat	KIM	1.165	1165	1165	1165	1165	1203	1165	1.219	
6	Jumlah BTS	BTS	272	272	272	312	283	322	319	346	
7	Sistem Informasi Manajemen Pemda		8	9	1	9	3	10	2	10	
8	Prosentase informasi daerah yang wajib diamankan dengan persandian	Persen	n/a	n/a	13.8	3.04	18	3.09	27.8	3.14	
PERTANAHAN											
1	Persentase Bidang Tanah yang bersertifikat milik Pemda	Persen	81	50	78	75	60	50	46	69.61	BPKAD
BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH											
1	Koperasi Aktif	Koperasi	463	480	477	490	460	500	707	520	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan

No.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	TARGET DAN CAPAIAN SETIAP TAHUN						KONDISI AKHIR RPJMD 2023	KETERANG AN
				2019		2020		2021			
				TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	
2	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil	UKM	N.A	100	470	60	90	100	150	460	dan Perindustrian
3	Desa UKM	Desa	N.A	0	2	0	1	1	1	3	
4	Desa Koperasi	Desa	N.A	0	0	0	4	1	8	3	
5	Desa Kuliner Tradisional	Desa	N.A	0	0	0	0	1	0	1	
6	Wirausaha baru berbasis pesantren	Pesantren/ Orang	N.A	0	10	2/40	24/24	2/40	4/40	8/160	
BIDANG PENANAMAN MODAL											
1	Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDM (milyar rupiah)	Persen	42.67	30,5	113.7	20.3	45	17.3	182.78	22,4	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional	Jumlah	1,719,5 93,858, 571	637,500, 000,000	725,118, 137,143	165,000, 000,000	251,512, 406,831	897,750, 000,000	1,800,36 3,869,95 2	6.416.906 587.075	
3	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	Orang	4,105	3,105	8,392	3,400	4.415	3,700	22,149	19.005	
4	Nilai Investasi yang Ada di Desa	Jumlah	5,950,3 00,000	6,854,34 5,000	-	7,882,49 6,759	0	9,064,87 1,262	0	39.488.30 8.666	
5	Jumlah Desa dengan Nilai Investasi >200 juta	Desa	N.A	2	2	0	0	3	3	15	
BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA											
1	Prestasi Olahraga Tingkat Regional:										Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata
	PORDA	Peringkat	9	-	0	-	0	-	0	8	
	POPDA	Peringkat	15	-	0	12	0	-	0	10	
BIDANG STATISTIK											

No.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	TARGET DAN CAPAIAN SETIAP TAHUN						KONDISI AKHIR RPJMD 2023	KETERANG AN
				2019		2020		2021			
				TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	
1	Buku “Kabupaten Dalam Angka”		Ada	Ada	-	Ada	-	Ada	-	Ada	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	Buku “PDRB” Kabupaten		Ada	Ada	-	Ada	-	Ada	-	Ada	
3	Jumlah Dokumen Data/Informasi/Statistik Daerah	Dokumen	23	23	30	50	50	70	55	70	
BIDANG PERSANDIAN											
1	Prosentase Informasi Daerah yang Wajib diamankan dengan Persandian	Persen	2,99	2.99	13.8	2.99	18	2.99	27.8	2,99	Dinas Komunikasi dan Informatika
BIDANG KEBUDAYAAN											
1	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	Kegiatan	18	20	12	12	12	12	12	14	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya	Sarana	11	12	2	2	2	2	2	2	
3	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	
BIDANG PERPUSTAKAAN											
1	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun	Orang	7000	7650	7650	5900	3032	85000	4290	9000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan	Eksemplar	18.15	20150	20849	22150	22802	24150	24742	28150	

No.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	TARGET DAN CAPAIAN SETIAP TAHUN						KONDISI AKHIR RPJMD 2023	KETERANG AN
				2019		2020		2021			
				TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	
BIDANG KEARSIPAN											
1	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku	Persen	65	70	70	75	75	80	80	90	Dinas Arsip dan Perpustakaan
2	Jumlah Kegiatan Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	Kegiatan	3	1	1	3	1	3	1	14	
URUSAN PILIHAN											
BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN											
1	Peningkatan Kesejahteraan Nelayan (NTN)	Persen	106.72	106.5	103.64	100.5	105.31	101.65	102.25	103.25	Dinas Perikanan dan Peternakan
2	Tingkat Produksi Perikanan Tangkap	Ton	285.5	302.12	311.16	326.29	315.61	355.66	321.65	419.57	
3	Cakupan Kelompok Usaha Bersama Nelayan Tangkap (KUB)	Kelompok	11	13	9	15	9	17	10	21	
4	Jumlah Rumah Tangga Perikanan	Orang	1250	1372	1.86	1500	1.95	1620	2,148	1835	
5	Tingkat Kesejahteraan Pembudidaya Ikan		104,47	104,25	108.35	102,60	99.35	102,75	98.8	103,95	
6	Tingkat Produksi Perikanan Budidaya	Ton	17822.06	18638.95	20,070.9	21451.85	21,627.20	23261.55	22,981.6	26875.67	
7	Defisit Swasembada Ikan	Ton	8	7.6	8.7	5.7	7.42	3.8	6.29	-	
8	Cakupan Kelompok Pembudidaya Ikan	Kelompok	530	560	520	600	634	650	665	800	
9	Jumlah RumahTangga Perikanan (Peningkatan	Orang	17	18	21	22	21.15	22.5	22,026	23.5	

No.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	TARGET DAN CAPAIAN SETIAP TAHUN						KONDISI AKHIR RPJMD 2023	KETERANG AN
				2019		2020		2021			
				TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	
	Produksi Perikanan Budidaya)										
10	Tingkat Kesejahteraan Pengolah dan Pemasar		102.85	102.72	110.81	102.47	115.31	102.1	107.52	101.5	
11	Tingkat Produksi Pegolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Ton	160.65	174.96	202.86	188.96	210.86	204.07	245.52	236.03	
12	Tingkat Konsumsi Ikan	(kg/kap /tahun)	24,5	24,5	25	25	25	25	25	25	
13	Cakupan Kelompok Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Kelompok	28	34	32	36	36	40	38	48	
14	Jumlah Rumah Tangga Perikanan	Orang	2.4	2.5	2.66	2.6	2.31	2.7	22,026	3	
15	Rasio kawasan perairan terhadap total lindung luas nelayan	Ha	199	200	150	201	200	202	200	204	
16	Prosentase Kasus Perusakan Sumberdaya Perikanan	Persen	15	14	11	13	11	12	10	10	
17	Cakupan Kelompok Masyarakat Pengawas	Kelompok	1	2	4	2	4	3	2	5	
BIDANG PARIWISATA											
1	Kunjungan Wisata	Orang	3.124.948	2%/3.187.447	4735408	70%/956.234	2480718	2%/975.359	2,668,442	2%/1.014.762	Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata
2	Kampung Budaya	Desa	N/A	-	0	1	0	-	0	1	Dinas Pendidikan

No.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	TARGET DAN CAPAIAN SETIAP TAHUN						KONDISI AKHIR RPJMD 2023	KETERANG AN
				2019		2020		2021			
				TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	
										dan Kebudayaan	
BIDANG PERTANIAN											
1	Tersedianya data dan informasi Sektor Pertanian	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
2	Nilai Tukar Petani (NTP)		n.a	103.69	101.33	103.99	101.2	104.29	96.45		104.89
3	Prosentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian	Unit	274	27	27	30	30	33	33		440
4	Produktivitas Komoditas Tanaman Pangan:										
	- Padi	Kw/Ha	60	60.12	62.07	60.24	61.9	60.36	62.56		60.6
	- Jagung		61.35	61.35	55.26	61.71	58.77	61.89	56.62		62.25
	- Kedelai		14.5	14.57	10.35	14.64	10.66	14.71	15.36		14.85
	- Kacang		14.71	14.86	15.16	15.01	17.52	15.16	15.65		15.46
	Tanah										
	- Kacang		11	11.13	10.75	11.26	10.38	11.39	10.28		11.65
	Hijau										
	- Ubi Kayu		160.68	162.29	169.73	163.9	177.27	165.51	167.72		168.73
	- Ubi Jalar		212.99	213.03	121.91	213.07	215.84	213.11	216.23		213.19
	- Porang		-	-	-	-	-	200	-		213.19
5	Produktivitas Komoditas Perkebunan										
	- Pala		344.06	350.1	369	350.1	158.63	357.1	499		367.89
	- Cengkeh		622.32	753.66	609	899.47	702.57	1049.85	604.77		1360.28

No.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	TARGET DAN CAPAIAN SETIAP TAHUN						KONDISI AKHIR RPJMD 2023	KETERANG AN
				2019		2020		2021			
				TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	
6	- Kopi Robusta		1247.4 5	1272.39	1,228	1285.11	1531.31	1285.11	855.6	1310.82	
	- Kopi Arabika		192,31	900,00	1,000	909,00	1033.64	918,09	840	927,27	
	- Tembakau		1.292,3 1	1.318,15	863	1.331,33	787.5	1.344,64	1039.5	1.371,67	
	- Tebu		3.722,4 7	3.796,91	3,242	3.834,88	3313.97	3.873,23	4970	3.911,96	
	- Nilam		465,00	474,30	240	479,04	240	483,83	240	493,56	
	- Kelapa		1.083,0 0	1.115,49	1,425	1.115,49	1560.95	1.183,42	1,542	1.255,49	
	Produktivitas Komoditas Hortikultura										
	- Bawang Merah	Kw/Ha	98.8	93,46	104.32	94,32	102.11	95,18	98.00	96,90	
	- Tomat	Kw/Ha	134.5	198.41	190.85	206.93	178.83	193,83	194.86	198,71	
	- Cabe Besar	Kw/Ha	23.53	83.41	68.85	92.91	98.00	91,69	63.76	93,72	
	- Cabe Rawit	Kw/Ha	94.04	69.84	87.59	71.50	115.85	89.64	70.64	92.17	
	- Jamur	Kw/Ha	1,215	1,227	2,127	1,251	1,614	1,287	2,773	2.516	
	- Sayuran Lainnya	Kw/Ha	-	-	0	-	0	40	0	50	
Produksi Buah-buahan:											
n	- Mangga	Kw	101,28 8	200,000	302,941	348,490	246,464	304,330	157,301	309,524	
	- Rambutan	Kw	15,201	200,000	31,146	15,200	14,631	31,150	18,563	31.994	

No.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		SATUAN	KONDISI AWAL 2018	TARGET DAN CAPAIAN SETIAP TAHUN						KONDISI AKHIR RPJMD 2023	KETERANG AN
					2019		2020		2021			
					TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	
	- Durian	Kw	36,918	40541	53,107	44595	35,284	53,470	32,706	58865		
	- Markisa	Kw	-	-	-	0.963	50	19360	75			
	- Jahe	Kw	4,259	-	1,622	-	6,786	5,693	6,872	175		
	Jumlah Latihan dan Kunjungan Penyuluh Tingkat Kemampuan Kelompok :	Kunjungan	51,150	51,672	51,800	55,672	56,200	60,192	60,250	70272		
	- Kelompok Pemula	Kelompok	999	924	906	970	970	1019	1028	1.123		
	- Kelompok Lanjut	Kelompok	880	1122	1140	1234	1234	1358	1240	1.643		
	- Kelompok Madya	Kelompok	59	105	105	116	116	127	103	154		
	- Kelompok Utama	Kelompok	-	2	2	3	3	4	3	8		
	Cakupan Binaan Kelompok Tani	Persen					27,82		30,87			
	Prosentase Kelompok Tani yang difasilitasi		10,32	12,19		12,65		25,00		40,00		
	Penguatan Kelembagaan Perkebunan	Kelompok	-	-	-	-	-	25	-	95		
	Penguatan Kelembagaan Hortikultura	Kelompok	-	-	-	-	-	10	-	45		
	Produksi Daging, Susu dan Telur :										Dinas Perikanan dan Peternakan	
	Meningkatnya Produksi Daging (Ton)											
	Sapi	Ton	1,280	1.286	1.835	1.181	1.494	1.216	2.193	1.290		

No.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	TARGET DAN CAPAIAN SETIAP TAHUN						KONDISI AKHIR RPJMD 2023	KETERANG AN
				2019		2020		2021			
				TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	
	Domba	Ton	774	789	777	716	1.349	737	1.375	782	
	Ayam Buras	Ton	476	486	524	446	491	468	560	496	
	Ayam Ras	Ton	24,551	25.042	24.576	17.88	25.804	19.668	28.991	22.716	
	Itik	Ton	50	52	51	50	53	51	56	56	
	Meningkatnya Produksi Telur (Ton)	Ton									
	- Ayam Buras	Ton	284	290	1.094	266	1.132	279	1.290	288	
	- Ayam Ras	Ton	6,437	6.566	8.112	5.358	17.143	5.626	17.120	6.202	
	Petelur	Ton									
	- Itik	Ton	425	434	411	398	431	423	443	458	
	Produksi Susu Sapi	Ton	21,317	22.384	18.934	19.787	19.262	20.776	19.780	22.687	
	Pertumbuhan Populasi Ternak										
	- Sapi Perah		5,274	5.353	7.605	5.432	7.737	5.511	7.945	5.67	
	- Sapi Potong		29,162	29.599	28.657	27.033	29.533	27.884	29.972	29.011	
	- Domba		120,720	122.531	121.021	118.125	125.652	120.448	130.114	125.356	
	- Kambing		7,217	7.325	7.014	6.691	7.489	6.825	7.603	7.101	
	- Ayam Ras		613,905	623.114	709.393	505.858	1,499,167	556.444	1,497,136	625.221	
	Petelur										

No.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	TARGET DAN CAPAIAN SETIAP TAHUN						KONDISI AKHIR RPJMD 2023	KETERANG AN
				2019		2020		2021			
				TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	
	- Ayam Ras Pedaging		1,692,974	3.166.381	3,124,301	2.271.879	3,280,516	2.430.911	3,685,653	2.705.604	
1	Expor Bersih Perdagangan (Nilai Ekspor perdagangan)	(US\$)	874,774,550	4,958,558	83,932,734,376	4,958,558	4,686,394	4,958,558	4,305,627	874,774,550	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan Dan Perindustria n
2	Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal (Jumlah Pasar yang direvitalisasi standar SNI)	Pasar	-	3	30	1	1	1	1	3	
3	Daerah Tertib Ukur (Jumlah UTTP yang ditera/Tera Ulang)	UTTP	2.5	5	5000	14,000	5250	3,924	5300	4,500	
4	Pertumbuhan Sektor Perdagangan (Jumlah produk IKM/UKM yang dipromosikan)	Produk	100	30	30	65	30	30	30	40	
5	Sentra Perdagangan	Desa	N.A	5	2	5	0	5	2	25	
BIDANG PERINDUSTRIAN											
1	Pertumbuhan Industri	Persen	4.83	4.97	152	4.97	9.20	4.97		4.97	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan Dan

No.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	TARGET DAN CAPAIAN SETIAP TAHUN						KONDISI AKHIR RPJMD 2023	KETERANG AN
				2019		2020		2021			
				TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	
										Perindustria n	
2	Kajian dan Pengawasan Izin Usaha Industri, Standar Industri Hijau, dan Industri 4.0	Perusahaan	100	5	5	25	20	40	40	250	
3	Peningkatan Daya Saing untuk Produk Home Industri dan kemasan	IKM	580	90	90	32	30	30	130	145	
4	Desa Industri	Desa	N.A	2	2	8	5	5	3	8	
BIDANG TRANSMIGRASI											
1	Persentase Transmigrasi	Persen	15	15	-	15	-	15	-	25	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	Transmigran Swakarsa	Persen	100	100	-	-	-	-	-	-	
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH											
PERENCANAAN											
1	Penerapan e-planning, e-Report, e-budgeting, e-procurement, e-Sakip, e-monev, Simpeg, perijinan online, pajak online	Jenis Aplikasi	2	2	2	2	2	2	2	10	Bappeda, BPKAD, Bag PBJ, Bag Organisasi, Bag. Adbang, BKPSDM, DPMPSTP, Bapenda
2	Regulasi Desa Pinunjul	Regulasi	N/A	1	1	1	1	1	1	1	

No.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	TARGET DAN CAPAIAN SETIAP TAHUN						KONDISI AKHIR RPJMD 2023	KETERANG AN
				2019		2020		2021			
				TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	
3	Perencanaan Ekonomi Desa Pinunjul berbasis sistem	Persen	N/A	10	40	30	60	30	0	100	
4	Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan	Persen	90	>90	>90	>90	>90	>90	>90	>90	
5	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
6	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
7	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
8	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	Persen	98	98	100	100	100	100	100	100	
9	Sistim Informasi Manajemen Pemda	Unit	8	8	2 (SIMPEG dan e- Kinerja)	9	2 (SIMPEG dan e- Kinerja)	9	2 (SIMPEG dan e- Kinerja)	9	
10	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	Survei	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
KEUANGAN											
1	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah

No.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	TARGET DAN CAPAIAN SETIAP TAHUN						KONDISI AKHIR RPJMD 2023	KETERANG AN
				2019		2020		2021			
				TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	
2	Perbandingan antara Belanja Langsung dengan Belanja Tidak Langsung	Persen	BL 60	BL 58	BL 33	BL 56	BL 64	BL 54	BL 40	BL 50	
4	Penetapan APBD		BTL 40	BTL 42	BTL 62	BTL 45	BTL 62	BTL 46	BTL 60	BTL 50	
5	Prosentase SILPA	Persen	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	
6	Penerapan e-SIPKD, e-ATISISBADA, e-SIM Gaji	Jenis Aplikasi	18	17	1.9	16	1.2	15	1,80	13	
7	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	Kategori	3	3	3	3	3	3	3	3	BPKAD
8	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Dokumen	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BPKAD
		Aplikasi	-	-	-	50	50	50	50	50	BPKAD
11	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dokumen	-	-	-	2	2	2	2	2	
		Aplikasi	-	-	-	20	20	20	20	50	
12	Penerapan e-planning, e-Report, e-budgeting, e-procurement, e-Sakip, e-monev, Simpeg, perijinan online, pajak online, e-SIPKD, e-ATISISBADA, e-SIM Gaji	Jenis Aplikasi	-	-	-	1	1	1	1	1	
		Aplikasi	2	2	2	2	6	6	6	6	Bappeda
13	Penerapan e-planning, e-Report, e-budgeting, e-procurement, e-Sakip, e-monev, Simpeg, perijinan online, pajak online, e-SIPKD, e-ATISISBADA, e-SIM Gaji	Jenis Aplikasi	3	3	3	3	3	3	3	3	BPKAD

No.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	TARGET DAN CAPAIAN SETIAP TAHUN						KONDISI AKHIR RPJMD 2023	KETERANG AN
				2019		2020		2021			
				TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	
14	Nilai Target PAD	Milyar	344.43	336.09	301,40	311.53	298,73	341.03	343,83	369,67	Bappenda Bagian Organisasi
15	Penerapan e-SAKIP	Jenis Aplikasi	2	2	-	2	-	2	-	20	
16	Nilai SAKIP	Level	B	BB-	B	BB	B	BB+	B	A	
17	Skor LPPD	Poin	34,975	35,035	0	3,511	0	3,412	0	3,522	
18	Persentase lembaga / organisasi keagamaan yang dibina & difasilitasi	Persen	N/A	20	20	5	5	35	35	20	
KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN											
1	Penerapan e-planning, e-Report, e-budgeting, e- procurement, e-Sakip, e- monev, Simpeg, perijinan online, pajak online, e-SIPKD, e- ATISISBADA, e-SIM Gaji	Jenis Aplikasi	2	2	2	2	2	2	2	10	Badan Kepegawaian dan Pengembang an Sumber Daya Manusia
2	Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	Persen	2.98	5.58	6.1	5.86	0.41	5.86	4.84	5,86	
3	Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	Persen	4,41	0.95	0.83	6.26	0.88	6.26	6.4	6,26	
PENGAWASAN											
1	Maturitas SPIP	Level	3,00	3,00	3	3,00	3	3,00	3	3,00	Inspektorat
2	Persentase rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI yang ditindaklanjuti	Persen	73	70	90	73	84.17	75	85	85	
3	Prosentase Pelanggaran Pegawai	Persen	0.25	0.17		0.17		0.17	0,09	0.17	

No.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	TARGET DAN CAPAIAN SETIAP TAHUN						KONDISI AKHIR RPJMD 2023	KETERANG AN
				2019		2020		2021			
				TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	
4	Prosentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pengawasan Inspektorat Kabupaten	Persentase	n/a	50	57.71	55	63.37	65	68.4	75	
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK											
1	Persentase partisipasi masyarakat dalam Pemilu	Persen	68,78	71,52	74.11	-	n/a	-	n/a	75,52	Kesbangpol
2	Kegiatan Pembinaan Politik Daerah	Kegiatan	2	1	1	1	1	1	1	1	
3	Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKP	Kegiatan	2	1	1	1	1	1	1	1	
C	ASPEK DAYA SAING DAERAH										
1	Persentase lembaga keagamaan yang dibina & difasilitasi	Persen	n/a	20	20	5	5	35	35	20	Bag. Kesra
2	Persentase lembaga pendidikan keagamaan yang dibina & difasilitasi	Persen	n/a	20	20	5	5	35	35	20	Bag. Kesra
3	Prestasi olahraga tingkat Regional (Porda)	Peringkat	9	-	-	-	-	-	-	8	Disporapar
4	Prestasi olahraga tingkat Regional (Popda)	Peringkat	15	-	-	-	-	-	-	10	Disporapar
5	NilaiTukar Petani (NTP)	Poin	n/a	<100	101.33	<100	101.2	<100	96.45	>100	DKPP
6	Desa agro pinunjul	Desa	n/a	5	6	5	7	10	5	42	DKPP
7	Jumlah sentra unggulan pertanian	Desa	n/a	5	5	5	5	10	5	40	DKPP

No.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	TARGET DAN CAPAIAN SETIAP TAHUN						KONDISI AKHIR RPJMD 2023	KETERANG AN
				2019		2020		2021			
				TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	
8	Desa pinunjul tematik	Desa	n/a	5	8	5	5	5	8	35	DKUKMPerd agin&DKPP Disporapar
9	Desa wisata	Desa	n/a	-	6	7	5	7	8	25	
10	Indeks desa membangun	Poin	0.645	0.65	0.68	0.655	0.7019	0.66	0.7229	0.67	DPMD
11	Cakupan pelayanan penyelenggaraan penanggulangan bencana	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	BPBD
12	Kemantapan Jalan	Persen	80.9	81.9	75.43	82.9	76.5	83.9	79.063	85,9	DPUTR
13	Kondisi Baik Irigasi	Persen	59,01	60	59.77	62	56.91	64	60.93	70	DPUTR
14	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	68.00	68.22	67.80	66.11	67.04	66.45	68.91	67,142	DLH
15	Indeks kepuasan layanan masyarakat	Persen	82,08	83.62	83.4	74	80.04	74.12	76.51	75.52	Bappeda
16	Indeks toleransi beragama	Poin	n/a	68.3 – 68.6	73,83	68.7 – 69.0	67,46	69.1 – 69.4	72,39	69.9 – 70.2	Badan Kesbangpol
17	Indeks gotong royong (aksi bersama)	Poin	n/a	n/a	n/a	0.45	n/a	0.46	n/a	0.5	Badan Kesbangpol

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi indikator makro pembangunan maupun Indikator Kinerja Utama pembangunan, terdapat permasalahan pembangunan daerah yang perlu ditangani melalui intervensi kebijakan, program dan kegiatan yang sifatnya spesifik pada tahun 2023. Permasalahan pembangunan di Kabupaten Kuningan sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Pembangunan jaring pengaman sosial (pangan, kesehatan, pendidikan, pariwisata dan budaya) dalam upaya mengurangi angka kemiskinan

Permasalahan:

- 1) Semakin berkurangnya lahan pertanian dan menurunnya minat berusaha di bidang pertanian;
- 2) Masih tingginya AKI dan AKB;
- 3) Masih rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat;
- 4) Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) masih di bawah angka provinsi dan nasional;
- 5) Angka harapan lama sekolah (HLS) masih di bawah angka provinsi dan nasional;
- 6) Kuantitas, kualitas, dan sebaran guru belum sesuai dengan standar pelayanan minimal;
- 7) Belum tercapainya akses pendidikan wajib belajar 12 tahun;
- 8) Jaring pengaman bagi keberlanjutan pendidikan bagi penduduk miskin atau terancam miskin belum optimal;
- 9) Belum adanya skill khusus dari pendidikan yang akan menjadi keunggulan lulusan dalam menghadapi pasar tenaga kerja dan dunia usaha;
- 10) Masih rendahnya serapan dunia usaha dan industri untuk menerima tenaga kerja tingkat menengah karena dianggap masih kurang terampil dan kurang profesional.
- 11) Rendahnya pemanfaatan IT (Teknologi Informasi) bagi guru dan siswa;
- 12) Masih tingginya angka kemiskinan, di atas rata-rata angka kemiskinan Provinsi Jawa Barat dan Nasional;

- 13) Masih Tingginya angka pengangguran;
- 14) Terbatasnya lapangan pekerjaan dari sektor industri ramah lingkungan;
- 15) Belum optimalnya penyediaan dan pengelolaan pelayanan sosial (aksesibilitas untuk penyandang disabilitas, dan lain-lain);
- 16) Besarnya potensi kepariwisataan belum didukung oleh keterpaduan penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana;
- 17) Masih terbatasnya even-even kebudayaan yang dinamis, unik dan berkelas yang bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan dan kecerdasan masyarakat, serta mendukung peningkatan pembangunan pariwisata daerah.
- 18) Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga budaya lokal, sehingga masyarakat lebih memilih budaya asing yang lebih praktis dan sesuai dengan perkembangan zaman;
- 19) Kurangnya pembelajaran kebudayaan lokal sejak dini, padahal melalui pembelajaran budaya, kita dapat mengetahui pentingnya budaya lokal dalam membangun budaya bangsa serta bagaimana cara mengadaptasi budaya lokal ditengah perkembangan zaman;

Peningkatan sarana prasarana Pendidikan

Permasalahan:

- 1) Jumlah dan kualitas sarana prasana pendidikan masih terbatas;
- 2) Sarana prasarana pendidikan masih belum memenuhi standar serta belum mewadahi kebutuhan tumbuh kembang anak;
- 3) Fasilitas penunjang pendidikan termasuk pengembangan laboratorium dan perpustakaan sebagai sarana minat dan budaya baca masih belum memadai.

Revitalisasi posyandu, penyediaan sarana prasarana kesehatan dan penanganan gizi buruk

Permasalahan:

- 1) Masih tingginya jumlah kasus kematian ibu dan bayi;
- 2) Masih terdapat bayi dan balita dalam keadaan gizi buruk dan gizi kurang dan stunting;

- 3) Masih belum optimalnya wadah pemberdayaan masyarakat dalam alih informasi dan keterampilan dari petugas kepada masyarakat dan antar sesama masyarakat dalam rangka mempercepat penurunan AKI dan AKB;
- 4) Belum terpenuhinya sarana, prasarana dan alat kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan;
- 5) Belum meratanya ketersediaan sarana prasarana Posyandu di tiap desa;
- 6) Kurangnya tenaga Sumber Daya Manusia (SDM) di fasilitas pelayanan kesehatan;
- 7) Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pengelolaan sampah.
- 8) Masih tingginya kasus COVID-19 di Kabupaten Kuningan dan adanya penyebaran mutasi virus;
- 9) Perubahan perilaku masyarakat di masa pandemi COVID-19 masih perlu ditingkatkan oleh semua sektor.

Peningkatan Produktivitas Pertanian

Permasalahan:

- 1) Belum optimalnya sistem agribisnis terintegrasi yang berkelanjutan;
- 2) Pengetahuan petani yang masih terbatas dalam proses produksi;
- 3) Minimnya generasi penerus muda yang bergerak disektor pertanian;
- 4) Menurunnya produktivitas lahan yang berdampak pada menurunnya produksi hasil pertanian;
- 5) Masih rendahnya penerapan inovasi teknologi pertanian yang berwasan lingkungan.

Pengembangan Desa Wisata dan Wisata Desa

Permasalahan:

- 1) Masih belum optimalnya pengembangan industri kreatif terutama di bidang pariwisata;
- 2) Masih perlu dikembangkannya kebijakan lembaga pendidikan dan pemerintah daerah menyangkut keberpihakan untuk mendukung

target pembangunan daerah sebagai kabupaten yang berbasis pariwisata dan agropolitan;

- 3) Belum terintegrasinya pariwisata Kabupaten dan pariwisata desa;
- 4) Masih belum optimalnya pengelolaan potensi - potensi yang dimiliki oleh daerah, disebabkan minimnya pengetahuan;
- 5) Keberadaan BUMDes dan BUMDes Bersama belum secara signifikan memberikan dampak terhadap Desa Wisata dan Wisata Desa;
- 6) Belum terintegrasinya AksesDesa Wisata dan Wisata Desa terhadap pusat perekonomian /IKM/UKM produk unggulan Kabupaten Kuningan;
- 7) Belum berkembangnya kegiatan Agrowisata/Agroedukasi yang dapat dikembangkan sebagai Desa Wisata dan Wisata;
- 8) Belum memadainya pengetahuan dan keterampilan SDM penggerak pariwisata;
- 9) Konsep pembangunan pariwisata belum mengarah pada konsep pembangunan wilayah atau pengembangan kawasan.

Pelatihan Wirausaha dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam upaya menurunkan angka pengangguran

Permasalahan:

- 1) Belum optimalnya pengembangan IKM/UKM, yang ditunjukkan masih terdapatnya produk pangan industri rumah tangga yang belum mendapatkan legalisasi/sertifikasi industri;
- 2) Masih rendahnya penerapan teknologi industri yang baik oleh IKM/UKM;
- 3) Penyediaan bahan baku IKM/UKM belum mengutamakan bahan baku lokal;
- 4) Kapasitas produksi IKM yang belum mampu memenuhi permintaan pasar;
- 5) Masih rendahnya perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan;
- 6) Belum terintegrasinya produk unggulan dan potensi ekonomi perdesaan serta belum dilakukannya mapping potensi;

- 7) Masih rendahnya daya ungkit hasil produk unggulan desa dalam meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat perdesaan.

Peningkatan ekonomi sektor perdagangan dan industri berbasis produk unggulan

Permasalahan:

- 1) Masih rendahnya tingkat investasi sehingga berpengaruh pada sedikitnya serapan tenaga kerja;
- 2) Belum optimalnya nilai investasi pada sektor agribisnis/agroindustri/agrowisata;
- 3) Kurangnya peningkatan promosi dan kerjasama investasi;
- 4) Masih belum berkembangnya sentra industri.

Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Permasalahan:

- 1) Kondisi infrastruktur jalan dan irigasi relatif rendah karena proyeksi alokasi anggaran tidak sesuai rencana serta adanya bencana hidrometeorologi yang menyebabkan laju degradasi kualitas infrastruktur lebih cepat;
- 2) Kondisi struktur tanah yang labil (terutama Kuningan bagian selatan) berdampak pada kekuatan konstruksi utamanya konstruksi jalan;
- 3) Kualitas dan cakupan pelayanan air minum dan sanitasi layak masih perlu ditingkatkan;
- 4) Cakupan pelayanan pengelolaan sampah serta tingkat kesadaran masyarakat untuk melaksanakan pengurangan produksi sampah masih rendah.

Integrasi Sistem Aplikasi Online untuk Peningkatan Layanan Publik

Permasalahan:

- 1) Tuntutan dan kebutuhan sektor teknologi informasi dan telekomunikasi dalam penyelenggaraan pemerintah merupakan sektor yang paling dominan pada kehidupan saat ini dan yang akan datang;

- 2) Perlu ditingkatkannya integrasi sistem perencanaan antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Daerah dengan berbasis sistem aplikasi;
- 3) Perlu ditingkatkannya kualitas SDM aparatur dalam pengelolaan Sistem Aplikasi Online untuk pelayanan sektor publik.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah pada Bab ini, akan memberikan gambaran tentang kondisi ekonomi makro Kabupaten Kuningan serta pengaruh perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global terhadap perekonomian daerah. Disertakan juga perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial yang merupakan dasar kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan perencanaan anggaran berbasis kinerja.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Rumusan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2022 tidak lepas dari pencapaian pembangunan ekonomi pada Tahun 2020, proyeksi Tahun 2021 dan 2022 dengan tetap memperhatikan arah kebijakan pembangunan nasional dan regional provinsi Jawa Barat.

Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 difokuskan pada pemulihan ekonomi yang diarahkan kepada penyerapan tenaga kerja, penciptaan lapangan kerja dan membangkitkan kembali aktifitas usaha yang sudah ada. Dalam rangka pelaksanaan pemulihan ekonomi tersebut ditetapkan beberapa strategi dan arah kebijakan yaitu:

- a. Pemulihan Industri dan Perdagangan
 - i. Meningkatkan perlindungan dan keahlian tenaga kerja;
 - ii. Mengakselerasi perwujudan kawasan industri terpadu dalam konteks pengembangan industri 4.0;
 - iii. Meningkatkan implementasi pola kemitraan antara industri besar dengan IKM;
 - iv. Meningkatkan ekspor melalui pengembangan pasar ekspor nontradisional dan peningkatan kerjasama perdagangan luar negeri;
 - v. Digitalisasi Koperasi dan UMKM untuk peningkatan daya saing;

- vi. Peningkatan kapasitas fiskal Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang menjadi bagian dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Jawa Barat melalui penyertaan modal daerah untuk membantu efektivitas kebijakan relaksasi kredit bagi IKM dan UMKM. Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2021.
- b. Perbaikan sistem pangan meningkatkan ketersediaan pangan, akses pangan, dan pemanfaatan pangan melalui peningkatan produksi dan pasokan pangan
- c. Pembangunan pariwisata pemulihan kinerja pariwisata dengan:
 - i. Mengembangkan destinasi pariwisata dan meningkatkan kualitas ekonomi kreatif dan digital; dan
 - ii. Peningkatan promosi pariwisata berbasis digital dengan branding baru yang mengutamakan protokol kesehatan
- d. Percepatan Investasi
 - i. Mengoptimalkan promosi investasi dan fasilitasi para calon investor;
 - ii. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal; dan
 - iii. Fasilitasi untuk percepatan proyek-proyek investasi yang terhambat pelaksanaannya.
- e. Pembangunan infrastruktur mendorong pembangunan yang bersifat padat karya
- f. Penguatan Sektor Kesehatan
 - i. Meningkatkan pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan jaminan kesehatan; dan
 - ii. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat

Selain itu Rumusan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2022 juga mengacu pada strategi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025. Bagian akhir Sub Bab adalah poin-poin arah kebijakan pembangunan ekonomi

Tahun 2022. Arah kebijakan Pembangunan Tahun 2022 yaitu **“Pemantapan Daya Saing Daerah Berbasis Desa”** yang meliputi percepatan rehabilitasi dan aksesibilitas pendidikan, percepatan pembangunan desa khususnya sektor pertanian dan pariwisata, melalui pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur, peningkatan produktivitas dan lapangan kerja melalui UMKM/IMKM berbasis teknologi informasi, ketersediaan bantuan permodalan dan pengembangan usaha, pengembangan karakter berbangsa dan bernegara serta keluhuran nilai-nilai agama, peningkatan layanan kesehatan, khususnya bagi ibu dan anak, manula dan penyandang disabilitas, dan peningkatan mutu pelayanan dan transparansi pemerintahan melalui Sistem Informasi Terpadu.

Kondisi ini menjadi dasar pertimbangan dalam perumusan permasalahan pembangunan dan isu strategis yang akan dijadikan salah satu input bagi pengambilan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan, selain berbagai pertimbangan lainnya seperti kebijakan pembangunan nasional Tahun 2022, amanat penerapan standar pelayanan minimal, pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan, dan dokumen perencanaan strategis lainnya, serta kondisi sosial dan ekonomi akibat pandemi Covid-19 di Kabupaten Kuningan khususnya. Lebih lanjut, sebagai upaya untuk melaksanakan percepatan pemulihan kondisi ekonomi dan kesehatan masyarakat dari dampak COVID-19, maka pada Tahun 2021 terdapat satu tambahan prioritas pembangunan daerah yaitu “Rehabilitas dan Rekonstruksi Dampak Pandemi COVID-19”.

Sebagai gambaran pencapaian pembangunan daerah dapat dilihat dari indikator utama ekonomi makro daerah, diantaranya sebagai berikut:

Tabel 3.1 Indikator Makro Pembangunan Ekonomi Kabupaten Kuningan Tahun 2015-2021

INDIKATOR	SATUAN	REALISASI						
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	7,49	7,20	7,94	8,99	9,83	11,22	14,06

INDIKATOR	SATUAN	REALISASI						
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tingkat Kemiskinan	Persen	13,97	13,59	13,27	12,22	11,41	12,82	13,10
Indeks Gini	Poin	0,23	0,33	0,32	0,32*	0,435	0,361	0,349
Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	6,38	6,09	6,36	6,43*	6,56**	0,09	3,56
Inflasi (Kota Cirebon)	Persen	2,73	3,98	3,61	2,8	2,0	1,16	1,81
Pengeluaran per kapita	Rp (ribuan)	-	-	-	-	9.731	9.459	9.409

Sumber: BPS Kabupaten Kuningan, 2022

3.1.1 Evaluasi Kondisi Pembangunan Ekonomi Kabupaten Kuningan Tahun 2020 dan 2021

1) Pertumbuhan Ekonomi dan Produk Domestik Regional Bruto

Indikator untuk melihat pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah laju pertumbuhan PDRB. Indikator tersebut menggambarkan laju pertumbuhan produk seluruh kegiatan ekonomi yang dapat digambarkan dengan data pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan.

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kabupaten Kuningan Tahun 2020 mencapai 16.879,45 miliar rupiah, meningkat 0,09% dibandingkan tahun 2019 senilai 16.864,15 miliar rupiah. Pertumbuhan sektor dalam PDRB tahun 2020 yang menunjukkan nilai positif terjadi pada sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Industri Pengolahan; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estate; dan Jasa Pendidikan. Sedangkan sektor pertambangan dan penggalian; pengadaan listrik dan gas; perdagangan besar dan eceran, reparasi; transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum; jasa perusahaan; administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; jasa kesehatan dan kegiatan sosial; dan jasa lainnya mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2019.

Sektor penggerak utama perekonomian Kabupaten Kuningan masih didominasi oleh sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (24,60%); (2) Transportasi dan Pergudangan (14,25%); (3) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi (14,00%), (4) Jasa Pendidikan (12,42%); (5) Konstruksi (8,16%); dan (6) Jasa Keuangan dan Asuransi (5,52%).

Secara rinci data dari penjabaran diatas tersaji pada tabel 3.2 -3.4 dibawah ini.

Tabel 3.2 Nilai Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Kuningan Tahun 2016-2021 (Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha		2016	2017	2018	2019	2020*	2021**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.031,84	3.196,98	3.379,28	3.540,57	3.591,62	3.675,49
B	Pertambangan dan Penggalian	227,76	228,13	229,36	223,47	217,43	245,14
C	Industri Pengolahan	340,89	357,83	376,80	411,82	416,25	430,15
D	Pengadaan Listrik dan Gas	13,40	13,95	14,55	15,09	14,79	16,77
E	Pengadaan Air, Pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	12,61	13,53	14,53	14,99	16,32	17,36
F	Konstruksi	1.227,21	1.334,59	1.452,84	1.543,85	1.433,51	1.534,20
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.353,69	2.441,34	2.541,67	2.737,99	2.655,96	2.751,05
H	Transportasi dan Pergudangan	1.974,10	2.077,60	2.190,20	2.323,00	2.287,91	2.293,42
I	Penyediaan akomodasi dan Makan Minum	251,11	272,53	296,44	320,06	307,84	310,70
J	Informasi dan Komunikasi	695,96	772,13	841,97	919,42	1.142,56	1.223,60
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	746,64	783,18	823,96	855,98	859,97	903,64
Lapangan Usaha		2016	2017	2018	2019	2020*	2021**
L	Real Estate	426,50	465,75	507,04	553,01	554,89	618,42
M.N	Jasa Perusahaan	59,86	65,46	71,74	78,04	75,83	82,81
O	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	514,89	523,69	537,05	561,60	540,31	531,67
P	Jasa Pendidikan	1.364,00	1.509,51	1.663,63	1.812,97	1.843,53	1.896,95
Q	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	234,42	257,39	277,91	302,65	292,77	314,78

R,S, T,U	Jasa lainnya	502,90	553,05	603,00	649,64	631,27	636,86
PDRB		13.175,672	14.866,629	15.821,945	16.864,15	16.882,76	17.483,02

Sumber: BPS Kabupaten Kuningan, 2022

Tabel 3.3 Laju Pertumbuhan Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Konstan (%) Kabupaten Kuningan Tahun 2016 – 2021

No.	Sektor	2016	2017	2018	2019	2020*	2021**
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,53	5,45	5,70	4,77	1,44	2,34
2.	Pertambangan dan Penggalan	-0,20	0,16	0,54	-2,57	-2,70	12,75
3.	Industri Pengolahan	7,15	4,97	5,30	9,29	1,07	3,34
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	5,90	4,08	4,34	3,74	-1,99	13,34
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,	5,83	7,30	7,36	3,21	8,85	6,39
6.	Konstruksi	3,58	8,75	8,86	6,26	-7,15	7,02
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi	4,25	3,72	4,11	7,72	-3,00	3,58
8.	Transportasi dan Pergudangan	6,86	5,24	5,42	6,06	-1,51	0,24
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,02	8,53	8,77	7,97	-3,82	0,93
10.	Informasi dan Komunikasi	11,35	10,94	9,04	9,20	24,27	7,09
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	9,35	4,89	5,21	3,89	0,47	5,08
12.	Real Estate	6,74	9,20	8,87	9,07	0,34	11,45
13.	Jasa Perusahaan	8,80	9,36	9,59	8,78	-2,83	9,21
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	3,02	1,71	2,55	4,57	-3,79	-1,60
15.	Jasa Pendidikan	9,93	10,67	10,21	8,98	1,69	2,90
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,20	9,80	7,97	8,90	-3,26	7,52
17.	Jasa Lainnya	8,27	9,97	9,03	7,73	-2,83	0,89
PDRB		6,09	6,36	6,43	6,59	0,11	3,56

Sumber: BPS Kabupaten Kuningan, 2022

**Tabel 3.4 Distribusi Prosentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Kabupaten Kuningan Tahun 2016 – 2021**

No.	Sektor	2016	2017	2018	2019	2020*	2021**
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	23,92	23,79	24,23	24,36	24,60	23,91
2.	Pertambangan dan Penggalian	1,66	1,47	1,34	1,21	1,22	1,22
3.	Industri Pengolahan	2,37	2,31	2,23	2,22	2,25	2,27
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,	0,09	0,09	0,10	0,10	0,10	0,11
6.	Konstruksi	8,69	8,69	8,78	8,89	8,92	8,16
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi	15,09	14,67	14,22	14,28	14,00	14,06
8.	Transportasi dan Pergudangan	15,42	15,17	14,72	14,25	14,02	14,02
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,76	1,81	1,84	1,86	1,82	1,80
10.	Informasi dan Komunikasi	3,56	3,56	3,63	3,58	3,51	4,27
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,61	5,64	5,60	5,54	5,52	5,79
12.	Real Estate	2,60	2,60	2,61	2,59	2,58	2,56
13.	Jasa Perusahaan	0,39	0,40	0,42	0,45	0,44	0,46
	Administrasi	4,31	4,31	4,17	4,01	3,84	3,67
14.	Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib						
15.	Jasa Pendidikan	9,89	10,61	11,33	11,90	12,42	12,54
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,55	1,55	1,59	1,58	1,61	1,57
17.	Jasa Lainnya	3,03	3,16	3,23	3,28	3,29	3,15
PDRB		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

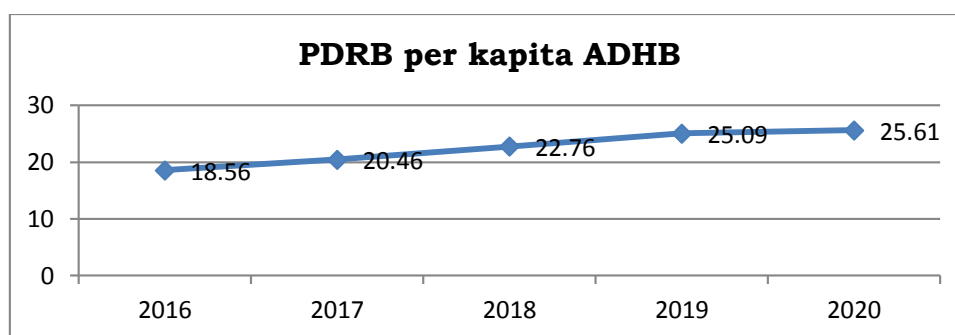
Sumber: BPS Kabupaten Kuningan, 2022

Sebagai acuan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, yaitu dilakukan melalui perhitungan PDRB per kapita. Semakin tinggi PDRB per kapita suatu daerah, maka semakin baik tingkat perekonomian daerah tersebut, walaupun ukuran ini belum mencakup faktor kesenjangan pendapatan antar penduduk. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

PDRB per kapita juga digunakan sebagai ukuran “produktivitas” suatu wilayah, karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik, yang dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan nilai tambah, pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan.

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Kuningan atas dasar harga berlaku selama 5 tahun terakhir mengalami trend peningkatan dengan rata-rata peningkatan pertahun sebesar 10,18 %. Pada tahun 2016, PDRB per kapita tercatat sebesar 18,56 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2020 mencapai 25,61 juta rupiah. Ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kuningan semakin meningkat.

Gambar 3.1 PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Kuningan Tahun 2016-2020 (juta rupiah)



Sumber: BPS Kab. Kuningan, 2020 (diolah)

Tabel 3.5 PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Kuningan Tahun 2016-2021 (juta rupiah)

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020*)
PDRB Perkapita ADHB	18,56	20,46	22,76	25,09	25,61
Peningkatan PDRB Perkapita	15,35%	10,23%	11,24%	10,23%	2,07%

Sumber: BPS Kabupaten Kuningan, 2022

*)Data Sementara, **)Data Sangat Sementara

2) Ketenagakerjaan

Ada beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur ketenagakerjaan, antara lain, yaitu melalui ; a) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK); b) Tingkat Pengangguran Terbuka; dan c) Angka Beban Ketergantungan.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK adalah perbandingan antara jumlah angkatan kerja terhadap total penduduk usia kerja. TPAK ini merupakan indikator untuk melihat keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi. Pada tahun 2021 tercatat TPAK penduduk kabupaten kuningan telah mencapai 63,82 persen.

Dilihat aspek gender di bidang ketenagakerjaan, pada tahun 2021 tampak keterlibatan penduduk perempuan dalam kegiatan ekonomi dinilai masih rendah, hal ini ditunjukkan dengan TPAK penduduk perempuan proporsinya kurang dari separuh penduduk laki-laki, yang masing-masing, TPAK perempuan sekitar 45,41 persen sedangkan TPAK laki-laki sekitar 82,38 persen.

Tabel 3.6 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Kuningan Tahun 2017-2021

Uraian	2017		2018		2019		2020		2021	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja berdasarkan Jenis Kelamin (%)	78,16	37,40	79,59	37,88	82,24	40,57	78,89	45,20	82,38	45,41
TPAK (%)	57,69		58,65		61,31		61,98		63,82	

Sumber: BPS Kab. Kuningan, 2021

Dari tabel di atas dapat digambarkan, bahwa ada persoalan yang masih cukup besar terkait dengan partisipasi angkatan kerja. Tantangan besar berikutnya adalah masih sangat rendahnya partisipasi angkatan kerja perempuan, dan kondisi ini menjadi rentan terhadap posisi perempuan dalam rumah tangga, sehingga berpotensi terhadap KDRT.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang sedang mencari pekerjaan dan jumlah angkatan kerja. BPS mendefinisikan pengangguran yaitu orang yang masuk dalam angkatan kerja (15 sampai 64 tahun) yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya.

Pada Tahun 2021, TPT penduduk Kabupaten Kuningan mencapai 11,68 persen, mengalami kenaikan sebesar 0,46 persen bila dibandingkan dengan kondisi Tahun 2020. Dilihat menurut aspek laki-laki dan perempuan, pengangguran terbuka laki-laki proporsinya 0,91 persen lebih sedikit dibandingkan dengan pengangguran terbuka perempuan, yaitu TPT

perempuan sebesar 12,26 persen, sedangkan TPT laki-laki hanya sebesar 11,35 persen.

Dari data BPS, dari 850.552 jiwa penduduk usia kerja, 542.782 jiwa adalah angkatan kerja (terdiri dari yang bekerja dan pengangguran terbuka) dan 307.770 jiwa bukan angkatan kerja (terdiri dari mereka yang bersekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya). Penduduk yang bekerja sejumlah 479.405 jiwa terdiri dari 309.240 jiwa laki-laki dan 170.165 jiwa perempuan.

**Tabel 3.7 Data Ketenagakerjaan di Kabupaten Kuningan
Tahun 2019 – 2021**

Indikator	2019			2020			2021		
	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
Penduduk Usia 15 tahun keatas	407.610	411.198	818.808	419.144	422.605	841.749	423.406	427.146	850.552
Angkatan Kerja	335.211	166.840	502.051	330.660	191.017	521.677	348.835	193.947	542.782
- Bekerja	303.852	149.929	453.781	292.807	170.357	463.164	309.240	170.165	479.405
- Pengangguran Terbuka	31.359	16.911	48.270	37.853	20.660	58.513	39.595	23.782	63.377
Bukan Angkatan Kerja	72.399	244.358	316.757	88.484	231.588	320.072	74.571	233.199	307.770
- Sekolah	31.541	28.403	59.944	30.595	24.816	55.411	26.952	26.631	53.583
- Mengurus Rumah Tangga	17.729	201.370	219.099	21.695	183.534	205.229	7.335	185.758	193.093
- Lainnya	23.129	14.585	37.714	36.194	23.238	59.432	40.284	20.810	61.094
TPAK	82,24	40,57	61,31	78,89	45,20	61,98	82,38	45,41	63,82
TPT	9,35	10,14	9,61	11,45	10,82	11,22	11,35	12,26	11,68
TKK	90,64	89,86	90,38	88,55	89,18	88,78	88,65	87,74	88,32

Sumber: BPS Kab. Kuningan, 2022

Keterangan: L = Laki-laki ; P = Perempuan

Dilihat dari tingkat pendidikan, jumlah angkatan kerja paling besar adalah berpendidikan Sekolah Dasar (60,52%), SMP (55,25%), SMA (72,11%), dan Diploma/Sarjana (84%). Jumlah Angkatan Kerja paling besar adalah berpendidikan Diploma/Sarjana. Namun, dari tingkat pengangguran yang paling tinggi adalah yang berpendidikan SMP (15,31%), yang selanjutnya SMA (14,14%), Sekolah Dasar (9,61%), dan Diploma/Sarjana (7,20%). Hal ini menggambarkan bahwa perbaikan

tingkat pendidikan masyarakat belum mampu meningkatkan angka penyerapan tenaga kerja.

Meningkatnya tingkat pengangguran dari tahun ketahun berdampak pada kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat Kabupaten Kuningan. Di bidang ekonomi, tingkat pengangguran yang tinggi akan memberikan dampak peningkatan beban pencapaian tujuan pembangunan ekonomi. Hal ini karena apabila melihat struktur pembentukan PDRB dari sisi pengeluaran, kontribusi pengeluaran dari konsumsi rumah tangga mencapai 82% pada tahun 2021, maka peningkatan pengangguran menimbulkan penurunan daya beli masyarakat sehingga akan berdampak negatif secara langsung terhadap perekonomian daerah.

Selain itu pengangguran akan menyebabkan meningkatkan kemiskinan, kemiskinan terjadi karena ketidakmampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, kesehatan, pakaian dan lain-lain. Selain dampaknya terhadap perekonomian, pengangguran juga berdampak pada kehidupan sosial yaitu meningkatnya tingkat kriminalitas.

Angka Beban Ketergantungan (*Dependency Ratio*). Masalah ketenagakerjaan tidak hanya melihat dari TPT dan jumlah penduduk bekerja, namun perlu diperhatikan pula aspek kualitas ketenagakerjaan. Salah satunya adalah dengan memperhatikan rasio ketergantungan. Angka Beban Ketergantungan (*Dependency ratio*) merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tinggi persentase angka beban ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase angka beban ketergantungan yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Dampak keberhasilan pembangunan kependudukan juga dapat dilihat pada perubahan komposisi penduduk menurut umur seperti tercermin angka beban ketergantungan akan memberikan kesempatan

yang semakin besar bagi penduduk usia produktif untuk meningkatkan kualitasnya.

Tabel 3.8 Angka Beban Ketergantungan Kabupaten Kuningan Tahun 2017-2021

No.	Kelompok Umur (Tahun)	2017	2018	2019	2020	2021
1	0 – 14	25,05	24,70	24,37	23,80	23,42
2	15 – 64	66,26	66,30	66,30	68,35	68,31
3	65+	8,70	9,00	9,33	7,85	8,27
4	Angka Beban Tanggungan	50,93	50,83	50,82	46,31	46,40

Sumber: BPS Kabupaten Kuningan, 2022

Selama periode 2017-2021 angka beban ketergantungan cenderung mengalami penurunan. Angka beban ketergantungan di Kabupaten Kuningan sebesar 50,93 di tahun 2017, terus mengalami penurunan sampai tahun 2021 menjadi sebesar 46,40, berarti bahwa setiap 100 penduduk produktif masih menanggung beban sekitar 46 penduduk tidak produktif (di bawah umur 15 tahun dan 65 tahun ke atas).

1) Kemiskinan

Persentase penduduk diatas garis kemiskinan dihitung dengan menggunakan formula $(100 - \text{angka kemiskinan})$. Angka kemiskinan adalah perbandingan antara persentase penduduk yang masuk kategori miskin terhadap jumlah penduduk. Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak.

Garis kemiskinan menggambarkan batas minimum pengeluaran per kapita per bulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan non makanan yang memisahkan seseorang tergolong miskin atau tidak. Sedangkan indikator persentase penduduk di atas garis kemiskinan adalah indikator yang menggambarkan rasio penduduk yang hidup berkecukupan dan yang tidak menurut standar tertentu yang berlaku secara nasional.

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Kuningan masih terbilang tinggi, yaitu 13,10% pada tahun 2021. Angka ini masih jauh di atas persentase penduduk miskin Jawa Barat sebesar 8,40% dan nasional sebesar 9,71%. Secara rinci, angka kemiskinan di Kabupaten Kuningan tergambar sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.9 Angka Kemiskinan Kabupaten Kuningan Tahun 2017-2021

No.	Indikator	Angka Kemiskinan				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Penduduk Miskin (000 jiwa)	141,55	131,16	123,16	139,20	143,35
2	Garis Kemiskinan	302.061	332.483	340.775	352.358	358.069
3	Persentase Penduduk Miskin	13,27	12,22	11,41	12,82	13,10

Sumber: BPS Kab. Kuningan, 2022

Keberhasilan program KB tidak terlepas dari upaya yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat dan lembaga atau organisasi masyarakat lainnya yang secara bersama-sama mensukseskan program dimaksud yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2016, sesuai dengan tahapan atau tingkatan kesejahteraan keluarga, maka setiap keluarga dapat dikelompokkan kepada 3 (tiga) tahapan keluarga yaitu: Keluarga Pra Sejahtera, Keluarga Sejahtera Tahap I, dan Keluarga Sejahtera Tahap II. Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera di Kabupaten Kuningan Tahun 2017-2021 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.10 Persentase Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera Kabupaten Kuningan Tahun 2017-2021

Jumlah Keluarga	2017	2018	2019	2020	2021
Pra Sejahtera	5,29	5,11	3,92	3,97	4,07
Sejahtera Tahap I	64,05	44,76	58,02	57,56	57,60
Sejahtera Tahap II	30,66	50,13	38,06	38,47	38,33

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA Kab. Kuningan, 2022

2) Gini Rasio

Gini Ratio adalah salah satu alat untuk mengukur derajat ketidakmerataan distribusi pendapatan penduduk. Nilai rasio gini berkisar antara 0 (nol) dan 1 (satu). Koefisien gini bernilai 0 menunjukkan adanya

pemerataan pendapatan yang sempurna. Sebaliknya, rasio gini yang bernilai 1 mengindikasikan adanya pemerataan pendapatan yang tidak sempurna, atau dengan kata lain terjadi ketimpangan sempurna.

Gini Rasio di Kabupaten Kuningan relatif rendah dan trend relatif stabil dari tahun ke tahun. Hal ini diperlihatkan oleh angka gini ratio (GR) yang berada pada angka 0,32 pada tahun 2017 dan naik pada angka 0,349 di tahun 2021. Artinya, terdapat sedikit peningkatan ketimpangan atau ketidakmerataan pengeluaran antar penduduk dari tahun sebelumnya meskipun masih berada pada taraf tingkat ketimpangan rendah (karena $GR < 0,4$). Hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.11 Gini Ratio Kabupaten Kuningan Tahun 2017 – 2021

Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
Gini Ratio	0,32	0,32	0,435	0,361	0,349

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kuningan, 2022

3) Inflasi

Terdapat 7 (tujuh) Kota di Jawa Barat yang dihitung angka inflasinya oleh Badan Pusat Statistik (BPS), tujuh kota besar tersebut yaitu Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Bogor, Kota Sukabumi dan Kota Tasikmalaya. Di wilayah III Cirebon, untuk melihat gambaran inflasi Kabupaten sekitarnya biasanya menggunakan data inflasi Kota Cirebon. Pada tahun 2021, inflasi kota Cirebon adalah 1,81% (BPS Kota Cirebon). Angka inflasi tersebut berada di atas inflasi Jawa Barat yaitu 1,69% dan masih di bawah inflasi Nasional sebesar 1,87% pada tahun yang sama (BPS).

3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Tahun 2019-2023

Prospek perekonomian Kabupaten Kuningan, tidak terlepas dari tantangan dan prospek pada tataran lingkungan sekitarnya baik itu secara global, nasional maupun perkembangan perekonomian regional Provinsi Jawa Barat serta perekonomian regional Kabupaten Kuningan sendiri. Kabupaten Kuningan untuk 5 tahun ke depan, memproyeksikan target pencapaian pembangunan ekonomi daerah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.12 Target Kinerja Indikator Makro Pembangunan Ekonomi

Indikator	Satuan	Target			
		2020	2021	2022	2023
Laju pertumbuhan Ekonomi	Persen	-2,42 - 1,51	1,75 - 2,65	1,90 - 3,00	2,00- 3,45
Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	15,25	13,80	11,01	10,14
Angka kemiskinan	Persen	13,58	13,38	13,06	12,74
Gini Ratio	Poin	<0,38	<0,38	<0,38	<0,38
Inflasi	Persen	≥4,02	≥4,02	≥4,02	≥4,02

Sumber: Bappeda Kabupaten Kuningan, 2022

3.1.2.1 Tantangan serta Prospek Perekonomian Global dan Nasional

Prospek ekonomi global pada tahun 2022 diperkirakan masih sangat dipengaruhi oleh kondisi Pandemi Covid 19. Berdasarkan *World Economic Outlook* (WEO) IMF, ekonomi dunia khususnya pada negara-negara *emerging* (rendah menuju menengah) dan *developing economies* (berkembang menuju maju), kinerja ekonominya diproyeksikan meningkat. Pertumbuhan ekonomi global tahun 2021 diperkirakan sebesar 5,5% (yoy) dan 4,2% (q4toq4), jauh lebih tinggi daripada tahun 2020 masing-masing sebesar -3,5% (yoy) dan -1,4% (q4toq4). Proyeksi ini sudah direvisi (lebih baik) dari perkiraan sebelumnya, yaitu sebesar 5,2% (yoy) dan berdasarkan rilis proyeksi IMF bulan Oktober 2020.

Volume perdagangan dunia tahun 2021 diharapkan bertambah menjadi 8% (yoy) setelah turun di tahun 2020 sebesar 5,3% (yoy). Hal ini diperkirakan turut memberikan dampak positif pada perekonomian Jawa Barat yang memiliki pangsa ekspor besar ke negara mitra dagang utama seperti Amerika Serikat, Jepang, ASEAN, Eropa dan Tiongkok. Perang dagang Tiongkok dan AS mulai mereda seiring dengan penandatanganan kesepakatan fase I pada Januari 2020 meningkatkan optimisme perekonomian global yang turut berdampak positif pada perekonomian Jawa Barat sehubungan dengan potensi peningkatan permintaan ekspor. Namun demikian, perkembangan COVID-19 dengan perkiraan dampak *outbreak* rata-rata 4-6 bulan, menahan laju pemulihan ekonomi global sehingga dilakukan koreksi proyeksi kebawah oleh IMF baik untuk pertumbuhan ekonomi dunia ataupun pertumbuhan *world trade volume*.

Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan tahun 2021 akan berada pada kisaran 4,1%-5,1% (yoy) dan 6,7% (q2), jauh lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 sebesar -2,07% (yoy) dan -5,32% (q2). Sementara, volume perdagangan untuk tahun 2019 adalah sebesar US\$ 338,958.7 dan tahun 2020 adalah sebesar US\$ 304,875.3; mengalami penurunan sebesar US\$ 34,083.4 atau 10,05% yang diakibatkan adanya Pandemi covid 19. (Sumber: BPS, diolah Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Perdagangan).

3.1.2.2 Tantangan serta Prospek Perekonomian Regional Jawa Barat

Secara tahunan, pertumbuhan ekonomi Jawa Barat tahun 2020 sebesar -2,44% (yoy), jauh melambat dibanding tahun 2019 5,07% (yoy). Namun demikian, realisasi ini masih lebih tinggi dibanding dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat sebesar -3,5% Perlambatan ekonomi Jawa Barat pada tahun 2020 terutama dipengaruhi oleh kondisi Pandemi Covid 19. Selain itu perlambatan juga dipengaruhi oleh dampak *based year*, dimana tahun 2019 lebih banyak faktor pendorong pertumbuhan yang sulit diimbangi di tahun 2020. Namun demikian, permintaan domestik masih kuat seiring dengan rata-rata kenaikan UMK sebesar 8,51%. Selain itu, penyaluran bantuan sosial pada tahun 2020 tercatat lebih tinggi dibanding tahun 2019. Penyaluran bansos PKH tercatat meningkat sebesar 25%, sementara itu penyaluran bansos BPNT meningkat sebesar 27.4%, yaitu dari 20,4 triliun menjadi 28,1 triliun. Hal ini turut mendorong pendapatan masyarakat pada tahun 2020.

Perlambatan ekonomi Jawa Barat triwulan IV 2019 antara lain disebabkan oleh menurunnya konsumsi masyarakat seiring dengan penurunan pendapatan di akhir tahun 2019, akibat dari realisasi bansos yang mencapai 73% dilakukan di semester I 2019 sehingga realisasi bansos diakhir tahun cenderung kecil. Selain itu, kondisi perekonomian global yang cenderung melambat menyebabkan ekspor Jawa Barat, khususnya ekspor luar negeri menurun.

3.1.2.3 Perkembangan Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

Di tengah melambatnya laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Jawa Barat pada triwulan IV 2019, kondisi ketenagakerjaan di Jawa Barat mengalami perbaikan. Hal ini tercermin dari Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Barat yang menurun dari 8,17% pada Agustus 2018 menjadi 7,99% pada Agustus 2019. Kesejahteraan petani terpantau membaik, tercermin dari pertumbuhan nilai tukar petani (NTP) pada triwulan IV 2019 (1,57%, yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan III 2019 (1,18%). Sementara itu, kondisi kesejahteraan masyarakat Jawa Barat secara umum membaik ditengah perlambatan pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV 2019. Perbaikan kondisi ketenagakerjaan dan kesejahteraan pada 2019 juga tidak terlepas dari Program Padat Karya Tunai yang diinisiasi Pemerintah sejak 2018 dan kembali dilanjutkan pada 2019.

3.1.2.4 Prakiraan Perekonomian Ke Depan

Keseluruhan tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Jawa Barat diperkirakan berada pada kisaran 5,0%-5,4% (yoy) relative lebih tinggi dari pada prakiraan pertumbuhan pada tahun 2019. Pertumbuhan tersebut diperkirakan meningkat seiring dengan adanya kenaikan UMK dan anggaran bansos oleh Pemerintah. Dari sisi lapangan usaha, kinerja sektor utama meningkat sejalan dengan potensi perbaikan kondisi ekonomi global dan meredanya tensi perang dagang antara AS-Tiongkok, serta memasuki masa pemilihan presiden AS. Selain itu, kinerja sektor pertanian diperkirakan lebih baik dibandingkan 2019 karena kondisi cuaca yang lebih baik. Dengan demikian, daya beli masyarakat cenderung terjaga.

Sementara itu, tekanan inflasi pada tahun 2020 diperkirakan moderat dengan proyeksi masih berada dalam kisaran sasaran inflasi nasional $3,0\% \pm 1\%$ (yoy). Peningkatan biaya-biaya yang diatur oleh pemerintah seperti biaya listrik, BPJS, dan rokok diperkirakan menjadi faktor yang berpotensi memberikan tekanan terhadap inflasi. Disisi lain, tren penurunan harga komoditas global diperkirakan masih menjadi penahan inflasi pada tahun 2020.

3.1.2.5 Tantangan serta Prospek Perekonomian Kabupaten Kuningan

Analisis SWOT untuk tantangan perekonomian Kabupaten Kuningan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 3.13 Analisis SWOT Ekonomi Kabupaten Kuningan

Strenghts	Weakness	Opportunities	Threats
- Kepemilikan potensi sumberdaya pertanian sebagai sektor dominan perekonomian. - Kekayaan destinasi pariwisata alami sebagai sektor unggulan yang dikembangkan untuk sumber pendapatan daerah. - Ketersediaan SDM yang sebagian besar pada usia produktif. - Keberadaan IKM berbahan baku produk pertanian. - Stabilitas makro ekonomi daerah yang terjaga	- Rata-rata Kepemilikan lahan pertanian yang kecil sehingga kurang efisien untuk kegiatan usahatani - Terbatasnya sarana prasarana pertanian dan pariwisata. - Rendahnya pengembangan produk, destinasi dan daya tarik wisata. - Inovasi dan kualitas produk masih rendah dan sebagian bahan baku produksi masih tergantung pada daerah lain - Pertumbuhan ekonomi disertai meningkatnya ketimpangan pendapatan dan wilayah. - Pertumbuhan ekonomi belum berdampak pada penurunan pengangguran dan kemiskinan secara signifikan - Keterbatasan wirausahawan lokal sebagai penggerak ekonomi daerah.	- Memiliki topografi yang indah dan tanah yang subur sehingga dapat mendukung aktivitas di sektor pertanian dan pariwisata. - Peluang pasar dalam negeri dan luar negeri produk pertanian Kuningan terus berkembang. - Stabilitas ekonomi regional, global dan nasional. - Infrastruktur (Tol Cipali dan BIJB) yang telah mempercepat jarak tempuh wisatawan dalam dan luar negeri masuk ke wilayah Kabupaten Kuningan. - Adanya tematik sektoral dan kewilayahan. - Adanya <i>common goal</i> dan janji Gubernur yang memperkuat arah pembangunan ekonomi. - Adanya arah pengelolaan metropolitan Cirebon Raya dan Pusat Pertumbuhan Wilayah Cirebon.	- Potensi bencana akibat aktivitas gunung berapi (Gunung Ciremai) yang bisa terjadi kapan saja dapat mengganggu aktivitas perekonomian. - Daya saing ekonomi Kabupaten Kuningan yang meningkat. - Persaingan produk serupa yang semakin tinggi. - Masuknya produk impor yang lebih bersaing dari produk lokal. - Infrastruktur dan sarana prasarana ekonomi yang lebih baik di daerah tetangga yang lebih menarik investor dari luar untuk masuk.

Tabel 3.14 Analisis Faktor Internal dan Eksternal RKPD 2023

FAKTOR INTERNAL	PELUANG	TANTANGAN
	Memiliki topografi yang indah dan tanah yang subur sehingga dapat mendukung aktivitas di sektor pertaniandan pariwisata.	Potensi bencana akibat aktivitas gunung berapi (Gunung Ciremai) yang bisa terjadi kapan saja dapat mengganggu aktivitas perekonomian
	Peluang pasar dalam negeri dan luar negeri produk pertanian Kuningan terus berkembang.	Daya saing ekonomi Kabupaten tetangga yang meningkat.
	Stabilitas ekonomi regional, global dan nasional.	Persaingan produk serupa yang semakin tinggi.
	Infrastruktur (Tol Cipali dan BIJB) yang telah mempercepat jarak tempuh wisatawan dalam dan luar negeri masuk ke wilayah Kabupaten Kuningan.	Infrastruktur dan sarana prasarana ekonomi yang lebih baik di daerah tetangga yang lebih menarik investor dari luar untuk masuk.
	Adanya tematik sektoral dan kewilayahan.	Masuknya produk impor yang lebih bersaing dari produk lokal.
	Adanya common goal dan janji Gubernur yang memperkuat arah pembangunan ekonomi.	
	Adanya arah pengelolaan metropolitan Cirebon Raya dan Pusat Pertumbuhan Wilayah Cirebon.	
FAKTOR INTERNAL	KEKUATAN	KELEMAHAN
	Kepemilikan potensi sumberdaya pertanian sebagai sektor dominan perekonomian.	Rata rata kepemilikan lahan yang kecil sehingga kurang efisien untuk kegiatan ussha tani
	Kekayaan destinasi pariwisata alami sebagai sektor unggulan yang dikembangkan untuk sumber pendapatan daerah.	Terbatasnya sarana prasarana pertanian dan pariwisata.
	Ketersediaan SDM yang sebagian besar pada usia produktif.	Rendahnya pengembangan produk, destinasi dan daya tarik wisata.
	Keberadaan IKM berbahan baku produk pertanian.	Inovasi dan kualitas produk masih rendah dan sebagian bahan baku produksi masih tergantung pada daerah lain
	Stabilitas makro ekonomi daerah yang terjaga	Pertumbuhan ekonomi disertai meningkatnya ketimpangan pendapatan dan wilayah.
		Pertumbuhan ekonomi belum berdampak pada penurunan

		pengangguran dan kemiskinan secara signifikan
		Keterbatasan wirausahawan lokal sebagai penggerak ekonomi daerah.

Tabel 3.15 Analisis Faktor Strategi Internal (IFAS)

KEKUATAN (STRENGTH)	Bobot	Rating	Skor
Kepemilikan potensi sumberdaya pertanian sebagai sektor dominan perekonomian.	0,14	4	0,56
Kekayaan destinasi pariwisata alami sebagai sektor unggulan yang dikembangkan untuk sumber pendapatan daerah.	0,12	3	0,36
Ketersediaan SDM yang sebagian besar pada usia produktif.	0,08	3	0,24
Keberadaan IKM berbahan baku produk pertanian.	0,08	4	0,32
Stabilitas makro ekonomi daerah yang terjaga	0,08	4	0,32
JUMLAH	0,5		1,80
KELEMAHAN (WEAKNESS)			
Rata rata kepemilikan lahan yang kecil sehingga kurang efisien untuk kegiatan usaha tani	0,07	2	0,14
Terbatasnya sarana prasarana pertanian dan pariwisata.	0,08	3	0,24
Rendahnya pengembangan produk, destinasi dan daya tarik wisata.	0,06	3	0,18
Inovasi dan kualitas produk masih rendah dan sebagian bahan baku produksi masih tergantung pada daerah lain	0,09	3	0,31
Pertumbuhan ekonomi disertai meningkatnya ketimpangan pendapatan dan wilayah.	0,07	3	0,24
Pertumbuhan ekonomi belum berdampak pada penurunan pengangguran dan kemiskinan secara signifikan	0,05	3	0,15
Keterbatasan wirausahawan lokal sebagai penggerak ekonomi daerah.	0,08	3	0,24
JUMLAH	0,5		1,49

Tabel 3.16 Analisis Faktor Strategi Eksternal (EFAS)

PELUANG (OPPORTUNITY)	Bobot	Rating	Skor
Memiliki topografi yang indah dan tanah yang subur sehingga dapat mendukung aktivitas di sektor pertanian dan pariwisata.	0,06	3	0,18
Peluang pasar dalam negeri dan luar negeri produk pertanian Kuningan terus berkembang.	0,09	4	0,36
Stabilitas ekonomi regional, nasional dan global	0,06	4	0,24
Infrastruktur (Tol Cipali dan BIJB) yang telah mempercepat jarak tempuh wisatawan dalam dan luar negeri masuk ke wilayah Kabupaten Kuningan.	0,09	3	0,306
Adanya tematik sektoral dan kewilayahan.	0,06	3	0,204
Adanya common goal dan janji Gubernur yang memperkuat arah pembangunan ekonomi.	0,05	3	0,15

PELUANG (OPPORTUNITY)	Bobot	Rating	Skor
Adanya arah pengelolaan metropolitan Cirebon Raya dan Pusat Pertumbuhan Wilayah Cirebon.	0,09	4	0,36
JUMLAH	0,5		1,80
TANTANGAN (THREATS)			
Potensi bencana akibat rawan longsor dapat mengganggu aktivitas perekonomian	0,08	2	0,16
Daya saing ekonomi Kabupaten tetangga yang meningkat.	0,12	4	0,48
Persaingan produk serupa yang semakin tinggi.	0,14	3	0,42
Belum memadainya daya dukung Infrastruktur dan sarana prasarana ekonomi yang lebih baik untuk menarik investor dari luar untuk masuk.	0,10	3	0,3
Masuknya produk impor yang lebih bersaing dari produk lokal.	0,06	2	0,12
JUMLAH	0,5		1,48

Setelah memberikan bobot dan rating pada faktor faktor internal dan eksternal, kemudian merumuskan alternatif alternatif strategi menggunakan matrik SWOT. Berikut matrik SWOT.

Tabel 3.17 Matriks SWOT Ekonomi Kabupaten Kuningan

FAKTOR EKSTERNAL	PELUANG (OPPORTUNITY)	TANTANGAN (THREATS)
	Memiliki topografi yang indah dan tanah yang subur sehingga dapat mendukung aktivitas di sektor pertanian dan pariwisata.	Potensi bencana akibat aktivitas gunung berapi (Gunung Ciremai) yang bisa terjadi kapan saja dapat mengganggu aktivitas perekonomian
	Peluang pasar dalam negeri dan luar negeri produk pertanian Kuningan terus berkembang.	Daya saing ekonomi Kabupaten tetangga yang meningkat.
	Stabilitas ekonomi regional, global dan nasional.	Persaingan produk serupa yang semakin tinggi.
	Infrastruktur (Tol Cipali dan BLJB) yang telah mempercepat jarak tempuh wisatawan dalam dan luar negeri masuk ke wilayah Kabupaten Kuningan.	Infrastruktur dan sarana prasarana ekonomi yang lebih baik di daerah tetangga yang lebih menarik investor dari luar untuk masuk.
	Adanya tematik sektoral dan kewilayahan.	Masuknya produk impor yang lebih bersaing dari produk lokal.

	PELUANG (OPPORTUNNITY)	TANTANGAN (THREATS)
FAKTOR INTERNAL	Adanya common goal dan janji Gubernur yang memperkuat arah pembangunan ekonomi.	
	Adanya arah pengelolaan metropolitan Cirebon Raya dan Pusat Pertumbuhan Wilayah Cirebon.	
KEKUATAN (STRENGTH)	SO	ST
Kepemilikan potensi sumberdaya pertanian sebagai sektor dominan perekonomian.	Pengembangan teknologi informasi perencanaan yang terintegrasi	Peningkatan koordinasi perencanaan daerah lintas sektor dan regional
Kekayaan destinasi pariwisata alami sebagai sektor unggulan yang dikembangkan untuk sumber pendapatan daerah.	Peningkatan pembangunan dengan memperhatikan rencana prioritas yang selaras dengan pembangunan provinsi Jawa barat dan nasional	Optimalisasi pemanfaatan lahan di kawasan konservasi, pelibatan swasta dan masyarakat dalam kegiatan ekonomi, peningkatan SDM lokal
Ketersediaan SDM yang sebagian besar pada usia produktif.	Mengembangkan infrastruktur strategis daerah dan regional	Peningkatan peran lintas kelembagaan dalam pembangunan
Keberadaan IKM berbahan baku produk pertanian.	Mempercepat pembangunan agribisnis, Agroindustri dan Agrowisata yang berkelanjutan	
Stabilitas makro ekonomi daerah yang terjaga	Percepatan dan pengembangan daya saing daerah berbasis unggulan daerah	
KELEMAHAN (WEAKNESS)	WO	WT
Rata rata kepemilikan lahan yang kecil sehingga kurang efisien untuk kegiatan ussha tani	Peningkatan investasi sektor agribisnis , agroindustri dan agrowisata berbasis kearifan lokal	Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah pusat yang berkenaan dengan perencanaan

KELEMAHAN (WEAKNESS)	WO	WT
Terbatasnya sarana prasarana pertanian dan pariwisata.	Peningkatan Kemitraan pengembangan ekonomi masyarakat lintas sektor dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Penyesuaian tata ruang sesuai dengan perkembangan pembangunan dengan tetap memperhatikan daya dukung lahan
Rendahnya pengembangan produk, destinasi dan daya tarik wisata.	Peningkatan dan pengembangan inovasi daerah di berbagai bidang	Regulasi pemerintah dalam peningkatan investasi daerah
Inovasi dan kualitas produk masih rendah dan sebagian bahan baku produksi masih tergantung pada daerah lain	Mendorong pengembangan kawasan industri berbasis komoditas unggulan daerah	
Pertumbuhan ekonomi disertai meningkatnya ketimpangan pendapatan dan wilayah.	Percepatan penggunaan informasi, teknologi dan peningkatan peran petani milenial dalam efisiensi dan efektifitas usaha	
Pertumbuhan ekonomi belum berdampak pada penurunan pengangguran dan kemiskinan secara signifikan		
Keterbatasan wirausahawan lokal sebagai penggerak ekonomi daerah.		

Penentuan titik koordinat kuadran berdasarkan rekavitulasi hasil pembobotan dan rating Faktor Strategi Internal (IFAS) serta Faktor Strategi Eksternal (EFAS) dapat diketahui sebagai berikut :

1. Skor total kekuatan = 1,80
2. Skor total kelemahan = 1,49
3. Skor total peluang = 1,80
4. Skor total tantangan = 1,48

Dari data di atas, kemudian dilakukan penentuan titik koordinat analisis internal dan eksternal. Berikut perhitungan penentuan titik koordinat :

1. Koordinat analisis internal
 = skor total kekuatan – skor total kelemahan
 = 1,80 – 1,49

$$= 0,31$$

2. Koordinat analisis eksternal

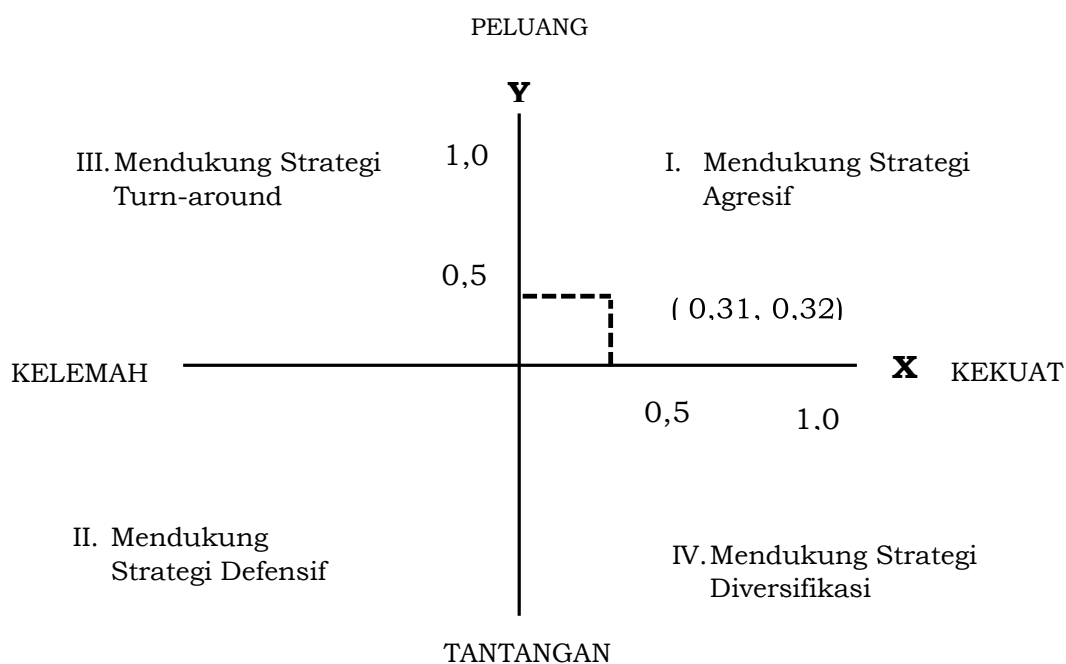
$$= \text{skor total peluang} - \text{skor total tantangan}$$

$$= 1,80 - 1,48$$

$$= 0,32$$

Penentuan koordinat dalam diagram analisis SWOT berfungsi untuk menentukan posisi strategi pemerintah daerah Kabupaten Kuningan melalui RKPD apakah terletak pada kuadran I, II, III, dan IV. Hal ini berfungsi untuk mengidentifikasi apakah strategi RKPD tahun 2023 bersifat agresif, diversifikasi, turn-around atau defensif. Berikut hasil analisis posisi koordinat hasil analisis internal dan eksternal dapat dilihat sebagai berikut.

Gambar 3.2 Diagram Analisis SWOT



Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui posisi strategi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kuningan Tahun 2023 berada pada kuadran I yakni mendukung Strategi Agresif. Hal ini menunjukkan bahwa RKPD Tahun 2023 memiliki kekuatan internal yang dapat dimanfaatkan untuk merebut peluang yang ada sehingga hal ini

dapat meningkatkan pembangunan di Kabupaten Kuningan pada tahap ke 4 dengan fokus **Mencapai Daerah yang Maju dan Unggul** dan mampu bersaing dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Jawa Barat. Kabupaten Kuningan memiliki banyak peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada dan dapat diterapkan dalam posisi tersebut, sehingga memberikan kemungkinan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan untuk bisa berkembang lebih cepat. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kuningan dalam perencanaan pembangunan pada tahun 2023 melalui RKPD menggunakan strategi SO dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengembangan teknologi informasi
2. Peningkatan pembangunan dengan memperhatikan rencana prioritas yang selaras dengan pembangunan Provinsi Jawa Barat Dan Nasional
3. Mengembangkan infrastruktur strategis daerah dan regional
4. Mempercepat pembangunan Agribisnis, Agroindustri dan Agrowisata yang berkelanjutan
5. Percepatan dan pengembangan daya saing daerah berbasis unggulan daerah

3.1.3 Evaluasi Hasil Perumusan Masalah Pembangunan Daerah

Permasalahan Pembangunan Daerah menjadi penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa mendatang dengan kondisi saat perencanaan dibuat. Selain itu, permasalahan pembangunan daerah merupakan perbedaan pencapaian antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi saat ini. Perbedaan dimaksud dilihat dari kesenjangan pencapaian daerah, maupun dengan pencapaian dan target Indikator Umum pada RPJMD Kabupaten Kuningan tahun 2018-2023.

Suatu permasalahan daerah dianggap mempunyai nilai prioritas apabila berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan termasuk prioritas lain dari kebijakan nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten

Kuningan. Perumusan masalah digunakan tiga konsep tentang masalah pembangunan yaitu masalah pokok, masalah dan akar masalah. Masalah pokok adalah masalah yang bersifat makro bagi daerah dan dipecahkan melalui rumusan misi, tujuan dan sasaran. Masalah adalah beberapa penyebab dari masalah pokok dipecahkan melalui rumusan strategi. Akar masalah adalah penyebab dari masalah yang dirinci, dipecahkan melalui arah kebijakan atau kebijakan umum. Penyelesaian permasalahan pembangunan merupakan esensi dari tujuan dari pembangunan daerah yaitu kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan secara bertahap.

Masalah kemiskinan, pengangguran, pertumbuhan ekonomi serta kondisi lingkungan hidup tetap menjadi dasar dalam rangka merumuskan kebijakan ekonomi Kabupaten Kuningan ke depan. Pada awal tahun 2020 Kabupaten Kuningan terdampak oleh penyebaran pandemic COVID-19. Hal tersebut berdampak pada aspek kesehatan, dampak yang ditimbulkan adalah melambatnya pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor, meningkatnya angka kemiskinan, pengangguran dan sektor lainnya. Agenda pembangunan Tahun 2022 diarahkan dalam rangka rekonstruksi dan rehabilitasi ekonomi, pemulihan ketahanan ekonomi serta daya saing daerah.

Apabila dianalisis dari data capaian pembangunan di Kabupaten Kuningan, masih banyak pekerjaan rumah yang dihadapi pada tahun 2022 yang perlu ditangani antara lain:

a) Kemiskinan

Kemiskinan bukan hanya persoalan pemerintah daerah, kemiskinan bisa dientaskan jika semua pihak peduli. Segenap instansi terkait bersama segenap stakeholder harus dapat saling bergerak bersama menekan jumlah kemiskinan di Kuningan. Rumah tangga dikatakan miskin apabila:

- 1) luas lantai bangunan tempat tinggalnya kurang dari 8 m² per orang;
- 2) lantai bangunan tempat tinggalnya terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan;

- 3) dinding bangunan tempat tinggalnya terbuat dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah atau tembok tanpa diplester;
- 4) tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama rumah tangga lain menggunakan satu jamban;
- 5) sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik;
- 6) air minum berasal dari sumur/mata air yang tidak terlindung/sungai/air hujan;
- 7) bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah;
- 8) hanya mengonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu;
- 9) hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun;
- 10) hanya mampu makan satu/dua kali dalam sehari;
- 11) tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik;
- 12) sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 500 m², buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp 600.000 per bulan;
- 13) pendidikan terakhir kepala rumah tangga: tidak sekolah/tidak tamat sekolah dasar (SD)/hanya SD; dan
- 14) tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai minimal Rp 500.000 seperti sepeda motor (kredit/nonkredit), emas, hewan ternak, kapal motor ataupun barang modal lainnya.

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Kuningan masih berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Barat. Pada tahun 2019 tingkat kemiskinan mengalami penurunan hanya sekitar 11,41% dibandingkan tahun 2018 yang mencapai 2,22%. Pandemi COVID-19 di awal 2020 menjadikan angka kemiskinan meningkat menjadi 12,82%. Hal ini perlu upaya penanggulangan yang sungguh-sungguh dari semua *stakeholder* yang ada. Selain itu, secara teknokratis, dalam penanggulangan kemiskinan ini dipandang perlu dilakukan penguatan pendapatan individu yang secara otomatis akan meningkatkan pendapatan rumah tangga. Hal ini dapat

dilakukan melalui optimalisasi usaha kecil dan mikro (UKM) pada masyarakat berpenghasilan rendah.

b) Pembangunan Manusia

Menurut Badan Pusat Statistik Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report (HDR)*. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar yakni umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak.

Capaian IPM Kabupaten Kuningan secara umum lebih baik dibandingkan kabupaten di Wilayah III Cirebon (Cirebon, Indramayu, Majalengka dan Kuningan – Ciayumajakuning), namun masih di bawah angka Jawa Barat, dan berada pada posisi ke-17 di tingkat Jawa Barat. Komponen indikator pendukung IPM yang perlu mendapat perhatian khusus adalah rata-rata lama sekolah yang masih berkisar pada 7,37 tahun.

c) Angkatan Kerja

Angkatan Kerja berhubungan erat dengan jumlah penduduk. Ukuran besar-kecilnya angkatan kerja sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan jumlah penduduk yang sudah memasuki usia kerja. Definisi angkatan kerja adalah penduduk yang sudah memasuki usia kerja, baik yang sudah bekerja, belum bekerja, atau sedang mencari pekerjaan. Menurut ketentuan pemerintah Indonesia, penduduk yang sudah memasuki usia kerja adalah mereka yang berusia minimal 15 tahun sampai 65 tahun. Namun, tidak semua penduduk yang memasuki usia tadi disebut angkatan kerja. Sebab penduduk yang tidak aktif dalam kegiatan ekonomi tidak termasuk dalam kelompok angkatan kerja, seperti ibu rumah tangga, pelajar, dan mahasiswa, serta penerima pendapatan (pensiunan).

Berdasarkan hasil estimasi survei angkatan kerja nasional tahun 2018, tingkat partisipasi angkatan kerja Kabupaten Kuningan mencapai 58,65% atau sejumlah 475.284 orang. Dari jumlah tersebut, 42.735 orang lainnya merupakan pengangguran terbuka yaitu mereka yang tidak bekerja tetapi aktif mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha dan lainnya dalam upaya memperoleh penghidupan, sehingga data tahun 2018 menunjukkan tingkat pengangguran terbuka sebesar 8,99%.

Terjadinya peningkatan jumlah pengangguran di Kabupaten Kuningan pada tahun 2018, perlu direspon dengan melakukan perbaikan pada penyerapan tenaga kerja. Hasil sakernas Agustus 2018 mencatat bahwa pengangguran di Kabupaten Kuningan relatif lebih tinggi di daerah perkotaan (9,09%) dibanding daerah perdesaan (8,88%). Ini mengindikasikan bahwa penduduk usia kerja di daerah perkotaan yang belum terserap pada lapangan usaha relatif lebih banyak dibanding mereka yang berada di daerah perdesaan.

Tingginya angka TPT harus mendapat perhatian serius dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan. Upaya pemberian pelatihan *lifeskill* dalam bentuk pelatihan keterampilan kerja atau pembinaan kewirausahaan baru. Perangkat daerah terkait perlu melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan untuk menyalurkan kredit usaha kecil dengan syarat yang lebih mudah.

Ruang investasi harus terbuka lebar, prosedur perizinan dimudahkan dengan tetap mempertimbangkan kebijakan daerah dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Investor akan hadir jika lingkungan masyarakat kondusif, masyarakat mau menerima secara terbuka investor yang memang telah memenuhi syarat perizinan, tidak diganggu atau dihalang-halangi. Banyaknya investor akan menjaring angkatan kerja di Kuningan sehingga dapat membantu menurunkan angka pengangguran yang pada akhirnya terjadi penurunan angka kemiskinan. Selain itu perbaikan infrastruktur penunjang diperlukan untuk memudahkan aksesibilitas ekonomi.

d) Pendidikan

Pendidikan merupakan kunci utama bagi suatu daerah untuk unggul dalam persaingan global. Pendidikan dianggap sebagai bidang yang paling strategis untuk mewujudkan kesejahteraan nasional. Sumber Daya Manusia (SDM) yang cerdas dan berkarakter merupakan prasyarat terbentuknya peradaban yang tinggi. Sebaliknya, SDM yang rendah akan menghasilkan peradaban yang kurang baik pula.

Kondisi pendidikan kabupaten kuningan dapat dilihat dari angka partisipasi murni (APM) anak-anak sebesar SD 98,25%, SMP 81,01% dan SMA 57,33%. Program pendidikan wajib belajar 12 tahun harus ditingkatkan mengingat APM untuk jenjang pendidikan menengah belum memberikan angka yang signifikan. Pemberian beasiswa bagi masyarakat miskin serta penumbuhan kesadaran akan pentingnya pendidikan melalui program dan kegiatan penyuluhan oleh pihak terkait.

e) Kesehatan

Derajat kesehatan merupakan salah satu kelompok penting indikator Indonesia Sehat atau merupakan indikator hasil. Gambaran tentang derajat kesehatan meliputi indikator Mortalitas (kematian), Morbiditas (kesakitan), dan Status Gizi. Pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan sangat penting dalam mempertahankan kelangsungan hidup seseorang. Semakin tinggi kualitas kesehatan seseorang semakin tahan terhadap keluhan kesehatan, dan semakin preventif terhadap terjadinya kesakitan. Derajat kesehatan penduduk Kabupaten Kuningan relatif baik, di antaranya ditunjukkan oleh Usia Harapan Hidup (UHH) yang relatif tinggi, dan berada di atas rata-rata UHH provinsi Jawa Barat, tetapi tetap perlu dilakukan pengawasan (*controlling*) terhadap kegiatan pelayanan dan penyuluhan kesehatan secara berkelanjutan.

Hasil survey nasional menunjukkan, aspek yang berpengaruh terhadap UHH adalah perlunya peningkatan pelayanan bagi penduduk yang berobat jalan ke fasilitas medis, peningkatan penolong kelahiran oleh petugas medis, peningkatan balita yang pernah diberi imunisasi, penurunan rumah tangga dengan lantai tempat tinggal terluas tanah,

penurunan gini ratio, peningkatan jumlah dokter, dan peningkatan rumah tangga menggunakan sumber air minum bersih.

f) Perekonomian

Kesuksesan suatu negara dilihat dari pertumbuhan ekonominya. Sementara kesuksesan pemerintahan dilihat dari kemampuannya meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Pertumbuhan ekonomi ini penting untuk diperhatikan bahkan terus ditingkatkan karena menjadi indikator keberhasilan kinerja pemerintah dan jajarannya dalam menciptakan kehidupan yang lebih baik dan sejahtera bagi rakyatnya. Oleh sebab itu, setiap daerah senantiasa berusaha untuk menggenjot pertumbuhan ekonominya agar mencapai optimal bahkan maksimal

Laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Kabupaten Kuningan tahun 2020, LPE Kabupaten Kuningan turun dari angka 6,56% di tahun 2019 menjadi 0,09%. Hal ini terjadi karena adanya dampak Kejadian Luar Biasa (KLB) Wabah Pandemi COVID-19. Adanya wabah tersebut mengharuskan Pemerintah Kabupaten Kuningan melakukan refocusing dan realokasi APBD Tahun Anggaran 2021. Hal ini mengakibatkan tidak optimalnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah di Tahun 2021. Dengan demikian, isu strategis yang mengemuka pada tahun rencana 2022 adalah “Pemulihan Ekonomi dan Kehidupan Masyarakat Sebagai Dampak Pandemi COVID-19”.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Faktor kemampuan keuangan daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan merupakan factor yang sangat penting, sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat perlu dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Faktor lain yang tidak kalah penting adalah pengelolaan aset daerah. Pengelolaan aset menjadi sangat penting dalam menunjang penerimaan daerah. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal telah

menempatkan pengelolaan aset daerah pada posisi yang amat potensial untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah.

Selain pendanaan melalui APBD, terdapat sumber pendanaan lainnya di luar APBD (Non APBD) antara lain pendanaan melalui APBN, PHLN, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan dan Program Kemitraan serta bina lingkungan yang semuanya merupakan potensi sumber penerimaan guna menunjang beban belanja pembangunan daerah.

Kontribusi CSR di Kabupaten Kuningan pada tahun 2019 – 2020 berdasarkan laporan CSR tahun 2021 pelaksanaan CSR di Kabupaten Kuningan sebesar Rp.4.841.901.577,- yang dilaksanakan untuk:

- Bidang pendidikan, berupa pemberian beasiswa pendidikan untuk mahasiswa yang menempuh perkuliahan di jurusan keperawatan.
- Bidang lingkungan, berupa sumbangan perbaikan jalan lingkungan masyarakat, perbaikan saluran air, serta program penghijauan atau penanaman pohon.
- Bidang kebencanaan, berupa penyuluhan siap siaga bencana.
- Bidang sosial, berupa program pembinaan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK).
- Bidang kesehatan, untuk mendukung pelaksanaan kegiatan posyandu, serta program-program penyediaan jasa pelayanan kesehatan untuk masyarakat dalam rangka Hari Kesehatan Nasional.
- Bidang lainnya, yang berupa sumbangan kemasyarakatan untuk masyarakat sekitar, seperti pemberian bahan material dan alat mesin.
- Usaha produksi cincin perak di Kecamatan Cidahu.
- Usaha toko-toko kelontong di Desa Ancaran.
- Usaha produksi aneka keripik dan oleh-oleh khas Kuningan di Cijoho dan Pasapen
- Kelompok pengrajin kayu di Kecamatan Garawangi.
- Usaha jamu seduh di Kecamatan Cilimus.

- mendukung kegiatan-kegiatan pengadaan dan perbaikan sarana prasarana umum, seperti mushola, masjid, langgar, sekolah, sanggar seni, dan makam
- pemberian bantuan pengadaan peralatan pengolahan dan pemasaran hasil produksi kopi
- program perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu) bagi penduduk miskin,
- program pengembangan Kampung Ramah Anak dalam rangka mendukung peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) di Kabupaten Kuningan
- pembagian zakat kepada masyarakat miskin yatim dan dhuafa di beberapa kecamatan, dan bahan makanan untuk siswa pesantren dan sekolah dasar
- pemberian bantuan penyaluran air bersih untuk masyarakat di Kecamatan Luragung dan Kalimanggis

Pada tahun 2023 CSR ditargetkan naik sekitar 10% dari total CSR yang telah dilaksanakan hingga tahun 2020 yaitu sebesar Rp.5.326.091.734,-.

3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Keberlangsungan pembangunan daerah sangat tergantung dari kemandirian keuangan daerah atau kemampuan fiskal daerah. Daerah yang kemampuan fiskalnya baik akan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mendesain dan melaksanakan kegiatan-kegiatan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Kemandirian keuangan daerah dapat diukur dari penerimaan pendapatan daerah.

Apabila memperhatikan realisasi pendapatan daerah kurun waktu 2019-2021 dalam kondisi pandemik wabah COVID-19 pendapatan daerah terus mengalami penurunan walaupun tidak secara signifikan, sedangkan untuk rencana target 2022 diperkirakan mengalami sedikit peningkatan.

3.2.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pengelolaan pendapatan daerah yang merupakan salah satu bagian dari pengelolaan keuangan daerah mempunyai peranan yang sangat

strategis dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah.

Kebijakan pendapatan daerah dilakukan melalui upaya, antara lain:

- 1) Mendorong upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan daerah;
- 2) Meningkatkan kapasitas manajemen Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- 3) Optimalisasi pengelolaan aset daerah dalam menunjang peningkatan pendapatan daerah;
- 4) Meminimalkan terjadinya kebocoran melalui pembinaan dan evaluasi pelaksanaan pemungutan pendapatan asli daerah;
- 5) Meningkatkan kesadaran, kepatuhan dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi;

Untuk merealisasikan rencana penerimaan pendapatan daerah Tahun 2023 dilakukan melalui strategi pencapaian target sebagai berikut:

- 1) Pemantapan kelembagaan dan peningkatan fasilitas sarana prasarana pelayanan, penyempurnaan sistem pungutan, dan peningkatan profesionalisme pegawai dalam pemungutan pendapatan;
- 2) Peningkatan kesadaran masyarakat melalui penyebaran informasi dan sosialisasi yang berkesinambungan di bidang pendapatan daerah;
- 3) Pelaksanaan pemungutan atas obyek pajak/retribusi baru dan pengembangan sistem operasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya; dan
- 4) Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan pendapatan daerah

Tabel 3.18 Realisasi Pendapatan Tahun 2020-2021 dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Kuningan Tahun 2022-2024

KODE	URAIAN	REALISASI 2020	REALISASI 2021	RENCANA 2022	RENCANA 2023	RENCANA 2024
4	PENDAPATAN DAERAH	2.776.498.025.041	2.778.618.768.752	2.791.492.860.472	2.905.063.380.452	3.087.559.950.125
4.1	<i>Pendapatan Asli Daerah</i>	<i>298.726.080.629</i>	<i>343.864.589.959</i>	<i>406.691.817.027</i>	<i>427.026.407.878</i>	<i>469.729.048.666</i>
4.1.01	Pajak Daerah	84.317.475.248	92.331.986.827	103.386.000.000	108.555.300.000	119.410.830.000
4.1.02	Retribusi Daerah	53.533.036.558	68.297.563.893	84.305.234.244	88.520.495.956	97.372.545.552
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	6.853.812.196	5.907.864.248	6.363.701.269	6.681.886.332	7.350.074.966
4.1.04	Lain-lain PAD Yang Sah	154.021.756.627	177.327.174.991	212.636.881.514	223.268.725.590	245.595.598.149
4.2	<i>Pendapatan Transfer</i>	<i>2.341.620.645.053</i>	<i>2.296.874.103.593</i>	<i>2.375.049.700.945</i>	<i>2.467.310.495.824</i>	<i>2.606.031.777.034</i>
4.2.01	Transfer Pemerintah Pusat	2.001.087.459.167	2.024.757.150.132	2.138.807.294.500	2.160.195.367.445	2.268.205.135.817
4.2.02	Transfer Antar-Daerah	340.533.185.886	272.116.953.461	236.242.406.445	307.115.128.379	337.826.641.216
4.3	<i>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</i>	<i>136.151.299.359</i>	<i>137.880.075.200</i>	<i>9.751.342.500</i>	<i>10.726.476.750</i>	<i>11.799.124.425</i>
4.3.01	Hibah	136.151.299.359	9.205.007.200	9.751.342.500	10.726.476.750	11.799.124.425
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	128.675.068.000	-	-	-

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Periode 31 Desember 2021 Pemerintah Kabupaten Kuningan.

3.2.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Arah kebijakan belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program / kegiatan dan sub kegiatan.

Arah kebijakan belanja daerah juga memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta situasi dan kondisi pada tahun mendatang, artinya program dan kegiatan strategis saja yang menjadi prioritas dan mendapatkan anggaran atau dengan istilah *money follow programme*.

Selain itu, kebijakan belanja daerah diarahkan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, upaya tersebut antara lain ditempuh dengan mengalokasikan belanja daerah untuk:

- 1) Program/kegiatan yang berorientasi terhadap kepada kepentingan publik yang bermanfaat jangka panjang;
- 2) Mendorong upaya pemulihan dunia usaha dan pemulihan ekonomi daerah yang menurun dampak dari pandemi covid-19;
- 3) Percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrim;
- 4) Pencapaian visi, misi daerah yang telah disinkronisasikan dengan program strategis Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun Program Pembangunan Nasional;
- 5) Pemerataan yang berkeadilan pada berbagai wilayah di Kabupaten Kuningan dengan memperhatikan kondisi, permasalahan, dan kebutuhan masing-masing wilayah, dengan tetap memperhatikan prioritas Pembangunan Daerah.

Tabel 3.19 Realisasi Belanja Tahun 2020-2021 dan Proyeksi/Target Belanja Kabupaten Kuningan Tahun 2022-2024

KODE	URAIAN	REALISASI 2020	REALISASI 2021	RENCANA 2022	RENCANA 2023	RENCANA 2024
5	BELANJA DAERAH	2.795.800.003.283	2.742.154.197.356	2.769.492.860.472	2.887.063.380.452	3.114.559.950.125
5.1	Belanja Operasi	1.909.824.149.985	1.951.840.892.690	2.017.043.453.964	2.075.199.906.400	2.220.622.233.487
5.1.01	Belanja Pegawai	1.198.140.805.050	1.152.944.764.985	1.254.713.549.092	1.279.807.820.074	1.305.403.976.476
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	630.797.764.199	729.215.570.980	682.724.367.622	711.806.272.213	782.986.899.434
5.1.03	Belanja Bunga	-	-	-	-	-
5.1.04	Belanja Hibah	50.895.164.000	59.840.624.500	63.497.645.250	66.672.527.513	113.626.742.317
5.1.05	Belanja Bantuan Sosial	29.990.416.736	9.839.932.225	16.107.892.000	16.913.286.600	18.604.615.260
5.2	Belanja Modal	378.703.766.805	320.727.654.180	300.392.315.308	345.451.162.604	379.996.278.865
5.2.01	Belanja Modal Tanah	4.732.989.296	7.612.718.068	35.434.000.000	40.749.100.000	44.824.010.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	179.573.821.550	104.329.063.606	75.310.226.154	86.606.760.077	95.267.436.085
5.2.03	Belanja Modal Bangunan dan Gedung	112.473.642.588	88.667.096.663	71.370.092.700	82.075.606.605	90.283.167.266
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jarigan dan Irigasi	43.926.659.308	119.717.944.843	89.466.786.454	102.886.804.422	113.175.484.864
5.2.05	Belanja Aset Tetap lainnya	37.996.654.063	400.831.000	28.811.210.000	33.132.891.500	36.446.180.650
5.3	Belanja Tidak Terduga	52.902.857.991	25.272.600.802	11.035.429.600	10.000.000.000	11.887.895.181
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	52.902.857.991	25.272.600.802	11.035.429.600	10.000.000.000	11.887.895.181
5.4	Belanja Transfer	454.369.228.502	444.313.049.684	441.021.661.600	456.412.311.448	502.053.542.593
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	14.370.649.039	13.580.038.690	8.000.000.000	10.400.000.000	11.440.000.000
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	439.998.579.463	430.733.010.994	433.021.661.600	446.012.311.448	490.613.542.593

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Periode 31 Desember 2021 Pemerintah Kabupaten Kuningan.

3.2.4 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan komponen APBD yang digunakan untuk menutup defisit APBD atau memanfaatkan surplus APBD. Arah kebijakan penerimaan pembiayaan ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat.

Sumber penerimaan pembiayaan terdiri dari:

- 1) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu (Silpa);
- 2) Penerimaan Pinjaman Daerah;
- 3) Pencairan Dana Cadangan; maupun
- 4) Penerimaan Piutang Daerah.

Sedangkan kebijakan pengeluaran pembiayaan timbul karena adanya surplus atau kelebihan anggaran. Pengeluaran pembiayaan daerah diantaranya untuk; pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah maupun untuk pembayaran pokok utang.

Tabel 3.20 Realisasi Pembiayaan Tahun 2020-2021 dan Proyeksi/Target Pembiayaan Kabupaten Kuningan Tahun 2022-2024

KODE	URAIAN	REALISASI 2020	REALISASI 2021	RENCANA 2022	RENCANA 2023	RENCANA 2024
6	PEMBIAYAAN DAERAH	51.604.199.504	28.802.221.262	(22.000.000.000)	(18.000.000.000)	27.000.000.000
6.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	54.604.199.504	32.302.221.262	-	-	30.000.000.000
6.1.01	SILPA Sebelumnya	54.604.199.504	32.302.221.262	-	-	-
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan					30.000.000.000
6.1.03	Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan					
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah					
6.1.05	Pinjaman Dalam Negeri					
6.1.06	Penerimaan Piutang Daerah					
6.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	3.000.000.000	3.500.000.000	22.000.000.000	18.000.000.000	3.000.000.000
6.2.01	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yg Jatuh Tempo					
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	3.000.000.000	3.500.000.000	7.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000
6.2.03	Pembentukan Dana Cadangan			15.000.000.000	15.000.000.000	-
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah					

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Periode 31 Desember 2021 Pemerintah Kabupaten Kuningan.

3.3 Kebijakan Non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Dalam upaya mendukung kebijakan pemerintah berkenaan dengan pelaksanaan RPJMN Tahun 2020-2024, maka perlu diperhatikan fokus pembangunan yang mengarah pada aspek infrastruktur sebagai bagian fokus pembangunan yang membutuhkan pendanaan cukup besar. Hal tersebut menjadi penting mengingat terdapat beberapa mega proyek infrastruktur yang akan dibangun yaitu penyelesaian Waduk Kuningan.

Adapun beberapa skema pendanaan proyek-proyek investasi berupa Investasi Pemerintah berupa investasi pada proyek-proyek yang dianggap layak secara ekonomi dengan memanfaatkan dana DAU, DAK, dan Dana Daerah; skema pendanaan dengan Kemitraan Pemerintah Swasta (KPS).

Skema pendanaan Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) dimaksudkan untuk pembangunan prasarana dasar yang tidak layak secara finansial namun layak secara ekonomis dan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Salah satu alternatif Kerjasama pemerintah dan swasta (KPS) yaitu pembiayaan pembangunan transportasi.

Dan skema pendanaan melalui Kerjasama dengan pihak dunia usaha melalui program TJSL dan PKBL untuk mendukung “CSR Jabar untuk kemanusiaan dan lingkungan”. Program TJSL dan PKBL Kabupaten Kuningan melibatkan beberapa perusahaan yang difokuskan pada penanganan:

- 1) Sosial, diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- 2) Lingkungan, yang diarahkan pada kegiatan penanaman pohon, pemberdayaan kondisi sosial masyarakat melalui peningkatan kapasitas, pendidikan lingkungan hidup dan konservasi, pencegahan polusi, penggunaan sumberdaya yang berkelanjutan, mitigasi dan

adaptasi terhadap perubahan iklim serta kampanye, proteksi dan pemulihan lingkungan;

- 3) Kesehatan, yang diarahkan agar seluruh wilayah Jawa Barat dapat menyelenggarakan kesehatan yang memadai, meliputi usaha kesehatan; pembiayaan kesehatan; sumberdaya kesehatan; sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan; serta pemberdayaan masyarakat;
- 4) Pendidikan, yang diarahkan untuk mencapai bebas putus jenjang sekolah pendidikan dasar dan menengah, beasiswa serta sarana dan prasarana pendidikan formal, non formal dan informal;
- 5) Peningkatan daya beli, yang diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengembangan sektor koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah; agribisnis; perikanan; dan pasar tradisional;
- 6) Infrastruktur dan sanitasi lingkungan, yang diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan perdesaan dan perkotaan;
- 7) Sarana dan prasarana keagamaan; dan
- 8) Program pembangunan lainnya yang disepakati oleh perusahaan dengan Pemerintah Kabupaten.

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam menyusun RKPD Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Kuningan tetap berusaha menyajikan strategi-strategi yang komprehensif untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan melalui prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang mengacu pada dokumen perencanaan daerah dan nasional.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Dalam RPJMD Kabupaten Kuningan 2018-2023, Visi Kabupaten Kuningan Tahun 2018-2023 adalah: **“Kuningan MAJU (Ma’mur, Agamis, Pinunjul) Berbasis Desa Tahun 2023”**. RKPD Tahun 2023 merupakan tahapan kelima dari RPJMD Kabupaten Kuningan 2018-2023, yaitu **“Mencapai Daerah Yang Maju dan Unggul”**. Lebih rinci mengenai indikator kinerja tujuan dan sasaran serta kondisi capaian tahun lalu dan targetnya untuk Tahun 2023 disajikan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	TARGET 2023	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL (2018)	TARGET					KONDISI AKHIR			
							2019	2020	2021	2022	2023				
VISI : “KUNINGAN MAJU (MA’MUR, AGAMIS, PINUNJUL) BERBASIS DESA TAHUN 2023”															
Misi 1 :Membangun tata kelola pemerintahan daerah yang profesional, efektif, demokratis dan terpercaya dengan jiwa kepemimpinan Nu Sajati.															
1.1	Mewujudkan mutu pelayanan, akuntabilitas dan transparansi pemerintahan	Opini BPK	WTP	1.1.1	Terwujudnya tata kelola pemerintah yang akuntabel	a.	Nilai SAKIP	Level	B	BB-	BB	BB+	A-	A	A
		b.				Maturitas SPIP	Level	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	
		c.				Skor LPPD	Poin	3,4975	3,5035	3,511	3,521	3,531	3,541	3,541	
		1.1.2	Meningkatnya mutu pelayanan publik yang baik dan partisipasi publik	a.	Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan	Persen	90	>90	>90	>90	>90	>90	>90		
				b.	Agregasi Kepemilikan Dokumen KTP Elektronik dan Akte Kelahiran 0-18 Tahun	Persen	KTP: 96,10 Akte kelahiran: 81,28	97,76 84	97,77 85	97,78 86	97,79 87	98 88	98 88		
		1.1.3	Meningkatnya kecepatan dan ketepatan pengelolaan data dan informasi publik	a.	Penerapan e-planning, e-data, e-Report, e-budgeting, e-procurement , e-Sakip, e-monev, Simpeg, perijinan online, pajak online	Jenis Aplikasi	2	2	2	2	2	2	2	10	
				b.	Meningkatnya Indeks SPBE	Point	2.32	2.11	2.5	2.75	3	3.5	4		

TUJUAN		INDIKATOR KINERJA TUJUAN	TARGET 2023	SASARAN		INDIKATOR KINERJA SASARAN		SATUAN	KONDISI AWAL (2018)	TARGET					KONDISI AKHIR
										2019	2020	2021	2022	2023	
				1.1.4	Meningkatnya kinerja pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	a.	Nilai Target PAD	Milyar	344,43	336,09	311,53	341,03	356,52	369,67	369,67
Misi 2 : Mewujudkan masyarakat Kuningan <i>nu Sajati</i> dalam kehidupan beragama dan bernegara dalam bingkai kebangsaan dan kebhinekaan.															
2.1	Mewujudkan kehidupan masyarakat yang agamis, toleran, ramah, berkualitas dengan melibatkan seluruh potensi umat beragama	Indeks Toleransi Beragama	69,9 – 70,2	2.1.1	Terwujudnya masyarakat yang agamis	a.	Persentase lembaga/ organisasi keagamaan yang dibina & difasilitasi	Perse n	N/A	20%	5%	35%	20%	20%	20%
						b.	Persentase lembaga pendidikan keagamaan yang dibina & difasilitasi	Persen	N/A	20%	5%	35%	20%	20%	20%
2.2	Menegakkan perundang-undangan daerah dan menciptakan kondusivitas kehidupan berbangsa dan bermasyaraka t	Indeks Rasa Aman	73,6 – 76	2.2.1	Terwujudnya penegakan perundang-undangan daerah, ketentraman, ketertiban umum dan kondusivitas kehidupan berbangsa dan bermasyaraka t	a.	Persentase Pelaksanaan Penegakan Perda	Persen	90	91	92	93	94	95	95
						b.	Persentase partisipasi masyarakat dalam Pemilu	Persen	68,78	71,52	-	-	-	-	75,52
				2.2.2	Terwujudnya kehidupan masyarakat berbasis kearifan lokal dan seni budaya daerah	a.	Jumlah budaya dan seni lokal yang dilestarikan	buah	128	128	128	128	128	128	128
						b.	Indeks Gotong Royong (Aksi Bersama)	Poin	N/A	0,45	0,46	0,47	0,48	0,50	0,50

TUJUAN		INDIKATOR KINERJA TUJUAN	TARGET 2023	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL (2018)	TARGET					KONDISI AKHIR		
								2019	2020	2021	2022	2023			
Misi 3 : Mewujudkan manajemen layanan pendidikan, kesehatan yang merata, adil, berkualitas dan berkelanjutan dalam menciptakan sumberdaya manusia Nu Sajati															
3.1	Mewujudkan layanan pendidikan yang adil dan berkualitas	IPM	69,66	3.1.1	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan	a.	EYS/Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,07*	12,24-12,29	12,1	12,14	12,19	12,23	12,23
						b.	MYS/Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,51*	7,54-7,71	7,41	7,46	7,52	7,6	7,6
						c.	Indeks EYS / Harapan Lama Sekolah	Poin	67,06*	69,45	67,22	67,56	67,78	68,04	68,04
						d.	Indeks MYS / Rata-rata Lama Sekolah	Poin	50,08*	51,38	49,40	50,24	50,47	50,61	50,61
						e.	Rehabilitasi ruang kelas (1.000 RK)	Ruang	110	238	162	200	200	200	1.000
						f.	Pembangunan ruang kelas baru (300 RKB)	Ruang	37	9	70	75	75	71	300
						g.	Pembangunan perpustakaan (100 ruang)	Ruang	10	20	20	20	20	20	100
						h.	Pemberian beasiswa (1.000 orang)	Orang	485	200	200	150	150	200	1.000
3.2	Mewujudkan masyarakat yang sehat melalui aksesibilitas pelayanan kesehatan yang terjangkau			3.2.1	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan	a.	Umur Harapan Hidup	Tahun	73,01	73,35	73,28	73,37	73,45	73,53	73,53
						b.	Persentase Balita Stunting	Persen	29	27	20	15	5	2,5	2,5
						c.	Ketersediaan ambulance gratis	Unit	40	0	8	8	8	8	72
						d.	Revitalisasi 1.423 posyandu	Unit	N/A	284	287	284	284	284	1.423
						e.	Angka Kematian Ibu	Kasus	23	23	22	22	21	21	21

TUJUAN		INDIKATOR KINERJA TUJUAN	TARGET 2023	SASARAN		INDIKATOR KINERJA SASARAN		SATUAN	KONDISI AWAL (2018)	TARGET					KONDISI AKHIR
										2019	2020	2021	2022	2023	
						f.	Angka Kematian Bayi	Poin/1.000 kelahiran	4,06	4,05	4,05	4,04	4,03	4,02	4,02
3.3	Menciptakan sumberdaya manusia yang Santana, Basajan, Santika dan Unggul			3.3.1	Meningkatnya upaya penanggulangan kemiskinan	a.	Persentase penduduk miskin	Persen	12,22	11,41	13,58	13,38	13,06	12,74	12,74
				3.3.2	Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk	a.	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Persen	0,59	0,59	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
				3.3.3	Meningkatnya PUG	a.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	86,34	86,83	87,32	87,82	88,32	88,82	88,82
				3.3.4	Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga	a.	Prestasi Olahraga tingkat regional (PORDA)	Peringkat	9	-	-	-	8	-	8
						b.	Prestasi Olahraga tingkat regional (POPDA)	Peringkat	15	-	-	-	10	-	10
Misi 4 : Mewujudkan pembangunan kawasan perdesaan berbasis pertanian, wisata, budaya dan potensi lokal untuk mempercepat pertumbuhan serta pemerataan ekonomi rakyat															
4.1	Terbangunnya desa pinunjul/unggul berdasarkan karakteristik lokal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi	Perencanaan Sektoral Terintegrasi Berbasis Desa	Sistem Perencanaan Ekonomi Pinunjul	4.1.1	Terwujudnya perencanaan pembangunan Ekonomi Tematik Desa Pinunjul	a.	Regulasi Desa Pinunjul	Regulasi	N/A	1	1	1	1	1	1
						b.	Perencanaan Ekonomi Desa Pinunjul berbasis system	Persen	N/A	10	30	30	20	10	100
				4.1.2	Terbangunnya sentra unggulan pertanian	a.	Sentra Unggulan Padi	Desa	N/A	0	0	1	0	0	1
						b.	Sentra Unggulan Jagung	Desa	N/A	0	0	0	1	0	1
						c.	Sentra Tanaman Kedelai	Desa	N/A	0	1	1	0	0	2
						d.	Sentra Unggulan	Desa	N/A	1	2	1	0	2	6

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	TARGET 2023	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN		SATUAN	KONDISI AWAL (2018)	TARGET					KONDISI AKHIR			
								2019	2020	2021	2022	2023				
						Pertanian Organik										
					e.	Sentra Unggulan Sapi Potong	Desa	N/A	0	1	2	1	2	6		
					f.	Sentra Unggulan Sapi Perah	Desa	N/A	1	0	0	0	0	1		
					g.	Sentra Domba	Desa	N/A	0	1	0	2	0	3		
					h.	Sentra Unggulan Itik	Desa	N/A	0	0	0	1	0	1		
					i.	Sentra Unggulan buah-buahan	Desa	N/A	0	2	1	2	2	7		
					j.	Sentra Tanaman Perkebunan Kopi	Desa	N/A	0	1	1	1	0	3		
					k.	Sentra Tanaman Cengkeh	Desa	N/A	0	0	0	1	1	2		
					l.	Sentra tanaman tembakau	Desa	N/A	0	0	1	0	0	1		
					m.	Sentra Tanaman Rempah dan Biofarmaka	Desa	N/A	0	0	1	1	1	3		
					n.	Sentra unggulan Sayuran	Desa	N/A	2	1	1	1	1	6		
					4.1.3	Terbangunnya sentra unggulan wisata dan budaya	a.	Desa wisata	Desa	N/A	-	7	7	7	4	25
							b.	Kampung Budaya	Desa	N/A	-	1	-	-	-	1
					4.1.4	Terbangunnya sentra unggulan lokal lainnya	a.	Sentra Pengembang an ikan mas	Desa	8	8	8	8	8	64	8
							b.	Sentra Pengembang	Desa	8	8	8	8	8	64	8

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	TARGET 2023	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN		SATUAN	KONDISI AWAL (2018)	TARGET					KONDISI AKHIR	
								2019	2020	2021	2022	2023		
					an ikan nila									
				c.	Sentra Pengembangan an ikan lele	Desa	9	9	9	9	9	72	9	
				d.	Sentra Pengembangan an ikan gurame	Desa	7	7	7	7	7	56	7	
				e.	Sentra Pengembangan an ikan hias	Desa	3	3	3	3	3	18	3	
				f.	Sentra Perdagangan	Desa	5	5	5	5	5	25	5	
					Desa Industri	Desa	2	5	3	4	4	18	2	
				g.	Desa UMKM	Desa	0	0	1	1	1	3	0	
				h.	Desa Koperasi	Desa	0	0	1	1	1	3	0	
				i.	Desa Kuliner Tradisional	Desa	0	0	1	0	0	1	0	
				j.	Desa Pendidikan	Desa	0	2	3	1	1	7	0	
4.2	Terwujudnya daya dukung investasi bagi pembangunan desa yang mendorong pertumbuhan lapangan kerja	LPE	1,51-3,45	4.2.1	Meningkatnya investasi skala desa	a.	Jumlah Desa dengan Nilai Investasi>20 0 juta	Desa	N.A	1	0	4	5	15
						b.	TPT	persen	8,99	15,25	13,88	11,51	10,14	10,14
						c.	Jumlah Penempatan Tenaga Kerja	Orang	10.111	8.480	3.000	5.670	6.230	30.530
				4.2.2	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas pangan desa	a.	Lumbung Pangan	Buah	N/A	1	0	3	3	10
				4.2.3	Meningkatnya lapangan kerja didesa	a.	Jumlah lapangan kerja di desa	Paket	N/A	4	5	6	7	30
						b.	Jumlah Tenaga Kerja yang terserap di desa	Orang	N/A	80	100	120	140	600
						c.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	58,65	59,62	60,61	61,62	62,64	63,68

TUJUAN		INDIKATOR KINERJA TUJUAN	TARGET 2023	SASARAN		INDIKATOR KINERJA SASARAN		SATUAN	KONDISI AWAL (2018)	TARGET					KONDISI AKHIR
										2019	2020	2021	2022	2023	
				4.2.4 .	Menurunnya tingkat pengangguran	a.	Jumlah Penempatan Tenaga Kerja	Orang		8.400-8.500	3.836	5.670	6.230	7.150	7.150
				4.2.5 .	Terciptanya wirausaha baru berbasis pesantren	a.	Wirausaha baru berbasis pesantren	Pesantren / Orang	N.A	0	2/40	2/40	2/40	2/40	8/160
4.3	Mempercepat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa	Indeks Desa Membangun	0,670	4.3.1	Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa	a.	Jumlah BUMDES	Unit	180	14	5	5	10	10	10 (55)
						b.	Status Desa : - Mandiri	Desa Mandiri	3	2	2	18	10	10	15 (57)
Misi 5 : Mewujudkan pemerataan infrastruktur untuk mendorong investasi dan penciptaan lapangan kerja dalam lingkungan yang lestari															
5.1 .	Meningkatkan pemerataan dan kualitas infrastruktur daerah	Kemantapan jalan	85,9 %	5.1.1	Meningkatnya konektivitas antar wilayah dan kawasan	a.	Penanganan jalan & jembatan (target 1.000 Km)	Km	640	72	70	72	72	72	998
						b.	Penanganan jaringan irigasi (target 18.000 Hektar)	Hektar	15.000	600	200	600	600	600	17.600
						c.	Akses Air Minum Layak	%	90,85	85,15	88,12	91,09	94,06	97,03	97,03
						d.	Jumlah pelayanan pengelolaan sampah	Ton	52.279,27	122.598,00	116.196,89	115.554,73	114.881,47	114.124,74	114.124,74
							Prosentase pelayanan sampah	%	32,00	142,64	53,63	53,97	54,41	54,84	54,84
						d.	Persentase ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan	%	55	55	40	40	50	65	65
				5.1.2	Meningkatnya kualitas	a.	Persentase kemantapan	%	80,9	81,9	78,2	82	83,5	84,9	84,9

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	TARGET 2023	SASARAN		INDIKATOR KINERJA SASARAN		SATUAN	KONDISI AWAL (2018)	TARGET					KONDISI AKHIR	
									2019	2020	2021	2022	2023		
				infrastruktur di seluruh wilayah Kabupaten Kuningan	b.	jalan dan jembatan jaringan Irigasi dengan kondisi baik	%	59,01	60	60	62	63	64	64	
					c.	Persentase Rumah layak huni	%	94,92	95,63	95,85	96,21	96,56	96,92	96,92	
5.2	Mewujudkan kelestarian fungsi sumberdaya alam dan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	67,142	5.2.1	Terwujudnya penataan ruang yang berwawasan lingkungan	a.	Jumlah dokumen perencanaan yang tersedia / tersusun	Dokumen	N/A	3	9	14	3	3	32
				5.2.2	Terwujudnya sumberdaya alam dan lingkungan yang lestari	a.	Capaian RTH (Penataan RTH)	Unit	8	2	0	0	0		10 Pindah kewenangan ke DLH
						b.	Indeks Tutupan Lahan	Point	56,48	56,50	57,25	57,5	57,75	58	58
				5.2.3	Meningkatnya upaya mitigasi bencana	a.	Persentase pencegahan dan kesiapsiagaan dalam rangka pengurangan resiko bencana	%	85	85	90%	95%	95%	100%	100%
						b.	Respons time penanganan kedaruratan dan pemenuhan kebutuhan dasar	Hari/24 jam	1 hari	1 hari	1 hari	1 hari	1 hari	1 hari	1 hari
						c.	Persentase penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi Pasca	%	85	80	90%	95%	95%	100%	100%

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	TARGET 2023	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN		SATUAN	KONDISI AWAL (2018)	TARGET					KONDISI AKHIR
								2019	2020	2021	2022	2023	
Sumber:	Perubahan		RPJMD	Bencana		Kab.	Kuningan						2018-2023

4.2 Isu Strategis Tahun 2023

Berdasarkan hasil analisis situasi lingkungan strategis eksternal dan internal serta perhatian khusus, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan bersama para stakeholder pembangunan lainnya telah menentukan 9 (sembilan) isu strategis diantaranya:

1. Penurunan angka kemiskinan;
2. Penurunan tingkat pengangguran terbuka;
3. Peningkatan sentra-sentra pertanian/peternakan/perikanan berbasis potensi lokal;
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, ketersediaan air bersih, sanitasi, perumahan, dan informasi);
5. Peningkatan potensi investasi daerah;
6. Pengembangan ekonomi kreatif, destinasi dan pemasaran wisata berbasis desa;
7. Peningkatan inovasi daerah di sektor layanan publik;
8. Reformasi birokrasi (penerapan e-government, reformasi kelembagaan, dan ketatalaksanaan serta penerapan sistem merit);
9. Kerentanan bencana sedang sampai tinggi.

4.3 Prioritas Pembangunan

Tujuan pembangunan daerah pada dasarnya harus selaras dengan tujuan nasional, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 bahwa dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran prioritas pembangunan Nasional harus dijabarkan kesemua tingkatan dan fungsi pemerintahan sesuai dengan kewenangan.

Sinergi prioritas pembangunan Kabupaten Kuningan Tahun 2023 dengan prioritas nasional dan prioritas pembangunan Jawa Barat sangat terkait, dapat dilihat sebagaimana gambar berikut ini:

Tabel 4.2 Sandingan Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Kuningan Tahun 2023

NASIONAL “Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan”	KABUPATEN KUNINGAN “Mencapai Daerah Yang Maju dan Unggul”	JAWA BARAT “Mencapai Kemandirian Masyarakat Jawa Barat”
- Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem - Peningkatan kualitas sumber daya manusia - Penanggulangan pengangguran - Pemulihan dunia usaha - Percepatan pembangunan infrastruktur dasar (air bersih dan sanitasi) - Pembangunan ekonomi hijau yang menjadi repons terhadap perubahan iklim - Revitalisasi industri dan penguatan riset - Pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN	- Percepatan rehabilitasi dan aksesibilitas pendidikan - Percepatan pembangunan desa khususnya sektor pertanian dan pariwisata, melalui pembangunan dan rehabilitasi Infrastruktur - Peningkatan produktivitas dan lapangan kerja melalui UMKM/IMKM berbasis teknologi informasi, Ketersediaan bantuan permodalan dan pengembangan usaha: - Pengembangan karakter berbangsa dan bernegara serta keluhuran nilai-nilai agama - Peningkatan layanan kesehatan, khususnya bagi ibu dan anak, manula dan penyandang disabilitas - Peningkatan mutu pelayanan dan transparansi pemerintahan melalui Sistem Informasi Terpadu	- Reformasi sistem kesehatan daerah - Pemulihan dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis inovasi - Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan - Reformasi Sistem Perlindungan Sosial - Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan - Reformasi Sistem Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana - Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah - Gerakan Membangun Desa - Pendidikan Agama dan Tempat Ibadah Juara - Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup - Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata

Keterangan : warna huruf yang sejenis menunjukkan keterkaitan tema dan prioritas

Keberpihakan kebijakan perencanaan serta dukungan penganggaran dalam menjawab permasalahan dan isu strategis merupakan bagian penting dan menentukan dalam keberhasilan pelaksanaan pembangunan di

Kabupaten Kuningan, oleh sebab itu dalam RKPD Kabupaten Kuningan Tahun 2023 dilakukan pembobotan terhadap isu-isu strategis yang sebelumnya diselaraskan dengan isu strategis Provinsi dan juga Nasional. Setelah dikaji setidaknya terdapat 9 (sembilan) persoalan utama yang merupakan bagian dari isu strategis pembangunan di Kabupaten Kuningan, yaitu: Infrastruktur, Pemulihan Ekonomi, Penanggulangan Kemiskinan, Peningkatan Daya Beli, Pengarusutamaan Gender, Peningkatan Kualitas Kesehatan, Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pengurangan Pengangguran dan terciptanya masyarakat yang agamis.

Berikut proporsi anggaran per isu strategis terhadap total rencana belanja pembangunan. Anggaran tersebut merupakan proyeksi alokasi belanja yang berasal dari PAD, proyeksi alokasi kegiatan dari Bantuan Keuangan Provinsi dan proyeksi alokasi kegiatan Dana Alokasi Khusus.

- **Infrastruktur: 36,50%** atau setara dengan nilai anggaran Rp. 471.724.150.044.
- **Pemulihan Ekonomi: 23,45%** atau setara dengan nilai anggaran Rp. 303.108.729.774.
- **Penanggulangan Kemiskinan: 21,46%** atau setara dengan nilai anggaran Rp. 277.328.729.774.
- **Peningkatan Daya Beli: 6,05%** atau setara dengan nilai Rp. 78.138.537.511.
- **Pengarusutamaan Gender: 20,38%** atau setara dengan nilai anggaran Rp. 263.343.150.044.
- **Peningkatan Kualitas Kesehatan: 22,72%** atau setara dengan nilai Rp. 293.622.081.645.
- **Peningkatan Kualitas Pendidikan: 15,21%** atau setara dengan nilai anggaran Rp. 196.618.331.000.
- **Pengurangan Pengangguran: 12,10%** atau setara dengan nilai anggaran Rp. 156.330.136.187.
- **Agamis: 5,67%** atau setara dengan nilai Rp. 73.313.645.000.
- **Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia 30,1%** atau setara dengan nilai Rp. 388.566.947.174.

- **Pengawasan Internal Pemerintahan 2,2%** atau setara dengan nilai Rp.28.688.600.000.

Selanjutnya Proporsi anggaran untuk **Program Unggulan Daerah** adalah sebesar Rp. 591.229.796.165 atau sebesar **46,00%** dari total anggaran Kabupaten Kuningan. Anggaran tersebut diperuntukkan penuntasan Program Unggulan Daerah Kabupaten Kuningan di tahun 2023 yang mencakup: rehabilitasi ruang kelas (1000), pembangunan ruang kelas (300), pembangunan perpustakaan (100), pemberian beasiswa (1000), jalan dan jembatan Kabupaten/Desa 1.000 KM, penanganan jaringan irigasi (18.000 Hektar), Desa pinunjul wisata (25), Desa Pinunjul Agro (42), Desa Pinunjul Industri (18), Desa Pinunjul UMKM (3), Desa Pinunjul Koperasi (3), Desa Pinunjul Wisata (1), Desa Pinunjul Kuliner Tradisional (1), Desa Pinunjul Pendidikan (7), wirausahawan baru berbasis industri kreatif (1.000), bantuan modal usaha (1.000), Ketersediaan ruang-ruang kreatifitas masyarakat meliputi seluruh bidang, Wakaf Al-Quran (1000 Mushaf) Ambulans Gratis, Revitalisasi Posyandu (1.423) dan Sistem Informasi Terpadu.

4.3.1 Prioritas Pembangunan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2023: **“Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**, maka fokus pembangunan diarahkan kepada Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan, Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan, SDM Berkualitas dan Berdaya Saing, Revolusi Mental dan Pembangunan

Kebudayaan, Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar, Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim, Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik, dengan sasaran dan target yang harus dicapai antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi nasional 2020-2024 rata-rata sebesar 6,0 persen pertahun. Sasaraninflasi tahun 2020-2024 dijaga stabil dengan tren menurun, menjadi sekitar 2,7 persen pada tahun 2024.
2. Sasaran tingkat kemiskinan pada kisaran6,0–7,0 persen dan 3,6–4,3 persen; tingkat rasio ginimenurun menjadi 0,360–0,374; dan IPM yang mengindikasikan perbaikan kualitas sumber daya manusia meningkat menjadi 75,54. (Sumber : RPJMN Tahun 2020 – 2024)

Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2023diselaraskan untuk mendukung pencapaian pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui **5 (lima) arahan utama Presiden**, sebagai berikut:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun Sumber DayaManusiapekerjakerasyangdinamis,produktif,terampil,menguas ai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomianrakyat;
3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 Undang- Undang. pertama Undang-Undang Cipta Kerja dan kedua Undang- Undang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Menengah(UMKM);
4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi;dan
5. Transformasi Ekonomi, Melakukan transformasi ekonomi dari

ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam rangka mendukung 5 (lima) arahan Presiden tersebut, maka diterjemahkan ke dalam **7 (tujuh) Agenda Pembangunan** yang perlu dilakukan, sebagai berikut:

1. *Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan*

Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:

- a) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
- b) Akselerasi peningkatan nilai tambah agrofisery industry, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

2. *Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.*

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui:

- a) pengembangan sektor/ komoditas/ kegiatan unggulan daerah;
- b) distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang;
- c) peningkatan daya saing wilayah yang inklusif;

- d) memperkuat kemampuan Sumber Daya Manusia dan Ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah; dan
- e) meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.

3. *Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing*

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia yaitu Sumber Daya Manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:

- a) pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
- b) penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
- c) peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
- d) peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
- e) peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
- f) pengentasan kemiskinan; dan
- g) peningkatan produktivitas dan daya saing.

4. *Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan*

Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan. Revolusi mental dilaksanakan secara terpadu yang bertumpu pada:

- a) revolusi mental dalam sistem pendidikan;
- b) revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan; dan
- c) revolusi mental dalam sistem sosial.

Selain itu revolusi mental juga diperkuat melalui upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan, memperkuat moderasi beragama; dan meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas

5. *Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar*

Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui:

- a) menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah;
- b) peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan;
- c) pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK;
- d) rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien; dan
- e) mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.

6. *Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim*

Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan:

- a) peningkatan kualitas lingkungan hidup;
- b) peningkatan ketahanan bencana dan iklim; dan
- c) pembangunan rendah karbon

7. *Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, dan Transformasi Pelayanan Publik*

Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas

pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:

- a) reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
- b) meningkatkan hak-hak politik dan kebebasansipil;
- c) memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamananansiber;
- d) mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; dan
- e) mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luarnegeri.

4.3.2 Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat

Adapun tema atau fokus pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 adalah: **“Mencapai Kemandirian Masyarakat Jawa Barat”**. Tema tersebut memiliki makna bahwa pembangunan Jawa Barat Tahun2023 bahwa masyarakat Jawa Barat diharapkan dapat mencapaikemandirian setelah menghadapi pandemi Corona Virus Deases (COVID-19).

Prioritas yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018– 2023 berjumlah 11 (Sebelas), yang terdiri dari:

1. Reformasi Sistem Kesehatan Daerah;
2. Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan berbasis Inovasi;
3. Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan;
4. Reformasi Sistem Perlindungan Sosial;
5. Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan;
6. Reformasi Sitem Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana;
7. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah;
8. Gerakan Membangun Desa;
9. Pendidikan Agama dan Tempat Ibadah Juara;

10. Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
11. Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata.

Selain penjabaran pelaksanaan prioritas pembangunan di atas, juga dilakukan upaya-upaya transformasi pembangunan di Provinsi Jawa Barat dengan memperhatikan upaya-upaya adaptasi terhadap situasi pandemi COVID-19 melalui program-program Jabar Juara, meliputi pesantren juara, masjid juara, ulama juara, kesehatan juara, perempuan juara, olahraga juara, budaya juara, sekolah juara, guru juara, ibu juara, millennial juara, perguruan tinggi juara, SMK juara, transportasi juara, lingkungan juara, kelola sampah juara, logistik juara, gerbang desa juara, kota juara, pantura juara, pansela juara, energi juara, nelayan juara, pariwisata juara, tanggap bencana juara, ekonomi kreatif juara, buruh juara, industri juara, pasar juara, petani juara, umat juara, UMKM juara, wirausaha juara, birokrasi juara, APBD juara, ASN juara, BUMD juara.

4.3.3 Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Kuningan

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Kuningan tahun 2023 pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) tahun rencana. Pada Tahun 2023 ini, prioritas pembangunan diarahkan pada pemenuhan 6 program unggulan bupati yaitu:

- Percepatan rehabilitasi dan aksesibilitas pendidikan, yaitu :
 1. Rehabilitasi Ruang Kelas (Target* 200 RK);
 2. Pembangunan Ruang Kelas Baru (Target* 71 RKB);
 3. Pembangunan Perpustakaan (Target* 20 Ruang); dan
 4. Pemberian Beasiswa (Target* 200 Orang).
- Percepatan pembangunan desa khususnya sektor pertanian dan pariwisata, melalui pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur, yaitu :
 1. Penanganan Jalan/Jembatan (Target* $\pm$ 72 KM);
 2. Penanganan Jaringan Irigasi untuk melayani Daerah Irigasi seluas (Target* $\pm$ 600 Hektar);
 3. Pengembangan Desa Wisata (Target* 4 desa); dan
 4. Pengembangan Desa Pinunjul Tematik (Target* 10 desa).
- Peningkatan produktivitas dan lapangan kerja melalui UMKM/IMKM berbasis teknologi informasi, Ketersediaan bantuan permodalan dan pengembangan usaha:
 1. Wirausahawan Baru Berbasis Industri Kreatif; dan
 2. Bantuan Modal Usaha Kecil.
- Pengembangan karakter berbangsa dan bernegara serta keluhuran nilai-nilai agama melalui:
Ketersediaan ruang-ruang kreatifitas masyarakat meliputi seluruh bidang dan menjadikan mesjid sebagai pusat kegiatan masyarakat dengan memenuhi kebutuhan mesjid, salah satunya yaitu ketersediaan Alqur'an melalui wakaf Al Quran (Target* 192 mushaf Al Quran).

- Peningkatan layanan kesehatan, khususnya bagi ibu dan anak, manula dan penyandang disabilitas melalui:
 1. Ketersediaan ambulance gratis yang bisa menjangkau seluruh pelosok Kabupaten Kuningan (Target* 8 Ambulance); dan
 2. Revitalisasi Posyandu (Target* 284 Posyandu).
- Peningkatan mutu pelayanan dan transparansi pemerintahan melalui Sistem Informasi Terpadu (Target* 2 Aplikasi).

Pembangunan Kabupaten Kuningan Tahun 2023 diarahkan untuk menjabarkan dan melaksanakan sasaran setiap misi pembangunan Kabupaten Kuningan periode 2018-2023. Pencapaian target sasaran pembangunan diindikasikan dengan sejumlah indikator kinerja makro dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Guna mencapai target indikator kinerja sasaran pembangunan, maka dilakukan pengendalian dan evaluasi secara periodik dan berkesinambungan.

Hasil pengendalian dan evaluasi memberikan gambaran riil mengenai kondisi capaian pembangunan di wilayah Kabupaten Kuningan. Kondisi ini menjadi dasar pertimbangan dalam perumusan permasalahan pembangunan dan isu strategis yang akan dijadikan salah satu input bagi pengambilan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan, selain berbagai pertimbangan lainnya seperti kebijakan pembangunan nasional Tahun 2023, amanat penerapan standar pelayanan minimal, pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan, dan dokumen perencanaan strategis lainnya, serta kondisi sosial dan ekonomi akibat pandemi Covid-19 di Kabupaten Kuningan khususnya. Lebih lanjut, sebagai upaya untuk melaksanakan percepatan pemulihan kondisi ekonomi dan kesehatan masyarakat dari dampak COVID-19 dan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (PKE) di 25 Desa 5 Kecamatan, maka pada Tahun 2023 terdapat satu tambahan prioritas pembangunan daerah yaitu “Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (PKE) di 25 Desa 5 Kecamatan”. Selain itu, dalam menentukan prioritas pembangunan tahun 2023 pemerintah daerah Kabupaten Kuningan telah menyerap aspirasi masyarakat yang tertuang dalam Pokok-Pokok Pikiran DPRD. Hal

tersebut sebagai implementasi pendekatan politis. Adapun rekapitulasi jumlah kegiatan dalam Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang ditindak lanjuti sebagai masukan dalam RKPD 2023 adalah sebagai berikut:

No	Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan
1	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	101
2	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	198
3	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	13
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	91
5	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	92
6	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	59
7	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	61
8	DINAS PERHUBUNGAN	96
9	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN	255
10	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	637
11	DINAS SOSIAL	1
12	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	4
13	SEKRETARIAT DAERAH	30
14	Satpol PP	1
JUMLAH		1639

Pembangunan Kabupaten Kuningan Tahun 2023 diarahkan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan jangka menengah periode 2018-2023. Guna mencapai sasaran tersebut, maka serangkaian program pembangunan akan dilaksanakan pada Tahun 2023. Dari seluruh program perangkat daerah Tahun 2023 dipilih program-program yang diprioritaskan untuk mencapai sasaran pembangunan sekaligus dalam rangka mewujudkan program Jabar Juara. Program-program yang telah dipilih selanjutnya disebut dengan program pembangunan daerah.

Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 27Desember 2021 menerbitkan Kepmendagri Nomor 050-5889 tentangHasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Peraturan tersebut mengatur perencanaan pada nomenklatur program dan kegiatan serta sub kegiatan untuk pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Selanjutnya pemerintah daerah wajib untuk melakukan penyesuaian nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan dimulai pada RKPD Tahun 2021.Pemerintah Kabupaten Kuningan pada

penyusunan RKPD Tahun 2023 melakukan penyesuaian nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan, namun tidak mengubah target untuk semua indikator kinerja tahunan. Penyesuaian dilakukan melalui pemetaan nomenklatur yang tertuang dalam RPJMD terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang dalam Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

4.4 Program Inovasi Daerah

Kemiskinan sampai saat ini masih menjadi permasalahan utama pembangunan di Kabupaten Kuningan terlebih sejak adanya tekanan ekonomi akibat dampak pandemi COVID-19. Sehingga pengentasan kemiskinan telah menjadi prioritas pembangunan di Kabupaten Kuningan. Berdasarkan data tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Jawa Barat, Kabupaten Kuningan berada pada urutan kedua tertinggi, yaitu sebesar 11,41% berada di atas rata-rata kemiskinan provinsi dan nasional.

Dengan memperhatikan Visi Kabupaten Kuningan “**MAJU Berbasis Desa Tahun 2023**”, Pengentasan Kemiskinan dengan menjadikan Desa sebagai pusat pertumbuhan pembangunan yang membumi berkarakteristik lokal menjadi Kebutuhan Strategis di Kabupaten Kuningan. Selain itu, Kabupaten Kuningan didukung dengan program Desa Pinunjul, dimana program tersebut merupakan upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kewilayahan dengan mengangkat sektor agro yang menjadi sektor unggulan Kabupaten Kuningan.

Paradigma penanggulangan kemiskinan dewasa ini telah bergeser dari yang bersifat *top down* menjadi *bottom up*, sehingga dalam hal ini daerah diberikan keleluasaan untuk melaksanakan program penanggulangan kemiskinan yang disesuaikan dengan karakteristik dan potensi yang dimilikinya. Tentunya kondisi tersebut membuka peluang daerah untuk berinisiasi menggali konsep dalam upaya penanggulangan kemiskinan melalui inovasi dan kolaborasi secara komprehensif.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan mengusulkan suatu gagasan penanggulangan kemiskinan melalui **KABISA DESA**. Konsep ini merupakan suatu upaya pendekatan pola-pola inovatif dan kolaboratif dalam rangka penanggulangan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Kuningan.

4.4.1 Kegiatan KABISA DESA

KABISA DESA singkatan dari Kolaborasi Aneka Agribisnis Bina Bersama Desa adalah suatu model pengembangan sistem pertanian terpadu yang dikemas dalam bahasa sunda agar lebih membumi. **KABISA DESA** ini sebagai upaya penanggulangan kemiskinan melalui perluasan kesempatan kerja, peningkatan ekonomi masyarakat, optimalisasi pemanfaatan lahan, optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam yang berbasis usaha di sektor pertanian dengan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Arti Kalimat KABISA adalah kemampuan desa mengelola sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, dan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya **KABISA DESA** juga mempunyai artian huruf K untuk Kolaborasi, huruf A untuk Aneka Agribisnis, huruf BI untuk Bina; dan SA untuk Bersama. Bina bersama dalam implementasinya Bina Bersama mengadopsi pendekatan Pentahelix yaitu ABCGM singkatan dari *Academy, Business, Community, Government, dan Media*. **KABISA DESA** merupakan core dari 3 kegiatan, yaitu **SIPADU** (Sistem Pertanian Terpadu); **Gerbang Kaya** (Gerakan Mengembangkan Kambing dan Ayam); dan **Si Kobo Naek Kuda Poni** (Sistem Kolam *Bioflock* Optimalisasi Ideal Naikkan Ekonomi Keluarga Pelaku Budidaya Pondasi Nikmati Illahi).

Prinsip kegiatan **KABISA DESA** adalah penggabungan berbagai teknik budidaya pertanian, peternakan, dan perikanan sehingga konvergen saling terhubung, memberi manfaat, dan tidak saling merugikan. Limbah yang dihasilkan pertanian bisa dimanfaatkan untuk peternakan. Begitu juga sebaliknya, limbah yang ada pada peternakan bisa digunakan untuk pertanian. Contoh dari sistem **KABISA DESA** adalah Tanaman Sorgum, Padi, Sayuran yang tempatnya berdekatan

dengan peternakan. Limbah-limbah dari pertanian tersebut (batang dan daun sorgum) bisa diberikan pada hewan ternak melalui proses fermentasi menjadi pakan ternak yang berkualitas yaitu silase. Setelah dimakan maka hewan akan mengeluarkan kotoran. Kotoran ini nantinya bisa digunakan sebagai pupuk untuk tanaman tadi. Dengan begitu, tercipta hubungan saling menguntungkan. Selanjutnya buah sorgum selain pasarnya sudah dijamin oleh *off taker* juga buah sorgum selain untuk sumber makanan juga menjadi salah satu bahan baku untuk pembuatan pakan ikan dan ternak. Ciri utama dari integrasi ini adalah adanya keterkaitan dan hubungan yang saling menguntungkan antara tanaman dan ternak. Integrasi ini mampu memperbaiki kesuburan tanah, sehingga hasil dari kedua sektor bisa lebih optimal.

KABISA DESA selaras dengan konsep *integrated farming system* yang dicirikan dengan adanya interaksi dan keterkaitan yang sinergis antar berbagai aktivitas pertanian dalam mewujudkan peningkatan efisiensi, peningkatan produktivitas, kemandirian, dan kesejahteraan petani secara berkelanjutan. Adanya keterkaitan dalam sistem produksi dapat mengurangi penggunaan dan ketergantungan pada masukan produksi eksternal baik berupa pupuk, pestisida dan benih. Berkurangnya masukan eksternal dapat mendatangkan nilai tambah yang menjadi pendapatan petani.

Kolaborasi dalam konsep **KABISA DESA** adalah adanya kerjasama baik dalam Intra Agribisnis, Antar Agribisnis dan Antar Agribisnis - Agroindustri sehingga dengan adanya sinergitas yang saling keterkaitan yang tidak terpisahkan satu sama lain pada setiap aktivitas usaha pertanian, maka akan dihasilkan efisiensi dan efektifitas biaya produksi dalam setiap rangkaian usaha. Selanjutnya dalam hal ini pemerintah bertindak sebagai fasilitator, regulator, motivator yang harus menserasikan hubungan antar pelaku agribisnis tersebut, sehingga para pelaku dapat berinteraksi secara proporsional dan tidak terjadi eksploitasi yang bersifat kontradiktif.

Dengan memperhatikan potensi dan keunggulan yang diantaranya adalah potensi agro, perikanan dan peternakan, potensi desa wisata, Kelompok Penggerak Pariwisata, Kelompok Tani Hutan dan Kelompok Wanita Tani, Kegiatan **KABISA DESA** yang diusulkan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan mengambil tema **Penanganan Kemiskinan dan Masalah Kesejahteraan Sosial** yang terdiri dari 3 fokus sub tema sebagai berikut :

1. Pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat miskin sektor pertanian;
2. Pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat miskin sektor kelautan dan perikanan; dan
3. Pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat miskin sektor peternakan;

4.4.2 Mekanisme dan Rancangan Kegiatan

Tahapan proses penyusunan Model **KABISA DESA** diawali dari: 1) identifikasi masalah, potensi dan kebutuhan, 2) penggalan gagasan, penyusunan model **KABISA DESA** sesuai potensi desa dan agroklimat, 3) verifikasi usulan, 4) penetapan program/kegiatan, 5) pelaksanaan program secara partisipatif, integrasi dan fokus, 6) monitoring dan evaluasi **KABISA DESA**. Adapun Mekanisme kegiatan implementasi **KABISA DESA** adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Perencanaan

Penguatan perencanaan dalam mengimplementasikan model **KABISA DESA** diantaranya adalah study literatur, Rapat koordinasi lintas sektor/lintas SKPD, identifikasi sasaran lokasi (*mapping* wilayah), identifikasi sasaran kelompok, identifikasi komoditas pertanian dan populasi ternak, penyusunan rencana aksi (identifikasi kebutuhan) dan pengajuan usulan lokasi kegiatan berada di 6 desa (Desa Situsari, Desa Cageur, Desa Paninggaran, Desa Karangsari, Desa Tugumulya dan Desa Darma) di Kecamatan Darma.

2. Membangun Kerjasama

Kerjasama multipihak penting untuk dilakukan dalam kerangka penguatan hulu hilir sektor pertanian (dalam arti luas). **KABISA DESA**

merupakan kegiatan yang memadukan praktek hulu hilir dengan pendekatan *Penta-Helix*.

3. Penguatan Sarana Prasarana

Penguatan sarana prasarana pada setiap aktivitas kegiatan usaha pertanian baik di *on farm*, *of farm* dan penguatan sarana prasarana pendukung usaha pertanian seperti pembangunan jalan usaha tani, irigasi, pasar dsb.

4. Peningkatan Kapasitas SDM

Peningkatan kapasitas SDM diarahkan pada peningkatan pengetahuan dan keterampilan melalui pelatihan, pembinaan, pendampingan, dan sosialisasi.

5. Penguatan Kelembagaan

Penguatan kelembagaan diarahkan pada kelompok tani sasaran penerima manfaat, kelompok masyarakat miskin, dan kelembagaan usaha ekonomi desa seperti BUMDes.

6. Adopsi Teknologi

Adopsi teknologi diterapkan pada proses *on farm* dan *off farm* dengan tujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas hasil.

4.4.3 Sumberdaya yang Dibutuhkan

Sumberdaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan adalah:

- Sumberdaya lahan;
- Sarana produksi untuk budidaya, prasarana alat dan mesin;
- Sarana dan prasarana pengairan;
- Sarana dan prasarana pengolahan hasil;
- Sumberdaya manusia yang terdiri dari para Anggota Kelompok Tani, Kelompok Wanita Tani, Pengelola BUMDes, PPL, dinas terkait dan *off taker*;
- Sumberdaya kelembagaan Kelompok Tani, Kelompok Wanita Tani dan BUMDes,

- Sumber pendanaan yang dibutuhkan berasal dari APBD Provinsi (melalui Banku Kompetitif), APBD Kabupaten, dan sumber lain.

4.4.4 Rencana Pelaksanaan

KABISA DESA merupakan kegiatan kolaborasi yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Kuningan. Inti kegiatan **KABISA DESA** adalah Agribisnis dengan konsep Pertanian terintegrasi (*Integrated Farming*) dengan pelibatan masyarakat miskin sebagai pelaku utamanya. Perangkat Daerah yang terlibat dalam program ini adalah:

- 1) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, berperan sebagai pengampu kegiatan Agribisnis dengan pengembangan komoditas potensial dan memiliki jaminan pasar;
- 2) Dinas Perikanan dan Peternakan, berperan dalam fasilitasi pengembangan budidaya Ternak dan Ikan serta produk olahannya, dalam rangka penyediaan protein hewani;
- 3) Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian, berperan dalam fasilitasi pendampingan dan pembinaan kegiatan usaha;
- 4) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, berperan dalam memfasilitasi Teknologi Tepat Guna;
- 5) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, berperan dalam fasilitasi sarana dan prasarana irigasi untuk kegiatan usaha tani.

Selain peran perangkat daerah diatas, KABISA Desa didukung oleh kesiapan dan komitmen Pemerintah Desa dan Jejaring Mitra Usaha yang diantaranya adalah 1) Pemdes; 2) Bumdes; 3)Kompepar; 4) KTH; 5)Perguruan Tinggi (UNIKU, UNISA); 6) Media; 7) Komunitas (Organisasi Kewirausahaan).

4.4.5 Rencana Lokasi/Calon Penerima Calon Lokasi (CPCL)

Lokasi kegiatan **KABISA DESA** adalah di 6 desa (Desa Sitisari, Desa Cageur, Desa Paninggaran, Desa Karangsari, Desa Tugumulya dan Desa Darma) di Kecamatan Darma.

4.4.6 Keberlanjutan

Dengan adanya kerja sama dengan *off taker*, dipastikan kegiatan ini akan berlanjut meskipun fasilitas kegiatan telah selesai. Fasilitasi kegiatan merupakan modal awal bagi kelompok pelaksana. Untuk selanjutnya keuntungan dari hasil kegiatan sebagian digunakan untuk modal usaha berikutnya. Diharapkan dengan keberlanjutan kegiatan ini, dapat berkembang dan ada replikasi di lokasi lain sehingga semakin banyak masyarakat yang terlibat dalam agribisnis **KABISA DESA**, sehingga penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Kuningan dapat tercapai dengan estimasi sebagai berikut :

- Kemiskinan berkurang 3560 Orang
- Pengangguran berkurang 3560 orang
- Penambahan Pendapatan per orang per hari Rp 1.813.948
- Pengembangan Usaha Agro (5 Desa)
- Pengembangan Wisata Desa (1 Desa)
- Pengembangan Pupuk Organik (6 Desa)
- Pengembangan Usaha Perikanan (5 Desa)
- serta akan berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan di Jawa Barat 4,3 – 4,54 persen.

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana program prioritas daerah merupakan uraian yang menjelaskan program, kegiatan, indikator keluaran (*output*) kegiatan maupun hasil (*outcome*) program, sasaran dari kegiatan, satuan, volume, target, serta pagu indikatif pendanaannya. Klasifikasi program dan kegiatan dituangkan secara lengkap dalam Matrik Rencana Prioritas Pembangunan Kabupaten dan Matrik Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/SKPD.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 Kabupaten Kuningan merupakan gambaran Rencana Prioritas Pembangunan Pemerintah Kabupaten Kuningan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023 berdasarkan evaluasi capaian hasil pembangunan sampai dengan Tahun 2022 dan evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2020 dan 2021. Evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan pembangunan yang telah dilaksanakan, untuk kemudian dibuat analisisnya sebagai bahan perencanaan pembangunan selanjutnya.

Perencanaan pembangunan yang telah disusun bersama ini tidak mungkin seluruhnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di Kabupaten Kuningan. Namun demikian, melalui program/kegiatan yang telah direncanakan diharapkan dapat mengurangi permasalahan pembangunan, terutama permasalahan pembangunan yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.

Estimasi rencana belanja pada Tahun 2023 direncanakan sebesar Rp.2.887.063.380.452,- sedangkan estimasi pendapatan daerah sebesar Rp.2.905.063.380.452,- untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1 Rekapitulasi Estimasi Belanja Tahun 2023

URAIAN	RENCANA TAHUN 2023
BELANJA DAERAH	2.887.063.380.452
1 Belanja Operasi	2.075.199.906.400
a. Belanja Pegawai	1.279.807.820.074
b. Belanja Barang dan Jasa	711.806.272.213
c. Belanja Bunga	-
d. Belanja Hibah	66.672.527.513
e. Belanja Bantuan Sosial	16.913.286.600
2 Belanja Modal	345.451.162.604
a. Belanja Tanah	40.749.100.000
b. Belanja Peralatan dan Mesin	86.606.760.077
c. Belanja Bangunan dan Gedung	82.075.606.605
d. Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi	102.886.804.422
e. Belanja Aset Tetap lainnya	33.132.891.500
3 Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000
4 Belanja Transfer	456.412.311.448
a. Belanja Bagi Hasil	10.400.000.000
b. Belanja Bantuan Keuangan	446.012.311.448

Tabel 5.2 Rekapitulasi Estimasi Pendapatan Daerah Tahun 2023

URAIAN	RENCANA TAHUN 2023
PENDAPATAN DAERAH	2.905.063.380.452
1. Pendapatan Asli Daerah	427.026.407.878
a Pajak Daerah	108.555.300.000
b Retribusi Daerah	88.520.495.956
c Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	6.681.886.332
d Lain-lain PAD Yang Sah	223.268.725.590
2. Pendapatan Transfer	2.467.310.495.824
a Transfer Pemerintah Pusat	2.160.195.367.445
b Transfer Antar-Daerah	307.115.128.379
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	10.726.476.750
a. Hibah	10.726.476.750
b. Dana Darurat	-
c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	-

Tabel 5.3 Rekapitulasi Program Prioritas Kabupaten Kuningan Tahun 2023

NO	PERANGKAT DAERAH/ URUSAN/ PROGRAM	JUMLAH ANGGARAN (Rp)
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.254.397.845.645
	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	1.239.947.845.645
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	796.397.845.645
	Program Pengelolaan Pendidikan	442.770.000.000
	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	780.000.000
	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	14.450.000.000
	Program Pengembangan Kebudayaan	1.000.000.000
	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	2.900.000.000
	Program Pembinaan Sejarah	1.400.000.000
	Progra Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	8.200.000.000
	Program Pengelolaan Permuseuman	950.000.000
2	DINAS KESEHATAN	194.697.000.000
	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	194.697.000.000
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100.578.819.634
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	92.988.180.366
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	600.000.000
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	380.000.000
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	150.000.000
3	RSUD 45	184.475.000.000
	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	184.475.000.000
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	38.923.895.000
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	145.551.105.000
4	RSUD LINGGAJATI	59.510.000.000
	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	59.510.000.000
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	15.974.615.000

NO	PERANGKAT DAERAH/ URUSAN/ PROGRAM	JUMLAH ANGGARAN (Rp)
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	43.085.385.000
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	450.000.000
5	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	145.428.000.000
	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	145.428.000.000
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	27.184.000.000
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	24.080.000.000
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	10.400.000.000
	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	1.500.000.000
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	4.850.000.000
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	1.400.000.000
	Program Penataan Bangunan Gedung	1.400.000.000
	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	10.100.000.000
	Program Penyelenggaraan Jalan	54.619.000.000
	Program Pengembangan Jasa Kontruksi	3.195.000.000
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	6.700.000.000
6	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	127.028.686.402
	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	56.278.686.402
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.698.095.000
	Program Pengembangan Perumahan	4.100.000.000
	Program Kawasan Permukiman	4.350.000.000
	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	1.500.000.000
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	36.630.591.402
	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	70.750.000.000

NO	PERANGKAT DAERAH/ URUSAN/ PROGRAM	JUMLAH ANGGARAN (Rp)
	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	70.000.000.000
	Program Pengelolaan Tanah Kosong	450.000.000
	Program Penatagunaan Tanah	300.000.000
7	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	27.667.150.000
	Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	27.667.150.000
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	19.599.500.000
	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	7.317.650.000
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	750.000.000
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	6.135.000.000
	Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	6.135.000.000
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.934.500.000
	Program Penanggulangan Bencana	3.200.500.000
9	DINAS SOSIAL	26.508.800.000
	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	26.508.800.000
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.576.000.000
	Program Pemberdayaan Sosial	2.850.000.000
	Program Rehabilitasi Sosial	4.850.000.000
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	8.332.800.000
	Program Penanganan Bencana	2.600.000.000
	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	300.000.000
10	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	12.519.200.000
	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	12.419.200.000
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.594.200.000
	Program Perencanaan Tenaga Kerja	100.000.000

NO	PERANGKAT DAERAH/ URUSAN/ PROGRAM	JUMLAH ANGGARAN (Rp)
	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	2.150.000.000
	Program Penempatan Tenaga Kerja	1.225.000.000
	Program Hubungan Industrial	350.000.000
	Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi	100.000.000
	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	100.000.000
	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	0
11	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	44.705.150.000
	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	37.107.910.000
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	32.157.910.000
	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	1.550.000.000
	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	2.250.000.000
	Program Penanganan Kerawanan Pangan	850.000.000
	Program Pengawasan Keamanan Pangan	300.000.000
	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	7.597.240.000
	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	4.297.240.000
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1.300.000.000
	Program Penyuluhan Pertanian	2.000.000.000
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	22.182.150.000
	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	22.182.150.000
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	17.758.894.959
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	400.000.000
	Program Pengendalian Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup	350.000.000
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	1.123.255.041
	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	175.000.000
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	150.000.000

NO	PERANGKAT DAERAH/ URUSAN/ PROGRAM	JUMLAH ANGGARAN (Rp)
	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	150.000.000
	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	75.000.000
	Program Pengelolaan Persampahan	2.000.000.000
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	9.226.150.000
	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9.226.150.000
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.701.150.000
	Program Pendaftaran Penduduk	525.000.000
	Program Pencatatan Sipil	300.000.000
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	600.000.000
	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	100.000.000
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	27.475.400.000
	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	27.475.400.000
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.226.877.800
	Program Penataan Desa	1.265.000.000
	Program Peningkatan Kerjasama Desa	450.000.000
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	11.400.000.000
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	8.133.522.200
15	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	34.431.000.000
	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	30.331.000.000
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.662.830.000
	Program Pengendalian Penduduk	2.150.000.000
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	10.961.451.040
	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sehat (KS)	6.556.718.960

NO	PERANGKAT DAERAH/ URUSAN/ PROGRAM	JUMLAH ANGGARAN (Rp)
	Urusan Pemerintahan Bidang	4.100.000.000
	Pemberdayaan Perempuan dan	
	Perlindungan Anak	
	Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	1.850.000.000
	Program Perlindungan Perempuan	750.000.000
	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	700.000.000
	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	200.000.000
	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	300.000.000
	Program Perlindungan Khusus Anak	300.000.000
16	DINAS PERHUBUNGAN	27.502.600.000
	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	27.502.600.000
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	18.792.600.000
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	8.710.000.000
17	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	16.000.000.000
	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika	14.650.000.000
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.925.000.000
	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	2.075.000.000
	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	5.650.000.000
	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	700.000.000
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	700.000.000
	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	650.000.000
	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	650.000.000
18	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	32.564.414.274
	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	24.613.825.674
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12.253.900.000
	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	150.000.000
	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	168.000.000

NO	PERANGKAT DAERAH/ URUSAN/ PROGRAM	JUMLAH ANGGARAN (Rp)
	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	118.000.000
	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	234.000.000
	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	545.088.000
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	7.099.500.000
	Program Pengembangan UMKM	4.045.337.674
	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	6.054.000.000
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	3.050.000.000
	Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	1.750.000.000
	Program Pengembangan Ekspor	500.000.000
	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	304.000.000
	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	450.000.000
	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	1.896.588.600
	Program Perencanaan dan dan Pembangunan Industri	1.488.588.600
	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	408.000.000
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	0
19	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	18.000.000.000
	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	18.000.000.000
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	13.350.000.000
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	1.200.000.000
	Program Promosi Penanaman Modal	600.000.000
	Program Pelayanan Penanaman Modal	1.300.000.000
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	800.000.000
	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	750.000.000
20	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	35.349.500.000
	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga	25.949.500.000

NO	PERANGKAT DAERAH/ URUSAN/ PROGRAM	JUMLAH ANGGARAN (Rp)
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.024.500.000
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1.750.000.000
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	15.825.000.000
	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	350.000.000
	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	9.400.000.000
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	5.250.000.000
	Program Pemasaran Pariwisata	1.750.000.000
	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	800.000.000
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1.600.000.000
21	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	5.340.650.000
	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	4.940.650.000
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.240.650.000
	Program Pembinaan Perpustakaan	600.000.000
	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	100.000.000
	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	400.000.000
	Program Pengelolaan Arsip	200.000.000
	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	200.000.000
22	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN	29.530.600.000
	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan	20.880.600.000
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12.780.600.000
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	1.750.000.000
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	4.350.000.000
	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	450.000.000
	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	1.550.000.000
	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	8.650.000.000

NO	PERANGKAT DAERAH/ URUSAN/ PROGRAM	JUMLAH ANGGARAN (Rp)
	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	4.650.000.000
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	2.000.000.000
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	2.000.000.000
23	SEKRETARIAT DAERAH	72.751.000.000
	Sekretariat Daerah	72.751.000.000
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	48.451.000.000
	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	20.600.000.000
	Program Perekonomian dan Pembangunan	3.200.000.000
	Program Pengelolaan Perbatasan	500.000.000
24	SEKRETARIAT DPRD	81.967.200.000
	Sekretariat DPRD	81.967.200.000
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	46.610.400.000
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	35.356.800.000
25	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	15.198.261.200
	Perencanaan	14.048.261.200
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.963.261.200
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.845.000.000
	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	3.340.000.000
	Penelitian dan Pengembangan	1.150.000.000
	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.150.000.000
26	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	21.466.520.000
	Keuangan	21.466.520.000
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	14.486.520.000
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	6.980.000.000

NO	PERANGKAT DAERAH/ URUSAN/ PROGRAM	JUMLAH ANGGARAN (Rp)
27	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	15.469.000.000
	Keuangan	15.469.000.000
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.914.120.000
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	5.079.880.000
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.475.000.000
28	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	19.030.400.000
	Kepegawaian	15.645.400.000
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.660.400.000
	Program Kepegawaian Daerah	4.985.000.000
	Pendidikan dan Pelatihan	3.385.000.000
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.385.000.000
29	INSPEKTORAT	28.688.600.000
	Inspektorat Daerah	28.688.600.000
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	15.840.340.000
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	10.098.260.000
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	2.750.000.000
30	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	12.275.000.000
	Kesatuan Bangsa dan Politik	12.275.000.000
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.332.104.750
	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	625.000.000
	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	2.147.895.250
	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	495.000.000
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	4.675.000.000

NO	PERANGKAT DAERAH/ URUSAN/ PROGRAM	JUMLAH ANGGARAN (Rp)
31	Kecamatan Ciawigebang	2.498.800.000
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.278.800.000
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	30.000.000
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	35.000.000
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	30.000.000
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	85.000.000
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	40.000.000
32	Kecamatan Cibeureum	1.758.340.000
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.608.340.000
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	20.000.000
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	20.000.000
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	20.000.000
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	60.000.000
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	30.000.000
33	Kecamatan Cibingbin	2.481.550.000
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.293.436.000
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	17.922.000
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	26.699.000
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	28.426.000
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	73.400.000
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	41.667.000

NO	PERANGKAT DAERAH/ URUSAN/ PROGRAM	JUMLAH ANGGARAN (Rp)
34	Kecamatan Cidahu	1.972.000.000
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.787.000.000
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	25.000.000
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	20.000.000
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	20.000.000
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	90.000.000
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	30.000.000
35	Kecamatan Cigandamekar	2.205.089.377
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.985.089.377
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	30.000.000
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	20.000.000
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	75.000.000
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	95.000.000
36	Kecamatan Cigugur	9.353.660.000
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.023.480.000
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	20.000.000
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	2.195.180.000
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	20.000.000
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	75.000.000
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	20.000.000
37	Kecamatan Cilebak	1.731.950.000
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.571.950.000

NO	PERANGKAT DAERAH/ URUSAN/ PROGRAM	JUMLAH ANGGARAN (Rp)
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	0
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	45.000.000
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	40.000.000
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	40.000.000
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	35.000.000
38	Kecamatan Cilimus	2.519.100.000
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.259.100.000
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	60.000.000
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	20.000.000
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	20.000.000
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	60.000.000
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100.000.000
39	Kecamatan Cimahi	1.719.765.000
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.469.765.000
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	35.000.000
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	35.000.000
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	35.000.000
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	110.000.000
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	35.000.000
40	Kecamatan Ciniru	2.037.460.000
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.837.460.000

NO	PERANGKAT DAERAH/ URUSAN/ PROGRAM	JUMLAH ANGGARAN (Rp)
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	70.000.000
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	50.000.000
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	20.000.000
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	40.000.000
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	20.000.000
41	Kecamatan Cipicung	2.069.678.800
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.949.678.800
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	15.000.000
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	20.000.000
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	10.000.000
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	55.000.000
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	20.000.000
42	Kecamatan Ciwaru	2.115.130.000
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.935.130.000
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	20.000.000
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	20.000.000
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	20.000.000
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	60.000.000
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	60.000.000
43	Kecamatan Darma	2.391.210.000
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.219.210.000

NO	PERANGKAT DAERAH/ URUSAN/ PROGRAM	JUMLAH ANGGARAN (Rp)
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	17.000.000
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	20.000.000
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	15.000.000
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	75.000.000
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	45.000.000
44	Kecamatan Garawangi	2.520.650.000
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.282.190.000
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	21.000.000
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	20.000.000
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	25.000.000
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	110.460.000
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	62.000.000
45	Kecamatan Hantara	2.283.090.000
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.103.090.000
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	40.000.000
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	20.000.000
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	0
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	70.000.000
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	50.000.000
46	Kecamatan Jalaksana	2.421.660.000
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.204.119.000

NO	PERANGKAT DAERAH/ URUSAN/ PROGRAM	JUMLAH ANGGARAN (Rp)
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	21.452.000
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	30.000.000
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	16.680.000
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	80.899.000
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	68.510.000
47	Kecamatan Japara	2.007.010.000
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.807.010.000
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	40.000.000
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	20.000.000
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	60.000.000
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	80.000.000
48	Kecamatan Kadugede	2.252.160.000
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.052.160.000
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	25.000.000
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	20.000.000
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	25.000.000
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	110.000.000
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	20.000.000
49	Kecamatan Kalimanggis	2.415.040.000
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.240.040.000
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	45.000.000

NO	PERANGKAT DAERAH/ URUSAN/ PROGRAM	JUMLAH ANGGARAN (Rp)
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	20.000.000
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	20.000.000
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	90.000.000
50	Kecamatan Karangkencana	2.087.725.000
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.842.725.000
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	25.000.000
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	25.000.000
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	25.000.000
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100.000.000
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	70.000.000
51	Kecamatan Kramatmulya	2.328.280.000
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.118.280.000
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	0
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	25.000.000
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	0
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	135.000.000
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	50.000.000
52	Kecamatan Kuningan	16.200.000.000
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11.239.390.250
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	47.349.750
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	4.770.000.000

NO	PERANGKAT DAERAH/ URUSAN/ PROGRAM	JUMLAH ANGGARAN (Rp)
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	15.000.000
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	109.375.000
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	18.885.000
53	Kecamatan Lebakwangi	2.364.179.413
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.119.179.413
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	20.000.000
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	20.000.000
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	40.000.000
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	80.000.000
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	85.000.000
54	Kecamatan Luragung	2.520.100.000
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.319.624.372
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	63.649.635
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	20.963.000
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	30.246.493
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	55.581.500
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	30.035.000
55	Kecamatan Maleber	2.290.750.000
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.085.750.000
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	0
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	25.000.000

NO	PERANGKAT DAERAH/ URUSAN/ PROGRAM	JUMLAH ANGGARAN (Rp)
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	30.000.000
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	70.000.000
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	80.000.000
56	Kecamatan Mandirancan	2.262.493.350
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.136.480.350
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	30.000.000
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	20.000.000
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	0
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	53.150.000
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	22.863.000
57	Kecamatan Nusaherang	2.640.370.000
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.475.370.000
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	15.000.000
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	25.000.000
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	15.000.000
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	70.000.000
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	40.000.000
58	Kecamatan Pancalang	2.286.700.000
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.975.200.000
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	54.000.000
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	24.000.000

NO	PERANGKAT DAERAH/ URUSAN/ PROGRAM	JUMLAH ANGGARAN (Rp)
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	24.000.000
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	107.500.000
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	102.000.000
59	Kecamatan Pasawahan	1.713.579.236
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.523.579.236
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	30.000.000
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	20.000.000
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	20.000.000
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100.000.000
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	20.000.000
60	Kecamatan Selajambe	2.066.900.000
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.868.900.000
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	22.000.000
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	65.000.000
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	23.000.000
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	66.000.000
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	22.000.000
61	Kecamatan Sindangagung	2.138.900.000
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.888.900.000
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	20.000.000
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	50.000.000

NO	PERANGKAT DAERAH/ URUSAN/ PROGRAM	JUMLAH ANGGARAN (Rp)
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	20.000.000
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	60.000.000
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100.000.000
62	Kecamatan Subang	1.876.075.000
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.760.800.500
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	16.190.750
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	20.050.000
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	13.720.000
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	51.417.500
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	13.896.250
	JUMLAH	2.699.149.672.697

Rincian kegiatan dan sub kegiatan per SKPD untuk belanja urusan dan non urusan disajikan lebih lengkap dalam lampiran.

5.1 Rencana Program Pembangunan Daerah dalam Rangka Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tahun 2023

Program pembangunan daerah Tahun 2023 dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah Kabupaten Kuningan yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2018-2023, prioritas program pembangunan daerah dan indikator kinerja yang ingin dicapai tahun 2023 disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5.4 Program dan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2023

No	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	IndikatorKinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023	Kondisi Akhir 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Target	Rp.	Target	Rp.	
VISI :“KUNINGAN MAJU (MA’MUR, AGAMIS, PINUNJUL) BERBASIS DESA TAHUN 2023”								
Misi 1 : Membangun tata kelola pemerintahan daerah yang profesional, efektif, demokratis dan terpercaya dengan jiwa kepemimpinan Nu Sajati.								
Tujuan :								
1.1	Mewujudkan mutu pelayanan, akuntabilitas dan transparansi pemerintahan	a Opini BPK	Kategori	WTP		WTP		
		b Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	Persen	85,58		85,58		
Sasaran :								
1.1.1	Terwujudnya tata kelola pemerintah yang akuntabel	a Nilai SAKIP	Level	A		A		
		b Maturitas SPIP	Level	3		3		
		c Skor LPPD	Poin	3,522		3,522		
Program :								
	Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi				2.556.801.413		2.556.801.413	Inspektorat
		1 Jumlah Kebijakan yang diimplementasikan	Peraturan/Keputusan/pedoman	3	485.853.000		485.853.000	Inspektorat
		2 Jumlah Asistensi/ Pendampingan Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan	3	425.121.375	9	425.121.375	
		3 Persentase capaian reformasi birokrasi	Persen	60	485.853.000	60	485.853.000	
		4 Persentase Capaian MCP	Persen	70	546.584.625	70	546.584.625	
		5 Jumlah SKPD yang memiliki nilai SPIP Level 3	SKPD	5	182.194.875	15	182.194.875	
		6 Persentase kepatuhan LHKASN	Persen	65	97.170.600	65	97.170.600	
		7 Persentase kepatuhan LHKPN	Persen	90	91.097.438	90	91.097.438	
		8 Level Kapabilitas APIP	Level	3	242.926.500	3	242.926.500	
	Program Penyelenggaraan Pengawasan				11.710.271.933		11.710.271.933	Inspektorat
		1 Persentase hasil Reviu yang ditindaklanjuti	Persen	70	4.129.750.500	70	4.129.750.500	
		2 Jumlah SKPD yang memiliki nilai LAKIP minimal BB	Jumlah	5	364.389.750	15	364.389.750	
		3 Persentase menurunnya pelaksanaan pungli	Persen	15	910.974.375	15	910.974.375	
		4 Persentase rekomendasi Hasil pemeriksaan APIP (Inspektorat Kabupaten, Provinsi dan Itjen) yang ditindaklanjuti	Persen	75	5.667.475.245	75	5.667.475.245	
		5 Persentase rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI yang ditindaklanjuti	Persen	85	91.097.438	85	91.097.438	

No	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023		Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp.	Target	Rp.	
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	6 Persentase Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah	Persen	15	182.194.875	15	182.194.875	Sekretariat Daerah (Bagian Tapem)
		1 Tercapainya Skor LPPD	poin	3,522	450.000.000		450.000.000	
		2 Jumlah Kerjasama Antar Daerah yang Dilaksanakan	Dokumen	40	110.000.000	40	110.000.000	
		3 Penetapan dan Penegasan Batas Desa dan Kelurahan	desa/kelurahan	8	400.000.000	100	400.000.000	
		4 Meningkatnya Jumlah Aparatur Kelurahan yang memahami tentang penyelenggaraan Pemerintahan di Kelurahan	Aparatur Kelurahan	75	100.000.000	75	100.000.000	
		5 Meningkatnya Kinerja Aparatur Kecamatan	Kecamatan	32	100.000.000	32	100.000.000	
		6 Ditetapkannya 3 peringkat terbaik hasil Penilaian Evaluasi Kinerja Kecamatan	Kecamatan	3	100.000.000	3	100.000.000	
		7 Terlaksananya Kebersihan, Ketertiban dan Keindahan	SKPD	30	130.000.000	30	130.000.000	
		8 Tersedianya dan terawatnya Pilar Batas Daerah	Pilar Batas	10	200.000.000	10	200.000.000	
		9 Tercapainya Target SPM	Persentase	82	150.000.000			
		10 Tersedianya Buku LKPJ	Persentase	100	350.000.000			
		11 Terlaksananya Sinergitas antar Daerah Perbatasan	Persentase	100	150.000.000			
		12 Terlaksananya Sinergitas dengan Pemerintah Provinsi	Persentase	100	150.000.000			
	Program Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja	13 Tersedianya toponimi	desa/kelurahan	188	100.000.000			Bagian Keuangan dan Bagian Umum Setda Kab. Kuningan
					1.611.974.100		6.721.715.100	

No	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023		Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp.	Target	Rp.	
		1 Jumlah Kegiatan Peningkatan Kompetensi Aplikasi Perencanaan dan Pelaporan Keuangan	Buah	2		10		
Sasaran :								
1.1.2	Meningkatnya mutu pelayanan publik yang baik dan partisipasi publik	A Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan	Persen	>90		>90		
		B Agregasi Kepemilikan Dokumen KTP Elektronik dan Akte Kelahiran 0-18 Tahun	Persen	98		98		
				88		88		
Program :								
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				12.257.744.500	12.257.744.500		Sekretariat Dewan
		1 Mengatur jalannya roda Pemerintahan untuk mensejahterakan masyarakat	Produk Hukum	10	4.067.024.500	10	4.067.024.500	
		2 Terbentuknya Produk-produk Hukum Daerah	Produk Hukum	1	300.000.000	1	300.000.000	
		3 Meningkatkan Wawasan Pimpinan dan Anggota DPRD	Kegiatan	2	2.585.880.000	2	2.585.880.000	
		4 Terlaksananya Kegiatan Seminar, Lokakarya, Bimtek Pimpinan dan Anggota DPRD	Kegiatan	1	201.100.000	1	201.100.000	
		5 Terpenuhi dalam Koordinasi Kegiatan Fraksi DPRD	Paket	1	1.138.500.000	1	1.138.500.000	
		6 Terpenuhi Aspirasi Masyarakat dalam Kegiatan DPRD	Orang	12000	500.000.000	12000	500.000.000	
		7 Meningkatkan Wawasan terhadap 3 Fungsi DPRD	Paket	1	300.000.000	1	300.000.000	
		8 Terfasilitasinya semua Aspirasi yang masuk	Paket	1	814.440.000	1	814.440.000	
		9 Terserapnya Aspirasi Masyarakat	Orang	76.500	2.350.800.000	76.500	2.350.800.000	
	Program Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah				2.900.000.000	9.150.000.000		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		1 Tingkat partisipasi publik dalam proses perencanaan Pembangunan Daerah	Persen	94		94		

No	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023		Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target	Rp.	Target	Rp.	
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					3.702.977.218		3.438.977.218	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		1	Kepemilikan Kartu Keluarga	Persen	80	330.750.000	80	330.750.000	
		2	Kepemilikan KTP-El	Persen	98	464.000.000	98	200.000.000	
		3	Kepemilikan Identitas Anak (KIA)	Persen	23,25	192.937.500	23,25	192.937.500	
		4	Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Administrasi Kependudukan	Orang	408	154.836.000	408	154.836.000	
		5	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Desa/Kel	30	454.685.333	30	454.685.333	
		6	Terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung pelayanan administrasi kependudukan	Paket	1	1.934.766.225	1	1.934.766.225	
		7	Terpeliharanya jaringan SIAK untuk pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	Paket	1	19.959.660	1	19.959.660	
		8	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Admnduk	Kali	4	151.042.500	4	151.042.500	
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					394.755.563		394.755.563	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		1	Meningkatnya dan lancarnya administrasi pelayanan kependudukan	Kab / Kec.	1 tk. Kab 32 Kec.	394.755.563	1 tk. Kab 32 Kec.	394.755.563	
Sasaran :									
1.1.3	Meningkatnya kecepatan dan ketepatan pengelolaan data dan informasi publik	a.	Penerapan e-planning, e-data, e-Report, e-budgeting, e-procurement, e-Sakip, e-monev, Simpeg, perijinan online, pajak online	Jenis Aplikasi	2		10		Bappeda, Bapenda, BPKAD, Bagian PBJ, Bag Administrasi Pembangunan, Bagian Organisasi & PA, BKPSDM, DPMPSTSP
		b.	Meningkatnya Indeks SPBE	Point	3,5		4		Dinas Komunikasi dan Informatika
Program :									
	Program Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah					2.900.000.000		9.150.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		1	Tingkat partisipasi publik dalam proses perencanaan Pembangunan Daerah	Persen	94		94		

No	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023		Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp.	Target	Rp.	
	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				4.762.318.000		4.762.318.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
		1 Persentase Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	Persen	100	580.800.000	100	580.800.000	
		2 Persentase Media Komunikasi Publik yang dimanfaatkan	Persen	100	2.433.068.000	100	2.433.068.000	
		3 Persentase diseminasi informasi dan kemitraan komunikasi yang dilaksanakan	Persen	100	1.748.450.000	100	1.748.450.000	
	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA				88.066.000.000		88.066.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
		1 Persentase ASN yang memiliki kompetensi di Dinas Komunikasi dan Informatika	Persen	100	5.566.000.000	100	5.566.000.000	
		2 Jumlah terbangunnya command center	Unit		-		-	
		3 Jumlah Sarana Prasarana Command Center (Smart City)	Paket	1	75.000.000.000		75.000.000.000	
		4 Jumlah maintenance command center	Paket	1	7.500.000.000		7.500.000.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				177.793.424.924		508.384.373.762	BPKAD
		1 Jumlah pengelolaan keuangan daerah	Dokumen	20	177.793.424.924	20	508.384.373.762	
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				2.078.212.500		5.942.462.500	BPKAD
		1 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dokumen	75	2.078.212.500	250	5.942.462.500	
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH							BKPSDM
Sasaran :								
1.1. 4	Meningkatnya kinerja pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	a Nilai Target PAD	Milyar	369,67		369,67		Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Program:								
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				6.885.112.500		6.885.112.500	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
		1 Jumlah Aplikasi Pendapatan Daerah Online Yang Diterapkan	Jenis	6	413.437.500	6	413.437.500	
		2 Nilai Target PAD	Milyar	369,67	6.471.675.000	369,67	6.471.675.000	

Misi 2 : Mewujudkan masyarakat Kuningan *nu Sajati* dalam kehidupan beragama dan bernegara dalam bingkai kebangsaan dan kebhinekaan.

Tujuan :

No	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023		Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp.	Target	Rp.	
2.1	Mewujudkan kehidupan masyarakat yang agamis, toleran, ramah, berkualitas dengan melibatkan seluruh potensi umat beragama.	a. Indeks Toleransi Beragama	Poin	69,9 – 70,2		69,9 – 70,2		
Sasaran :								
2.1.1	Terwujudnya masyarakat yang agamis	a. Persentase lembaga / organisasi keagamaan yang dibina & difasilitasi	Persen	20%		20%		Bag. Kesra
		b. Persentase lembaga pendidikan keagamaan yang dibina & difasilitasi	Persen	20%		20%		
Program :								
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					20.715.557.289		Sekretariat Daerah
		1. Persentase lembaga / organisasi keagamaan yang dibina & difasilitasi	Persen	20	2.016.289.950	100	2.016.289.950	Sekretariat Daerah (Bag. Kesra)
		2. Persentase lembaga pendidikan keagamaan yang dibina & difasilitasi	Persen	20	12.401.397.825	100	12.401.397.825	
Tujuan :								
2.2	Menegakkan perundang-undangan daerah dan menciptakan kondusivitas kehidupan berbangsa dan bermasyarakat	a. Indeks Rasa Aman	poin	73,6 – 76		73,6 – 76		
Sasaran :								
2.2.1	Terwujudnya penegakan perundang-undangan daerah, ketentraman, ketertiban umum dan kondusivitas kehidupan berbangsa dan bermasyarakat	a. Persentase Pelaksanaan Penegakan Perda	Persen	95		95		
		b. Persentase partisipasi masyarakat dalam Pemilu	Persen	75,52		75,52		
2.2.2	Terwujudnya kehidupan masyarakat berbasis kearifan lokal dan seni budaya daerah	a. Jumlah budaya dan seni lokal yang dilestarikan	buah	128		128		
		b. Indeks Gotong Royong (Aksi Bersama)	Poin	0,50		0,50		
Program :								
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN							Satuan Polisi Pamong Praja



No	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023		Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp.	Target	Rp.	
	KETERTIBAN UMUM							
		1 Persentase Pelaksanaan Penegakan Perda	Persen	95	535.570.442	95	535.570.442	
		2 Persentase Tingkat Penyelesaian K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	Persen	85	801.020.000	85	801.020.000	
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK				220.500.000		220.500.000	Bakesbangpol
		1 Jumlah Parpol yang mendapat pendidikan politik	Peserta	50	110.250.000	50	110.250.000	
		2 Partisipasi pemilih pemula dalam pemilu	Orang	300	110.250.000	300	110.250.000	
	PROGRAM PEMBINAAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA.				468.563.000		468.563.000	Bakesbangpol
		1 Pelaku seni/ penggiat seni dan budayawan lokal yang lestari	Orang	50	165.375.000	50	165.375.000	
		2 terjalannya rasa persaudaraan antar umat beragama	Orang & Tokoh Agama	150	220.500.000	150	220.500.000	
		3 Tingkat penyelesaian konflik aliran kepercayaan	Persen	100	82.688.000	100	82.688.000	
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONPLIK SOSIAL				441.000.000		441.000.000	
		1 Wilayah Rawan Konflik yang terdata	Kecamatan	11	165.375.000	11	165.375.000	
		2 Jumlah Desa yang mendapatkan pembinaan deteksi dini trantribum	Desa/ Kelurahan	376	275.625.000	376	275.625.000	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN				6.821.301.000		6.821.301.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		1 Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	Kegiatan	14	6.248.520.000	14	6.248.520.000	

No	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023		Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target	Rp.	Target	Rp.	
		2	Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya	Unit	2	468.639.000	2	468.639.000	
		3	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Persentase	100	104.142.000	100	104.142.000	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					5.904.851.400		5.904.851.400	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		1	Seminar Budaya	Kali	6	5.904.851.400	6	5.904.851.400	
	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH					801.893.400		801.893.400	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		1	Penguatan Fungsi dan Makna gedung bersejarah	Kegiatan	4	801.893.400	4	801.893.400	
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					11.429.584.500		11.429.584.500	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		1	Jumlah Pengunjung Ke Cagar Budaya	Orang	122.204	11.429.584.500	122.204	11.429.584.500	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN					312.426.000		312.426.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		1	Bimtek Pamong Budaya	Kali	4	312.426.000	4	312.426.000	
Misi 3 : Mewujudkan manajemen layanan pendidikan, kesehatan yang merata, adil, berkualitas dan berkelanjutan dalam menciptakan sumberdaya manusia Nu Sajati									
Tujuan									
3.1	Mewujudkan layanan pendidikan yang adil dan berkualitas	a	Indeks Pendidikan	Poin	60,77		60,77		
Sasaran :									
3.1.1	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan	a	EYS/Harapan Sekolah	Lama Tahun	12,23		12,23		
		b	MYS/Rata-rata Sekolah	Lama Tahun	7,6		7,6		
		c	Indeks EYS / Harapan Lama Sekolah	Poin	68,04		68,04		
		d	Indeks MYS / Rata-rata Lama Sekolah	Poin	50,61		50,61		
		e	Rehabilitasi ruang kelas (1.000 RK)	Ruang	200		1.000		
		f	Pembangunan ruang kelas baru (300 RKB)	Ruang	71		300		
		g	Pembangunan perpustakaan (100 ruang)	Ruang	20		100		
Program :									
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					647.530.113.915		647.530.113.915	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		1	Persentase Anak yang mengikuti PAUD	Persen	76,2	97.522.429.344	76,2	97.522.429.344	
		2	APK SD/MI	Persen	100,16	107.462.969.172	100,16	107.462.969.172	
		3	APK SMP/MTs	Persen	99,08	69.624.787.539	99,08	69.624.787.539	
		4	APM SD/MI	Persen	99,93	107.462.969.172	99,93	107.462.969.172	

No	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023		Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp.	Target	Rp.	
5		APM SMP/MTs	Persen	91,27	69.624.787.539	91,27	69.624.787.539	
6		Angka Partisipasi Sekolah :						
		- Sekolah Dasar (SD	Persen	100.96	107.462.969.172	100.96	107.462.969.172	
		- Sekolah Menengah Pertama (SMP	Persen	100.70	69.624.787.539	100.70	69.624.787.539	
7		Angka Kelulusan :						
		- Sekolah Dasar (SD	Persen	100	260.355.000	100	260.355.000	
		- Sekolah Menengah Pertama (SMP	Persen	100	104.142.000	100	104.142.000	
8		Angka Melanjutkan Pendidikan :						
		- Sekolah Dasar (SD	Persen	99.98	104.142.000	99.98	104.142.000	
		- Sekolah Menengah Pertama (SMP	Persen	93.40	104.142.000	93.40	104.142.000	
9		Rasio Guru Terhadap Murid :						
		- Sekolah Dasar (SD	Orang	1 : 0.10	826.054.344		826.054.344	
		- Sekolah Menengah Pertama (SMP	Orang	1 : 0050	598.816.500		598.816.500	
10		Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan Informal	Orang	1 : 058	2.431.715.700	1 : 058	2.431.715.700	
11		Pelayanan Pendidikan kepada Masyarakat	Orang	1.051	14.315.046.894	1.051		
3.2	Mewujudkan masyarakat yang sehat melalui aksesibilitas pelayanan kesehatan yang terjangkau	a Indeks Kesehatan	Ruang	82,67		82,67		
Sasaran :								
3.2.1	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan	a. Umur Harapan Hidup	Tahun	73,53		73,53		
		b. Persentase Balita Stunting	Persen	2,5		2,5		
		c. Ketersediaan ambulance gratis	Unit	8		72		
		d. Revitalisasi 1.423 posyandu	Unit	284		1.423		
		e. Angka Kematian Ibu	Kasus	21		21		
		f. Angka Kematian Bayi	Poin/1.000 kelahiran	4,02		4,02		
Program :								
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				175.075.385.262		175.075.385.262	

No	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023		Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp.	Target	Rp.	
1		Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP)						
2		Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Unit	-	-	1	-	
3		Pembangunan Puskesmas	Unit	3	12.000.000.000	9	31.500.000.000	
4		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Unit	3	3.000.000.000	6	6.000.000.000	
5		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya / Pustu	Unit	10	1.500.000.000	20	1.500.000.000	
6		Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Unit	Roda 4 = 4/Roda 2 = 10	3.750.000.000	Roda 4 = 12/Roda 2 = 30	51.000.000.000	
7		Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Unit	1	200.000.000	1	200.000.000	
8		Pengadaan Alat kesehatan/Alat penunjang medic fasilitas pelayanan kesehatan	Paket	1	650.000.000			
9		Pengadaan Obat, Vaksin	Paket	1	12.500.000.000			
10		Pengadaan Bahan Habis Pakai	Paket	1	15.000.000.000			
11		Persentase layanan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dasar (SPM Bid. Kesehatan, Jaminan Kesehatan, KLB, Surveilans Kesehatan, Penyakit Menular dan Tidak Menular				100	-	Dinkes
12		Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persen	100	100.000.000			Bid.Kesmas
13		Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persen	100	100.000.000			Bid.Kesmas
14		Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persen	100	100.000.000			Bid.Kesmas
15		Pelayanan Kesehatan Balita	Persen	100	100.000.000			Bid.Kesmas
16		Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persen	100	400.000.000			Bid.Kesmas
17		Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persen	100	2.400.000.000			Bid.P2P
18		Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persen	100	50.000.000			Bid.Kesmas
19		Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persen	100	6.300.000.000			Bid.P2P
20		Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Persen	100	850.000.000			Bid.P2P
21		Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Persen	100	150.000.000			Bid.P2P

No	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023		Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp.	Target	Rp.	
22		Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persen	100	1.850.000.000			Bid.P2P
23		Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persen	100	405.000.000			Bid.P2P
24		Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Persen	100	100.000.000			Bid.P2P
25		Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Persen	100	225.000.000			Bid.P2P
26		Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persen	100	300.000.000			Bid.Kesmas
27		Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Persen	100	100.000.000			Bid.Kesmas
28		Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persen	100	310.000.000			Bid.Kesmas
29		Pelayanan Kesehatan Promosi	Persen	100	125.000.000			Bid.Kesmas
30		Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Persen	100	100.000.000			Bid. Yankes
31		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persen	100	100.000.000			Bid.P2P
32		Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Persen	100	100.000.000			Bid.P2P
33		Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Persen	100	50.000.000			Bid.P2P
34		Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Persen	100	275.000.000			Bid. Yankes
35		Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Persen	100	100.000.000			Bid. Yankes
36		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persen	100	1.535.000.000			Bid.P2P
37		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Persen	100	49.544.666.586			Bid.SDK
38		Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Persen	100	100.000.000			Bid.P2P
39		Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Persen	100	50.000.000			Bid.P2P
40		Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Persen	80	1.000.000.000			Bid.Kesmas
41		Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Unit	1	1.750.000.000			Bid. Yankes
42		Operasional Puskesmas		37	54.145.718.676			
43		Operasional Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Unit	1	250.000.000			
44		Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Puskesmas	37	2.500.000.000			Bid. Yankes

No	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023		Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp.	Target	Rp.	
45		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Persen	100	110.000.000			Bid.P2P
46		Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Persen	100	50.000.000			Bid.P2P
47		Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) pada Nomenklatur Kabupaten/Kota	37 PKM 12 RS Kader	50	100.000.000			Bid. Yankes
48		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi						
49		Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Dokumen	1	150.000.000			
50		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Aplikasi	1	100.000.000			
51		Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Paket	1	250.000.000			
52		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	persen	100	50.000.000			Bid.SDK
53		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Persen	100	50.000.000			Bid.SDK
54		Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	12 RS	100	50.000.000			Bid.Yankes
55		Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Puskesmas	37	150.000.000			Bid.Yankes
56		Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan		100	50.000.000			Bid.Yankes

Tujuan :

3.3	Menciptakan sumberdaya manusia yang Santana, Basajan, Santika dan Unggul	a.	IPM	Poin	69,66	69,66
		b.	Gini Ratio	Poin	<0,38	<0,38
		c.	Persentase penduduk miskin	Persen	9,72	9,72

Sasaran :

3.3.1	Meningkatnya upaya penanggulangan kemiskinan	a.	Persentase penduduk miskin	Persen	12,74	12,74
--------------	--	----	----------------------------	--------	-------	-------

No	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	IndikatorKinerja (tujuan/impact/outcome)		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023		Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target	Rp.	Target	Rp.	
Program :									
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					826.875.000		826.875.000	
		1	Persentase penduduk miskin	Persen	12,74		12,74		
		2	Jumlah Kecamatan yang Melaksanakan Pendataan DTKS & non – DTKS	Kec.	32	500.000.000	32	500.000.000	
		3	Jumlah anak terlantar yang ditangani	Orang	50	250.000.000	50	250.000.000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					19.762.312.500		19.762.312.500	
		1	Jumlah Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE-FM)	Kelompok	15	300.000.000	15	300.000.000	
		2	Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)yang diberdayakan	Orang	300	675.000.000	300	675.000.000	
		3	Jumlah PSM, Karang Taruna, TKSK dan Orsos Tingkat Kab. Kuningan yang dibina	Orang	200	400.000.000	200	400.000.000	
		4	Jumlah Desa yang mendapat Bhakti Sosial Karang Taruna	Desa	20	300.000.000	20	300.000.000	
		5	Jumlah TKSK yang dibina	Orang	32	16.750.000.000	32	16.750.000.000	
		6	Jumlah Undian Berhadiah yang diberi ijin	Kegiatan	100	100.000.000	100	100.000.000	
		7	Jumlah Lembaga Konsultasi Kesejahteraan keluarga (LK3) yang ditangani	Orang	160	150.000.000	160	150.000.000	
	Program Pengembangan Perumahan					37.275.000.000		274.480.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		1	Jumlah Panjang Jalan Lingkungan, Rutilahu dan Rumah Khusus yang ditangani	Lokasi/Km	-		411 / 60,73		
				Unit Rumah	-		3.426		
		2	Jumlah Rehabilitasi, Rekonstruksi Rumah dan Infrastruktur PSU Terdampak Bencana dan Relokasi Program Pemerintah	Lokasi	15		45		
				Unit Rumah	1.9		5.4		
				Dokumen	26		68		
Sasaran :									
3.3.2	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	a.	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Persen	0,37		0,37		
Program :									

No	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023		Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp.	Target	Rp.	
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				9.052.048.706		9.052.048.706	DPPKBP3A
		1	Jumlah Fasilitas Kesehatan dan Jejaringnya diseluruh Tingkatan Wilayah yang melayani KB	Jumlah	121	1.821.948.750	121	1.821.948.750
		2	Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi/Contraceptive Prevelence Rate (CPR)	Persen	72.24	2.429.265.000	72.24	2.429.265.000
		3	Persentase Angka Pasangan Usia Subur (PUS) ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed)	Persen	13.73	2.125.606.875	13.73	2.125.606.875
		4	Persentase Cakupan Pengguna Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persen	36.1	2.675.228.081	36.1	2.675.228.081
Sasaran :								
3.3.	Meningkatnya PUG	a.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	88,82		88,82	
Program :								
1	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				971.706.000		971.706.000	DPPKBP3A
		1	Jumlah Perempuan dalam Jabatan yang dibina	Orang	55	121.463.250	255	121.463.250
		2	Jumlah Perempuan dalam Politik yang dibina	Orang	200	242.926.500	1.048	242.926.500
		3	Jumlah Perempuan dalam Profesi yang dibina	Orang	4.507	121.463.250	13.521	121.463.250
		4	Jumlah Penganggaran Responsif Gender yang dibimbing	Orang	30	242.926.500	150	242.926.500
		5	Jumlah Kelompok Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) yang dibina	Kelompok	5	121.463.250	25	121.463.250
		6	Jumlah Organisasi Perempuan yang dibina	Organisasi	38	121.463.250	190	121.463.250
2	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					213.000.000	242.926.500	DPPKBP3A
		1	Jumlah KDRT dan Trafficking yang ditangani	Kasus	10	242.926.500	15	242.926.500
3	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					303.658.125	303.658.125	DPPKBP3A
		1	Jumlah Desa Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) yang dibina	Desa	1	303.658.125	5	303.658.125
4	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					182.194.875	182.194.875	DPPKBP3A
		1	Jumlah dokumen profil Gender	Jenis	1	182.194.875	1	182.194.875

Sasaran :

No	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023		Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target	Rp.	Target	Rp.	
3.3.4	Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga	a.	Peringkat Prestasi Olahraga di tingkat regional (PORDA)	Peringkat	8		8		
		b.	Peringkat Prestasi Olahraga di tingkat regional (POPDA)	Peringkat	10		10		
Program :									
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan		Jumlah Pemuda Prestasi ditingkat Provinsi	Orang	5	1.400.000.000	15	3.400.000.000	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
			Persentase Pembinaan Organisasi Kepemudaan	Persen	100	3.350.000.000	100	28.700.000.000	
			Jumlah Peserta Pelatihan dan Penguatan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	Orang	100	500.000.000	400	1.200.000.000	
	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan					1.400.000.000		3.400.000.000	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
			Jumlah penerima penghargaan kepemudaan dan kepramukaan	Kategori	1	1.400.000.000	1	3,400.000.000	
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan		Jumlah Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Olahraga	Orang	900	300.000.000	2.750	550.000.000	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
			Jumlah event olahraga Tradisional, dan Rekreasi	Event	2	475.000.000	7	1.225.000.000	
			Prestasi Olahraga Tingkat Regional	Peringkat		2.700.0000.000		7.403.450.000	
		a.	PORDA	Peringkat	-		8		
		b.	POPDA	Peringkat	-		10		
		a.	POPWILDA	Peringkat	1		1		
		b.	PORPEMDA	Peringkat	3		3		
		c.	PORSENITAS	Peringkat	1		1		
		d.	POSPEDA	Peringkat	1		1		
			Cakupan Pembinaan Olahraga	Cabor	28	23.650.000.000	28	178.112.165.000	
			Jumlah Atlet Berprestasi	Atlet	30	300.000.000	100	625.000.000	
Misi 4 : Mewujudkan pembangunan kawasan perdesaan berbasis pertanian, wisata, budaya dan potensi local untuk mempercepat pertumbuhan serta pemerataan ekonomi rakyat									
Tujuan :									
4.1	Terbangunnya desa pinunjul/unggul berdasarkan karakteristik local untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi	a.	Perencanaan Sektoral Terintegrasi Berbasis Desa	Buah	1		1		
		b.	Pembangunan Desa Agro Pinunjul	Desa			42		
		c.	Pembangunan Desa Wisata dan Budaya Pinunjul	Desa	4		26		
		d.	Pembangunan Desa Pinunjul lainnya	Desa			33		

No	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah		IndikatorKinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023	Kondisi Akhir 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Target	Rp.	Target	Rp.	
Sasaran :									
4.1.1	Terwujudnya perencanaan pembangunan Ekonomi Tematik Desa Pinunjul	a.	Regulasi Desa Pinunjul	Regulasi	1		1		
		b.	Perencanaan Ekonomi Desa Pinunjul berbasis sistem	Persen	10		100		
Program :									
	Program Perencanaan Perkonomian dan Sumber Daya Alam					2.600.000.000		11.375.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian danPengembangan Daerah
		1	Persentase sasaran, program dan kegiatan RKPD yang konsisten dengan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah lingkup Bidang Ekonomi	Persen	100		100		
Sasaran :									
4.1.2	Terbangunnya sentra unggulan pertanian	a.	Sentra Unggulan Padi	Desa	0		1		
		b.	Sentra Unggulan Jagung	Desa	0		1		
		c.	Sentra Tanaman Kedelai	Desa	0		2		
		d.	Sentra Unggulan Pertanian Organik	Desa	2		6		
		e.	Sentra Unggulan Buah-buahan	Desa	2		7		
		f.	Sentra Tanaman Perkebunan Kopi	Desa	0		3		
		g.	Sentra Tanaman Cengkeh	Desa	1		2		
		h.	Sentra tanaman tembakau	Desa	0		1		
		i.	Sentra tanaman rempah dan Biofarmaka	Desa	1		3		
		j.	Sentra Unggulan Sayuran	Desa	1		6		
		k.	Sentra Unggulan Sapi Potong	Desa	2		6		
		l.	Sentra Unggulan Sapi Perah	Desa	0		1		
		m.	Sentra Domba	Desa	0		3		
		n.	Sentra Unggulan Itik	Desa	0		1		
Program :									
	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	1	Produktivitas Komoditas Tanaman Pangan			7.000.000.000		27.007.500.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			- Padi	Kw/Ha	60,60		60,60		
			- Jagung	Kw/Ha	62,25		62,25		
			- Kedelai	Kw/Ha	14,85		14,85		
			- Kacang Tanah	Kw/Ha	15,49		15,49		

No	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023		Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target	Rp.	Target	Rp.	
		-	Kacang Hijau	Kw/Ha	11,65		11,65		
		-	Ubi Kayu	Kw/Ha	168,73		168,73		
		-	Ubi Jalar	Kw/Ha	213,19		213,19		
		-	Porang	Kw/Ha	213,19		213,19		
2	Produktivitas Perkebunan	Komoditas				4.500.000.000		16.050.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	-	Pala	Kg/Ha	367,89			367,89		
	-	Cengkeh	Kg/Ha	1.360,28			1.360,28		
	-	Kopi Robusta	Kg/Ha	1.310,82			1.310,82		
	-	Kopi Arabika	Kg/Ha	927,27			927,27		
	-	Tembakau	Kg/Ha	1.371,67			1.371,67		
	-	Tebu	Kg/Ha	3.911,96			3.911,96		
	-	Nilam	Kg/Ha	493,56			493,56		
	-	Kelapa	Kg/Ha	1.255,49			1.255,49		
3	Produktivitas Holtikultura	Komoditas				3.000.000.000		10.950.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	Bawang Merah		Kw/Ha	96,90			96,90		
	Tomat		Kw/Ha	346,08			346,08		
	Cabe Besar		Kw/Ha	114,71			114,71		
	Cabe Rawit		Kw/Ha	226,89			226,89		
	Produksi Buah-buahan:								
	Mangga		Kw	556.602			556.602		
	Rambutan		Kw	24.279			24.279		
	Durian		Kw	58.865			58.865		
						970.126.978		970.126.978	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	Jumlah Latihan dan Kunjungan Penyuluh		Kunjungan	70.272			70.272		
	Kelas Kelompok Tani :								
	Kelompok Tani Pemula		Kelompok	1.123			1.123		
	Kelompok Tani Lanjut		Kelompok	1.643			1.643		
	Kelompok Tani Madya		Kelompok	154			154		
	Kelompok Tani Utama		Kelompok	8			8		
	Cakupan Binaan Kelompok yang difasilitasi		Persen	35			35		
	Penguatan Kelembagaan Perkebunan		Kelompok	40			95		
	Penguatan Kelembagaan Hortikultura		Kelompok	20			45		

No	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023		Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target	Rp.	Target	Rp.	
	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat					1.800.000.000		6.600.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		1	Ketersediaan Pangan Utama	Kg/kap./th	280,08		280,08		
		2	Pangsa Pangan Lokal	Persen	50		50		
		3	Skor Pola Pangan Harapan	Persen	86,73		86,73		
		4	Ketersediaan Energi PerKapita	Gr	2.185		2.185		
		5	Ketersediaan Protein perKapita	Gr	62,25		62,25		
		6	Pengawasan Pangan	Jenis	12		12		
		7	Pembinaan Keamanan Pangan	Unit	250		250		
Sasaran :									
4.1.3	Terbangunnya sentra unggulan wisata dan budaya	a.	Desa wisata	Desa	4		25		
		b.	Kampung Budaya	Desa	-		1		
Program :									
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata					20.250.000.000		85.810.000.000	Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata
		1	Pengembangan Desa Wisata dan Desa	DTW	3	10.250.000.000	13		
		2	Sarana dan prasarana destinasi pariwisata	Desa/DTW	3	10.000.000.000	13		
						6.821.301.000		6.821.301.000	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN								Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		1	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	Kegiatan	14	6.248.520.000	14	6.248.520.000	
		2	Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya	Unit	2	468.639.000	2	468.639.000	
		3	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Persentase	100	104.142.000	100	104.142.000	
Sasaran :									
4.1.4	Terbangunnya sentra unggulan lokal lainnya	a	5 Sentra Pengembangan ikan						Dinas Perikanan dan Peternakan
			1. Mas	Desa	8		40		
			2. Nila	Desa	8		40		
			3. Lele	Desa	9		45		
			4. Gurame	Desa	7		35		
			5. Ikan Hias	Desa	3		15		
		b	Sentra Perdagangan	Desa	5		25		
		c	Desa Industri	Desa	4		18		

No	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023		Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp.	Target	Rp.	
		d Desa UKM	Desa	1		3		
		e Desa Koperasi	Desa	1		3		
		f Desa Kuliner Tradisional	Desa	0		1		
		G Desa Pendidikan	Desa	1		7		
Program :								
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya				4.680.500.000		15.597.465.500	Dinas Perikanan dan Peternakan
		1 Peningkatan Kesejahteraan Pembudidaya Ikan (NTPi)	Persen	103,72		103,95		
		2 Produksi Perikanan Budidaya	Ton	26.875,67		26.875,67		
		3 Defisit Swasembada Ikan	Ton	0		0		
		4 Cakupan Pembudidaya (POKDAKAN)	Ton	800		800		
		5 Jumlah Rumah Tangga Perikanan (RTP)	Orang	23.500		23.500		
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap				1.518.000.000		4.038.000.000	Dinas Perikanan dan Peternakan
		1 Peningkatan Kesejahteraan Nelayan (NTN)	Persen	103,25		103,25		
		2 Produksi Perikanan Tangkap	Ton	419,57		419,57		
		3 Cakupan Usaha Bersama Nelayan Tangkap (KUB)	Kelompok	21		21		
		4 Jumlah Rumah Tangga Perikanan (RTP)	Orang	1.835		1.835		
	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan				2.277.000.000		6.057.000.000	Dinas Perikanan dan Peternakan
		1 Peningkatan Kesejahteraan Pengolah dan Pemasar	Point	101,5		101,5		
		2 Produksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Ton	236,03		236,03		
		3 Tingkat Konsumsi Ikan	(kg/kap/tahun)	25		25		
		4 Cakupan Pengolah dan Pemasaran Hasil Perikanan	Kelompok	48		48		
		5 Jumlah Rumah Tangga Perikanan	Orang	3.000		3.000		
	Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan				885.500.000		2.355.500.000	Dinas Perikanan dan Peternakan
		1 Rasio Kawasan Perairan Terhadap Total Luas Nelayan	Ha	204		204		

No	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023		Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target	Rp.	Target	Rp.	
		2	Prosentase Perusakan Perikanan	Kasus Sumberdaya	Persen	10	10		
		3	Cakupan Masyarakat	Kelompok Pengawas	Kelompok	5	5		
	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian		Peningkatan Peternakan	Produkti		3.240.000.000	8.220.000.000		Dinas Perikanan dan Peternakan
		1	Produksi Daging						
			- Sapi	Ton	1290		1290		
			- Domba	Ton	782		782		
			- Ayam Buras	Ton	496		496		
			- Ayam Ras	Ton	22.716		22.716		
			- Itik	Ton	56		56		
			Produksi Telur:						
			- Ayam Buras	Ton	288		288		
			- Ayam Ras Petelur	Ton	6.202		6.202		
			- Itik	Ton	458		458		
			Produksi Susu Sapi	Ton	22.687		22.687		
			Populasi Ternak:						
			Sapi Perah	Ekor	5.67		5.67		
			Sapi Potong	Ekor	29.011		29.011		
			Domba	Ekor	125.356		125.356		
			Kambing	Ekor	7.101		7.101		
			Ayam Ras Petelur	Ekor	625.221		625.221		
			Ayam Ras Pedaging	Ekor	2.705.604		2.705.604		
	Program Penyediaan Pengembangan Prasarana Pertanian					2.600.000.000	6.700.000.000		Dinas Perikanan dan Peternakan
			Kesehatan Hewan dan Inseminasi Buatan	Persen	50		50		
			Pembangunan Rehabilitasi, Jaringan Irigasi dan Jalan Usaha Tani dan Ternak	Unit	3		3		
			Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Sapi Pasundan	Ekor	10		50		
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner					700.000.000	2.000.000.000		Dinas Perikanan dan Peternakan
			Sosialisasi Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis	Desa	10		10		
			Vaksin Rabies	Ekor	1.000		1.000		
			Vaksin Flu Burung	Ekor	50.000		50.000		

No	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023		Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target	Rp.	Target	Rp.	
		Pengawasan Produk Makanan asal Hewan	Sample		400		500		
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting					500.000.000		1.600.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan Dan Perindustrian
		1 Jumlah Pelaksanaan Opeasi Pasar Murah dan Bazar Pasar Murah	Kali		1		5		
	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri					2.000.000.000		5.405.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan Dan Perindustrian
		1 Jumlah Prosuk IKM yang dipromoaikan	IKM		40		190		
		2 Jumlah Pameran yang dilaksanakan	Event		5		24		
		3 Optimalisasi Pelayanan Informasi Perdagangan	Kegiatan		1		3		
	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi					2.500.000.000		9.400.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan Dan Perindustrian
		1 Jumlah Koperasi Aktif	Koperasi		520		520		
Tujuan :									
4.2	Terwujudnya daya dukung investasi bagi pembangunan desa yang mendorong pertumbuhan lapangan kerja	a. Desa Pusat Investasi	Desa		4		4		
		b. LPE	Persen		2,00-3,45		2,00-3,45		
		c. Indeks pengeluaran	Poin		66,33-66,91		66,33-66,91		
		d. Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen		10,14		10,14		
		e. Pemetaan Kebutuhan Keahlian/kualifikasi tenaga kerja berbasis desa	paket		8		30		
Sasaran :									
4.2.1	Meningkatnya investasi skala desa	a. Jumlah Desa dengan Nilai Investasi >200 M	desa		5		15		
		b. TPT	persen		10,14		10,14		
		c. Jumlah Penempatan Tenaga Kerja	Orang		7.159		30.530		
Program :									
	Program Promosi Penanaman Modal					850.000.000		2.950.000.000	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)			Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023		Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target	Rp.	Target	Rp.	
		1	Jumlah Investasi	Data Potensi	Objek Potensi Investasi	4		21		
Sasaran :										
4.2.2	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas pangan desa	a.	Lumbung pangan		Buah	3		10		
Program :										
	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat						2.318.776.125	2.318.776.125		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		1	Penguatan Pangan:	Cadangan						
			-Cadangan Pemerintah	Pangan	Ton	30		30		
			-Cadangan Masyarakat	Pangan	Ton	180		180		
		2	Ketersediaan Utama	Pangan	Kg/kap./th	280,08		280,08		
		3	Pangsa Pangan Lokal		Persen	50		50		
		4	Skor Pola Pangan Harapan		Persen	85,35		85,35		
		5	Ketersediaan PerKapita	Energi	Gr	2.185		2.185		
		6	Ketersediaan Pasokan, Harga dan Akses Pangan	Informasi	Dokumen	2		2		
		7	Stabilisasi Harga dan Pasokan Pangan							
			- Penguatan Distribusi Masyarakat (LDPM)	Lembaga Pangan	Kelompok	2		21		
			- Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Usaha	Kelompok	2		12		
Sasaran :										
4.2.3	Meningkatnya lapangan kerja didesa	a.	Jumlah lapangan kerja di desa		Paket	8		30		
		b.	Jumlah Tenaga Kerja yang terserap di desa		Orang	160		600		
Program :										
	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja						2.500.000.000	8.650.000.000		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		1	Jumlah Pencari Kerja yang mengikuti pelatihan Berbasis Kompetensi		Orang	880		2944		
		2	Jumlah Pencari Kerja yang mengikuti pelatihan Berbasis Masyarakat		Orang	160		544		
Sasaran :										
4.2.4	Menurunnya tingkat pengangguran	a.	Jumlah Tenaga Kerja	Penempatan	Orang	7.150		30.530		
Program :										
66	Program Penempatan Tenaga Kerja						2.150.000.000	2.150.000.000		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023		Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp.	Target	Rp.	
		1	Jumlah Tenaga Kerja yang terdaftar dan terlayani	Orang	12.682		57.654	
		2	Jumlah Pencari Kerja yang Berpartisipasi dalam Pameran Bursa Kerja / Job Fair per tahun	Orang	2.750		10.050	
		3	Jumlah Penganggur Musiman yang terserap	Orang	176		792	
		4	Jumlah Penempatan Tenaga Kerja	Orang	7.150		30.53	
		5	Jumlah Tenaga Kerja Mandiri/Wirausaha Baru	Orang	40		100	
		6	Penyebarluasan Informasi Peluang Kerja keluar Negeri	Desa	151		376	
		7	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia	Orang	100		225	
		8	Penyelesaian Permasalahan PMI	Kasus	20		45	
Sasaran :								
4.2. 5	Terciptanya wirausaha baru berbasis pesantren	a.	Wirausaha baru berbasis pesantren	Pesantren/Orang	Feb-40		8/160	
Program :								
148	Program Perencanaan dan Pengembangan Industri				1.500.000.000		5.875.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan Dan Perindustrian
		1	Jumlah Pertumbuhan IKM	IKM	200		436	
		2	Jumlah Peningkatan Produk IKM	IKM	10		66	
		3	Jumlah IKM Penerima Bantuan Mesin dan Peralatan	IKM	30		116	
		4	Peningkatan Daya Saing untuk Produk Home Industri dan kemasan	IKM	130		1.09	
		5	Wirausaha Baru berbasis Pesantren	Pesantren/Orang	Feb-40		8/160	
Tujuan :								
4.3	Mempercepat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa	a.	Indeks Desa Membangun	Poin	0,670		0,670	
Sasaran :								
4.3. 1	Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa	a	Jumlah BUMDES	Unit	10		10 (55)	
		b	Status Desa :	Desa Mandiri	10		57	
			- Tertinggal					
			- Berkembang					
			- Maju					
			- Mandiri					

No	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	IndikatorKinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023		Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp.	Target	Rp.	
Program :								
1	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA				376.356.086.456		376.356.086.456	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		1	Jumlah Aparatur Desa yang Dibina dan Terlatih	Jumlah	1083	1.653.750.000	1083	-
		2	Peningkatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa	Desa	361	340.086.066.997	361	
		3	Jumlah BUMDesa yang mendapat pendampingan Pembangunan Ekonomi Desa yang Mandiri	Desa	10	1.179.675.000	55	-
Misi 5 : Mewujudkan pemerataan infrastruktur untuk mendorong investasi dan penciptaan lapangan kerja dalam lingkungan yang lestari								
Tujuan :								
5.1	Meningkatkan pemerataan dan kualitas infrastruktur daerah	a.	Kemantapan Jalan	Persen	85,9		85,9	
		b.	Kondisi Baik Irigasi	Persen	70		70	
Sasaran :								
5.1.1	Meningkatnya konektivitas antar wilayah dan kawasan	a.	Penanganan jalan & jembatan (target 1.000 Km)	Km	72		1.000	
		b.	Penanganan jaringan irigasi (target 18.000 Hektar)	Hektar	600		18.000	
		c.	Cakupan pelayanan air minum	Persen	55,70		56,70	
		d.	Persentase ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan	Persen	65		65	
Program :								
	Program Penyelenggaraan Jalan				72.000.000.000		295.095.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		1	Bertambahnya jaringan jalan	Km	6		21,42	
		2	Bertambahnya jumlah jembatan	Buah	0		3	
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)				48.000.000.000		218.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		1	Jumlah Situ/Embung dalam Kondisi Baik dan Terpelihara	Buah	16		80	
		2	Penataan Kawasan Sempadan Sungai dan Pembangunan/Pemeliharaan TPT Sungai	Buah	4		21	
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum				5.816.948.000		25.445.158.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		1	Jumlah Peningkatan Kinerja Air Minum	Lokasi	42		218	

No	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah		IndikatorKinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023		Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target	Rp.	Target	Rp.	
5.1.2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1	Jumlah Peningkatan Kinerja Air Limbah	Lokasi	40		200		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Program Pengembangan Perumahan	1	Jumlah Rehabilitasi, Rekonstruksi Rumah dan Infrastruktur PSU Terdampak Bencana dan Relokasi Program Pemerintah	Rumah	1.400		5.448		Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	1	Persentase Ketersediaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Persen	65		65		Dinas Perhubungan
	Sasaran :								
	Meningkatnya kualitas infrastruktur di seluruh wilayah Kabupaten Kuningan	a.	Persentase kemandapan jalan dan jembatan	Persen	85,9		85,9		
		b.	Persentase jaringan Irigasi dengan kondisi baik	Persen	70		70		
	Program :								
	Program Penyelenggaraan Jalan	1	Jalan dalam kondisi mantap	Km	70		380		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		2	Jembatan dalam kondisi baik	M	48		264		
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	1	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	Persen	70%		70%		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1	Cakupan pelayanan air minum	Persen	56,70		56,70		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1	Akses Air Limbah Domestik	Persen	66		66		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh					333.700.000.000		1.185.538.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	

No	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023		Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp.	Target	Rp.	
		1 Jumlah Rutilahu dan PSU yang ditangani	Unit rumah	3.115		15.589		
Tujuan :								
5.2	Mewujudkan kelestarian fungsi sumberdaya alam dan lingkungan hidup	a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	67,142		67,142		
Sasaran :								
5.2.1	Terwujudnya penataan ruang yang berwawasan lingkungan	a. Jumlah dokumen perencanaan yang tersedia / tersusun	Dokumen	3		32		
Program :								
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang				500.000.000	2.300.000.000		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		1 Jumlah dokumen perencanaan yang tersedia/tersusun	Dokumen	2		10		
Sasaran :								
5.2.2	Terwujudnya sumberdaya alam dan lingkungan yang lestari	a. Capaian RTH (Penataan RTH)	Unit	-		10		
		b. Jumlah pelayanan pengelolaan sampah	Ton	114.124,74		114.124,74		
			%	81,91		81,91		
Program :								
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup				2.850.000.000	6.800.000.000		Dinas Lingkungan Hidup
		1 Dokumen perlindungan pengelolaan lingkungan hidup yang disusun	Dokumen	41		88		
	Program Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati (KEHATI)				4.250.000.000	14.650.000.000		Dinas Lingkungan Hidup
		1 Persentase RTH yang dikelola dengan baik/tuntas	Persen	29,31		100		
	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional				9.000.000.000	22.225.000.000		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		1 Tersedianya prasarana pengelolaan sampah	Lokasi/ Lokasi TPA	15 / 1		44 / 1		
	Program Pengelolaan Persampahan				3.111.000.000	12.694.000.000		Dinas Lingkungan Hidup
		1 Persentase wilayah yang sampahnya ditangani dengan tuntas	Persen	30,80		30,80		
Sasaran :								

No	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah		IndikatorKinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023		Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target	Rp.	Target	Rp.	
5.2.3	Meningkatnya upaya mitigasi bencana	a.	Persentase pencegahan dan kesiapsiagaan dalam rangka pengurangan resiko bencana	Persen	100		100		
		b.	Respons time penanganan kedaruratan dan pemenuhan kebutuhan dasar	Hari/24 jam	1		1		
		c.	Persentase penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi Pasca Bencana	Persen	100		100		
Program :									
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					9.150.750.000		9.150.750.000	BPBD
		a.	Indeks Ketahanan / Kapasitas Daerah	Point	0,66	6.422.062.500	0,66	6.422.062.500	
		b.	Rata-rata Waktu penanganan kedaruratan dan pemenuhan kebutuhan dasar	waktu	1 hari/ 24 jam	1.929.375.000	1 hari/ 24 jam	1.929.375.000	
		c.	Persentase Kajian Kebutuhan pasca Bencana	persen	80	799.312.500	80	799.312.500	

Sumber: Perubahan RPJMD Kabupaten Kuningan Tahun 2018-2023

5.2 Rencana Kerja Standar Pelayanan Minimal Tahun 2023

Pelaksanaan program pembangunan daerah diprioritaskan pula untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, bahwa terdapat 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan sosial.

Kegiatan pembangunan daerah yang terkait dengan penerapan standar pelayanan minimal (SPM) yang menjadi kewenangan kabupaten disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.5 Rencana Kegiatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2023

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Prangkat Daerah	Kegiatan
I	SPM Pendidikan				
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 -	100%	Dinas Pendidikan	Program Wajib Belajar

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Prangkat Daerah	Kegiatan
		15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/ MI, SMP/ MTS)			Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100 %	Dinas Pendidikan	Program Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI)
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100 %	Dinas Pendidikan	Program Pendidikan Usia Dini
SPM Kesehatan					
1	Pelayanan Kesehatan Hamil	Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Dinas Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
2	Pelayanan Kesehatan Bersalin	Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Dinas Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Lahir	Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Dinas Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Dinas Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Balita
5	Pelayanan Kesehatan Pada Pendidikan Dasar	Usia Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Dinas Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar
6	Pelayanan Kesehatan Pada Produktif,	Usia Warga Negara usia produktif yang	100 %	Dinas Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Prangkat Daerah	Kegiatan
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut;	mendapatkan layanan kesehatan Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Dinas Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita Hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Dinas Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Warga Negara penderita DM yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Dinas Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100 %	Dinas Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga <i>tuberculosis</i> yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Dinas Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (TB)
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Dinas Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV
SPM Pekerjaan Umum					
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air	100 %	PUPR	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Prangkat Daerah	Kegiatan
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	minum sehari-hari Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100 %	PUPR	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik
SPM Perumahan Rakyat					
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten / Kota;	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	PDKPP	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten / Kota;
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni.	100%	DPKPP	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota
SPM Trantibumlinmas					
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	100%	POLPP	Program Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan dalam rangka Penegakkan Peraturan Perundang-undangan Daerah
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	BPBD	Sosialisasi, Monitoring, dan Evaluasi Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Prangkat Daerah	Kegiatan
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	BPBD	Kebakaran dan Kedaruratan Lainnya di Kabupaten Kuningan Sosialisasi, Monitoring, dan Evaluasi Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Kedaruratan Lainnya di Kabupaten Kuningan Sosialisasi, Monitoring, dan Evaluasi Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Kedaruratan Lainnya di Kabupaten Kuningan
4	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100%	BPBD	Kebakaran dan Kedaruratan Lainnya di Kabupaten Kuningan Sosialisasi, Monitoring, dan Evaluasi Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Kedaruratan Lainnya di Kabupaten Kuningan
SPM Sosial					
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Jumlah Penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	Dinas Sosial	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	Dinas Sosial	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti	Jumlah lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	Dinas Sosial	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya	Jumlah gelandangan dan pengemis yang	100%	Dinas Sosial	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Prangkat Daerah	Kegiatan
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten.	memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti Jumlah korban bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan social	100%	Dinas Sosial	khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten.

5.3 Sinergitas Usulan Rencana Kegiatan yang Bersumber dari APBN Tahun 2023

Tabel 5.6 Usulan Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Tahun 2023

Bidang/SubBidang	Jenis				Total		Perangkat Daerah
	Reguler		Penugasan				
	Jmlh Usulan	Nilai Usulan Rp (000)	Jmlh Usulan	Nilai Usulan Rp (000)	Jmlh Usulan	Nilai Usulan Rp (000)	
Perumahan & Permukiman							DPKPP
Pendidikan	13	195.215.000	-	-	13	195.215.000	Disdikbud / Dinas Arsipus
Sanitasi	47	22.280.000	-	-	47	22.280.000	DPUTR
Air Minum	29	14.500.000	-	-	29	14.500.000	DPUTR
Kesehatan	5	123.596.445	-	-	5	123.596.445	Dinas Kesehatan / RSUD Linggarjati
KB			-	-			Disdalduk KBPP&PA
Jalan	34	190.250.000	-	-	34	190.250.000	DPUTR
					128	545.841.445	
Irigasi	-	-	8	23.095.887	8	23.095.887	DPUTR
Pertanian	-	-					DKPP
Jalan	-	-	4	11.250.000	4	11.250.000	DPUTR
Pariwisata	-	-	1	7.000.000	1	7.000.000	Disporapar
Kelautan dan Perikanan	-	-	3	3.499.000	3	3.499.000	Dinas Perikanan & Peternakan
	-	-			16	44.844.887	
Total						590.686.332	

Sumber : Data Rekap sementara Usulan DAK Tahun 2023

Pada menu DAK Reguler ada 7 bidang garapan yang diusulkan Kabupaten Kuningan senilai Rp 545.841.445.000. Usulan-usulan tersebut berkaitan dengan pemecahan permasalahan di Kabupaten Kuningan, yaitu stunting dan kemiskinan, termasuk di dalamnya aksesibilitas pelayanan dasar yang belum optimal.

Sedangkan untuk DAK Penugasan ada 5 bidang garapan yang berkaitan dengan sektor pertanian dan masuk pada usulan tematik Pengembangan Food Estate dan Sentra Produksi Pangan. Total usulan DAK Penugasan senilai Rp 44.844.887.00. Adanya DAK Penugasan ini diharapkan dapat menunjang core bisnis Kabupaten Kuningan yaitu sektor pertanian.

5.4 Usulan Rencana Kegiatan yang Bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2023

Tabel 5.7 Usulan Rencana Kegiatan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2023

No.	Urusan	Usulan (Rp)	Jumlah Kegiatan
1.	Pendidikan	122.409.800.000	13
2.	Kesehatan	144.117.024.127	6
3.	Pemberdayaan Masyarakat	60.997.334.773	10
4.	Pengawasan	150.000.000	1
5.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	39.750.000.000	12
6.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	669.051.760.000	130
7.	Pariwisata	14.600.000.000	6
8.	Perdagangan		
9.	KUKM		
10.	Tenaga Kerja		
11.	Pertanian		
12.	Penanaman Modal		
13.	Pemuda dan Olahraga		
14.	Kelautan dan Perikanan	8.507.500.000	10
15.	Perhubungan	30.125.000.000	3
16.	Lingkungan Hidup	38.040.000.000	3
17.	Kependudukan & catatan Sipil	4.258.900.000	2
18.	Komunikasi & Informatika	10.000.000.000	1
19.	Perpustakaan	7.851.472.000	4
20.	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta	1.725.000.000	2

No.	Urusan	Usulan (Rp)	Jumlah Kegiatan
21.	Perlindungan Masyarakat Sosial	3.355.980.000	3
22.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		

Sumber : Data Rekap Sementara Usulan Bankeu 2023

Usulan yang disampaikan tentunya telah bersinergi dengan target kinerja provinsi. Kabupaten Kuningan hanya bisa mengakses menu usulan tertentu yang mendorong peningkatan kinerja provinsi yang lokasinya di Kabupaten Kuningan.

Tabel 5.8 Rekapitulasi Rencana Program dan Kegiatan berdasarkan Perangkat Daerah Tahun 2023

No	Perangkat Daerah	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6
1	Dinas Pendidikan	8	18	79	1.254.397.845.645
2	Dinas Kesehatan	5	16	54	194.697.000.000
3	Rumah Sakit Umum Daerah 45	2	2	2	184.475.000.000
4	Rumah Sakit Umum Daerah Linggajati	3	12	29	59.510.000.000
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	11	25	76	145.428.000.000
6	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	8	19	45	127.028.686.402
7	Satuan Polisi dan Pamong Praja	3	11	34	27.667.150.000
8	Dinas Sosial	6	16	49	26.508.800.000
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	6	15	34	12.519.200.000
10	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	8	14	43	44.705.150.000
11	Dinas Lingkungan Hidup	9	16	47	22.182.150.000
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	15	36	9.226.150.000
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5	10	40	27.475.400.000
14	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	10	25	59	34.431.000.000
15	Dinas Perhubungan	2	13	38	27.502.600.000
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	5	12	51	16.000.000.000

No	Perangkat Daerah	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah Pagu Indikatif (Rp.)
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	15	20	42	32.564.414.274
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6	13	34	18.000.000.000
19	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	8	19	54	35.349.500.000
20	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	5	12	27	5.340.650.000
21	Dinas Perikanan dan Peternakan	8	25	53	29.530.600.000
22	Inspektorat Kabupaten	3	11	33	28.688.600.000
23	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	4	15	58	15.298.261.200
24	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	2	7	26	21.466.520.000
25	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3	10	39	15.469.000.000
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3	13	43	19.030.400.000
27	Sekretariat Daerah	4	19	69	72.751.000.000
28	Sekretariat DPRD	2	14	33	81.967.200.000
29	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2	10	32	6.135.000.000
30	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5	9	21	12.275.000.000
31	Kecamatan Ciawigebang	6	10	21	2.498.800.000
32	Kecamatan Cibeureum	6	10	21	1.758.340.000
33	Kecamatan Cibingbin	6	11	23	2.481.550.000
34	Kecamatan Cidahu	6	10	21	1.972.000.000
35	Kecamatan Cigandamekar	5	9	20	2.205.089.377
36	Kecamatan Cigugur	6	11	26	9.353.660.000
37	Kecamatan Cilebak	5	10	24	1.731.950.000
38	Kecamatan Cilimus	6	10	25	2.519.100.000
39	Kecamatan Cimahi	6	10	22	1.719.765.000
40	Kecamatan Ciniru	6	11	20	2.037.460.000
41	Kecamatan Cipicung	6	10	19	2.069.678.800
42	Kecamatan Ciwaru	6	10	22	2.115.130.000
43	Kecamatan Darma	6	10	26	2.391.210.000
44	Kecamatan Garawangi	6	10	22	2.520.650.000
45	Kecamatan Hantara	5	10	22	2.283.090.000
46	Kecamatan Jalaksana	6	10	21	2.421.660.000
47	Kecamatan Japara	5	8	20	2.007.010.000
48	Kecamatan Kadugede	6	10	21	2.252.160.000

No	Perangkat Daerah	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah Pagu Indikatif (Rp.)
49	Kecamatan Kalimanggis	5	10	28	2.415.040.000
50	Kecamatan Karangancana	6	10	21	2.087.725.000
51	Kecamatan Kramatmulya	4	8	20	2.328.280.000
52	Kecamatan Kuningan	6	12	27	16.200.000.000
53	Kecamatan Lebakwangi	6	11	23	2.364.179.413
54	Kecamatan Luragung	6	9	19	2.520.100.000
55	Kecamatan Mandirancan	5	9	21	2.262.493.350
56	Kecamatan Maleber	5	9	19	2.290.750.000
57	Kecamatan Nusaherang	6	10	22	2.640.370.000
58	Kecamatan Pancalang	6	11	26	2.286.700.000
59	Kecamatan Pasawahan	6	10	20	1.713.579.236
60	Kecamatan Selajambe	6	10	23	2.066.900.000
61	Kecamatan Sindangagung	6	11	24	2.138.900.000
62	Kecamatan Subang	6	10	21	1.876.075.000

Tabel 5.8 menampilkan alokasi anggaran di tiap perangkat daerah, di dalamnya termasuk belanja gaji pegawai, belanja penunjang dan belanja urusan.

Tabel 5.9 Proporsi Biaya Operasional Tahun 2023 per Isu

No	ISU	ANGGARAN	% dari Total Biaya Operasional
1	Infrastruktur	234.102.846.443	26,48%
2	Pemulihan Ekonomi	16.246.588.600	1,84%
3	Penanggulangan Kemiskinan	70.180.040.000	7,94%
4	Peningkatan Daya Beli	11.144.837.674	1,26%
5	Pengarusutamaan Gender	2.800.000.000	0,32%
6	Peningkatan Kualitas Kesehatan	92.988.180.366	10,52%
7	Peningkatan Kualitas Pendidikan	442.770.000.000	50,08%
8	Pengurangan Pengangguran	13.808.522.200	1,56%

Dalam upaya menjawab persoalan-persoalan strategis daerah dalam RKPD 2023 telah dimappingkan kebutuhan anggaran sesuai isu strategis. Pada tabel 5.9 di atas terlihat isu yang mendapat alokasi tertinggi yaitu Peningkatan Kualitas Pendidikan dan kedua yaitu isu infrastruktur, tetapi jika ditelaah kedalamannya infrastruktur ini juga beririsan dengan upaya penanggulangan kemiskinan dan pemulihan ekonomi. Misalnya

pembuatan atau rehab jalan dari daerah terpencil menuju pusat ekonomi. Akses jalan yang mudah akan memudahkan aktivitas ekonomi masyarakat.

Demikian juga isu lainnya, antara satu dan lainnya banyak yang saling mendukung dalam menyelesaikan persoalan daerah. Misalnya pengurangan pengangguran, hanya mendapat alokasi 1,56% tetapi dia juga mendukung isu pengentasan kemiskinan dan pemulihan ekonomi.

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Merupakan bagian dari desentralisasi adalah daerah mempunyai hak serta kewajiban untuk mengatur rumah tangganya sendiri sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut mengindikasikan bahwa setiap kepala daerah mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memajukan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah yang dipimpinnya. Keberhasilan pemimpin dalam mewujudkan cita-cita dapat dinilai melalui ketercapaian indikator-indikator yang ditetapkan. Standar Pelayanan Minimum (SPM) merupakan indikator yang harus dipenuhi terlebih dahulu, karena SPM menjadi kewenangan masing - masing daerah.

Capaian indikator kinerja dari setiap aspek dapat diketahui dengan fokus menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Hal yang perlu diperhatikan bahwa informasi yang akan diolah untuk mengevaluasi capaian indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten, merupakan informasi yang menggambarkan keadaan senyatanya ada pada setiap kecamatan di wilayah masing-masing. Pemerintah daerah pada dasarnya dapat mengembangkan dan/atau melakukan seleksi informasi yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK). Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan

pada akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja.

6.1 Penetapan Indikator dan Target Kinerja Utama Tahun 2023

Berdasarkan hasil evaluasi pencapaian indikator pembangunan Kabupaten Kuningan Tahun 2020-2021, serta mempertimbangkan kondisi lingkungan strategis (internal dan eksternal) yang akan dihadapi Kabupaten Kuningan pada Tahun 2023, maka Pemerintah Kabupaten Kuningan menetapkan Indikator Makro dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang harus dikawal dan dicapai adalah merupakan angka target/proyeksi hasil reformulasi sebagai dampak Pandemi Covid-19 yang berimplikasi terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Kuningan, yaitu :

Table 6.1 Target Indikator Makro Kabupaten Kuningan Tahun 2023

No	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN		TARGET TAHUN 2023	PENYEDIA DATA
			TAHUN 2020	TAHUN 2021		
1	Umur Harapan Hidup	Tahun	73,59	73,78	73,53	BPS
2	HLS/ Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,22	12,23	12,23	BPS
3	RLS/ Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,57	7,80	7,60	BPS
4	Pengeluaran Per Kapita	Rp. 000	9.459	9.409	9.190-9.271	BPS
5	Indeks Kesehatan	Point	82,45	82,74	82,67	BPS
6	Indeks HLS	Poin	67,89	67,56	68,04	BPS
7	Indeks RLS	Poin	50,47	50,24	50,61	BPS
8	Indeks Pendidikan	Poin	59,18	59,97	60,77	BPS
9	Indeks Pengeluaran	Poin	68,44	68,27	66,33-66,91	BPS
10	IPM	Poin	69,38	69,71	69,66	BPS
11	Prosentase Kemiskinan	Persen	12,82	13,10	12,74	BPS
12	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	11,22	14,06	10,14	BPS
13	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	0,09	3,56	2,00-3,45	BPS
14	Indeks Gini Rasio	Poin	0,361	0,349	<0,38	BPS
15	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Persen	1,17	1,09	0,60	BPS

Sumber: Perubahan RPJMD Kab. Kuningan Tahun 2018-2023 dan BPS Kab. Kuningan, 2021

Dari tabel di atas terdapat beberapa indikator makro yang tidak mencapai target pada tahun 2021, yaitu

**Table 6.2 Penetapan Target Indikator Kinerja Utama (IKU)
Kabupaten Kuningan Tahun 2023**

No	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2021	TARGET TAHUN 2023	PERANGKAT DAERAH PENYEDIA DATA
MISI 1 :					
1	Opini BPK	Kategori	WTP	WTP	BPKAD
2	Indeks kepuasan layanan masyarakat	Persen	76,51	75,52	Bappeda
MISI 2 :					
2	Indeks toleransi beragama	Poin	72,39	69,90 -70,20	Badan Kesbangpol
3	Indeks rasa aman	Poin	n/a	73.60-76	Satpol-PP/Badan Kesbangpol
MISI 3 :					
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	69.71	69,66	Bappeda
MISI 4 :					
5	Perencanaan Sektoral Terintegrasi berbasis Desa	Buah	1	1	Bappeda
6	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	3,56	2.00-3.45	Bappeda
7	Indeks Desa Membangun	Poin	n/a	0,670	DPMD
MISI 5 :					
8	Kemantapan Jalan	Persen	79,063	85,90	DPUTR
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	68,91	67,142	DLH

Sumber: Perubahan RPJMD Kab. Kuningan Tahun 2018-2023

Table 6.3 Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kuningan Tahun 2023

No.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT				
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	69,66	69,71	Bappeda
2	Persentase Penduduk Miskin (PPM)	Persen	12,74	13,10	Bappeda
3	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Persen	0,60	1,09	Bappeda
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	10,14	14,06	Bappeda
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	2,00-3,45	3,56	Bappeda
6	Indeks Gini	Poin	< 0,38	0,349	Bappeda
7	Indeks Pendidikan	Poin	60,77	59,97	Bappeda
8	EYS/Harapan lama sekolah	Tahun	12,23	12,23	Bappeda
9	MYS/Rata-rata lama sekolah	Tahun	7,60	7,80	Bappeda
10	Indeks EYS	Poin	68,04	67,56	Bappeda
11	Indeks MYS	Poin	50,61	50,24	Bappeda
12	Umur Harapan Hidup (UHH)	Tahun	73,53	73,78	Bappeda
13	Indeks Kesehatan	Persen	82,67	82,74	Bappeda
14	Persentase balita stunting	Persen	2,5	6,21	Dinkes
15	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	88,82	86,81	DPPKBP3A
16	Indeks Pengeluaran	Poin	66,33 – 66,91	68,27	Bappeda
17	Pengeluaran perkapita per tahun	Rp. Ribu	9190-9271	9409	Bappeda
18	Laju inflasi	Persen	≤ 5	1,81	Bappeda
19	PDRB per kapita (ADHK)	Rp. Ribu	18.175,37	17.483,02	Bappeda
20	Garis Kemiskinan	Rp.	409318	358069	Bappeda
21	Jumlah Angkatan Kerja	Jiwa	545390	542.782	Bappeda
22	Rasio penduduk yang bekerja/Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	Persen	92,86	88,32	Bappeda
23	Indeks Pemberdayaan Gender	Poin	83,10	-	DPPKBP3A
24	Keluarga pra sejahtera	Persen	5,12	4,07	DPPKBP3A
25	Keluarga sejahtera I	Persen	64,02	57,60	DPPKBP3A
26	Keluarga sejahtera II	Persen	30,86	38,33	DPPKBP3A

No.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
B	ASPEK PELAYANAN UMUM URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB TERKAIT PELAYANAN DASAR BIDANG PENDIDIKAN				
1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persen	74,80	78,7	Disdikbud
2	Eys/ Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,23	12,23	Disdikbud
3	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	Persen	99,93	95,26	Disdikbud
4	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	Persen	91,27	79,82	Disdikbud
5	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	Persen	100,16	100,72	Disdikbud
6	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	Persen	99,08	96,55	Disdikbud
7	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	Persen	0,01	0,01	Disdikbud
8	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	Persen	0,12	0,15	Disdikbud
9	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	Persen	100	100	Disdikbud
10	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	Persen	100	100	Disdikbud
11	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI Ke SMP/MTs	Persen	99,98	99,98	Disdikbud
12	Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/ D-IV	Persen	97,54	95,98	Disdikbud
13	Prosentase Guru PAUD Terlatih/ Bersertifikat	Persen	0,55	3,45	Disdikbud
14	Prosentase Ruang Kelas SD Dalam Kondisi Baik	Persen	85,72	84,92	Disdikbud
15	Prosentase Ruang Kelas SMP <i>Dalam</i> Kondisi Baik	Persen	98,10	97,81	Disdikbud
16	Jumlah Lembaga Pendidikan Non Formal/ Kursus Yang Legal	Jumlah	1.063	47	Disdikbud
17	Rasio Guru Terhadap Jumlah Murid Pendidikan Dasar	Rasio	1:0,10	1:0,08	Disdikbud
18	Rasio Jumlah Murid Dan Guru SMP Negeri/ Swasta Non Tsanawiyah	Rasio	1:0,050	1:0,052	Disdikbud
19	MYS/Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,6	7,8	Disdikbud
20	Indeks EYS / Harapan Lama Sekolah	Poin	68,04	67,94	Disdikbud
21	Indeks MYS / Rata-rata Lama Sekolah	Poin	50,61	52	Disdikbud
22	Rehabilitasi ruang kelas (1.000 RK)	Ruang	1000	244	Disdikbud
23	Pembangunan ruang kelas baru (300 RKB)	Ruang	300	10	Disdikbud
24	Pembangunan perpustakaan (100 ruang)	Ruang	100	14	Disdikbud

No.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
25	Pemberian beasiswa (1.000 orang) BIDANG KESEHATAN	Orang	1000		Disdikbud
1	Nilai Akreditasi Rumah Sakit di atas 80	Persen	100	73,3	RSUD Linggajati
2	BOR		80	40	RSUD 45
3	LOS		3	4	RSUD 45
4	GDR		30	72	RSUD 45
5	NDR		18	38	RSUD 45
6	BTO		69	78	RSUD 45
7	TOI		1	5	RSUD 45
8	Umur Harapan Hidup	Tahun	73,53	73,78	Dinas Kesehatan
9	Persentase Balita Stunting	Persen	2,5	6,21	Dinas Kesehatan
10	Ketersediaan ambulance gratis	Unit	72	1	Dinas Kesehatan
11	Revitalisasi 1.423 posyandu	Unit	1.423	100%	Dinas Kesehatan
12	Angka Kematian Ibu	Kasus	21	42	Dinas Kesehatan
13	Angka Kematian Bayi	Poin/ 1.000 kelahiran	4,02	2,95	Dinas Kesehatan
14	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditanganani	Persen	100	98,10	Dinas Kesehatan
15	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	Persen	93	83,29	Dinas Kesehatan
16	Cakupan desa/kelurahan universal child immunization (UCI)	Persen	90	61,07	Dinas Kesehatan
17	Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan	Persen	100	100	Dinas Kesehatan
18	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC/TBA	Persen	74,15	38,22	Dinas Kesehatan
19	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	Persen	100	100	Dinas Kesehatan
20	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	Persen	100	100	Dinas Kesehatan
21	Cakupan kunjungan bayi	Persen	95	68,14	Dinas Kesehatan
22	Prosentase Penduduk yang menggunakan jamban keluarga	Persen		82,70	Dinas Kesehatan
23	Jumlah sarana prasarana Puskesmas, Pustu dan jaringannya dalam kondisi baik	Unit	7 Puskesmas,	2 Puskesmas,	Dinas Kesehatan

No.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
			5 Pustu	0 Pustu	Dinas Kesehatan
24	Jumlah puskesmas dengan perawatan	Unit	6	6	
25	Prosentase penduduk yang mempunyai BPJS/KIS	Persen	61,54	75,87	Dinas Kesehatan
26	Jumlah PBI BPKJS/KIS	Orang	661.241	423.231	Dinas Kesehatan
BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					
1	Persentase Kemantapan Jalan dan Jembatan	Persen	85,9	79,063	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
2	Persentase jaringan irigasi dengan kondisi baik	Persen	70	60,93	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
3	Jumlah dokumen perencanaan yang tersedia/ tersusun	Dokumen	32	9	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
4	Capaian RTH (Penataan RTH)	Unit	10		DLH
5	Penanganan jalan & jembatan (target 1.000 Km)	Km	1000	282,82	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
6	Penanganan jaringan irigasi (target 18.000 Hektar)	Hektar	18	906,63	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
7	Penanganan Jalan dan Jembatan (1.000 Km)	Km	2000		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
8	Akses Air Minum Layak	Persen	97,03	91,09	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
9	Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Sanitasi Layak	Persen	98,31	94,93	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
10	Akses Air Minum Perpipaan (%)	Persen	41,73	37,01	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					
1	Persentase rumah layak huni	Persen	96,92	97	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2	Jumlah dokumen perencanaan yang tersedia / tersusun	Dokumen	71	18	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

No.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
3	Lingkungan pemukiman kumuh	Persen	2.57	2.78	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
4	Kawasan kumuh	Persen	0.152	0.0154	
BIDANG KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT					
1	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (LINMAS)	Petugas	111	109	Satpol-PP
2	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	Persen	85	84	Satpol-PP
3	Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Persen	80	80	Satpol-PP
4	Cakupan Pelayanan Kebakaran Kab./Kota	Persen	14,7	14,7	Satpol-PP
5	Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) daerah Layanan WMK	Persen	100	100	Satpol-PP
6	Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran di atas 3000 – 5000 liter pada WMK	Persen	14,3	14,3	Satpol-PP
7	Persentase Penegakan Perda	Persen	95	93	Satpol-PP
8	Persentase Tingkat Kapasitas Aparatur Satpol PP dan Damkar	Persen	98	95	Satpol-PP
9	Persentase pencegahan dan kesiapsiagaan dalam rangka pengurangan resiko bencana	%	100	92.31	BPBD
10	Respons time penanganan kedaruratan dan pemenuhan kebutuhan dasar	Hari/24 jam	1	1	BPBD
11	Persentase penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi Pasca Bencana	%	100	80	BPBD
12	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Nilai	0,66	0.88	BPBD
13	Persentase Korban Bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Persen	100	90	BPBD
14	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	Persen	100	100	BPBD

No.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
15	Jumlah Desa Tangguh yang terbentuk	Desa	7	2	BPBD
16	Persentase kajian kebutuhan pasca bencana (Jitupasna)	Persen	95	72.57	BPBD
BIDANG SOSIAL					
1	Sarana Sosial seperti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	Panti	10	2	Dinas Sosial
2	Persentase Penyandang cacat baik fisik dan mental, serta lanjut usia yang tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Persen	10,00	13.39	Dinas Sosial
3	PMKS yang memperoleh bantuan social	Persen	33,00	10.29	Dinas Sosial
4	Jumlah PMKS yang ditangani	PMKS	79.578	10,223	Dinas Sosial
5	Persentase penduduk miskin	Persen	12,74	5.00	Dinas Sosial
URUSAN WAJIB TIDAK TERKAIT PELAYANAN DASAR					
BIDANG TENAGA KERJA					
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	10.14	14.06	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	Jumlah lapangan kerja di desa	Paket	9	2	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3	Jumlah Tenaga Kerja yang terserap di desa	Orang	180	40	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	63.68	63.82	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
5	Persentase Transmigrasi	Persen	25	-	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
6	Pelayanan kepesertaan Jaminan Sosial bagi Pekerja/Buruh	Persen	22.16	76.94	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
7	Pencari kerja yang ditempatkan	Persen	68.5	55.78	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					
1	Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Persen	49,54	41,00	DPPKBP3A

No.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
2	Partisipasi angkatan kerja perempuan	Persen	37,44		DPPKBP3A
3	Rasio KDRT	Persen	0,02	1:0000040	DPPKBP3A
4	Jumlah PMKS yang ditangani	PMKS	79.578	10,223	DPPKBP3A
5	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	Persen	100	100	DPPKBP3A
6	Dokumen profil gender	Dokumen	1	1	DPPKBP3A
7	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	88,82	86,81	DPPKBP3A
BIDANG PANGAN					
1	Regulasi Ketahanan Pangan		Ada	Ada	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	Ketersediaan Pangan Utama	Kg/kap./th	280,08	274.21	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	Penanganan Daerah Rawan Pangan	Desa	10	0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
4	Penanganan Penduduk Rawan Pangan yang Ditangani	Jiwa	500	1021	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
5	Tingkat Konsumsi Pangan Lokal	Persen	50	40	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
6	Lumbung Pangan	Buah	10	1	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
7	Skor Pola Pangan Harapan	Persen	86,73	82,4	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					
1	Jumlah pelayanan pengelolaan sampah	Ton	114124.74	115554.64	Dinas Lingkungan Hidup
		Persen	81,91	77.11	Dinas Lingkungan Hidup
	Penanganan Sampah	Ton	103.652,44	103888	Dinas Lingkungan Hidup
		Persen	59,57	60.11	Dinas Lingkungan Hidup
	Pengurangan Sampah	Ton	10472.3	10120.64	Dinas Lingkungan Hidup

No.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
		Persen	22,34	18.1	Dinas Lingkungan Hidup
2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	67.14	68.91	Dinas Lingkungan Hidup
	Indeks Kualitas Air	Poin	50	50	Dinas Lingkungan Hidup
	Indeks Kualitas Udara	Poin	88	86.52	Dinas Lingkungan Hidup
	Indeks tutupan lahan	Poin	58	68.8	Dinas Lingkungan Hidup
BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					
1	Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	Persen	80	94.6	Disdukcapil
2	Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP-eL.)	Persen	98	98.53	Disdukcapil
3	Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	Persen	23,25	54.68	Disdukcapil
4	Kepemilikan Akta Kelahiran	Persen	83	84..21	Disdukcapil
5	Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0 s.d 18 Tahun	Persen	88	92.67	Disdukcapil
6	Penanganan Pelayanan Pembuatan Akta Perkawinan	Persen	100	100	Disdukcapil
7	Penanganan Pelayanan Pembuatan Akta Perceraian	Persen	100	100	Disdukcapil
8	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK		YA	YA	Disdukcapil
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					
1	Jumlah BUMDES	Unit	10	229	DPMD
2	Status Desa :	Desa			DPMD
	- Tertinggal	Mandiri	0	0	
	- Berkembang		82	165	
	- Maju		75	160	
	- Mandiri		15	36	
3	PKK aktif	Persen	100	100	DPMD
4	Posyandu	Persen	100	100	DPMD
5	Jumlah usaha ekonomi masyarakat yang berdaya	Desa		189	DPMD
6	Prosentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	Persen		100	DPMD

No.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					
1	Prevelensi Pemakaian Kontrasepsi/ Contraceptive Prevalence Rate (CPR)	Persen	72.24	71.6	DPPKBP3A
2	Prosentase Angka Pasangan Usia Subur (PUS) Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmetneed)	Persen	13.73	17.49	DPPKBP3A
3	Rata-rata Usia Kawin Pertama (RKP) Wanita		19.5	19	DPPKBP3A
4	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Persen	0.6	1,09	DPPKBP3A
BIDANG PERHUBUNGAN					
1	Persentase ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan	Persen	65	59	Dinas Perhubungan
2	Jumlah Prasarana Perhubungan:				Dinas Perhubungan
	PJU	Titik	12258	9.558	
	Terminal	Unit	10	10	
	Terminal Penumpang Wisata Terpadu	Unit	1	1	
	Kawasan/Area Parkir Terpadu	Unit	0	0	
3	Jumlah Ketersediaan Fasilitas dan Perlengkapan Jalan :				Dinas Perhubungan
	- Traffic light	Unit	10	10	
	- Warning Light	Unit	37	38	
	- RPPJ	Unit	157	22	
	- Rambu Lalulintas	Unit	3087	0	
	- Marka Jalan	Meter	57677.71	0	
	- Marka Zoss	Lokasi	10	9	
	- Guardrail	Meter	10288	0	
	- Patok Pengaman Jalan	Unit	100	0	
	- Cermin Tikungan	Unit	4	0	
	- Velican Crossing	Unit	6	0	
	- Rambu Elektronik	Unit	4	0	
	- ATCS	Unit	2	1	
4	Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji Yang melaksanakan Uji Berkala	Unit	11000	42.124	Dinas Perhubungan

No.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
1	Website Milik Pemerintah Daerah		Ada	Ada	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	Pameran Expo		Ada	Tidak Ada	Dinas Komunikasi dan Informatika
3	Prosentase Jaringan Komunikasi dan Informatika yang Terintegrasi	Persen	100	75	Dinas Komunikasi dan Informatika
4	Jumlah Informasi Publik yang Dipublikasikan	Buah	30	10	Dinas Komunikasi dan Informatika
5	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat	KIM	1.219	1165	Dinas Komunikasi dan Informatika
6	Jumlah BTS	BTS	346	319	Dinas Komunikasi dan Informatika
7	Sistem Informasi Manajemen Pemda		10	2	Dinas Komunikasi dan Informatika
8	Prosentase Informasi Daerah yang wajib diamankan dengan persandian	persen	3.14	27.8	
PERTANAHAN					
1	Persentase Bidang Tanah yang bersertifikat milik Pemda	Persen	69.61	46	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					
1	Koperasi Aktif	Koperasi	520	707	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
2	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil	UKM	460	150	
3	Desa UKM	Desa	3	1	
4	Desa Koperasi	Desa	3	8	
5	Desa Kuliner Tradisional	Desa	1	0	
6	Wirausaha baru berbasis pesantren	Pesantren/ Orang	8/160	4/40	

No.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
BIDANG PENANAMAN MODAL					
1	Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	Persen	22,4	182.78	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional	Rupiah	6.416.906587.075	1,800,363,869,952	
3	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	Orang	19.005	22,149	
4	Nilai Investasi yang Ada di Desa	Rupiah	39.488.308.666	0	
5	Jumlah Desa dengan Nilai Investasi >200 juta	Desa	15	3	
BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					
1	Prestasi Olahraga Tingkat Regional:		-	-	Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata
	PORDA	Peringkat	8	0	
	POPDA	Peringkat	10	0	
BIDANG STATISTIK					
1	Buku “Kabupaten Dalam Angka”		Ada	-	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	Buku “PDRB” Kabupaten		Ada	-	
3	Jumlah Dokumen Data/Informasi/Statistik Daerah	Dokumen	70	55	
BIDANG PERSANDIAN					
1	Prosentase Informasi Daerah yang Wajib diamankan dengan Persandian	Persen	2.99	27.8	Dinas Komunikasi dan Informatika
BIDANG KEBUDAYAAN					
1	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	Kegiatan	14	12	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya	Sarana	2	2	
3	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	Persen	100	100	

No.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
BIDANG PERPUSTAKAAN					
1	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun	Orang	9000	4.290	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan daerah	Eksemplar	28150	24.742	
BIDANG KEARSIPAN					
1	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku	Persen	90	80	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	Jumlah Kegiatan Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	Kegiatan	14	1	
URUSAN PILIHAN					
BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					
1	Peningkatan Kesejahteraan Nelayan (NTN)	Persen	103.25	102.25	Dinas Perikanan dan Pernakan
2	Tingkat Produksi Perikanan Tangkap	Ton	419.57	321.65	
3	Cakupan Kelompok Usaha Bersama Nelayan Tangkap (KUB)	Kelompok	21	10	
4	Jumlah Rumah Tangga Perikanan	Orang	1835	2,148	
5	Tingkat Kesejahteraan Pembudidaya Ikan		103,95	98.8	
6	Tingkat Produksi Perikanan Budidaya	Ton	26875.67	22,981.6	
7	Defisit Swasembada Ikan	Ton	-	6.29	
8	Cakupan Kelompok Pembudidaya Ikan	Kelompok	800	665	
9	Jumlah RumahTangga Perikanan (Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya)	Orang	23.5	22,026	
10	Tingkat Kesejahteraan Pengolah dan Pemasar		101.5	107.52	
11	Tingkat Produksi Pegolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Ton	236.03	245.52	
12	Tingkat Konsumsi Ikan	kg/kap/th	25	25	
13	Cakupan Kelompok Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Kelompok	48	38	
14	Jumlah Rumah Tangga Perikanan	Orang	3	22,026	
15	Rasio kawasan perairan terhadap total lindung luas nelayan	Ha	204	200	

No.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
16	Prosentase Kasus Perusakan Sumberdaya Perikanan	Persen	10	10	
17	Cakupan Kelompok Masyarakat Pengawas	Kelompok	5	2	
	BIDANG PARIWISATA				
1	Kunjungan Wisata	Orang	2%/1.014.762	2,668,442	Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata
2	Kampung Budaya	Desa	1	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	BIDANG PERTANIAN				
1	Tersedianya data dan informasi Sektor Pertanian	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	Nilai Tukar Petani (NTP)		104.89	96.45	
3	Prosentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian	Unit	440	33	
4	Produktivitas Komoditas Tanaman Pangan:				
	Padi	Kw/Ha	60.6	62.56	
	Jagung		62.25	56.62	
	Kedelai		14.85	15.36	
	Kacang Tanah		15.46	15.65	
	Kacang Hijau		11.65	10.28	
	Ubi Kayu		168.73	167.72	
	Ubi Jalar		213.19	216.23	
	Porang		213.19		
5	Produktivitas Komoditas Perkebunan				
	- Pala		367.89	499	
	- Cengkeh		1360.28	604.77	
	- Kopi Robusta		1310.82	855.6	
	- Kopi Arabika		927,27	840	
	- Tembakau		1.371,67	1039.5	
	- Tebu		3.911,96	4970	
	- Nilam		493,56	240	
	Kelapa		1.255,49	1,542	
6	Produktivitas Komoditas Hortikultura				
	Bawang Merah	Kw/Ha	96,90	98.00	

No.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
	Tomat	Kw/Ha	198,71	194.86	
	Cabe Besar	Kw/Ha	93,72	63.76	
	Cabe Rawit	Kw/Ha	92.17	70.64	
	Jamur	Kw/Ha	2.516	2,773	
	Sayuran Lainnya	Kw/Ha	50	0	
	Produksi Buah-buahan:				
	Mangga	Kw	309,524	157,301	
	Rambutan	Kw	31.994	18,563	
	Durian	Kw	58865	32,706	
	Markisa	Kw	75	19360	
	Jahe	Kw	175	6,872	
	Jumlah Latihan dan Kunjungan Penyuluh	Kunjungan	70272	60,250	
	Tingkat Kemampuan Kelompok :				
	Kelompok Pemula	Kelompok	1.123	1028	
	Kelompok Lanjut	Kelompok	1.643	1240	
	Kelompok Madya	Kelompok	154	103	
	Kelompok Utama	Kelompok	8	3	
	Cakupan Binaan Kelompok Tani			30,87	
	Prosentase Kelompok Tani yang difasilitasi		40,00		
	Penguatan Kelembagaan Perkebunan	Kelompok	95		
	Penguatan Kelembagaan Hortikultura	Kelompok	45		
	Produksi Daging, Susu dan Telur :				Dinas Perikanan dan Pernakan
	Meningkatnya Produksi Daging (Ton)				
	Sapi	Ton	1.290	2.193	
	Domba	Ton	782	1.375	
	Ayam Buras	Ton	496	560	
	Ayam Ras	Ton	22.716	28.991	
	Itik	Ton	56	56	
	Meningkatnya Produksi Telur (Ton)	Ton			
	Ayam Buras	Ton	288	1.290	
	Ayam Ras Petelur	Ton	6.202	17.120	
	Itik	Ton	458	443	

No.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
	Produksi Susu Sapi	Ton	22.687	19.780	
	Pertumbuhan Populasi Ternak				
	Sapi Perah		5.67	7.945	
	Sapi Potong		29.011	29.972	
	Domba		125.356	130.114	
	Kambing		7.101	7.603	
	Ayam Ras Petelur		625.221	1,497,136	
	Ayam Ras Pedaging		2.705.604	3,685,653	
	BIDANG PERDAGANGAN				
1	Expor Bersih Perdagangan (Nilai Ekspor perdagangan)	(US\$)	874,774,550	4,305,627	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan Dan Perindustrian
2	Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal (Jumlah Pasar yang direvitalisasi standar SNI)	Pasar	3	1	
3	Daerah Tertib Ukur (Jumlah UTTP yang ditera/Tera Ulang)	UTTP	4,500	5300	
4	Pertumbuhan Sektor Perdagangan (Jumlah produk IKM/UKM yang dipromosikan)	Produk	40	30	
5	Sentra Perdagangan	Desa	25	2	
	BIDANG PERINDUSTRIAN				
1	Pertumbuhan Industri	Persen	4.97		Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan Dan Perindustrian
2	Kajian dan Pengawasan Izin Usaha Industri, Standar Industri Hijau, dan Industri 4.0	Perusahaan	250	40	
3	Peningkatan Daya Saing untuk Produk Home Industri dan kemasan	IKM	145	130	
4	Desa Industri	Desa	8	3	
	BIDANG TRANSMIGRASI				
1	Persentase Transmigrasi	Persen	25	-	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
2	Transmigran Swakarsa	Persen	-	-	
	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PERENCANAAN				
1	Penerapan e-planning, e-Report, e-budgeting, e-procurement, e-Sakip, e-monev, Simpeg, perijinan online, pajak online	Jenis Aplikasi	10	2	Bappeda, BPKAD, Bag PBJ, Bag Organisasi, Bag. Adbang, BKPSDM, DPMPTSP, Bapenda
2	Regulasi Desa Pinunjul	Regulasi	1	1	
3	Perencanaan Ekonomi Desa Pinunjul berbasis sistem	Persen	100	0	
4	Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan	Persen	>90	>90	
5	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	Dokumen	Ada	Ada	
6	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	Dokumen	Ada	Ada	
7	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	Dokumen	Ada	Ada	
8	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	Persen	100	100	
9	Sistim Informasi Manajemen Pemda	Unit	9	2 (SIMPEG dan e-Kinerja)	
10	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	Survei	Ada	Ada	
	KEUANGAN				
1	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
2	Perbandingan antara Belanja Langsung dengan Belanja Tidak Langsung	Persen	BL 50 BTL 50	BL 40 BTL 60	BPKAD BPKAD
4	Penetapan APBD		Tepat Waktu	Tepat Waktu	BPKAD

No.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
5	Prosentase SILPA	Persen	13	1,80	BPKAD
6	Penerapan e-SIPKD, e-ATISISBADA, e-SIM Gaji	Jenis	3	3	BPKAD
7	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	Aplikasi	WTP	WTP	BPKAD
8	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Kategori	WTP	WTP	BPKAD
		Dokumen	50	50	BPKAD
		Aplikasi	2	2	BPKAD
11	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dokumen	50	20	BPKAD
		Aplikasi	1	1	BPKAD
12	Penerapan e-planning, e-Report, e-budgeting, e-procurement, e-Sakip, e-monev, Simpeg, perijinan online, pajak online, e-SIPKD, e-ATISISBADA, e-SIM Gaji	Jenis	6	6	Bappenda
		Aplikasi			
13	Penerapan e-planning, e-Report, e-budgeting, e-procurement, e-Sakip, e-monev, Simpeg, perijinan online, pajak online, e-SIPKD, e-ATISISBADA, e-SIM Gaji	Jenis	3	3	BPKAD
		Aplikasi			
14	Nilai Target PAD	Milyar	369,67	343,83	Bappenda
15	Penerapan e-SAKIP	Jenis	20	-	Bagian Organisasi
		Aplikasi			
16	Nilai SAKIP	Level	A	B	Bagian Organisasi
16	Skor LPPD	Poin	3,522	0	Bagian Tata Pemerintahan
17	Persentase lembaga / organisasi keagamaan yang dibina & difasilitasi	Persen	20	35	Bagian Kesra

No.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					
1	Penerapan e-planning, e-Report, e-budgeting, e-procurement, e-Sakip, e-monev, Simpeg, perijinan online, pajak online, e-SIPKD, e-ATISISBADA, e-SIM Gaji	Jenis Aplikasi	10	2	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
2	Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	Persen	5,86	4.84	
3	Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	Persen	6,26	6.4	
PENGAWASAN					
1	Maturitas SPIP	Level	3,00	3	Inspektorat
2	Persentase rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI yang ditindaklanjuti	Persen	85	85	
3	Prosentase Pelanggaran Pegawai	Persen	0.17	0,09	
4	Prosentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pengawasan Inspektorat Kabupaten	Persentase	75	68.4	
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					
1	Persentase partisipasi masyarakat dalam Pemilu	Persen	75,52	n/a	Kesbangpol
2	Kegiatan Pembinaan Politik Daerah	Kegiatan	1	1	
3	Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKP	Kegiatan	1	1	
C ASPEK DAYA SAING DAERAH					
1	Persentase lembaga keagamaan yang dibina & difasilitasi	Persen	20	35	Bag. Kesra
2	Persentase lembaga pendidikan keagamaan yang dibina & difasilitasi	Persen	20	35	Bag. Kesra
3	Prestasi olahraga tingkat Regional (Porda)	Peringkat	8	-	Disporapar
4	Prestasi olahraga tingkat Regional (Popda)	Peringkat	10	-	Disporapar
5	NilaiTukar Petani (NTP)	Poin	>100	96.45	DKPP
6	Desa agro pinunjul	Desa	42	5	DKPP
7	Jumlah sentra unggulan pertanian	Desa	40	5	DKPP
8	Desa pinunjul tematik	Desa	35	8	DKUKM, Perdagin & DKPP

No.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
9	Desa wisata	Desa	25	8	Disporapar
10	Indeks desa membangun	Poin	0.67	0.7229	DPMD
11	Cakupan pelayanan penyelenggaraan penanggulangan bencana	Persen	100	100	BPBD
12	Kemantapan Jalan	Persen	85,9	79.063	DPUTR
13	Kondisi Baik Irigasi	Persen	70	60.93	DPUTR
14	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	68.91	66.45	DLH
15	Indeks kepuasan layanan masyarakat	Persen	75.52	76.51	Bappeda
16	Indeks toleransi beragama	Poin	69.9 – 70.2	72,39	Badan Kesbangpol
17	Indeks gotong royong (aksi bersama)	Poin	0.5	n/a	Badan Kesbangpol

BAB VII

PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan penjabaran arahan pembangunan tahap ketiga sebagaimana yang diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Kuningan tahun 2018 - 2023. Proses penelaahan terhadap isu-isu strategis yang berkembang dengan mempertimbangkan segenap masukan dan aspirasi dari masyarakat proses penyusunan RKPD tahun 2023 telah menerapkan asas perencanaan partisipatif.

Proses perencanaan pembangunan daerah telah melibatkan seluruh para pihak dan disusun berdasarkan azas keterbukaan, akurasi dan akuntabilitas publik. Pelaksanaan RKPD 2023 diharapkan dapat menjadi wujud pelaksanaan pembangunan yang berpihak pada pemberdayaan masyarakat menuju terbangunnya masyarakat yang mandiri, tangguh, harmonis dan berdaya saing tinggi.

Berbagai pendekatan keilmuan diterapkan untuk menetapkan program dan kegiatan strategis yang mempunyai daya ungkit maksimum bagi percepatan pembangunan yang pada akhirnya akan menjadi langkah maju dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kuningan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dan dilaksanakan sebagai kaidah pelaksanaan RKPD tahun 2023 oleh perangkat daerah, antara lain:

- (1) RKPD Kabupaten Kuningan tahun 2023 menjadi acuan perangkat daerah untuk menyempurnakan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2023;
- (2) RKPD merupakan wujud keselarasan program dan sinkronisasi pencapaian sasaran RPJMD Kabupaten Kuningan Tahun 2018-2023;
- (3) RKPD Kabupaten Kuningan Tahun 2023 Menjadi landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Kuningan 2023; dan

- (4) Bappeda melakukan evaluasi hasil RKPD Tahun 2023 dan melaporkannya kepada Bupati setiap triwulan, berdasarkan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023.